



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp925.466.086.709,19 (sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah sembilan belas sen);

- b. belanja sebesar Rp918.877.871.321,02 (sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah nol dua sen);
- c. surplus sebesar Rp6.588.215.388,17 (enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
- d. pembiayaan, dengan rincian:
 - 1. penerimaan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
 - 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - 3. pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen); dan
 - 4. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp37.265.116.496,81 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp962.731.203.206,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah); dan
 - 2. realisasi pendapatan sebesar Rp925.466.086.709,19 (sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan belas sen);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp118.807.017.203,98 (seratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.037.684.888.525,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - 2. realisasi belanja sebesar Rp918.877.871.321,02 (sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah nol dua sen);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp81.541.900.707,17 (delapan puluh satu miliar lima ratus

empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh rupiah tujuh belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. defisit setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
 2. realisasi surplus sebesar Rp6.588.215.388,17 (enam miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh belas sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,04 (nol rupiah nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
 2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 2. realisasi pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,04 (nol rupiah nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp74.953.685.319,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan
 2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.155.724.653.157,52 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp1.119.612.553,28 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.154.605.040.604,24 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima

juta empat puluh ribu enam ratus empat rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp74.484.067.946,04 (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah nol empat sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp149.285.789.864,17 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tujuh belas sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp142.697.574.476,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp36.922.360,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- f. koreksi sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp0.00 (nol rupiah); dan
- g. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp81.035.360.974,21 (delapan puluh satu miliar tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp901.555.610.851,19 (sembilan ratus satu miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sembilan belas sen);
- b. beban sebesar Rp878.789.720.284,43 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);
- c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. surplus laporan operasional sebesar Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. sisa anggaran lebih awal sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp74.953.685.319,04 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah nol empat sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah dua puluh satu sen);
- d. koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp81.541.900.707,21 (delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.134.179.324.141,89 (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen);
- b. penambahan ekuitas dari laporan operasional Rp22.765.890.566,21 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah dua puluh satu sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp2.340.174.103,86 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan puluh enam sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.154.605.040.604,24 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar enam ratus lima juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah dua puluh empat sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran (LRA) yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri atas:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025
NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/37/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama. Laporan keuangan yang dilampirkan paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH	962.731.203.206,00	925.466.086.709,19	37.265.116.496,81	96,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	10.581.880.818,81	83,37
4.1.01	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	(96.258.510,24)	101,07
4.1.02	Retribusi Daerah	28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	12.916.522.618,00	54,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	(2.238.383.288,95)	122,71
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	10.581.880.818,81	83,37
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	26.499.270.861,00	97,03
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	25.110.835.558,00	97,03
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	1.388.435.303,00	96,93
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74
	JUMLAH PENDAPATAN	962.731.203.206,00	925.466.086.709,19	37.265.116.496,81	96,13
5	BELANJA DAERAH	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	118.807.017.203,98	88,55
5.1	BELANJA OPERASI	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	85.638.902.076,98	88,58
5.1.01	Belanja Pegawai	372.950.582.176,14	331.088.804.278,00	41.861.777.898,14	88,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.367.493.905,86	289.506.143.986,02	41.861.349.919,84	87,37
5.1.04	Belanja Subsidi	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	1.166.577.397,00	86,07
5.1.05	Belanja Hibah	36.112.240.700,00	35.433.087.998,00	679.152.702,00	98,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.011.600.000,00	941.555.840,00	70.044.160,00	93,08

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
	JUMLAH BELANJA OPERASI	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	85.638.902.076,98	88,58
5.2	BELANJA MODAL	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	32.768.773.593,00	81,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.752.470.851,00	213.300.000,00	3.539.170.851,00	5,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.307.471.798,00	23.182.154.448,00	1.125.317.350,00	95,37
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	8.385.144.874,00	75,66
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.740.126.118,00	91.142.885.630,00	19.597.240.488,00	82,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	75.425.030,00	95,92
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	362.320.000,00	315.845.000,00	46.475.000,00	87,17
	JUMLAH BELANJA MODAL	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	32.768.773.593,00	81,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29
5.4	BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	(574.796.845,00)	100,52
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.070.774,00	3.257.906.575,00	259.164.199,00	92,63
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.884.552.900,00	107.718.513.944,00	(833.961.044,00)	100,78
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	(574.796.845,00)	100,52
	JUMLAH BELANJA	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	118.807.017.203,98	88,55
	SURPLUS/DEFISIT	(74.953.685.319,00)	6.588.215.388,17	(81.541.900.707,17)	(8,79)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	(0,04)	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	(0,04)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	(0,04)	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	(0,04)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	(0,04)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	81.541.900.707,21	(81.541.900.707,21)	0,00

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	962.731.203.206,00	925.466.086.709,19	37.265.116.496,81	96,13
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.013.400.650,00	4.881.483.173,00	6.131.917.477,00	44,32
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	9.487.013.178,00	4.272.675.384,00	5.214.337.794,00	45,04
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.025.270.541,00	10.461.045.400,00	6.564.225.141,00	61,44
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		DINAS PERHUBUNGAN	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		DINAS PERIKANAN	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39
5.02			KEUANGAN	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.351.158.011,00	37.685.799.810,19	(2.334.641.799,19)	106,60
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.1.01	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	(96.258.510,24)	101,07
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	(2.238.383.288,95)	122,71
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	26.499.270.861,00	97,03
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	25.110.835.558,00	97,03
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	1.388.435.303,00	96,93
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74
		5	Belanja	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	118.807.017.203,98	88,55
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	571.722.630.708,00	493.415.169.859,02	78.307.460.848,98	86,30

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	235.652.837.386,00	210.527.645.227,00	25.125.192.159,00	89,34
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	235.652.837.386,00	210.527.645.227,00	25.125.192.159,00	89,34
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	235.652.837.386,00	210.527.645.227,00	25.125.192.159,00	89,34
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	208.366.854.939,00	186.208.973.096,00	22.157.881.843,00	89,37
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	176.016.310.788,00	155.711.977.045,00	20.304.333.743,00	88,46
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.891.776.151,00	27.239.211.251,00	1.652.564.900,00	94,28
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.458.768.000,00	3.257.784.800,00	200.983.200,00	94,19
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.285.982.447,00	24.318.672.131,00	2.967.310.316,00	89,13
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.467.737.600,00	4.285.822.825,00	181.914.775,00	95,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.967.344.447,00	18.257.373.936,00	2.709.970.511,00	87,08
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	75.425.030,00	95,92
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	139.917.175.393,00	120.792.371.902,02	19.124.803.490,98	86,33
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	95.027.361.225,00	85.131.747.835,00	9.895.613.390,00	89,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	95.027.361.225,00	85.131.747.835,00	9.895.613.390,00	89,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	88.326.587.015,00	78.637.878.375,00	9.688.708.640,00	89,03
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	63.037.707.675,00	54.035.608.437,00	9.002.099.238,00	85,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.088.879.340,00	24.402.269.938,00	686.609.402,00	97,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.700.774.210,00	6.493.869.460,00	206.904.750,00	96,91
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.836.812.210,00	1.777.435.860,00	59.376.350,00	96,77
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.435.000,00	204.033.600,00	401.400,00	99,80
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.613.707.000,00	4.512.400.000,00	101.307.000,00	97,80
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.820.000,00	0,00	45.820.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	23.500.636.421,00	18.219.763.226,00	5.280.873.195,00	77,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	23.500.636.421,00	18.219.763.226,00	5.280.873.195,00	77,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.773.824.421,00	15.518.225.803,00	5.255.598.618,00	74,70
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.534.953.168,00	1.735.076.974,00	2.799.876.194,00	38,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.238.871.253,00	13.783.148.829,00	2.455.722.424,00	84,88
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	25.274.577,00	99,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	25.274.577,00	99,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		PUSKESMAS MAPADDEGAT	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	213.995.852,80	92,83
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	213.995.852,80	92,83

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	47.889.000,00	47.863.996,00	25.004,00	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.889.000,00	47.863.996,00	25.004,00	99,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		PUSKESMAS SIOBAN	1.803.899.821,00	1.708.948.433,82	94.951.387,18	94,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5	BELANJA DAERAH	1.803.899.821,00	1.708.948.433,82	94.951.387,18	94,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.793.258.771,00	1.698.307.433,82	94.951.337,18	94,71
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.058.771,00	1.698.307.433,82	81.751.337,18	95,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.641.050,00	10.641.000,00	50,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.641.050,00	10.641.000,00	50,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		PUSKESMAS BOSUA	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	821.927.200,00	424.418.512,00	397.508.688,00	51,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	821.927.200,00	424.418.512,00	397.508.688,00	51,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5	BELANJA DAERAH	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	426.572.476,00	75,15
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	426.572.476,00	75,15
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	10.990.000,00	10.939.992,00	50.008,00	99,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.990.000,00	10.939.992,00	50.008,00	99,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		PUSKESMAS PEIPEI	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5	BELANJA DAERAH	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.628.536.550,00	925.580.956,00	702.955.594,00	56,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.536.550,00	907.580.956,00	702.955.594,00	56,35
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	11.407.150,00	1.500.000,00	9.907.150,00	13,15
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.407.150,00	1.500.000,00	9.907.150,00	13,15
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5	BELANJA DAERAH	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	358.878.208,00	76,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	358.878.208,00	76,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5	BELANJA DAERAH	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	203.381.818,00	89,19
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	203.381.818,00	89,19
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	4.025.000,00	3.999.996,00	25.004,00	99,38
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.025.000,00	3.999.996,00	25.004,00	99,38
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		PUSKESMAS BETAET	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5	BELANJA DAERAH	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	878.011.698,00	791.127.671,00	86.884.027,00	90,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.011.698,00	791.127.671,00	86.884.027,00	90,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012		PUSKESMAS MALAKOPA	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5	BELANJA DAERAH	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013		PUSKESMAS BULASAT	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5	BELANJA DAERAH	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.469.730,00	810.814.425,00	199.655.305,00	80,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.469.730,00	810.814.425,00	199.655.305,00	80,24
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.2	BELANJA MODAL	6.330.000,00	5.882.400,00	447.600,00	92,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.330.000,00	5.882.400,00	447.600,00	92,93
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014		PUSKESMAS SAREREIKET	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5	BELANJA DAERAH	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015		PUSKESMAS SIMATALU	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5	BELANJA DAERAH	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016		PUSKESMAS SIGAPOKNA	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5	BELANJA DAERAH	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	494.188.190,00	387.259.547,00	106.928.643,00	78,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.188.190,00	387.259.547,00	106.928.643,00	78,36

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011		PUSKESMAS SIKAKAP	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5	BELANJA DAERAH	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	450.550.648,00	80,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	450.550.648,00	80,79
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	7.625.000,00	7.599.996,00	25.004,00	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.625.000,00	7.599.996,00	25.004,00	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017		PUSKESMAS SAUMANGANYA	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5	BELANJA DAERAH	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	188.639.363,00	86,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	188.639.363,00	86,07
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	16.570.000,00	16.254.000,00	316.000,00	98,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.570.000,00	16.254.000,00	316.000,00	98,09
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	143.004.153.503,00	116.249.359.250,00	26.754.794.253,00	81,29
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	138.957.539.503,00	113.564.109.564,00	25.393.429.939,00	81,73
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	138.957.539.503,00	113.564.109.564,00	25.393.429.939,00	81,73
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	37.747.983.696,00	31.081.305.228,00	6.666.678.468,00	82,34
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.023.587.543,00	6.449.653.166,00	573.934.377,00	91,83
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.724.396.153,00	24.631.652.062,00	6.092.744.091,00	80,17
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	101.209.555.807,00	82.482.804.336,00	18.726.751.471,00	81,50
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.632.470.851,00	100.000.000,00	3.532.470.851,00	2,75
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	793.986.678,00	704.352.002,00	89.634.676,00	88,71
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.300.000.000,00	2.279.537.000,00	20.463.000,00	99,11
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.483.098.278,00	79.398.915.334,00	15.084.182.944,00	84,04
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004		UPT Pengelolaan Air Minum Daerah	3.719.429.000,00	2.413.029.759,00	1.306.399.241,00	64,88
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5	BELANJA DAERAH	3.719.429.000,00	2.413.029.759,00	1.306.399.241,00	64,88
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.940.707.000,00	1.134.748.388,00	805.958.612,00	58,47
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	50,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.607.000,00	1.132.198.388,00	803.408.612,00	58,49
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.778.722.000,00	1.278.281.371,00	500.440.629,00	71,87
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.2.01	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	113.300.000,00	6.700.000,00	94,42
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	758.722.000,00	650.752.000,00	107.970.000,00	85,77
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	315.983.371,00	384.016.629,00	45,14
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.246.000,00	1.754.000,00	99,12
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	680.044.460,00	95,95
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	680.044.460,00	95,95
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	680.044.460,00	95,95
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.171.034.438,00	13.495.132.740,00	675.901.698,00	95,23
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.290.285.538,00	2.058.322.878,00	231.962.660,00	89,87
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.880.748.900,00	11.436.809.862,00	443.939.038,00	96,26
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.599.758.020,00	2.595.615.258,00	4.142.762,00	99,84
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.758.020,00	171.800.000,00	1.958.020,00	98,87
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	2.184.742,00	99,91
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.206.020.791,00	23.988.012.192,00	6.218.008.599,00	79,41
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	15.135.307.644,00	14.741.418.616,00	393.889.028,00	97,40
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	15.135.307.644,00	14.741.418.616,00	393.889.028,00	97,40
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.338.087.644,00	8.043.503.542,00	294.584.102,00	96,47
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.151.694.344,00	3.046.429.204,00	105.265.140,00	96,66
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.186.393.300,00	4.997.074.338,00	189.318.962,00	96,35
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.797.220.000,00	6.697.915.074,00	99.304.926,00	98,54
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.597.220.000,00	5.498.844.000,00	98.376.000,00	98,24
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.199.071.074,00	928.926,00	99,92
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.070.713.147,00	9.246.593.576,00	5.824.119.571,00	61,35
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	15.070.713.147,00	9.246.593.576,00	5.824.119.571,00	61,35
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.909.717.307,00	5.461.582.576,00	1.448.134.731,00	79,04
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.633.944.607,00	2.376.790.757,00	257.153.850,00	90,24
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.275.772.700,00	3.084.791.819,00	1.190.980.881,00	72,15
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.160.995.840,00	3.785.011.000,00	4.375.984.840,00	46,38
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.711.000,00	116.521.000,00	190.000,00	99,84
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	4.375.794.840,00	45,60
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.171.651.177,00	5.767.033.290,00	404.617.887,00	93,44

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.171.651.177,00	5.767.033.290,00	404.617.887,00	93,44
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	6.171.651.177,00	5.767.033.290,00	404.617.887,00	93,44
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.094.222.677,00	5.694.118.640,00	400.104.037,00	93,43
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.285.002.727,00	3.071.272.879,00	213.729.848,00	93,49
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.231.719.950,00	2.062.845.761,00	168.874.189,00	92,43
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	577.500.000,00	560.000.000,00	17.500.000,00	96,97
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.428.500,00	72.914.650,00	4.513.850,00	94,17
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.428.500,00	72.914.650,00	4.513.850,00	94,17
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95.956.600.835,00	80.886.348.206,00	15.070.252.629,00	84,29
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	644.988.947,00	600.692.975,00	44.295.972,00	93,13
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	644.988.947,00	600.692.975,00	44.295.972,00	93,13
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	644.988.947,00	600.692.975,00	44.295.972,00	93,13
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	337.271.547,00	305.124.800,00	32.146.747,00	90,47
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.871.547,00	305.124.800,00	28.746.747,00	91,39
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	307.717.400,00	295.568.175,00	12.149.225,00	96,05
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.717.400,00	295.568.175,00	12.149.225,00	96,05
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.160.613.850,00	1.109.712.520,00	50.901.330,00	95,61
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	889.747.550,00	908.783.620,00	(19.036.070,00)	102,14
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	889.747.550,00	908.783.620,00	(19.036.070,00)	102,14
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	832.337.550,00	851.373.620,00	(19.036.070,00)	102,29
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.337.550,00	851.373.620,00	(19.036.070,00)	102,29
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	57.410.000,00	57.410.000,00	0,00	100,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.410.000,00	57.410.000,00	0,00	100,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001		UPTD PPA	270.866.300,00	200.928.900,00	69.937.400,00	74,18
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	5	BELANJA DAERAH	270.866.300,00	200.928.900,00	69.937.400,00	74,18
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	248.065.600,00	180.428.900,00	67.636.700,00	72,73
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.065.600,00	180.428.900,00	67.636.700,00	72,73
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	22.800.700,00	20.500.000,00	2.300.700,00	89,91
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.800.700,00	20.500.000,00	2.300.700,00	89,91
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	617.965.156,00	92,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	617.965.156,00	92,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	617.965.156,00	92,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	617.965.156,00	92,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	446.274.235,00	94,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.189.250,00	244.598.329,00	121.590.921,00	66,80
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	1.447.902.546,00	80,13
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	1.447.902.546,00	80,13
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	1.447.902.546,00	80,13
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.960.061.099,00	5.535.526.010,00	1.424.535.089,00	79,53
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.477.008.762,00	2.210.040.974,00	266.967.788,00	89,22
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.483.052.337,00	3.325.485.036,00	1.157.567.301,00	74,18
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	326.810.857,00	303.443.400,00	23.367.457,00	92,85
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.810.857,00	303.443.400,00	23.367.457,00	92,85
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	307.126.698,00	93,62
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	307.126.698,00	93,62
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	307.126.698,00	93,62
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.790.685.336,00	4.485.358.638,00	305.326.698,00	93,63
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.577.748.736,00	2.390.832.603,00	186.916.133,00	92,75
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.936.600,00	2.094.526.035,00	118.410.565,00	94,65
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.800.000,00	20.000.000,00	1.800.000,00	91,74
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.800.000,00	20.000.000,00	1.800.000,00	91,74
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.541.691.984,00	5.206.369.781,00	335.322.203,00	93,95
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.541.691.984,00	5.206.369.781,00	335.322.203,00	93,95
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	5.541.691.984,00	5.206.369.781,00	335.322.203,00	93,95
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.508.561.984,00	5.174.356.421,00	334.205.563,00	93,93
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.094.866.884,00	2.892.325.883,00	202.541.001,00	93,46
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.413.695.100,00	2.282.030.538,00	131.664.562,00	94,55
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.130.000,00	32.013.360,00	1.116.640,00	96,63
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.130.000,00	32.013.360,00	1.116.640,00	96,63

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	936.780.094,00	63,04
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	936.780.094,00	63,04
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	936.780.094,00	63,04
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	936.780.094,00	63,04
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	936.780.094,00	63,04
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	7.223.726.566,00	80,68
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		DINAS PERHUBUNGAN	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	7.223.726.566,00	80,68
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	7.223.726.566,00	80,68
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.909.521.628,00	29.716.445.706,00	7.193.075.922,00	80,51
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.973.509.273,00	4.764.078.106,00	209.431.167,00	95,79
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.891.012.255,00	16.397.514.997,00	5.493.497.258,00	74,91
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	1.166.577.397,00	86,07
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.670.000.100,00	1.346.430.000,00	323.570.100,00	80,62
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	486.774.100,00	456.123.456,00	30.650.644,00	93,70
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.774.100,00	86.473.100,00	301.000,00	99,65
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.655.356,00	344.644,00	99,83
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	169.995.000,00	30.005.000,00	85,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.038.794.917,00	6.606.133.535,00	432.661.382,00	93,85
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.038.794.917,00	6.606.133.535,00	432.661.382,00	93,85
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5	BELANJA DAERAH	7.038.794.917,00	6.606.133.535,00	432.661.382,00	93,85
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.677.038.703,00	6.253.942.535,00	423.096.168,00	93,66
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.287.073.153,00	2.109.208.266,00	177.864.887,00	92,22
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.289.965.550,00	4.044.748.669,00	245.216.881,00	94,28
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.985.600,00	14.400,00	99,99
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	361.756.214,00	352.191.000,00	9.565.214,00	97,36
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.756.214,00	352.191.000,00	9.565.214,00	97,36
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.306.006.228,00	5.715.394.404,00	590.611.824,00	90,63
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.306.006.228,00	5.715.394.404,00	590.611.824,00	90,63
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5	BELANJA DAERAH	6.306.006.228,00	5.715.394.404,00	590.611.824,00	90,63
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.292.256.228,00	5.702.496.404,00	589.759.824,00	90,63
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.581.174.068,00	2.425.258.266,00	155.915.802,00	93,96

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.134.082.160,00	2.700.238.138,00	433.844.022,00	86,16
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.05	Belanja Hibah	577.000.000,00	577.000.000,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.750.000,00	12.898.000,00	852.000,00	93,80
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.750.000,00	12.898.000,00	852.000,00	93,80
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.238.952.874,00	3.899.917.940,00	339.034.934,00	92,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.238.952.874,00	3.899.917.940,00	339.034.934,00	92,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	4.238.952.874,00	3.899.917.940,00	339.034.934,00	92,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.189.192.874,00	3.853.447.940,00	335.744.934,00	91,99
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.464.874,00	2.607.881.187,00	172.583.687,00	93,79
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.408.728.000,00	1.245.566.753,00	163.161.247,00	88,42
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.760.000,00	46.470.000,00	3.290.000,00	93,39
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.760.000,00	46.470.000,00	3.290.000,00	93,39
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.169.389.500,00	2.070.620.984,00	98.768.516,00	95,45
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.169.389.500,00	2.070.620.984,00	98.768.516,00	95,45
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	2.169.389.500,00	2.070.620.984,00	98.768.516,00	95,45
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.039.831.500,00	1.941.437.984,00	98.393.516,00	95,18
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	50,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.471.500,00	1.683.602.984,00	94.868.516,00	94,67
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1.05	Belanja Hibah	260.000.000,00	257.155.000,00	2.845.000,00	98,91
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	129.558.000,00	129.183.000,00	375.000,00	99,71
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.558.000,00	129.183.000,00	375.000,00	99,71
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	5	BELANJA DAERAH	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	906.520.300,00	805.731.996,00	100.788.304,00	88,88
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	906.520.300,00	805.731.996,00	100.788.304,00	88,88
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	906.520.300,00	805.731.996,00	100.788.304,00	88,88
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	560.470.300,00	493.055.697,00	67.414.603,00	87,97
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.080.000,00	4.080.000,00	1.000.000,00	80,31
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.390.300,00	488.975.697,00	66.414.603,00	88,04
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	346.050.000,00	312.676.299,00	33.373.701,00	90,36
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.050.000,00	44.198.000,00	1.852.000,00	95,98

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	268.478.299,00	31.521.701,00	89,49
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.777.894.940,00	5.274.632.276,00	2.503.262.664,00	67,82
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.777.894.940,00	5.274.632.276,00	2.503.262.664,00	67,82
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	7.777.894.940,00	5.274.632.276,00	2.503.262.664,00	67,82
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.659.812.485,00	3.268.592.403,00	391.220.082,00	89,31
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.267.504.885,00	2.083.532.055,00	183.972.830,00	91,89
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.307.600,00	1.185.060.348,00	207.247.252,00	85,11
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	2.112.042.582,00	48,71
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	2.112.042.582,00	48,71
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	140.193.100,00	110.469.260,00	29.723.840,00	78,80
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	140.193.100,00	110.469.260,00	29.723.840,00	78,80
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	140.193.100,00	110.469.260,00	29.723.840,00	78,80
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	123.742.900,00	94.019.260,00	29.723.640,00	75,98
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.742.900,00	94.019.260,00	29.723.640,00	75,98
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.450.200,00	16.450.000,00	200,00	100,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.450.200,00	16.450.000,00	200,00	100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	53.275.372.916,00	44.409.564.670,00	8.865.808.246,00	83,36
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	2.904.014.529,00	91,02
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		DINAS PERIKANAN	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	2.904.014.529,00	91,02
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	2.904.014.529,00	91,02
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	30.804.756.909,00	28.005.858.042,00	2.798.898.867,00	90,91
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.601.745.357,00	3.374.783.868,00	226.961.489,00	93,70
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.203.011.552,00	24.631.074.174,00	2.571.937.378,00	90,55
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.534.150.000,00	1.429.034.338,00	105.115.662,00	93,15
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.334.150.000,00	1.231.046.300,00	103.103.700,00	92,27
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.988.038,00	2.011.962,00	98,99
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.141.952.901,00	8.776.031.087,00	5.365.921.814,00	62,06
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14.141.952.901,00	8.776.031.087,00	5.365.921.814,00	62,06
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	14.141.952.901,00	8.776.031.087,00	5.365.921.814,00	62,06
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.391.626.791,00	7.212.387.568,00	2.179.239.223,00	76,80
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.721.025.391,00	3.447.286.554,00	273.738.837,00	92,64
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.670.601.400,00	3.765.101.014,00	1.905.500.386,00	66,40
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.750.326.110,00	1.563.643.519,00	3.186.682.591,00	32,92
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	537.129.110,00	475.582.000,00	61.547.110,00	88,54

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.213.197.000,00	1.088.061.519,00	3.125.135.481,00	25,83
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.436.513.106,00	5.883.108.060,00	553.405.046,00	91,40
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.436.513.106,00	5.883.108.060,00	553.405.046,00	91,40
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	6.436.513.106,00	5.883.108.060,00	553.405.046,00	91,40
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.863.477.106,00	5.310.072.060,00	553.405.046,00	90,56
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	30.220.000,00	21.520.000,00	8.700.000,00	71,21
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.803.257.106,00	5.288.552.060,00	514.705.046,00	91,13
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	100,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	311.104.000,00	297.825.643,00	13.278.357,00	95,73
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	311.104.000,00	297.825.643,00	13.278.357,00	95,73
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	5	BELANJA DAERAH	311.104.000,00	297.825.643,00	13.278.357,00	95,73
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	311.104.000,00	297.825.643,00	13.278.357,00	95,73
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.384.000,00	297.825.643,00	10.558.357,00	96,58
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	5	BELANJA DAERAH	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	86.619.262.398,00	79.155.394.776,00	7.463.867.622,00	91,38
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	2.632.221.633,00	94,36
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000		SEKRETARIAT DAERAH	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	2.632.221.633,00	94,36
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5	BELANJA DAERAH	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	2.632.221.633,00	94,36
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.209.410.388,00	42.599.568.244,00	2.609.842.144,00	94,23
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.852.483.090,00	10.285.410.728,00	567.072.362,00	94,77
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.649.927.298,00	23.730.113.688,00	1.919.813.610,00	92,52
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.323.000.000,00	8.202.487.988,00	120.512.012,00	98,55
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	384.000.000,00	381.555.840,00	2.444.160,00	99,36
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	22.379.489,00	98,44
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	22.379.489,00	98,44
4.02			SEKRETARIAT DPRD	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	4.831.645.989,00	87,91

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000		SEKRETARIAT DPRD	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	4.831.645.989,00	87,91
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5	BELANJA DAERAH	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	4.831.645.989,00	87,91
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5.1	BELANJA OPERASI	39.346.476.010,00	34.531.660.351,00	4.814.815.659,00	87,76
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.578.310.860,00	11.981.383.026,00	596.927.834,00	95,25
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.768.165.150,00	22.550.277.325,00	4.217.887.825,00	84,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5.2	BELANJA MODAL	633.200.000,00	616.369.670,00	16.830.330,00	97,34
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.200.000,00	616.369.670,00	16.830.330,00	97,34
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	168.538.772.676,00	161.843.767.107,00	6.695.005.569,00	96,03
5.01			PERENCANAAN	8.450.370.180,00	7.981.450.808,00	468.919.372,00	94,45
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.450.370.180,00	7.981.450.808,00	468.919.372,00	94,45
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5	BELANJA DAERAH	8.450.370.180,00	7.981.450.808,00	468.919.372,00	94,45
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.643.243.830,00	7.187.541.875,00	455.701.955,00	94,04
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.092.511.080,00	3.821.651.755,00	270.859.325,00	93,38
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.732.750,00	3.365.890.120,00	184.842.630,00	94,79
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.2	BELANJA MODAL	807.126.350,00	793.908.933,00	13.217.417,00	98,36
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577.126.350,00	564.218.933,00	12.907.417,00	97,76
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.000.000,00	229.690.000,00	310.000,00	99,87
5.02			KEUANGAN	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	5.661.839.257,00	96,32
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	5.661.839.257,00	96,32
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5	BELANJA DAERAH	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	5.661.839.257,00	96,32
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.1	BELANJA OPERASI	40.190.001.867,00	35.045.566.899,00	5.144.434.968,00	87,20
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	20.347.482.051,00	17.496.268.718,00	2.851.213.333,00	85,99
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.842.519.816,00	17.549.298.181,00	2.293.221.635,00	88,44
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.096.611.255,00	978.548.500,00	118.062.755,00	89,23
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.111.255,00	662.703.500,00	117.407.755,00	84,95
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	316.500.000,00	315.845.000,00	655.000,00	99,79
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	(574.796.845,00)	100,52
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.070.774,00	3.257.906.575,00	259.164.199,00	92,63
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.884.552.900,00	107.718.513.944,00	(833.961.044,00)	100,78
5.03			KEPEGAWAIAN	5.297.955.500,00	4.778.692.116,00	519.263.384,00	90,20
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.297.955.500,00	4.778.692.116,00	519.263.384,00	90,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5	BELANJA DAERAH	5.297.955.500,00	4.778.692.116,00	519.263.384,00	90,20
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.282.955.500,00	4.778.692.116,00	504.263.384,00	90,45
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.039.064.694,00	2.854.849.705,00	184.214.989,00	93,94
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.243.890.806,00	1.923.842.411,00	320.048.395,00	85,74
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5	BELANJA DAERAH	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	23.655.556,00	97,75
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	23.655.556,00	97,75
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5	BELANJA DAERAH	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	23.655.556,00	97,75
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	23.655.556,00	97,75
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.210.200,00	862.554.644,00	23.655.556,00	97,33
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000		INSPEKTORAT	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5	BELANJA DAERAH	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.725.260.137,00	9.367.178.747,00	358.081.390,00	96,32
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.555.447.937,00	4.324.755.161,00	230.692.776,00	94,94
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.169.812.200,00	5.042.423.586,00	127.388.614,00	97,54
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5.2	BELANJA MODAL	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61
7			UNSUR KEWILAYAHAN	26.783.459.525,00	25.308.150.324,00	1.475.309.201,00	94,49
7.01			KECAMATAN	26.783.459.525,00	25.308.150.324,00	1.475.309.201,00	94,49
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000		KECAMATAN SIBERUT UTARA	3.256.555.352,00	3.173.146.435,00	83.408.917,00	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5	BELANJA DAERAH	3.256.555.352,00	3.173.146.435,00	83.408.917,00	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.234.759.652,00	3.151.350.735,00	83.408.917,00	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.244.064.352,00	2.167.722.835,00	76.341.517,00	96,60
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.695.300,00	983.627.900,00	7.067.400,00	99,29

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.795.700,00	21.795.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.795.700,00	21.795.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000		KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.350.524.531,00	2.247.048.903,00	103.475.628,00	95,60
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5	BELANJA DAERAH	2.350.524.531,00	2.247.048.903,00	103.475.628,00	95,60
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.294.666.531,00	2.191.259.903,00	103.406.628,00	95,49
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.331.175.848,00	1.239.516.903,00	91.658.945,00	93,11
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.490.683,00	951.743.000,00	11.747.683,00	98,78
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5.2	BELANJA MODAL	55.858.000,00	55.789.000,00	69.000,00	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.858.000,00	55.789.000,00	69.000,00	99,88
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000		KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.248.815.330,00	2.082.893.596,00	165.921.734,00	92,62
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5	BELANJA DAERAH	2.248.815.330,00	2.082.893.596,00	165.921.734,00	92,62
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.178.386.940,00	2.017.643.596,00	160.743.344,00	92,62
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.111.072.330,00	992.801.986,00	118.270.344,00	89,36
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.067.314.610,00	1.024.841.610,00	42.473.000,00	96,02
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5.2	BELANJA MODAL	70.428.390,00	65.250.000,00	5.178.390,00	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.428.390,00	65.250.000,00	5.178.390,00	92,65
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.205.429.062,00	1.925.994.058,00	279.435.004,00	87,33
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5	BELANJA DAERAH	2.205.429.062,00	1.925.994.058,00	279.435.004,00	87,33
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.458.062,00	1.925.994.058,00	264.464.004,00	87,93
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.207.657.362,00	1.082.543.258,00	125.114.104,00	89,64
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.800.700,00	843.450.800,00	139.349.900,00	85,82
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000		KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2.708.984.716,00	2.571.982.141,00	137.002.575,00	94,94
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5	BELANJA DAERAH	2.708.984.716,00	2.571.982.141,00	137.002.575,00	94,94
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.667.332.016,00	2.530.329.441,00	137.002.575,00	94,86
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.743.174.836,00	1.643.950.211,00	99.224.625,00	94,31
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	924.157.180,00	886.379.230,00	37.777.950,00	95,91
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5.2	BELANJA MODAL	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000		KECAMATAN SIPORA UTARA	2.659.876.413,00	2.526.873.740,00	133.002.673,00	95,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5	BELANJA DAERAH	2.659.876.413,00	2.526.873.740,00	133.002.673,00	95,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.497.324.713,00	2.364.359.740,00	132.964.973,00	94,68
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.547.156.428,00	1.421.441.818,00	125.714.610,00	91,87

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.168.285,00	942.917.922,00	7.250.363,00	99,24
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.2	BELANJA MODAL	162.551.700,00	162.514.000,00	37.700,00	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.551.700,00	142.524.000,00	27.700,00	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000		KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.160.345.080,00	2.957.937.248,00	202.407.832,00	93,60
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5	BELANJA DAERAH	3.160.345.080,00	2.957.937.248,00	202.407.832,00	93,60
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.110.945.080,00	2.913.707.248,00	197.237.832,00	93,66
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.114.776.080,00	2.005.913.798,00	108.862.282,00	94,85
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.169.000,00	907.793.450,00	88.375.550,00	91,13
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.400.000,00	44.230.000,00	5.170.000,00	89,53
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.400.000,00	44.230.000,00	5.170.000,00	89,53
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000		KECAMATAN PAGAI UTARA	2.406.977.607,00	2.263.726.982,00	143.250.625,00	94,05
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5	BELANJA DAERAH	2.406.977.607,00	2.263.726.982,00	143.250.625,00	94,05
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.376.943.357,00	2.233.695.982,00	143.247.375,00	93,97
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.339.695.717,00	1.218.944.538,00	120.751.179,00	90,99
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.247.640,00	1.014.751.444,00	22.496.196,00	97,83
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.034.250,00	30.031.000,00	3.250,00	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.034.250,00	30.031.000,00	3.250,00	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000		KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.464.102.664,00	2.346.185.294,00	117.917.370,00	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5	BELANJA DAERAH	2.464.102.664,00	2.346.185.294,00	117.917.370,00	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.398.902.664,00	2.280.985.294,00	117.917.370,00	95,08
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.372.050.664,00	1.275.615.597,00	96.435.067,00	92,97
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.852.000,00	1.005.369.697,00	21.482.303,00	97,91
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5.2	BELANJA MODAL	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000		KECAMATAN SIKAKAP	3.321.848.770,00	3.212.361.927,00	109.486.843,00	96,70
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5	BELANJA DAERAH	3.321.848.770,00	3.212.361.927,00	109.486.843,00	96,70
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.246.351.270,00	3.136.864.427,00	109.486.843,00	96,63
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.419.644.670,00	2.328.347.572,00	91.297.098,00	96,23
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.706.600,00	808.516.855,00	18.189.745,00	97,80
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5.2	BELANJA MODAL	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	100,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.782.815.179,00	24.316.694.687,00	466.120.492,00	98,12
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.709.279,00	947.354.677,00	83.354.602,00	91,91
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.633.300,00	1.937.095.400,00	381.537.900,00	83,54
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.05	Belanja Hibah	21.433.472.600,00	21.432.244.610,00	1.227.990,00	99,99
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	106.314.150,00	50.722.945,00	55.591.205,00	47,71
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.314.150,00	50.722.945,00	55.591.205,00	47,71
			Jumlah	(74.953.685.319,00)	6.588.215.388,17	(81.541.900.707,17)	(8,79)

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	962.731.203.206,00	925.466.086.709,19	96,13	920.985.184.695,54
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	83,37	47.820.088.328,54
4.1.01	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	101,07	8.514.261.917,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33	13.344.054.501,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	100,00	14.907.522.965,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	122,71	11.054.248.945,54
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	83,37	47.820.088.328,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	97,03	866.150.527.635,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	97,03	822.513.520.621,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	96,93	43.637.007.014,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	97,74	7.014.568.732,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	97,74	7.014.568.732,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	97,74	7.014.568.732,00
	JUMLAH PENDAPATAN	962.731.203.206,00	925.466.086.709,19	96,13	920.985.184.695,54
5	BELANJA DAERAH	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	88,55	940.980.377.027,00
5.1	BELANJA OPERASI	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	88,58	613.130.109.057,00
5.1.01	Belanja Pegawai	372.950.582.176,14	331.088.804.278,00	88,78	274.844.651.251,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.367.493.905,86	289.506.143.986,02	87,37	309.205.396.703,00
5.1.04	Belanja Subsidi	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	86,07	7.585.855.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	36.112.240.700,00	35.433.087.998,00	98,12	20.513.398.438,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.011.600.000,00	941.555.840,00	93,08	980.807.665,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	88,58	613.130.109.057,00
5.2	BELANJA MODAL	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	81,32	220.044.232.584,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.752.470.851,00	213.300.000,00	5,68	199.222.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.307.471.798,00	23.182.154.448,00	95,37	33.569.000.163,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	65.815.959.222,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.740.126.118,00	91.142.885.630,00	82,30	118.659.040.585,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.666.699.814,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	362.320.000,00	315.845.000,00	87,17	134.310.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	81,32	220.044.232.584,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	51,29	919.232.006,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	51,29	919.232.006,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	51,29	919.232.006,00
5.4	BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	100,52	106.886.803.380,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.070.774,00	3.257.906.575,00	92,63	1.962.033.191,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.884.552.900,00	107.718.513.944,00	100,78	104.924.770.189,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	100,52	106.886.803.380,00
	JUMLAH BELANJA	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	88,55	940.980.377.027,00
	SURPLUS/DEFISIT	(74.953.685.319,00)	6.588.215.388,17	(8,79)	(19.995.192.331,46)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
	PEMBIAYAAN NETTO	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	81.541.900.707,21	0,00	74.953.685.319,04



Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA	236.559.357.686,00	211.333.377.223,00	25.225.980.463,00	89,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	178.298.722.132,00	158.015.588.633,00	20.283.133.499,00	88,62	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	20.215.582.337,00	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	20.215.582.337,00	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	20.215.582.337,00	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	20.215.582.337,00	88,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	75.628.600,00	24.371.400,00	75,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	75.628.600,00	24.371.400,00	75,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	75.628.600,00	24.371.400,00	75,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	75.628.600,00	24.371.400,00	75,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.866.400,00	217.852.667,00	21.013.733,00	91,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	99.549.400,00	450.600,00	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.549.400,00	450.600,00	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.549.400,00	450.600,00	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.004.000,00	42.002.000,00	2.000,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.004.000,00	42.002.000,00	2.000,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.004.000,00	42.002.000,00	2.000,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.862.400,00	58.301.267,00	20.561.133,00	73,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	78.862.400,00	58.301.267,00	20.561.133,00	73,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.862.400,00	58.301.267,00	20.561.133,00	73,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000,00	47.269.471,00	15.730.529,00	75,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000,00	47.269.471,00	15.730.529,00	75,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	47.269.471,00	15.730.529,00	75,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	47.269.471,00	15.730.529,00	75,03	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.154.750,00	2.132.719.250,00	6.435.500,00	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.750.000,00	66.314.500,00	6.435.500,00	91,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.750.000,00	66.314.500,00	6.435.500,00	91,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.750.000,00	66.314.500,00	6.435.500,00	91,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.066.404.750,00	2.066.404.750,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	54.726.640,00	54.726.640,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.726.640,00	54.726.640,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.011.678.110,00	2.011.678.110,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.011.678.110,00	2.011.678.110,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.213.576.354,00	52.375.493.094,00	4.838.083.260,00	91,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.562.194.720,00	30.605.643.861,00	2.956.550.859,00	91,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.050.000,00	362.855.000,00	76.195.000,00	82,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.122.000,00	72.055.000,00	29.067.000,00	71,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	7.480.000,00	3.910.000,00	3.570.000,00	52,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.642.000,00	68.145.000,00	25.497.000,00	72,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	337.928.000,00	290.800.000,00	47.128.000,00	86,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.928.000,00	290.800.000,00	47.128.000,00	86,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	907.944.500,00	766.597.900,00	141.346.600,00	84,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	199.629.200,00	147.048.200,00	52.581.000,00	73,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	15.350.000,00	7.820.000,00	7.530.000,00	50,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.279.200,00	139.228.200,00	45.051.000,00	75,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	708.315.300,00	619.549.700,00	88.765.600,00	87,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	708.315.300,00	619.549.700,00	88.765.600,00	87,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	423.297.704,00	394.104.600,00	29.193.104,00	93,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	73.089.600,00	43.954.600,00	29.135.000,00	60,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.369.600,00	43.954.600,00	26.415.000,00	62,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	350.208.104,00	350.150.000,00	58.104,00	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.208.104,00	350.150.000,00	58.104,00	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.427.359.446,00	1.999.628.600,00	427.730.846,00	82,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	222.594.800,00	176.017.200,00	46.577.600,00	79,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	25.600.000,00	13.948.400,00	11.651.600,00	54,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.994.800,00	162.068.800,00	34.926.000,00	82,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.204.764.646,00	1.823.611.400,00	381.153.246,00	82,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.204.764.646,00	1.823.611.400,00	381.153.246,00	82,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	576.105.600,00	547.743.800,00	28.361.800,00	95,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	30.305.600,00	1.943.800,00	28.361.800,00	6,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.905.600,00	1.943.800,00	24.961.800,00	7,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	545.800.000,00	545.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545.800.000,00	545.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.772.000.000,00	14.574.242.870,00	197.757.130,00	98,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	10.721.962.000,00	10.651.480.000,00	70.482.000,00	99,34	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.721.962.000,00	10.651.480.000,00	70.482.000,00	99,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	4.050.038.000,00	3.922.762.870,00	127.275.130,00	96,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.549.137.600,00	2.529.637.600,00	19.500.000,00	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.900.400,00	1.393.125.270,00	107.775.130,00	92,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.415.824.400,00	4.291.628.315,00	124.196.085,00	97,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	4.413.224.400,00	4.289.603.315,00	123.621.085,00	97,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.413.224.400,00	4.289.603.315,00	123.621.085,00	97,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	2.600.000,00	2.025.000,00	575.000,00	77,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	2.025.000,00	575.000,00	77,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	676.131.000,00	412.494.808,00	263.636.192,00	61,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	676.131.000,00	412.494.808,00	263.636.192,00	61,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.131.000,00	412.494.808,00	263.636.192,00	61,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	227.213.800,00	177.700.958,00	49.512.842,00	78,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	227.213.800,00	177.700.958,00	49.512.842,00	78,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.213.800,00	177.700.958,00	49.512.842,00	78,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000,00	49.178.500,00	821.500,00	98,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.178.500,00	821.500,00	98,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.178.500,00	821.500,00	98,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.830.704.250,00	1.591.287.060,00	239.417.190,00	86,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	135.484.106,00	56.761.300,00	78.722.806,00	41,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.01	Belanja Pegawai	27.199.806,00	22.270.000,00	4.929.806,00	81,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.284.300,00	34.491.300,00	73.793.000,00	31,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	1.695.220.144,00	1.534.525.760,00	160.694.384,00	90,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.695.220.144,00	1.534.525.760,00	160.694.384,00	90,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.276.757.200,00	3.679.135.450,00	597.621.750,00	86,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	304.703.800,00	202.023.500,00	102.680.300,00	66,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.01	Belanja Pegawai	43.320.000,00	18.190.000,00	25.130.000,00	41,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.383.800,00	183.833.500,00	77.550.300,00	70,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	3.972.053.400,00	3.477.111.950,00	494.941.450,00	87,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.972.053.400,00	3.477.111.950,00	494.941.450,00	87,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	64.200.000,00	58.425.200,00	5.774.800,00	91,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	58.425.200,00	5.774.800,00	91,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	58.425.200,00	5.774.800,00	91,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.475.606.820,00	1.700.620.800,00	774.986.020,00	68,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	155.053.200,00	111.253.200,00	43.800.000,00	71,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.01	Belanja Pegawai	22.100.000,00	16.830.000,00	5.270.000,00	76,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.953.200,00	94.423.200,00	38.530.000,00	71,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	2.320.553.620,00	1.589.367.600,00	731.186.020,00	68,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.320.553.620,00	1.589.367.600,00	731.186.020,00	68,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.262.142.834,00	17.609.996.133,00	1.652.146.701,00	91,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.013.118.000,00	815.099.998,00	198.018.002,00	80,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.360.000,00	5.100.000,00	7.260.000,00	41,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	12.360.000,00	5.100.000,00	7.260.000,00	41,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.000.758.000,00	809.999.998,00	190.758.002,00	80,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.758.000,00	809.999.998,00	190.758.002,00	80,94	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	288.349.600,00	233.244.300,00	55.105.300,00	80,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	64.349.600,00	10.244.600,00	54.105.000,00	15,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.509.600,00	10.244.600,00	47.265.000,00	17,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	224.000.000,00	222.999.700,00	1.000.300,00	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.000.000,00	222.999.700,00	1.000.300,00	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.656.427.000,00	2.267.676.538,00	388.750.462,00	85,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	288.226.000,00	259.192.200,00	29.033.800,00	89,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	11.040.000,00	6.870.000,00	4.170.000,00	62,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.186.000,00	252.322.200,00	24.863.800,00	91,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.368.201.000,00	2.008.484.338,00	359.716.662,00	84,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.368.201.000,00	2.008.484.338,00	359.716.662,00	84,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.965.420.000,00	7.576.015.325,00	389.404.675,00	95,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	5.765.420.000,00	5.504.701.000,00	260.719.000,00	95,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.765.420.000,00	5.504.701.000,00	260.719.000,00	95,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00	2.071.314.325,00	128.685.675,00	94,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000.000,00	1.688.964.225,00	161.035.775,00	91,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	350.000.000,00	382.350.100,00	(32.350.100,00)	109,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.062.338.600,00	2.915.034.000,00	147.304.600,00	95,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	3.062.338.600,00	2.915.034.000,00	147.304.600,00	95,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.01	Belanja Pegawai	54.720.000,00	54.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.007.618.600,00	2.860.314.000,00	147.304.600,00	95,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	374.366.700,00	273.378.473,00	100.988.227,00	73,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	374.366.700,00	273.378.473,00	100.988.227,00	73,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.366.700,00	273.378.473,00	100.988.227,00	73,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	207.645.000,00	152.150.708,00	55.494.292,00	73,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	207.645.000,00	152.150.708,00	55.494.292,00	73,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.645.000,00	152.150.708,00	55.494.292,00	73,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	162.315.800,00	140.434.400,00	21.881.400,00	86,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	162.315.800,00	140.434.400,00	21.881.400,00	86,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.315.800,00	140.434.400,00	21.881.400,00	86,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.589.737.011,00	2.441.206.071,00	148.530.940,00	94,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	268.118.011,00	231.409.011,00	36.709.000,00	86,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.01	Belanja Pegawai	14.720.000,00	11.560.000,00	3.160.000,00	78,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.398.011,00	219.849.011,00	33.549.000,00	86,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	2.321.619.000,00	2.209.797.060,00	111.821.940,00	95,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.198.000,00	802.000,00	97,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.291.619.000,00	2.180.599.060,00	111.019.940,00	95,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	942.425.123,00	795.756.320,00	146.668.803,00	84,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.1	BELANJA OPERASI	6.180.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00	49,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.1.01	Belanja Pegawai	6.180.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00	49,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	936.245.123,00	792.696.320,00	143.548.803,00	84,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	936.245.123,00	792.696.320,00	143.548.803,00	84,67	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.072.663.900,00	2.602.430.800,00	470.233.100,00	84,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.229.038.600,00	1.038.259.800,00	190.778.800,00	84,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.229.038.600,00	1.038.259.800,00	190.778.800,00	84,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.920.600,00	120.006.300,00	914.300,00	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.102.538.000,00	912.673.500,00	189.864.500,00	82,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	197.521.400,00	197.135.700,00	385.700,00	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	197.521.400,00	197.135.700,00	385.700,00	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.521.400,00	197.135.700,00	385.700,00	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	145.935.400,00	145.512.600,00	422.800,00	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	145.935.400,00	145.512.600,00	422.800,00	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.935.400,00	145.512.600,00	422.800,00	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000,00	127.939.700,00	22.060.300,00	85,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	127.939.700,00	22.060.300,00	85,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	127.939.700,00	22.060.300,00	85,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.250.168.500,00	995.115.300,00	255.053.200,00	79,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.214.168.500,00	959.117.300,00	255.051.200,00	78,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.518.500,00	24.046.000,00	472.500,00	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	1.189.650.000,00	935.071.300,00	254.578.700,00	78,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	35.998.000,00	2.000,00	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.998.000,00	2.000,00	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.467.700,00	1.532.300,00	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.467.700,00	1.532.300,00	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.467.700,00	1.532.300,00	98,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.316.574.900,00	1.557.422.300,00	(240.847.400,00)	118,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	149.994.900,00	147.382.300,00	2.612.600,00	98,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	149.994.900,00	147.382.300,00	2.612.600,00	98,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.994.900,00	147.382.300,00	2.612.600,00	98,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.166.580.000,00	1.410.040.000,00	(243.460.000,00)	120,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.166.580.000,00	1.410.040.000,00	(243.460.000,00)	120,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	1.166.580.000,00	1.410.040.000,00	(243.460.000,00)	120,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.538.900,00	136.563.500,00	3.975.400,00	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900,00	136.563.500,00	3.975.400,00	97,17	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900,00	136.563.500,00	3.975.400,00	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.538.900,00	136.563.500,00	3.975.400,00	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.538.900,00	136.563.500,00	3.975.400,00	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	465.075.000,00	408.462.637,00	56.612.363,00	87,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	258.703.000,00	227.548.137,00	31.154.863,00	87,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	258.703.000,00	227.548.137,00	31.154.863,00	87,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	226.503.000,00	197.150.137,00	29.352.863,00	87,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.503.000,00	197.150.137,00	29.352.863,00	87,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	32.200.000,00	30.398.000,00	1.802.000,00	94,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.200.000,00	30.398.000,00	1.802.000,00	94,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.372.000,00	180.914.500,00	25.457.500,00	87,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	206.372.000,00	180.914.500,00	25.457.500,00	87,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	198.522.000,00	173.114.500,00	25.407.500,00	87,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.522.000,00	173.114.500,00	25.407.500,00	87,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	441.445.300,00	397.269.359,00	44.175.941,00	89,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	441.445.300,00	397.269.359,00	44.175.941,00	89,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	441.445.300,00	397.269.359,00	44.175.941,00	89,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.445.300,00	122.791.060,00	12.654.240,00	90,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.080.000,00	4.080.000,00	1.000.000,00	80,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.365.300,00	118.711.060,00	11.654.240,00	91,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	306.000.000,00	274.478.299,00	31.521.701,00	89,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	268.478.299,00	31.521.701,00	89,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				JUMLAH BELANJA	236.559.357.686,00	211.333.377.223,00	25.225.980.463,00	89,34	
				SURPLUS/DEFISIT	(236.559.357.686,00)	(211.333.377.223,00)	(25.225.980.463,00)	(89,34)	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	5.204.974.294,00	44,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001								
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		5	BELANJA	23.500.636.421,00	18.219.763.226,00	5.280.873.195,00	77,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.031.752.368,00	10.705.433.127,00	4.326.319.241,00	71,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.089.953.168,00	6.435.524.724,00	3.654.428.444,00	63,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.223.168,00	1.552.834.974,00	2.781.388.194,00	35,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	4.334.223.168,00	1.552.834.974,00	2.781.388.194,00	35,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.334.223.168,00	1.552.834.974,00	2.781.388.194,00	35,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.755.730.000,00	4.882.689.750,00	873.040.250,00	84,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	5.755.730.000,00	4.882.689.750,00	873.040.250,00	84,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	178.200.000,00	168.770.000,00	9.430.000,00	94,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.577.530.000,00	4.713.919.750,00	863.610.250,00	84,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.259.200,00	429.923.921,00	19.335.279,00	95,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.328.800,00	313.066.000,00	19.262.800,00	94,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	332.328.800,00	313.066.000,00	19.262.800,00	94,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	822.000,00	538.000,00	60,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.968.800,00	312.244.000,00	18.724.800,00	94,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.128.400,00	91.055.921,00	72.479,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	91.128.400,00	91.055.921,00	72.479,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.128.400,00	91.055.921,00	72.479,00	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.536.620.000,00	2.954.262.174,00	582.357.826,00	83,53	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.500.000,00	372.290.460,00	98.209.540,00	79,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	470.500.000,00	372.290.460,00	98.209.540,00	79,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.500.000,00	372.290.460,00	98.209.540,00	79,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.066.120.000,00	2.581.971.714,00	484.148.286,00	84,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	3.066.120.000,00	2.581.971.714,00	484.148.286,00	84,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.120.000,00	2.581.971.714,00	484.148.286,00	84,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.920.000,00	885.722.308,00	70.197.692,00	92,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.300.000,00	295.078.608,00	221.392,00	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	295.300.000,00	295.078.608,00	221.392,00	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.300.000,00	295.078.608,00	221.392,00	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.620.000,00	590.643.700,00	69.976.300,00	89,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	660.620.000,00	590.643.700,00	69.976.300,00	89,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.900.000,00	590.643.700,00	67.256.300,00	89,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.468.884.053,00	7.514.330.099,00	954.553.954,00	88,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.858.378.053,00	3.952.441.203,00	905.936.850,00	81,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.725.110.000,00	873.092.328,00	852.017.672,00	50,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	1.725.110.000,00	873.092.328,00	852.017.672,00	50,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	8.250.000,00	5.170.000,00	3.080.000,00	62,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.716.860.000,00	867.922.328,00	848.937.672,00	50,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000,00	255.151.200,00	6.208.800,00	97,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0020	05.01	BELANJA OPERASI	261.360.000,00	255.151.200,00	6.208.800,00	97,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	253.791.200,00	6.208.800,00	97,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.871.908.053,00	2.824.197.675,00	47.710.378,00	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0023	05.01	BELANJA OPERASI	2.871.908.053,00	2.824.197.675,00	47.710.378,00	98,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.120.000,00	680.000,00	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.865.108.053,00	2.818.077.675,00	47.030.378,00	98,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.610.506.000,00	3.561.888.896,00	48.617.104,00	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.610.506.000,00	3.561.888.896,00	48.617.104,00	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	05.01	BELANJA OPERASI	883.694.000,00	860.351.473,00	23.342.527,00	97,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.654.000,00	860.351.473,00	21.302.527,00	97,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	05.02	BELANJA MODAL	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	25.274.577,00	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	25.274.577,00	99,07	
				JUMLAH	23.500.636.421,00	18.219.763.226,00	5.280.873.195,00	77,53	
				SURPLUS/DEFISIT	(14.098.623.243,00)	(14.022.724.342,00)	(75.898.901,00)	(32,89)	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Unit Organisasi : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.000.000,00	75.636.500,00	9.363.500,00	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000								
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA	116.416.538.972,86	102.572.608.676,02	13.843.930.296,84	88,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.879.593.975,00	55.617.747.186,00	7.261.846.789,00	88,45	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.664.400,00	63.739.600,00	924.800,00	98,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.664.400,00	33.799.600,00	864.800,00	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	34.664.400,00	33.799.600,00	864.800,00	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.422.577.675,00	54.730.677.437,00	7.691.900.238,00	87,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.370.977.675,00	53.963.638.437,00	8.407.339.238,00	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	62.370.977.675,00	53.963.638.437,00	8.407.339.238,00	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	62.370.977.675,00	53.963.638.437,00	8.407.339.238,00	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.600.000,00	767.039.000,00	(715.439.000,00)	1.486,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	51.600.000,00	767.039.000,00	(715.439.000,00)	1.486,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	42.050.000,00	9.550.000,00	81,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	45.012.000,00	4.988.000,00	90,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	45.012.000,00	4.988.000,00	90,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0005	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.012.000,00	4.988.000,00	90,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.551.900,00	253.637.620,00	2.914.280,00	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.500,00	14.994.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	14.994.500,00	14.994.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.083.000,00	60.694.900,00	1.388.100,00	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	52.583.000,00	51.194.900,00	1.388.100,00	97,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.583.000,00	51.194.900,00	1.388.100,00	97,36	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.658.000,00	56.657.400,00	600,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	05.01 BELANJA OPERASI	56.658.000,00	56.657.400,00	600,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.745.000,00	17.565.000,00	1.180.000,00	93,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	05.01 BELANJA OPERASI	18.745.000,00	17.565.000,00	1.180.000,00	93,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.995.000,00	13.700.000,00	295.000,00	97,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	05.01 BELANJA OPERASI	13.995.000,00	13.700.000,00	295.000,00	97,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.076.400,00	90.025.820,00	50.580,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	05.01 BELANJA OPERASI	90.076.400,00	90.025.820,00	50.580,00	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.800.000,00	504.811.932,00	(439.011.932,00)	767,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.800.000,00	131.232.532,00	(65.432.532,00)	199,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	05.01 BELANJA OPERASI	65.800.000,00	131.232.532,00	(65.432.532,00)	199,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	373.579.400,00	(373.579.400,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	05.01 BELANJA OPERASI	0,00	373.579.400,00	(373.579.400,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	19.868.597,00	131.403,00	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.868.597,00	131.403,00	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0010	05.01 BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.868.597,00	131.403,00	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.375.624.150,00	28.462.047.344,00	1.913.576.806,00	93,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.719.543.186,00	10.005.436.136,00	714.107.050,00	93,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.815.385.600,00	2.391.063.757,00	424.321.843,00	84,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	05.01 BELANJA OPERASI	2.815.385.600,00	2.391.063.757,00	424.321.843,00	84,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.01 Belanja Pegawai	37.230.000,00	28.560.000,00	8.670.000,00	76,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.454.624.000,00	5.318.543.400,00	136.080.600,00	97,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	05.01 BELANJA OPERASI	183.580.000,00	168.108.400,00	15.471.600,00	91,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.01 Belanja Pegawai	4.760.000,00	1.360.000,00	3.400.000,00	28,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	05.02 BELANJA MODAL	5.271.044.000,00	5.150.435.000,00	120.609.000,00	97,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.337.000,00	638.035.000,00	19.302.000,00	97,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.613.707.000,00	4.512.400.000,00	101.307.000,00	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.101.432,00	60.545.097,00	3.556.335,00	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	05.01 BELANJA OPERASI	64.101.432,00	60.545.097,00	3.556.335,00	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	471.939.400,00	400.021.637,00	71.917.763,00	84,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	05.01 BELANJA OPERASI	259.404.400,00	188.296.787,00	71.107.613,00	72,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	05.02 BELANJA MODAL	212.535.000,00	211.724.850,00	810.150,00	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	7.691.250,00	408.750,00	94,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.435.000,00	204.033.600,00	401.400,00	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.618.492.854,00	1.607.275.945,00	11.216.909,00	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	05.01 BELANJA OPERASI	1.605.712.854,00	1.596.325.945,00	9.386.909,00	99,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.01 Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	05.02	BELANJA MODAL	12.780.000,00	10.950.000,00	1.830.000,00	85,68
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.780.000,00	10.950.000,00	1.830.000,00	85,68
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	69.999.900,00	32.673.300,00	37.326.600,00	46,68
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0024	05.01	BELANJA OPERASI	69.999.900,00	32.673.300,00	37.326.600,00	46,68
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.000.000,00	195.313.000,00	29.687.000,00	86,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	05.01	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	195.313.000,00	29.687.000,00	86,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.656.080.964,00	18.456.611.208,00	1.199.469.756,00	93,90
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	418.944.000,00	387.906.690,00	31.037.310,00	92,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	415.944.000,00	384.906.690,00	31.037.310,00	92,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	05.02	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	539.890.750,00	236.673.012,00	303.217.738,00	43,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	539.890.750,00	236.673.012,00	303.217.738,00	43,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	260.825.300,00	179.608.100,00	81.217.200,00	68,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	260.825.300,00	179.608.100,00	81.217.200,00	68,86
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	250.000.000,00	246.022.292,00	3.977.708,00	98,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	246.022.292,00	3.977.708,00	98,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	102.974.100,00	98.934.800,00	4.039.300,00	96,08
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	05.01	BELANJA OPERASI	102.974.100,00	98.934.800,00	4.039.300,00	96,08
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	144.817.100,00	121.770.867,00	23.046.233,00	84,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	05.01	BELANJA OPERASI	144.817.100,00	121.770.867,00	23.046.233,00	84,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86.000.000,00	80.198.961,00	5.801.039,00	93,25
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	05.01	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	80.198.961,00	5.801.039,00	93,25
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.999.900,00	95.740.797,00	4.259.103,00	95,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	05.01	BELANJA OPERASI	99.999.900,00	95.740.797,00	4.259.103,00	95,74
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	69.000.000,00	53.535.137,00	15.464.863,00	77,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	05.01	BELANJA OPERASI	69.000.000,00	53.535.137,00	15.464.863,00	77,59
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71.725.500,00	66.148.100,00	5.577.400,00	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	05.01	BELANJA OPERASI	71.725.500,00	66.148.100,00	5.577.400,00	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	120.443.900,00	106.197.217,00	14.246.683,00	88,17
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	05.01	BELANJA OPERASI	120.443.900,00	106.197.217,00	14.246.683,00	88,17
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	70.774.814,00	59.435.040,00	11.339.774,00	83,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	05.01	BELANJA OPERASI	70.774.814,00	59.435.040,00	11.339.774,00	83,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	96.670.426,00	3.329.574,00	96,67
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0013	05.01	BELANJA OPERASI	83.000.000,00	79.670.426,00	3.329.574,00	95,99

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0013	05.02	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	96.916.100,00	77.650.300,00	19.265.800,00	80,12
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	05.01	BELANJA OPERASI	76.516.100,00	57.287.300,00	19.228.800,00	74,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	05.02	BELANJA MODAL	20.400.000,00	20.363.000,00	37.000,00	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.400.000,00	20.363.000,00	37.000,00	99,82
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	317.496.500,00	308.261.600,00	9.234.900,00	97,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	05.01	BELANJA OPERASI	317.496.500,00	308.261.600,00	9.234.900,00	97,09
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00	45.675.400,00	4.324.600,00	91,35
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	05.01	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	18.305.400,00	3.694.600,00	83,21
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	05.02	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.370.000,00	630.000,00	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.370.000,00	630.000,00	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.302.621.000,00	1.241.325.542,00	61.295.458,00	95,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	05.01	BELANJA OPERASI	397.711.000,00	336.615.542,00	61.095.458,00	84,64
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	05.02	BELANJA MODAL	904.910.000,00	904.710.000,00	200.000,00	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.910.000,00	904.710.000,00	200.000,00	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.999.510,00	49.999.510,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	05.01	BELANJA OPERASI	28.747.300,00	28.747.300,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	05.02	BELANJA MODAL	21.252.210,00	21.252.210,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.252.210,00	21.252.210,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	99.999.800,00	93.275.955,00	6.723.845,00	93,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019	05.01	BELANJA OPERASI	99.999.800,00	93.275.955,00	6.723.845,00	93,28
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	93.402.000,00	77.845.121,00	15.556.879,00	83,34
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	05.01	BELANJA OPERASI	73.277.000,00	60.345.121,00	12.931.879,00	82,35
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	05.02	BELANJA MODAL	20.125.000,00	17.500.000,00	2.625.000,00	86,96
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.125.000,00	17.500.000,00	2.625.000,00	86,96
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	555.212.000,00	515.615.424,00	39.596.576,00	92,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	05.01	BELANJA OPERASI	501.212.000,00	473.648.424,00	27.563.576,00	94,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	05.02	BELANJA MODAL	54.000.000,00	41.967.000,00	12.033.000,00	77,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	41.967.000,00	12.033.000,00	77,72
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.319.934.240,00	13.114.111.039,00	205.823.201,00	98,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	05.01	BELANJA OPERASI	13.319.934.240,00	13.114.111.039,00	205.823.201,00	98,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	250.247.750,00	98.539.050,00	151.708.700,00	39,38
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	05.01	BELANJA OPERASI	204.427.750,00	98.539.050,00	105.888.700,00	48,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	05.02	BELANJA MODAL	45.820.000,00	0,00	45.820.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.820.000,00	0,00	45.820.000,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	399.999.900,00	328.652.828,00	71.347.072,00	82,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	05.01	BELANJA OPERASI	399.999.900,00	328.652.828,00	71.347.072,00	82,16
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	487.346.800,00	440.492.800,00	46.854.000,00	90,39
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0035	05.01	BELANJA OPERASI	470.146.800,00	424.090.300,00	46.056.500,00	90,20
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0035	05.02	BELANJA MODAL	17.200.000,00	16.402.500,00	797.500,00	95,36
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.200.000,00	16.402.500,00	797.500,00	95,36

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100.000.000,00	83.114.400,00	16.885.600,00	83,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	83.114.400,00	16.885.600,00	83,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000,00	93.362.700,00	6.637.300,00	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.362.700,00	6.637.300,00	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	97.510.000,00	59.848.100,00	37.661.900,00	61,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	05.01	BELANJA OPERASI	77.385.000,00	59.848.100,00	17.536.900,00	77,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	05.02	BELANJA MODAL	20.125.000,00	0,00	20.125.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.125.000,00	0,00	20.125.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	816.635.400,00	227.366.900,00	589.268.500,00	27,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	24.720.800,00	24.566.400,00	154.400,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0001		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.720.800,00	24.566.400,00	154.400,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	24.720.800,00	24.566.400,00	154.400,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	791.914.600,00	202.800.500,00	589.114.100,00	25,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	791.914.600,00	202.800.500,00	589.114.100,00	25,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	791.914.600,00	202.800.500,00	589.114.100,00	25,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	571.700.000,00	0,00	571.700.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	268.100.900,00	244.392.200,00	23.708.700,00	91,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85.386.900,00	75.669.800,00	9.717.100,00	88,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85.386.900,00	75.669.800,00	9.717.100,00	88,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	85.386.900,00	75.669.800,00	9.717.100,00	88,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.714.000,00	168.722.400,00	13.991.600,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.714.000,00	168.722.400,00	13.991.600,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	182.714.000,00	168.722.400,00	13.991.600,00	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	687.406.800,00	580.194.205,00	107.212.595,00	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.315.000,00	346.484.805,00	73.830.195,00	82,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	420.315.000,00	346.484.805,00	73.830.195,00	82,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		05.01	BELANJA OPERASI	420.315.000,00	346.484.805,00	73.830.195,00	82,43	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.091.800,00	233.709.400,00	33.382.400,00	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	267.091.800,00	233.709.400,00	33.382.400,00	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	267.091.800,00	233.709.400,00	33.382.400,00	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS MAPADDEGAT	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.033.292.304,00	2.819.271.447,20	214.020.856,80	92,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	213.995.852,80	92,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	47.889.000,00	47.863.996,00	25.004,00	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.889.000,00	47.863.996,00	25.004,00	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SIOBAN	1.803.899.821,86	1.708.948.433,82	94.951.388,04	94,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.803.899.821,86	1.708.948.433,82	94.951.388,04	94,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.803.899.821,86	1.708.948.433,82	94.951.388,04	94,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.803.899.821,86	1.708.948.433,82	94.951.388,04	94,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.793.258.771,86	1.698.307.433,82	94.951.338,04	94,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	10.641.050,00	10.641.000,00	50,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.641.050,00	10.641.000,00	50,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS BOSUA	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	827.927.200,00	424.418.512,00	403.508.688,00	51,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	821.927.200,00	424.418.512,00	397.508.688,00	51,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.727.250.200,00	1.300.627.716,00	426.622.484,00	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	426.572.476,00	75,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	10.990.000,00	10.939.992,00	50.008,00	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.990.000,00	10.939.992,00	50.008,00	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS PEIPEI	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.639.943.700,00	927.080.956,00	712.862.744,00	56,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.628.536.550,00	925.580.956,00	702.955.594,00	56,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	11.407.150,00	1.500.000,00	9.907.150,00	13,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.407.150,00	1.500.000,00	9.907.150,00	13,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.504.531.220,00	1.143.015.512,00	361.515.708,00	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	358.878.208,00	76,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.885.360.950,00	1.681.954.128,00	203.406.822,00	89,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	203.381.818,00	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	4.025.000,00	3.999.996,00	25.004,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.025.000,00	3.999.996,00	25.004,00	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS BETAET	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	880.417.212,00	793.533.185,00	86.884.027,00	90,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	878.011.698,00	791.127.671,00	86.884.027,00	90,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SIKAKAP	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	2.353.315.000,00	1.902.739.348,00	450.575.652,00	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	450.550.648,00	80,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	7.625.000,00	7.599.996,00	25.004,00	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.625.000,00	7.599.996,00	25.004,00	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS MALAKOPA	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	190.409.220,00	84,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS BULASAT	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.016.799.730,00	816.696.825,00	200.102.905,00	80,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	1.010.469.730,00	810.814.425,00	199.655.305,00	80,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	6.330.000,00	5.882.400,00	447.600,00	92,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.330.000,00	5.882.400,00	447.600,00	92,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SAREREIKET	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	756.136.100,00	653.993.910,00	102.142.190,00	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SIMATALU	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	840.874.400,00	635.444.184,00	205.430.216,00	75,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SIGAPOKNA	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	497.188.190,00	390.259.547,00	106.928.643,00	78,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01	BELANJA OPERASI	494.188.190,00	387.259.547,00	106.928.643,00	78,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000			PUSKESMAS SAUMANGANYA	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.370.869.720,00	1.181.914.357,00	188.955.363,00	86,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.01 BELANJA OPERASI	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	188.639.363,00	86,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	05.02 BELANJA MODAL	16.570.000,00	16.254.000,00	316.000,00	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.570.000,00	16.254.000,00	316.000,00	98,09	
			JUMLAH	116.416.538.972,86	102.572.608.676,02	13.843.930.296,84	88,11	
			SURPLUS/DEFISIT	(116.331.538.972,86)	(102.496.972.176,02)	(13.834.566.796,84)	88,11	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000			JUMLAH PENDAPATAN	1.526.387.472,00	608.807.789,00	917.579.683,00	39,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000								
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA	143.004.153.503,00	116.249.359.250,00	26.754.794.253,00	81,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.429.443,00	6.127.112.828,00	294.316.615,00	95,42	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.910.200,00	46.848.400,00	61.800,00	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.910.200,00	46.848.400,00	61.800,00	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	46.910.200,00	46.848.400,00	61.800,00	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.910.200,00	46.848.400,00	61.800,00	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	280.589.177,00	95,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	280.589.177,00	95,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	280.589.177,00	95,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	280.589.177,00	95,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.551.700,00	349.262.546,00	1.289.154,00	99,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.862.500,00	23.860.446,00	2.054,00	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	23.862.500,00	23.860.446,00	2.054,00	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.862.500,00	23.860.446,00	2.054,00	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.314.000,00	34.214.000,00	100.000,00	99,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	22.889.000,00	22.789.000,00	100.000,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.889.000,00	22.789.000,00	100.000,00	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.602.800,00	25.485.800,00	117.000,00	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003	05.01	BELANJA OPERASI	17.952.800,00	17.842.800,00	110.000,00	99,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.952.800,00	17.842.800,00	110.000,00	99,39	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003	05.02	BELANJA MODAL	7.650.000,00	7.643.000,00	7.000,00	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.650.000,00	7.643.000,00	7.000,00	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.361.400,00	102.250.000,00	111.400,00	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	102.361.400,00	102.250.000,00	111.400,00	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.361.400,00	102.250.000,00	111.400,00	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.145.000,00	32.145.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	32.145.000,00	32.145.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.145.000,00	32.145.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.266.000,00	67.547.300,00	718.700,00	98,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	68.266.000,00	67.547.300,00	718.700,00	98,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.266.000,00	67.547.300,00	718.700,00	98,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.500.000,00	14.260.000,00	240.000,00	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	05.01	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.260.000,00	240.000,00	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.260.000,00	240.000,00	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.750.000,00	125.188.316,00	11.561.684,00	91,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.750.000,00	86.382.316,00	11.367.684,00	88,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	97.750.000,00	86.382.316,00	11.367.684,00	88,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.750.000,00	86.382.316,00	11.367.684,00	88,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	38.806.000,00	194.000,00	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	38.806.000,00	194.000,00	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.806.000,00	194.000,00	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.970.000,00	40.155.200,00	814.800,00	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.970.000,00	40.155.200,00	814.800,00	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	40.970.000,00	40.155.200,00	814.800,00	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.970.000,00	40.155.200,00	814.800,00	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.980.609.900,00	13.721.004.624,00	1.259.605.276,00	91,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.650.583.900,00	12.445.268.861,00	1.205.315.039,00	91,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107		Pembangunan Unit Air Baku	8.424.678.000,00	8.187.467.334,00	237.210.666,00	97,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	05.01	BELANJA OPERASI	1.784.678.000,00	1.547.467.334,00	237.210.666,00	86,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	5.1.01	Belanja Pegawai	9.500.000,00	7.620.000,00	1.880.000,00	80,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.775.178.000,00	1.539.847.334,00	235.330.666,00	86,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	05.02	BELANJA MODAL	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113		Pembangunan Kanal Banjir	3.403.989.900,00	2.928.567.600,00	475.422.300,00	86,03	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	05.01	BELANJA OPERASI	428.989.900,00	352.812.600,00	76.177.300,00	82,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1.01	Belanja Pegawai	8.120.000,00	7.520.000,00	600.000,00	92,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.869.900,00	345.292.600,00	75.577.300,00	82,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	05.02	BELANJA MODAL	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	399.245.000,00	86,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	399.245.000,00	86,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0127		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.821.916.000,00	1.329.233.927,00	492.682.073,00	72,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0127	05.01	BELANJA OPERASI	1.821.916.000,00	1.329.233.927,00	492.682.073,00	72,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0127	5.1.01	Belanja Pegawai	71.880.000,00	67.360.000,00	4.520.000,00	93,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0127	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.036.000,00	1.261.873.927,00	488.162.073,00	72,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.330.026.000,00	1.275.735.763,00	54.290.237,00	95,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.330.026.000,00	1.275.735.763,00	54.290.237,00	95,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	05.01	BELANJA OPERASI	1.177.588.000,00	1.138.316.888,00	39.271.112,00	96,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	8.240.000,00	7.480.000,00	760.000,00	90,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.169.348.000,00	1.130.836.888,00	38.511.112,00	96,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	05.02	BELANJA MODAL	152.438.000,00	137.418.875,00	15.019.125,00	90,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.438.000,00	56.600.000,00	7.838.000,00	87,84	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.000.000,00	80.818.875,00	7.181.125,00	91,84	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.945.407.230,00	6.076.545.109,00	868.862.121,00	87,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.945.407.230,00	6.076.545.109,00	868.862.121,00	87,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0022		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	398.178.100,00	380.035.700,00	18.142.400,00	95,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0022	05.01	BELANJA OPERASI	398.178.100,00	380.035.700,00	18.142.400,00	95,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.898.100,00	377.755.700,00	18.142.400,00	95,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0024		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	310.258.400,00	95.939.800,00	214.318.600,00	30,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0024	05.01	BELANJA OPERASI	310.258.400,00	95.939.800,00	214.318.600,00	30,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.258.400,00	95.939.800,00	214.318.600,00	30,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	555.208.000,00	330.312.800,00	224.895.200,00	59,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	05.01	BELANJA OPERASI	555.208.000,00	330.312.800,00	224.895.200,00	59,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.208.000,00	330.312.800,00	224.895.200,00	59,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.326.647.930,00	2.098.186.316,00	228.461.614,00	90,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	05.01	BELANJA OPERASI	171.310.000,00	155.907.852,00	15.402.148,00	91,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.310.000,00	155.907.852,00	15.402.148,00	91,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	05.02	BELANJA MODAL	2.155.337.930,00	1.942.278.464,00	213.059.466,00	90,11	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.155.337.930,00	1.942.278.464,00	213.059.466,00	90,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.355.114.800,00	3.172.070.493,00	183.044.307,00	94,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	05.01	BELANJA OPERASI	1.531.687.600,00	1.449.405.493,00	82.282.107,00	94,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	136.650.000,00	134.574.800,00	2.075.200,00	98,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.037.600,00	1.314.830.693,00	80.206.907,00	94,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	05.02	BELANJA MODAL	1.823.427.200,00	1.722.665.000,00	100.762.200,00	94,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.227.200,00	17.150.000,00	77.200,00	99,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.806.200.000,00	1.705.515.000,00	100.685.000,00	94,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.059.468.800,00	843.273.760,00	216.195.040,00	79,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.059.468.800,00	843.273.760,00	216.195.040,00	79,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.059.468.800,00	843.273.760,00	216.195.040,00	79,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	05.01	BELANJA OPERASI	865.832.600,00	658.153.760,00	207.678.840,00	76,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	56,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.232.600,00	656.113.760,00	206.118.840,00	76,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	05.02	BELANJA MODAL	193.636.200,00	185.120.000,00	8.516.200,00	95,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.636.200,00	85.120.000,00	8.516.200,00	90,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	341.164.742,00	87,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	341.164.742,00	87,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	341.164.742,00	87,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	05.01	BELANJA OPERASI	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	341.164.742,00	87,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	341.164.742,00	87,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.677.530.681,00	1.421.034.900,00	256.495.781,00	84,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.677.530.681,00	1.421.034.900,00	256.495.781,00	84,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.524.015.681,00	1.288.332.900,00	235.682.781,00	84,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	05.01	BELANJA OPERASI	262.005.011,00	146.666.100,00	115.338.911,00	55,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.195.011,00	142.856.100,00	115.338.911,00	55,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	05.02	BELANJA MODAL	1.262.010.670,00	1.141.666.800,00	120.343.870,00	90,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.010.670,00	61.800.000,00	210.670,00	99,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.200.000.000,00	1.079.866.800,00	120.133.200,00	89,99	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0030		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	153.515.000,00	132.702.000,00	20.813.000,00	86,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0030	05.01	BELANJA OPERASI	153.515.000,00	132.702.000,00	20.813.000,00	86,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1.01	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.065.000,00	132.702.000,00	20.363.000,00	86,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.070.600.101,00	3.445.798.375,00	624.801.726,00	84,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.070.600.101,00	3.445.798.375,00	624.801.726,00	84,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.785.095.101,00	3.325.815.925,00	459.279.176,00	87,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	05.01	BELANJA OPERASI	1.280.533.893,00	1.046.278.925,00	234.254.968,00	81,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	50,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.433.893,00	1.043.728.925,00	231.704.968,00	81,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	05.02	BELANJA MODAL	2.504.561.208,00	2.279.537.000,00	225.024.208,00	91,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.01	Belanja Modal Tanah	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.561.208,00	0,00	19.561.208,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.300.000.000,00	2.279.537.000,00	20.463.000,00	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	285.505.000,00	119.982.450,00	165.522.550,00	42,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	05.01	BELANJA OPERASI	280.605.000,00	119.982.450,00	160.622.550,00	42,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	134.500.000,00	17.200.000,00	117.300.000,00	12,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.105.000,00	102.782.450,00	43.322.550,00	70,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	05.02	BELANJA MODAL	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99.632.014.348,00	78.042.557.230,00	21.589.457.118,00	78,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	99.632.014.348,00	78.042.557.230,00	21.589.457.118,00	78,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.221.741.200,00	1.968.278.480,00	253.462.720,00	88,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	05.01	BELANJA OPERASI	2.075.828.000,00	1.875.483.868,00	200.344.132,00	90,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	30.490.000,00	27.660.000,00	2.830.000,00	90,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.338.000,00	1.847.823.868,00	197.514.132,00	90,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	05.02	BELANJA MODAL	145.913.200,00	92.794.612,00	53.118.588,00	63,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.913.200,00	92.794.612,00	53.118.588,00	63,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0030		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.972.385.070,00	2.681.145.254,00	291.239.816,00	90,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0030	05.01	BELANJA OPERASI	2.972.385.070,00	2.681.145.254,00	291.239.816,00	90,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1.01	Belanja Pegawai	35.500.000,00	23.040.000,00	12.460.000,00	64,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.885.070,00	2.658.105.254,00	278.779.816,00	90,51	

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2		3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	24.784.440.660,00	20.331.296.975,00	4.453.143.685,00	82,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	05.01	BELANJA OPERASI	872.995.000,00	569.465.284,00	303.529.716,00	65,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	75.490.000,00	48.270.000,00	27.220.000,00	63,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.505.000,00	521.195.284,00	276.309.716,00	65,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	05.02	BELANJA MODAL	23.911.445.660,00	19.761.831.691,00	4.149.613.969,00	82,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.347.470.851,00	0,00	3.347.470.851,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.419.000,00	53.667.000,00	3.752.000,00	93,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.506.555.809,00	19.708.164.691,00	798.391.118,00	96,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	54.202.140.664,00	45.080.814.932,00	9.121.325.732,00	83,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	05.01	BELANJA OPERASI	4.054.153.165,00	3.590.802.468,00	463.350.697,00	88,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	472.720.000,00	446.010.000,00	26.710.000,00	94,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.581.433.165,00	3.144.792.468,00	436.640.697,00	87,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	05.02	BELANJA MODAL	50.147.987.499,00	41.490.012.464,00	8.657.975.035,00	82,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.840.000,00	184.353.000,00	9.487.000,00	95,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.954.147.499,00	41.305.659.464,00	8.648.488.035,00	82,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	1.341.597.040,00	1.247.289.872,00	94.307.168,00	92,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	05.01	BELANJA OPERASI	239.394.000,00	145.086.832,00	94.307.168,00	60,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.01	Belanja Pegawai	7.620.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	50,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.774.000,00	141.276.832,00	90.497.168,00	60,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	05.02	BELANJA MODAL	1.102.203.040,00	1.102.203.040,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.102.203.040,00	1.102.203.040,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.386.538.960,00	1.071.343.489,00	315.195.471,00	77,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	05.01	BELANJA OPERASI	1.386.538.960,00	1.071.343.489,00	315.195.471,00	77,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.01	Belanja Pegawai	65.240.000,00	21.120.000,00	44.120.000,00	32,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.321.298.960,00	1.050.223.489,00	271.075.471,00	79,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	8.381.397.500,00	3.408.447.923,00	4.972.949.577,00	40,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	05.01	BELANJA OPERASI	325.743.500,00	149.793.923,00	175.949.577,00	45,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.01	Belanja Pegawai	45.480.000,00	34.560.000,00	10.920.000,00	75,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.263.500,00	115.233.923,00	165.029.577,00	41,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	05.02	BELANJA MODAL	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	4.797.000.000,00	40,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	4.797.000.000,00	40,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	825.635.000,00	638.703.000,00	186.932.000,00	77,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	05.01	BELANJA OPERASI	825.635.000,00	638.703.000,00	186.932.000,00	77,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.01	Belanja Pegawai	21.480.000,00	19.870.000,00	1.610.000,00	92,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.155.000,00	618.833.000,00	185.322.000,00	76,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	3.516.138.254,00	1.615.237.305,00	1.900.900.949,00	45,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	05.01	BELANJA OPERASI	3.428.282.054,00	1.538.987.915,00	1.889.294.139,00	44,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.01	Belanja Pegawai	35.770.000,00	7.220.000,00	28.550.000,00	20,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.392.512.054,00	1.531.767.915,00	1.860.744.139,00	45,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	05.02	BELANJA MODAL	87.856.200,00	76.249.390,00	11.606.810,00	86,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.856.200,00	76.249.390,00	11.606.810,00	86,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0013	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.441.074.300,00	1.336.115.164,00	104.959.136,00	92,72	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	169.638.800,00	150.047.369,00	19.591.431,00	88,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0005		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	169.638.800,00	150.047.369,00	19.591.431,00	88,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	169.638.800,00	150.047.369,00	19.591.431,00	88,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.638.800,00	150.047.369,00	19.591.431,00	88,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.271.435.500,00	1.186.067.795,00	85.367.705,00	93,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.271.435.500,00	1.186.067.795,00	85.367.705,00	93,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.243.325.500,00	1.158.067.795,00	85.257.705,00	93,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.905.500,00	1.158.067.795,00	81.837.705,00	93,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	28.110.000,00	28.000.000,00	110.000,00	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.110.000,00	28.000.000,00	110.000,00	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000			UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.185.000,00	272.219.927,00	54.965.073,00	83,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000			UPT Pengelolaan Air Minum Daerah	3.719.429.000,00	2.575.457.375,00	1.143.971.625,00	69,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.719.429.000,00	2.575.457.375,00	1.143.971.625,00	69,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.719.429.000,00	2.575.457.375,00	1.143.971.625,00	69,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.719.429.000,00	2.575.457.375,00	1.143.971.625,00	69,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	05.01	BELANJA OPERASI	1.940.707.000,00	1.267.626.004,00	673.080.996,00	65,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	50,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.607.000,00	1.265.076.004,00	670.530.996,00	65,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	05.02	BELANJA MODAL	1.778.722.000,00	1.307.831.371,00	470.890.629,00	73,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.01	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	113.300.000,00	6.700.000,00	94,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	758.722.000,00	680.302.000,00	78.420.000,00	89,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	315.983.371,00	384.016.629,00	45,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.246.000,00	1.754.000,00	99,12	
				JUMLAH	143.004.153.503,00	116.249.359.250,00	26.754.794.253,00	81,29	
				SURPLUS/DEFISIT	(141.477.766.031,00)	(115.640.551.461,00)	(25.837.214.570,00)	81,74	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000		5	BELANJA	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	680.044.460,00	95,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.356.914.258,00	3.071.022.613,00	285.891.645,00	91,48	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.266.255.538,00	2.058.322.878,00	207.932.660,00	90,82	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.224.555.538,00	2.028.622.878,00	195.932.660,00	91,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.224.555.538,00	2.028.622.878,00	195.932.660,00	91,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.224.555.538,00	2.028.622.878,00	195.932.660,00	91,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.700.000,00	29.700.000,00	12.000.000,00	71,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	41.700.000,00	29.700.000,00	12.000.000,00	71,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	41.700.000,00	29.700.000,00	12.000.000,00	71,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.810.800,00	221.296.937,00	50.513.863,00	81,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.586.100,00	2.413.900,00	75,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.586.100,00	2.413.900,00	75,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.586.100,00	2.413.900,00	75,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	28.832.700,00	6.167.300,00	82,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	28.832.700,00	6.167.300,00	82,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	28.832.700,00	6.167.300,00	82,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	69.810.900,00	189.100,00	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.810.900,00	189.100,00	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.810.900,00	189.100,00	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	24.592.000,00	9.408.000,00		
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	24.592.000,00	9.408.000,00	72,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	24.592.000,00	9.408.000,00	72,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.810.800,00	80.575.237,00	32.235.563,00	71,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	112.810.800,00	80.575.237,00	32.235.563,00	71,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.810.800,00	80.575.237,00	32.235.563,00	71,43	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.119.920,00	171.800.000,00	5.319.920,00	97,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.119.920,00	171.800.000,00	5.319.920,00	97,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	3.361.900,00	0,00	3.361.900,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.001.900,00	0,00	2.001.900,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	173.758.020,00	171.800.000,00	1.958.020,00	98,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.758.020,00	171.800.000,00	1.958.020,00	98,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.328.000,00	547.859.919,00	5.468.081,00	99,01	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000,00	89.130.530,00	3.869.470,00	95,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	89.130.530,00	3.869.470,00	95,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	89.130.530,00	3.869.470,00	95,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.328.000,00	458.729.389,00	1.598.611,00	99,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	460.328.000,00	458.729.389,00	1.598.611,00	99,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.328.000,00	458.729.389,00	1.598.611,00	99,65	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.400.000,00	71.742.879,00	16.657.121,00	81,16	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.500.000,00	35.665.000,00	3.835.000,00	90,29	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	35.665.000,00	3.835.000,00	90,29	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	35.665.000,00	3.835.000,00	90,29	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.500.000,00	23.007.879,00	12.492.121,00	64,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	35.500.000,00	23.007.879,00	12.492.121,00	64,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	23.007.879,00	12.492.121,00	64,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	13.070.000,00	330.000,00	97,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	13.070.000,00	330.000,00	97,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.070.000,00	330.000,00	97,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.931.796.000,00	3.758.500.430,00	173.295.570,00	95,59	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.999.900,00	39.563.200,00	10.436.700,00	79,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01.0009		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49.999.900,00	39.563.200,00	10.436.700,00	79,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	49.999.900,00	39.563.200,00	10.436.700,00	79,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	39.563.200,00	10.436.700,00	79,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	145.000.000,00	84.911.600,00	60.088.400,00	58,56	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02.0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	145.000.000,00	84.911.600,00	60.088.400,00	58,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	84.911.600,00	60.088.400,00	58,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	84.911.600,00	60.088.400,00	58,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.602.701.100,00	3.511.602.230,00	91.098.870,00	97,47	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0001		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	878.227.300,00	843.286.700,00	34.940.600,00	96,02	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	878.227.300,00	843.286.700,00	34.940.600,00	96,02	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.227.300,00	843.286.700,00	34.940.600,00	96,02	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0004		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.724.473.800,00	2.668.315.530,00	56.158.270,00	97,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	2.724.473.800,00	2.668.315.530,00	56.158.270,00	97,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.473.800,00	2.668.315.530,00	56.158.270,00	97,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	134.095.000,00	122.423.400,00	11.671.600,00	91,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04.0005		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	134.095.000,00	122.423.400,00	11.671.600,00	91,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04.0005	05.01	BELANJA OPERASI	134.095.000,00	122.423.400,00	11.671.600,00	91,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.095.000,00	122.423.400,00	11.671.600,00	91,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.090.708.700,00	5.989.482.346,00	101.226.354,00	98,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.090.708.700,00	5.989.482.346,00	101.226.354,00	98,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0002		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.776.074.300,00	5.742.823.000,00	33.251.300,00	99,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	5.776.074.300,00	5.742.823.000,00	33.251.300,00	99,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.776.074.300,00	5.742.823.000,00	33.251.300,00	99,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0003		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	162.699.900,00	135.415.546,00	27.284.354,00	83,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	162.699.900,00	135.415.546,00	27.284.354,00	83,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.699.900,00	135.415.546,00	27.284.354,00	83,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0007		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	151.934.500,00	111.243.800,00	40.690.700,00	73,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0007	05.01	BELANJA OPERASI	151.934.500,00	111.243.800,00	40.690.700,00	73,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.934.500,00	111.243.800,00	40.690.700,00	73,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.391.373.500,00	3.271.742.609,00	119.630.891,00	96,47	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.391.373.500,00	3.271.742.609,00	119.630.891,00	96,47	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.332.760.500,00	3.213.726.109,00	119.034.391,00	96,43	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	906.760.500,00	789.910.851,00	116.849.649,00	87,11	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.670.000,00	0,00	22.670.000,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.090.500,00	789.910.851,00	94.179.649,00	89,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	05.02	BELANJA MODAL	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	2.184.742,00	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	2.184.742,00	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0009		Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	58.613.000,00	58.016.500,00	596.500,00	98,98	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	58.613.000,00	58.016.500,00	596.500,00	98,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.613.000,00	58.016.500,00	596.500,00	98,98	
				JUMLAH	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	680.044.460,00	95,95	
				SURPLUS/DEFISIT	(16.770.792.458,00)	(16.090.747.998,00)	(680.044.460,00)	95,95	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA	15.135.307.644,00	14.741.418.616,00	393.889.028,00	97,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.924.717.944,00	5.752.192.783,00	172.525.161,00	97,09	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.144.944.344,00	3.040.169.204,00	104.775.140,00	96,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.033.464.344,00	2.928.689.204,00	104.775.140,00	96,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.033.464.344,00	2.928.689.204,00	104.775.140,00	96,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.033.464.344,00	2.928.689.204,00	104.775.140,00	96,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.221.600,00	186.208.705,00	1.012.895,00	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.120.000,00	8.237.000,00	883.000,00	90,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003	05.01	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003	05.02	BELANJA MODAL	7.920.000,00	7.037.000,00	883.000,00	88,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.920.000,00	7.037.000,00	883.000,00	88,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.790.000,00	62.749.000,00	41.000,00	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	62.790.000,00	62.749.000,00	41.000,00	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.790.000,00	62.749.000,00	41.000,00	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.999.800,00	17.999.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	17.999.800,00	17.999.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.999.800,00	17.999.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.311.800,00	79.226.905,00	84.895,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	79.311.800,00	79.226.905,00	84.895,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.311.800,00	79.226.905,00	84.895,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.403.192.000,00	2.346.051.874,00	57.140.126,00	97,62	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.720.000,00	15.374.720,00	9.345.280,00	62,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.720.000,00	15.374.720,00	9.345.280,00	62,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	15.374.720,00	9.345.280,00	62,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.378.472.000,00	2.330.677.154,00	47.794.846,00	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	2.378.472.000,00	2.330.677.154,00	47.794.846,00	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.378.472.000,00	2.330.677.154,00	47.794.846,00	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.360.000,00	179.763.000,00	9.597.000,00	94,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000,00	30.396.000,00	4.000,00	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	30.400.000,00	30.396.000,00	4.000,00	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	30.396.000,00	4.000,00	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.970.000,00	140.287.000,00	8.683.000,00	94,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	148.970.000,00	140.287.000,00	8.683.000,00	94,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.970.000,00	140.287.000,00	8.683.000,00	94,17	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.080.000,00	910.000,00	90,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.080.000,00	910.000,00	90,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.080.000,00	910.000,00	90,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.380.615.800,00	1.340.622.750,00	39.993.050,00	97,10	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.336.203.800,00	1.296.210.750,00	39.993.050,00	97,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.133.774.800,00	1.093.937.150,00	39.837.650,00	96,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	05.01	BELANJA OPERASI	1.093.124.800,00	1.053.287.150,00	39.837.650,00	96,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.124.800,00	1.053.287.150,00	39.837.650,00	96,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	05.02	BELANJA MODAL	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	202.429.000,00	202.273.600,00	155.400,00	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	05.01	BELANJA OPERASI	142.129.000,00	141.973.600,00	155.400,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.129.000,00	141.973.600,00	155.400,00	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	05.02	BELANJA MODAL	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03.0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03.0006	05.01	BELANJA OPERASI	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.829.973.900,00	7.648.603.083,00	181.370.817,00	97,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.640.242.300,00	7.467.132.419,00	173.109.881,00	97,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	216.147.000,00	215.915.700,00	231.300,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	216.147.000,00	215.915.700,00	231.300,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.147.000,00	215.915.700,00	231.300,00	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	244.759.900,00	193.972.000,00	50.787.900,00	79,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	244.759.900,00	193.972.000,00	50.787.900,00	79,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.759.900,00	193.972.000,00	50.787.900,00	79,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7.179.335.400,00	7.057.244.719,00	122.090.681,00	98,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	05.01	BELANJA OPERASI	528.035.400,00	504.316.645,00	23.718.755,00	95,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.260.000,00	490.000,00	92,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.285.400,00	498.056.645,00	23.228.755,00	95,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	05.02	BELANJA MODAL	6.651.300.000,00	6.552.928.074,00	98.371.926,00	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.451.300.000,00	5.353.857.000,00	97.443.000,00	98,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.199.071.074,00	928.926,00	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	189.731.600,00	181.470.664,00	8.260.936,00	95,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	189.731.600,00	181.470.664,00	8.260.936,00	95,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001	05.01	BELANJA OPERASI	152.681.600,00	144.470.664,00	8.210.936,00	94,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.681.600,00	144.470.664,00	8.210.936,00	94,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001	05.02	BELANJA MODAL	37.050.000,00	37.000.000,00	50.000,00	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.050.000,00	37.000.000,00	50.000,00	99,87	
				JUMLAH	15.135.307.644,00	14.741.418.616,00	393.889.028,00	97,40	
				SURPLUS/DEFISIT	(15.135.307.644,00)	(14.741.418.616,00)	(393.889.028,00)	97,40	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000		5	BELANJA	15.070.713.147,00	9.246.593.576,00	5.824.119.571,00	61,35	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.446.358.407,00	4.097.506.436,00	348.851.971,00	92,15	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.480.000,00	12.800.000,00	8.680.000,00	59,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.480.000,00	12.800.000,00	8.680.000,00	59,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	21.480.000,00	12.800.000,00	8.680.000,00	59,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00	12.800.000,00	8.680.000,00	59,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.633.364.607,00	2.375.090.757,00	258.273.850,00	90,19	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.451.134.607,00	2.268.800.757,00	182.333.850,00	92,56	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.451.134.607,00	2.268.800.757,00	182.333.850,00	92,56	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.451.134.607,00	2.268.800.757,00	182.333.850,00	92,56	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.230.000,00	106.290.000,00	75.940.000,00	58,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	182.230.000,00	106.290.000,00	75.940.000,00	58,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	168.730.000,00	94.590.000,00	74.140.000,00	56,06	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	11.700.000,00	1.800.000,00	86,67	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.996.700,00	287.008.431,00	21.988.269,00	92,88	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	73,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	73,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	73,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.862.500,00	72.747.400,00	15.115.100,00	82,80	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	87.862.500,00	72.747.400,00	15.115.100,00	82,80	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.862.500,00	72.747.400,00	15.115.100,00	82,80	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.030.000,00	17.871.150,00	2.158.850,00	89,22	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	20.030.000,00	17.871.150,00	2.158.850,00	89,22	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.030.000,00	17.871.150,00	2.158.850,00	89,22	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	8.600.000,00	400.000,00	95,56	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.600.000,00	400.000,00	95,56	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.600.000,00	400.000,00	95,56	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.604.200,00	182.289.881,00	2.314.319,00	98,75	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	184.604.200,00	182.289.881,00	2.314.319,00	98,75	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.604.200,00	182.289.881,00	2.314.319,00	98,75	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.320.000,00	1.072.316.249,00	15.003.751,00	98,62	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	46.638.386,00	10.361.614,00	81,82	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	46.638.386,00	10.361.614,00		
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	46.638.386,00	10.361.614,00	81,82	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.320.000,00	1.025.677.863,00	4.642.137,00	99,55	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.030.320.000,00	1.025.677.863,00	4.642.137,00	99,55	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.320.000,00	1.025.677.863,00	4.642.137,00	99,55	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.197.100,00	350.290.999,00	44.906.101,00	88,64	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.750.000,00	63.291.729,00	14.458.271,00	81,40	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	77.750.000,00	63.291.729,00	14.458.271,00	81,40	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.750.000,00	63.291.729,00	14.458.271,00	81,40	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.707.250,00	97.707.590,00	23.999.660,00	80,28	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	121.707.250,00	97.707.590,00	23.999.660,00	80,28	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.707.250,00	97.707.590,00	23.999.660,00	80,28	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.010.000,00	15.410.000,00	1.600.000,00	90,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	17.010.000,00	15.410.000,00	1.600.000,00	90,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.010.000,00	15.410.000,00	1.600.000,00	90,59	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.729.850,00	173.881.680,00	4.848.170,00	97,29	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	170.829.850,00	166.054.680,00	4.775.170,00	97,20	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.149.850,00	165.374.680,00	4.775.170,00	97,19	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009	05.02	BELANJA MODAL	7.900.000,00	7.827.000,00	73.000,00	99,08	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.900.000,00	7.827.000,00	73.000,00	99,08	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.624.355.650,00	791.541.486,00	832.814.164,00	48,73	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	204.102.600,00	102.056.700,00	102.045.900,00	50,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	204.102.600,00	102.056.700,00	102.045.900,00	50,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	158.591.600,00	56.545.700,00	102.045.900,00	35,65	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.591.600,00	56.545.700,00	102.045.900,00	35,65	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01.0004	05.02	BELANJA MODAL	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	100,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	100,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	913.143.800,00	340.506.970,00	572.636.830,00	37,29	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.223.000,00	54.409.000,00	20.814.000,00	72,33	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0010	05.01	BELANJA OPERASI	75.223.000,00	54.409.000,00	20.814.000,00	72,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.223.000,00	54.409.000,00	20.814.000,00	72,33	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	599.068.800,00	207.532.810,00	391.535.990,00	34,64	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0016	05.01	BELANJA OPERASI	599.068.800,00	207.532.810,00	391.535.990,00	34,64	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.068.800,00	207.532.810,00	391.535.990,00	34,64	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	238.852.000,00	78.565.160,00	160.286.840,00	32,89	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0017	05.01	BELANJA OPERASI	238.852.000,00	78.565.160,00	160.286.840,00	32,89	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.852.000,00	78.565.160,00	160.286.840,00	32,89	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	457.113.250,00	313.170.046,00	143.943.204,00	68,51	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	284.951.250,00	206.251.216,00	78.700.034,00	72,38	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	221.651.250,00	143.068.216,00	78.583.034,00	64,55	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.971.250,00	143.068.216,00	77.903.034,00	64,75	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003	05.02	BELANJA MODAL	63.300.000,00	63.183.000,00	117.000,00	99,82	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.300.000,00	63.183.000,00	117.000,00	99,82	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	172.162.000,00	106.918.830,00	65.243.170,00	62,10	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0009	05.01	BELANJA OPERASI	172.162.000,00	106.918.830,00	65.243.170,00	62,10	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.162.000,00	106.918.830,00	65.243.170,00	62,10	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.996.000,00	35.807.770,00	14.188.230,00	71,62	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	49.996.000,00	35.807.770,00	14.188.230,00	71,62	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.04.0010	05.01	BELANJA OPERASI	49.996.000,00	35.807.770,00	14.188.230,00	71,62	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.000,00	35.807.770,00	14.188.230,00	71,62	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.999.999.090,00	4.357.545.654,00	4.642.453.436,00	48,42	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.999.999.090,00	4.357.545.654,00	4.642.453.436,00	48,42	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.999.999.090,00	4.357.545.654,00	4.642.453.436,00	48,42	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	955.714.250,00	689.055.654,00	266.658.596,00	72,10	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.994.250,00	676.335.654,00	266.658.596,00	71,72	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001	05.02	BELANJA MODAL	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	4.375.794.840,00	45,60	
01.05	1.02.1.06.0.0.05.0000	1.05.04.2.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	4.375.794.840,00	45,60	
				JUMLAH	15.070.713.147,00	9.246.593.576,00	5.824.119.571,00	61,35	
				SURPLUS/DEFISIT	(15.070.713.147,00)	(9.246.593.576,00)	(5.824.119.571,00)	61,35	

LAMPIRAN I.3
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
 DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Organisasi : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		5	BELANJA	7.332.265.027,00	6.876.745.810,00	455.519.217,00	93,79	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.193.964.677,00	3.944.989.232,00	248.975.445,00	94,06	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.203.100,00	8.737.800,00	1.465.300,00	85,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.203.100,00	8.737.800,00	1.465.300,00	85,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	10.203.100,00	8.737.800,00	1.465.300,00	85,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.203.100,00	8.737.800,00	1.465.300,00	85,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.283.642.727,00	3.069.912.879,00	213.729.848,00	93,49	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.210.742.727,00	2.997.012.879,00	213.729.848,00	93,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.210.742.727,00	2.997.012.879,00	213.729.848,00	93,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.210.742.727,00	2.997.012.879,00	213.729.848,00	93,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00		
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.217.350,00	248.328.022,00	7.889.328,00	96,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.035.000,00	38.750.400,00	4.284.600,00	90,04	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	480.000,00	600.000,00		
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	480.000,00	600.000,00	44,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	41.955.000,00	38.270.400,00	3.684.600,00	91,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.955.000,00	38.270.400,00	3.684.600,00	91,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.167.100,00	52.908.850,00	1.258.250,00	97,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	49.667.100,00	48.663.100,00	1.004.000,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.667.100,00	48.663.100,00	1.004.000,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	05.02	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.245.750,00	254.250,00	94,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.245.750,00	254.250,00	94,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.208.000,00	4.207.400,00	600,00	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	4.208.000,00	4.207.400,00	600,00	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.208.000,00	4.207.400,00	600,00	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.307.250,00	143.961.372,00	2.345.878,00	98,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	146.307.250,00	143.961.372,00	2.345.878,00	98,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.307.250,00	143.961.372,00	2.345.878,00	98,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.475.500,00	9.379.500,00	96.000,00	98,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	9.475.500,00	9.379.500,00	96.000,00	98,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0005	05.02	BELANJA MODAL	9.475.500,00	9.379.500,00	96.000,00	98,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.475.500,00	9.379.500,00	96.000,00	98,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.710.000,00	509.139.849,00	10.570.151,00	97,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.950.000,00	50.649.208,00	7.300.792,00	87,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	57.950.000,00	50.649.208,00	7.300.792,00	87,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.950.000,00	50.649.208,00	7.300.792,00	87,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.760.000,00	458.490.641,00	3.269.359,00	99,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	461.760.000,00	458.490.641,00	3.269.359,00	99,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.760.000,00	458.490.641,00	3.269.359,00	99,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.716.000,00	99.491.182,00	15.224.818,00	86,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.150,00	22.919.871,00	12.080.279,00	65,49	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	35.000.150,00	22.919.871,00	12.080.279,00	65,49	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.150,00	22.919.871,00	12.080.279,00	65,49	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.128.800,00	20.378.111,00	2.750.689,00	88,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	23.128.800,00	20.378.111,00	2.750.689,00	88,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.128.800,00	20.378.111,00	2.750.689,00	88,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.920.000,00	21.851.000,00	69.000,00	99,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	21.920.000,00	21.851.000,00	69.000,00	99,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.920.000,00	21.851.000,00	69.000,00	99,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.667.050,00	34.342.200,00	324.850,00	99,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	34.667.050,00	34.342.200,00	324.850,00	99,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.667.050,00	34.342.200,00	324.850,00	99,06	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	209.797.300,00	205.552.804,00	4.244.496,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	209.797.300,00	205.552.804,00	4.244.496,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54.207.000,00	51.695.000,00	2.512.000,00	95,37	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	54.207.000,00	51.695.000,00	2.512.000,00	95,37	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.207.000,00	51.695.000,00	2.512.000,00	95,37	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	84.520.300,00	83.398.104,00	1.122.196,00	98,67	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	84.520.300,00	83.398.104,00	1.122.196,00	98,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.520.300,00	83.398.104,00	1.122.196,00	98,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	71.070.000,00	70.459.700,00	610.300,00	99,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	71.070.000,00	70.459.700,00	610.300,00	99,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.070.000,00	70.459.700,00	610.300,00	99,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.336.478.300,00	1.292.489.454,00	43.988.846,00	96,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.336.478.300,00	1.292.489.454,00	43.988.846,00	96,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Makanan	108.559.000,00	108.490.000,00	69.000,00	99,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	108.559.000,00	108.490.000,00	69.000,00	99,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.559.000,00	28.490.000,00	69.000,00	99,76	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	169.090.000,00	137.853.860,00	31.236.140,00	81,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	169.090.000,00	137.853.860,00	31.236.140,00	81,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.590.000,00	117.853.860,00	13.736.140,00	89,56	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.500.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	53,33	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	70.910.000,00	65.151.300,00	5.758.700,00	91,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	70.910.000,00	65.151.300,00	5.758.700,00	91,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.910.000,00	65.151.300,00	5.758.700,00	91,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	987.919.300,00	980.994.294,00	6.925.006,00	99,30	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	987.919.300,00	980.994.294,00	6.925.006,00	99,30	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.919.300,00	530.994.294,00	6.925.006,00	98,71	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	62.217.900,00	60.803.100,00	1.414.800,00	97,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62.217.900,00	60.803.100,00	1.414.800,00	97,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.583.000,00	23.928.700,00	654.300,00	97,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.583.000,00	23.928.700,00	654.300,00	97,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.583.000,00	23.928.700,00	654.300,00	97,34	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	37.634.900,00	36.874.400,00	760.500,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	37.634.900,00	36.874.400,00	760.500,00	97,98	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.634.900,00	26.874.400,00	760.500,00	97,25	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	369.193.000,00	263.198.700,00	105.994.300,00	71,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	369.193.000,00	263.198.700,00	105.994.300,00	71,29	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2		3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002		Penyediaan Sandang	350.000.000,00	247.538.900,00	102.461.100,00	70,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	328.502.000,00	226.519.900,00	101.982.100,00	68,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.142.000,00	225.159.900,00	101.982.100,00	68,83	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	05.02	BELANJA MODAL	21.498.000,00	21.019.000,00	479.000,00	97,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.498.000,00	21.019.000,00	479.000,00	97,77	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	19.193.000,00	15.659.800,00	3.533.200,00	81,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	19.193.000,00	15.659.800,00	3.533.200,00	81,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.193.000,00	15.659.800,00	3.533.200,00	81,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	515.444.200,00	490.060.820,00	25.383.380,00	95,08	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	173.951.600,00	168.949.600,00	5.002.000,00	97,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	73.458.600,00	73.316.100,00	142.500,00	99,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	56.548.600,00	56.406.100,00	142.500,00	99,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.548.600,00	56.406.100,00	142.500,00	99,75	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002	05.02	BELANJA MODAL	16.910.000,00	16.910.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.910.000,00	16.910.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.493.000,00	95.633.500,00	4.859.500,00	95,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	100.493.000,00	95.633.500,00	4.859.500,00	95,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.493.000,00	95.633.500,00	4.859.500,00	95,16	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	341.492.600,00	321.111.220,00	20.381.380,00	94,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	341.492.600,00	321.111.220,00	20.381.380,00	94,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	341.492.600,00	321.111.220,00	20.381.380,00	94,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.492.600,00	321.111.220,00	20.381.380,00	94,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	45.302.700,00	44.009.200,00	1.293.500,00	97,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.302.700,00	44.009.200,00	1.293.500,00	97,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.302.700,00	44.009.200,00	1.293.500,00	97,14	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	40.502.700,00	39.209.200,00	1.293.500,00	96,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.502.700,00	39.209.200,00	1.293.500,00	96,81	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	05.02	BELANJA MODAL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	186.750.950,00	175.424.400,00	11.326.550,00	93,93	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	186.750.950,00	175.424.400,00	11.326.550,00	93,93	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	94.604.050,00	89.866.200,00	4.737.850,00	94,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	94.604.050,00	89.866.200,00	4.737.850,00	94,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.604.050,00	89.866.200,00	4.737.850,00	94,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.146.900,00	85.558.200,00	6.588.700,00	92,85	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	71.896.900,00	65.308.200,00	6.588.700,00	90,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.896.900,00	65.308.200,00	6.588.700,00	90,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	05.02	BELANJA MODAL	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	142.249.700,00	136.950.500,00	5.299.200,00	96,27	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.265.400,00	64.065.600,00	2.199.800,00	96,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66.265.400,00	64.065.600,00	2.199.800,00	96,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	66.265.400,00	64.065.600,00	2.199.800,00	96,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.265.400,00	64.065.600,00	2.199.800,00	96,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.984.300,00	72.884.900,00	3.099.400,00	95,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	75.984.300,00	72.884.900,00	3.099.400,00	95,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006	05.01	BELANJA OPERASI	60.534.300,00	57.434.900,00	3.099.400,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.534.300,00	57.434.900,00	3.099.400,00	94,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006	05.02	BELANJA MODAL	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		UPTD PPA		270.866.300,00	263.267.600,00	7.598.700,00	97,19	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	57.807.100,00	50.441.800,00	7.365.300,00	87,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	57.807.100,00	50.441.800,00	7.365.300,00	87,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.807.100,00	50.441.800,00	7.365.300,00	87,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	35.006.400,00	29.941.800,00	5.064.600,00	85,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.006.400,00	29.941.800,00	5.064.600,00	85,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	22.800.700,00	20.500.000,00	2.300.700,00	89,91	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.800.700,00	20.500.000,00	2.300.700,00	89,91	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	213.059.200,00	212.825.800,00	233.400,00	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.059.200,00	212.825.800,00	233.400,00	99,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	213.059.200,00	212.825.800,00	233.400,00	99,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0006	05.01	BELANJA OPERASI	213.059.200,00	212.825.800,00	233.400,00	99,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.059.200,00	212.825.800,00	233.400,00	99,89	
				JUMLAH	7.332.265.027,00	6.876.745.810,00	455.519.217,00	93,79	
				SURPLUS/DEFISIT	(7.332.265.027,00)	(6.876.745.810,00)	(455.519.217,00)	93,79	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		5	BELANJA	14.356.219.481,00	13.184.849.279,00	1.171.370.202,00	91,84	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.640.712.875,00	7.176.095.231,00	464.617.644,00	93,92	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.997.000,00	26.124.600,00	3.872.400,00	87,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.997.000,00	26.124.600,00	3.872.400,00	87,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	29.997.000,00	26.124.600,00	3.872.400,00	87,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.997.000,00	26.124.600,00	3.872.400,00	87,09	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	446.274.235,00	94,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	446.274.235,00	94,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	446.274.235,00	94,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	446.274.235,00	94,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.298.750,00	69.996.750,00	12.302.000,00	85,05	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.018.750,00	7.996.750,00	22.000,00	99,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	8.018.750,00	7.996.750,00	22.000,00	99,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.018.750,00	7.996.750,00	22.000,00	99,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.250.000,00	56.295.000,00	7.955.000,00	87,62	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	64.250.000,00	56.295.000,00	7.955.000,00	87,62	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.250.000,00	56.295.000,00	7.955.000,00	87,62	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.030.000,00	5.705.000,00	4.325.000,00	56,88	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	10.030.000,00	5.705.000,00	4.325.000,00	56,88	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	5.705.000,00	4.325.000,00	56,88	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	82.830.991,00	2.169.009,00	97,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	82.830.991,00	2.169.009,00	97,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	82.830.991,00	2.169.009,00	97,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	82.830.991,00	2.169.009,00	97,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	278.993.500,00	125.645.988,00	153.347.512,00	45,04	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	178.999.500,00	99.792.048,00	79.207.452,00	55,75	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	99.000.000,00	61.750.000,00	37.250.000,00	62,37	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	61.750.000,00	37.250.000,00	62,37	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	1.750.000,00	37.250.000,00	4,49	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	79.999.500,00	38.042.048,00	41.957.452,00	47,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0016	05.01	BELANJA OPERASI	79.999.500,00	38.042.048,00	41.957.452,00	47,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.999.500,00	38.042.048,00	41.957.452,00	47,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	17.278.440,00	62.721.560,00	21,60	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	17.278.440,00	62.721.560,00	21,60	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	17.278.440,00	62.721.560,00	21,60	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	17.278.440,00	12.621.560,00	57,79	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	50.100.000,00	0,00	50.100.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	19.994.000,00	8.575.500,00	11.418.500,00	42,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04.0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	19.994.000,00	8.575.500,00	11.418.500,00	42,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04.0001	05.01	BELANJA OPERASI	19.994.000,00	8.575.500,00	11.418.500,00	42,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.000,00	8.575.500,00	11.418.500,00	42,89	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.065.922.000,00	1.912.010.995,00	153.911.005,00	92,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.600.000,00	20.000.000,00	4.600.000,00	81,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.600.000,00	20.000.000,00	4.600.000,00	81,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	20.000.000,00	4.600.000,00	81,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	24.600.000,00	20.000.000,00	4.600.000,00	81,30	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.250.000,00	80.148.060,00	30.101.940,00	72,70	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.260.000,00	70.158.060,00	30.101.940,00	69,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	100.260.000,00	70.158.060,00	30.101.940,00	69,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.260.000,00	70.158.060,00	30.101.940,00	69,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	66.003.065,00	96,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	66.003.065,00	96,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	66.003.065,00	96,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	66.003.065,00	96,45	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.030.000,00	20.824.000,00	53.206.000,00	28,13	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.030.000,00	15.024.000,00	6.000,00	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	15.030.000,00	15.024.000,00	6.000,00	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000,00	15.024.000,00	6.000,00	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00	64,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00	64,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00	64,44	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.320.000,00	0,00	49.320.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.694.344.806,00	3.361.197.670,00	333.147.136,00	90,98	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.114.439.600,00	1.047.260.214,00	67.179.386,00	93,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.114.439.600,00	1.047.260.214,00	67.179.386,00	93,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.114.439.600,00	1.047.260.214,00	67.179.386,00	93,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.919.600,00	1.045.740.214,00	37.179.386,00	96,57	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	45.822.906,00	34.733.500,00	11.089.406,00	75,80	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	45.822.906,00	34.733.500,00	11.089.406,00	75,80	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	45.822.906,00	34.733.500,00	11.089.406,00	75,80	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.822.906,00	34.733.500,00	11.089.406,00	75,80	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.982.600,00	25.446.600,00	4.536.000,00	84,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05.0006		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	29.982.600,00	25.446.600,00	4.536.000,00	84,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05.0006	05.01	BELANJA OPERASI	29.982.600,00	25.446.600,00	4.536.000,00	84,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.982.600,00	25.446.600,00	4.536.000,00	84,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.504.099.700,00	2.253.757.356,00	250.342.344,00	90,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06.0003		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.504.099.700,00	2.253.757.356,00	250.342.344,00	90,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06.0003	05.01	BELANJA OPERASI	2.504.099.700,00	2.253.757.356,00	250.342.344,00	90,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.679.700,00	2.253.757.356,00	246.922.344,00	90,13	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	649.975.500,00	595.873.495,00	54.102.005,00	91,68	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000,00	6.661.000,00	23.339.000,00	22,20	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01.0017		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	30.000.000,00	6.661.000,00	23.339.000,00	22,20	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01.0017	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	6.661.000,00	23.339.000,00	22,20	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	6.661.000,00	23.339.000,00	22,20	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	619.975.500,00	589.212.495,00	30.763.005,00	95,04	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	619.975.500,00	589.212.495,00	30.763.005,00	95,04	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	46.939.500,00	16.176.495,00	30.763.005,00	34,46	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.939.500,00	16.176.495,00	30.763.005,00	34,46	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003	05.02	BELANJA MODAL	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.270.800,00	14.025.900,00	12.244.900,00	53,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	26.270.800,00	14.025.900,00	12.244.900,00	53,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26.270.800,00	14.025.900,00	12.244.900,00	53,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	26.270.800,00	14.025.900,00	12.244.900,00	53,39	
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.270.800,00	14.025.900,00	12.244.900,00	53,39	
				JUMLAH	14.356.219.481,00	13.184.849.279,00	1.171.370.202,00	91,84	
				SURPLUS/DEFISIT	(14.356.219.481,00)	(13.184.849.279,00)	(1.171.370.202,00)	91,84	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	1.447.902.546,00	80,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.634.194,00	3.776.697.353,00	326.936.841,00	92,03	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.357.560,00	4.231.500,00	126.060,00	97,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.211.560,00	2.085.500,00	126.060,00	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.211.560,00	2.085.500,00	126.060,00	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.211.560,00	2.085.500,00	126.060,00	94,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.474.888.762,00	2.209.360.974,00	265.527.788,00	89,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.488.762,00	2.189.010.974,00	265.477.788,00	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.454.488.762,00	2.189.010.974,00	265.477.788,00	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.454.488.762,00	2.189.010.974,00	265.477.788,00	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.400.000,00	20.350.000,00	50.000,00	99,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.350.000,00	50.000,00	99,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.350.000,00	50.000,00	99,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.691.414,00	270.393.084,00	298.330,00	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.604.500,00	6.523.050,00	81.450,00	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	6.604.500,00	6.523.050,00	81.450,00	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.604.500,00	6.523.050,00	81.450,00	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.496.514,00	151.339.544,00	156.970,00	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	151.496.514,00	151.339.544,00	156.970,00	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.496.514,00	151.339.544,00	156.970,00	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	9.555.000,00	45.000,00	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.555.000,00	45.000,00	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.555.000,00	45.000,00	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.990.400,00	96.975.490,00	14.910,00	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	96.990.400,00	96.975.490,00	14.910,00	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.990.400,00	96.975.490,00	14.910,00	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.798.000,00	830.019.763,00	60.778.237,00	93,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.550.000,00	40.233.389,00	9.316.611,00	81,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	49.550.000,00	40.233.389,00	9.316.611,00	81,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	40.233.389,00	9.316.611,00	81,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	841.248.000,00	789.786.374,00	51.461.626,00	93,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	841.248.000,00	789.786.374,00	51.461.626,00	93,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.248.000,00	789.786.374,00	51.461.626,00	93,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.898.458,00	462.692.032,00	206.426,00	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.459.858,00	82.259.858,00	200.000,00	99,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	82.459.858,00	82.259.858,00	200.000,00	99,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.459.858,00	82.259.858,00	200.000,00	99,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.328.600,00	370.322.174,00	6.426,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	370.328.600,00	370.322.174,00	6.426,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.328.600,00	370.322.174,00	6.426,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	800.555.400,00	740.806.190,00	59.749.210,00	92,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	800.555.400,00	740.806.190,00	59.749.210,00	92,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	800.555.400,00	740.806.190,00	59.749.210,00	92,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	800.555.400,00	740.806.190,00	59.749.210,00	92,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.555.400,00	740.806.190,00	59.749.210,00	92,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.980.300,00	51.427.800,00	4.552.500,00	91,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	55.980.300,00	51.427.800,00	4.552.500,00	91,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.240.300,00	45.765.000,00	4.475.300,00	91,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	50.240.300,00	45.765.000,00	4.475.300,00	91,09	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.240.300,00	45.765.000,00	4.475.300,00	91,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	5.740.000,00	5.662.800,00	77.200,00	98,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	05.01	BELANJA OPERASI	5.740.000,00	5.662.800,00	77.200,00	98,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	5.662.800,00	77.200,00	98,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	93.000.900,00	62.495.380,00	30.505.520,00	67,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93.000.900,00	62.495.380,00	30.505.520,00	67,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0005		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	93.000.900,00	62.495.380,00	30.505.520,00	67,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	93.000.900,00	62.495.380,00	30.505.520,00	67,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.900,00	62.495.380,00	30.505.520,00	67,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	35.415.165,00	34.895.565,00	519.600,00	98,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	23.141.240,00	23.128.940,00	12.300,00	99,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	23.141.240,00	23.128.940,00	12.300,00	99,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	23.141.240,00	23.128.940,00	12.300,00	99,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.141.240,00	23.128.940,00	12.300,00	99,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.273.925,00	11.766.625,00	507.300,00	95,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02.0001		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12.273.925,00	11.766.625,00	507.300,00	95,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	12.273.925,00	11.766.625,00	507.300,00	95,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.273.925,00	11.766.625,00	507.300,00	95,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.775.000.180,00	774.620.751,00	1.000.379.429,00	43,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.775.000.180,00	774.620.751,00	1.000.379.429,00	43,64	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	850.032.680,00	318.108.932,00	531.923.748,00	37,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	05.01 BELANJA OPERASI	850.032.680,00	318.108.932,00	531.923.748,00	37,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.01 Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	50,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	848.672.680,00	317.428.932,00	531.243.748,00	37,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	924.967.500,00	456.511.819,00	468.455.681,00	49,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	05.01 BELANJA OPERASI	827.842.500,00	367.627.919,00	460.214.581,00	44,41	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	827.842.500,00	367.627.919,00	460.214.581,00	44,41	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	05.02 BELANJA MODAL	97.125.000,00	88.883.900,00	8.241.100,00	91,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.125.000,00	88.883.900,00	8.241.100,00	91,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	423.285.817,00	398.026.371,00	25.259.446,00	94,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	375.548.817,00	350.534.771,00	25.014.046,00	93,34	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	58.625.600,00	54.264.655,00	4.360.945,00	92,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	05.01 BELANJA OPERASI	58.625.600,00	54.264.655,00	4.360.945,00	92,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	58.625.600,00	54.264.655,00	4.360.945,00	92,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	221.703.950,00	206.380.966,00	15.322.984,00	93,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	05.01 BELANJA OPERASI	55.281.600,00	49.915.616,00	5.365.984,00	90,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.01 Belanja Pegawai	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	54.521.600,00	49.915.616,00	4.605.984,00	91,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	05.02 BELANJA MODAL	166.422.350,00	156.465.350,00	9.957.000,00	94,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.422.350,00	156.465.350,00	9.957.000,00	94,02	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	95.219.267,00	89.889.150,00	5.330.117,00	94,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	05.01 BELANJA OPERASI	31.955.760,00	31.795.000,00	160.760,00	99,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	31.955.760,00	31.795.000,00	160.760,00	99,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	05.02 BELANJA MODAL	63.263.507,00	58.094.150,00	5.169.357,00	91,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.263.507,00	58.094.150,00	5.169.357,00	91,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	47.737.000,00	47.491.600,00	245.400,00	99,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	47.737.000,00	47.491.600,00	245.400,00	99,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03.0003	05.01 BELANJA OPERASI	47.737.000,00	47.491.600,00	245.400,00	99,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03.0003	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	47.737.000,00	47.491.600,00	245.400,00	99,49	
			JUMLAH	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	1.447.902.546,00	80,13	
			SURPLUS/DEFISIT	(7.286.871.956,00)	(5.838.969.410,00)	(1.447.902.546,00)	80,13	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	307.126.698,00	93,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.133.161.636,00	3.874.986.950,00	258.174.686,00	93,75	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	2.576.313.936,00	2.390.152.603,00	186.161.333,00	92,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.993.936,00	2.368.552.603,00	173.441.333,00	93,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.541.993.936,00	2.368.552.603,00	173.441.333,00	93,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.541.993.936,00	2.368.552.603,00	173.441.333,00	93,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002		Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	34.320.000,00	21.600.000,00	12.720.000,00	62,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	34.320.000,00	21.600.000,00	12.720.000,00	62,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	34.320.000,00	21.600.000,00	12.720.000,00	62,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah	341.881.900,00	329.466.309,00	12.415.591,00	96,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.422.000,00	27.392.000,00	5.030.000,00	84,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	12.422.000,00	7.392.000,00	5.030.000,00	59,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.422.000,00	7.392.000,00	5.030.000,00	59,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	05.02	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.830.600,00	125.010.800,00	1.819.800,00	98,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	126.830.600,00	125.010.800,00	1.819.800,00	98,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.150.600,00	124.330.800,00	1.819.800,00	98,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.999.900,00	69.509.900,00	5.490.000,00	92,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	74.999.900,00	69.509.900,00	5.490.000,00	92,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.900,00	69.509.900,00	5.490.000,00	92,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.229.400,00	93.153.609,00	75.791,00	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	93.229.400,00	93.153.609,00	75.791,00	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.229.400,00	93.153.609,00	75.791,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.416.000,00	930.938.956,00	58.477.044,00	94,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	44.490.756,00	25.509.244,00	63,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	44.490.756,00	25.509.244,00	63,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	44.490.756,00	25.509.244,00	63,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.416.000,00	886.448.200,00	32.967.800,00	96,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	919.416.000,00	886.448.200,00	32.967.800,00	96,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.416.000,00	886.448.200,00	32.967.800,00	96,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.549.800,00	224.429.082,00	1.120.718,00	99,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.984.800,00	198.864.082,00	1.120.718,00	99,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	199.984.800,00	198.864.082,00	1.120.718,00	99,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	754.800,00	0,00	754.800,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.230.000,00	198.864.082,00	365.918,00	99,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	484.411.800,00	440.503.809,00	43.907.991,00	90,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	329.518.000,00	323.879.300,00	5.638.700,00	98,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	329.518.000,00	323.879.300,00	5.638.700,00	98,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	329.518.000,00	323.879.300,00	5.638.700,00	98,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.518.000,00	323.879.300,00	5.638.700,00	98,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	154.893.800,00	116.624.509,00	38.269.291,00	75,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	154.893.800,00	116.624.509,00	38.269.291,00	75,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007	05.01	BELANJA OPERASI	153.093.800,00	116.624.509,00	36.469.291,00	76,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.093.800,00	116.624.509,00	36.469.291,00	76,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007	05.02	BELANJA MODAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	170.436.000,00	165.603.079,00	4.832.921,00	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	170.436.000,00	165.603.079,00	4.832.921,00	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	170.436.000,00	165.603.079,00	4.832.921,00	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	170.436.000,00	165.603.079,00	4.832.921,00	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.436.000,00	165.603.079,00	4.832.921,00	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.475.900,00	24.264.800,00	211.100,00	99,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	24.475.900,00	24.264.800,00	211.100,00	99,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	24.475.900,00	24.264.800,00	211.100,00	99,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.475.900,00	24.264.800,00	211.100,00	99,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.475.900,00	24.264.800,00	211.100,00	99,14	
				JUMLAH	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	307.126.698,00	93,62	
				SURPLUS/DEFISIT	(4.812.485.336,00)	(4.505.358.638,00)	(307.126.698,00)	93,62	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000		5	BELANJA	8.076.151.984,00	6.804.049.687,00	1.272.102.297,00	84,25	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.824.236.384,00	4.548.924.831,00	275.311.553,00	94,29	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.359.000,00	43.353.000,00	6.000,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.359.000,00	43.353.000,00	6.000,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	43.359.000,00	43.353.000,00	6.000,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.359.000,00	43.353.000,00	6.000,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.866.884,00	2.892.325.883,00	202.541.001,00	93,46	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.072.666.884,00	2.870.125.883,00	202.541.001,00	93,41	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.072.666.884,00	2.870.125.883,00	202.541.001,00	93,41	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.072.666.884,00	2.870.125.883,00	202.541.001,00	93,41	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.060.500,00	212.025.479,00	6.035.021,00	97,23	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.499.500,00	500,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.499.500,00	500,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.499.500,00	500,00	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.130.000,00	32.013.360,00	1.116.640,00	96,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	33.130.000,00	32.013.360,00	1.116.640,00	96,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.130.000,00	32.013.360,00	1.116.640,00	96,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.113.000,00	59.071.000,00	42.000,00	99,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	59.113.000,00	59.071.000,00	42.000,00	99,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.113.000,00	59.071.000,00	42.000,00	99,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.482.500,00	22.481.800,00	700,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	22.482.500,00	22.481.800,00	700,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.482.500,00	22.481.800,00	700,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	41,67	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	41,67	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	41,67	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.635.000,00	87.959.819,00	675.181,00	99,24	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	88.635.000,00	87.959.819,00	675.181,00	99,24	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.635.000,00	87.959.819,00	675.181,00	99,24	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0001	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.425.560.000,00	1.358.861.724,00	66.698.276,00	95,32	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000,00	26.840.868,00	10.959.132,00	71,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	26.840.868,00	10.959.132,00	71,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	26.840.868,00	10.959.132,00	71,01	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.387.760.000,00	1.332.020.856,00	55.739.144,00	95,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.387.760.000,00	1.332.020.856,00	55.739.144,00	95,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.387.760.000,00	1.332.020.856,00	55.739.144,00	95,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.390.000,00	42.358.745,00	31.255,00	99,93	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.968.745,00	31.255,00	99,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.968.745,00	31.255,00	99,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.968.745,00	31.255,00	99,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	396.678.200,00	340.809.374,00	55.868.826,00	85,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	396.678.200,00	340.809.374,00	55.868.826,00	85,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0003		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	84.982.000,00	72.509.000,00	12.473.000,00	85,32	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	84.982.000,00	72.509.000,00	12.473.000,00	85,32	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.982.000,00	72.509.000,00	12.473.000,00	85,32	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	89.173.000,00	47.374.157,00	41.798.843,00	53,13	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	89.173.000,00	47.374.157,00	41.798.843,00	53,13	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.173.000,00	47.374.157,00	41.798.843,00	53,13	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	45.626.100,00	45.425.200,00	200.900,00	99,56	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	45.626.100,00	45.425.200,00	200.900,00	99,56	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.626.100,00	45.425.200,00	200.900,00	99,56	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0007		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.384.500,00	5.364.700,00	19.800,00	99,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	5.384.500,00	5.364.700,00	19.800,00	99,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.384.500,00	5.364.700,00	19.800,00	99,63	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23.019.800,00	23.001.800,00	18.000,00	99,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	23.019.800,00	23.001.800,00	18.000,00	99,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.019.800,00	23.001.800,00	18.000,00	99,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	59.999.900,00	59.743.300,00	256.600,00	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0013	05.01	BELANJA OPERASI	59.999.900,00	59.743.300,00	256.600,00	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.900,00	59.743.300,00	256.600,00	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	49.137.900,00	48.296.100,00	841.800,00	98,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0014	05.01	BELANJA OPERASI	49.137.900,00	48.296.100,00	841.800,00	98,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.137.900,00	48.296.100,00	841.800,00	98,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	39.355.000,00	39.095.117,00	259.883,00	99,34	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	05.01	BELANJA OPERASI	39.355.000,00	39.095.117,00	259.883,00	99,34	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.355.000,00	39.095.117,00	259.883,00	99,34	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	320.777.400,00	316.635.576,00	4.141.824,00	98,71	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	320.777.400,00	316.635.576,00	4.141.824,00	98,71	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	86.165.400,00	84.622.700,00	1.542.700,00	98,21	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	86.165.400,00	84.622.700,00	1.542.700,00	98,21	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.165.400,00	84.622.700,00	1.542.700,00	98,21	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	234.612.000,00	232.012.876,00	2.599.124,00	98,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	234.612.000,00	232.012.876,00	2.599.124,00	98,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.612.000,00	232.012.876,00	2.599.124,00	98,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	163.800.000,00	65.354.133,00	98.445.867,00	39,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.800.000,00	65.354.133,00	98.445.867,00	39,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	43.800.000,00	18.000.000,00	25.800.000,00	41,10	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0012	05.01	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	18.000.000,00	25.800.000,00	41,10	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	18.000.000,00	25.800.000,00	41,10	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000,00	47.354.133,00	72.645.867,00	39,46	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0013	05.01	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	47.354.133,00	72.645.867,00	39,46	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	47.354.133,00	72.645.867,00	39,46	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.743.060.000,00	1.001.949.773,00	741.110.227,00	57,48	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.000.000,00	644.761.773,00	441.238.227,00	59,37	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	108.161.600,00	31.838.400,00	77,26	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	108.161.600,00	31.838.400,00	77,26	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	108.161.600,00	31.838.400,00	77,26	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	496.000.000,00	287.231.500,00	208.768.500,00	57,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0010	05.01	BELANJA OPERASI	496.000.000,00	287.231.500,00	208.768.500,00	57,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.000.000,00	287.231.500,00	208.768.500,00	57,91	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000,00	56.400.000,00	93.600.000,00	37,60	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0011	05.01	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	56.400.000,00	93.600.000,00	37,60	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	56.400.000,00	93.600.000,00	37,60	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	88.794.673,00	11.205.327,00	88,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0012	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	88.794.673,00	11.205.327,00	88,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	88.794.673,00	11.205.327,00	88,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	104.174.000,00	95.826.000,00	52,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0014	05.01	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	104.174.000,00	95.826.000,00	52,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	104.174.000,00	95.826.000,00	52,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	129.000.000,00	94.800.000,00	34.200.000,00	73,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	129.000.000,00	94.800.000,00	34.200.000,00	73,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	94.800.000,00	34.200.000,00	73,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	94.800.000,00	34.200.000,00	73,49	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	252.810.000,00	122.088.000,00	130.722.000,00	48,29	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	1.800.000,00	11.700.000,00	13,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	1.800.000,00	11.700.000,00	13,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	1.800.000,00	11.700.000,00	13,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	223.510.000,00	116.825.000,00	106.685.000,00	52,27	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	223.510.000,00	116.825.000,00	106.685.000,00	52,27	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.510.000,00	116.825.000,00	106.685.000,00	52,27	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.800.000,00	3.463.000,00	12.337.000,00	21,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0008	05.01	BELANJA OPERASI	15.800.000,00	3.463.000,00	12.337.000,00	21,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	3.463.000,00	12.337.000,00	21,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	275.250.000,00	140.300.000,00	134.950.000,00	50,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0002	05.01	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	271.500.000,00	140.300.000,00	131.200.000,00	51,68	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0006	05.01	BELANJA OPERASI	271.500.000,00	140.300.000,00	131.200.000,00	51,68	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.500.000,00	140.300.000,00	131.200.000,00	51,68	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	627.600.000,00	530.376.000,00	97.224.000,00	84,51	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01.0018	05.01	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	327.600.000,00	239.100.000,00	88.500.000,00	72,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	156.000.000,00	120.600.000,00	35.400.000,00	77,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0005	05.01	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	120.600.000,00	35.400.000,00	77,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	120.600.000,00	35.400.000,00	77,31	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	171.600.000,00	118.500.000,00	53.100.000,00	69,06	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0006	05.01	BELANJA OPERASI	171.600.000,00	118.500.000,00	53.100.000,00	69,06	
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.600.000,00	118.500.000,00	53.100.000,00	69,06	
				JUMLAH	8.076.151.984,00	6.804.049.687,00	1.272.102.297,00	84,25	
				SURPLUS/DEFISIT	(8.076.151.984,00)	(6.804.049.687,00)	(1.272.102.297,00)	84,25	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	351.529.327,00	521.516.284,00	(169.986.957,00)	148,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000								
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	7.223.726.566,00	80,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.892.320.223,00	8.228.717.988,00	663.602.235,00	92,54	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.073.373,00	4.743.002.206,00	208.071.167,00	95,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.770.429.273,00	4.586.684.106,00	183.745.167,00	96,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	4.770.429.273,00	4.586.684.106,00	183.745.167,00	96,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.770.429.273,00	4.586.684.106,00	183.745.167,00	96,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.644.100,00	156.318.100,00	24.326.000,00	86,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	170.170.000,00	145.844.000,00	24.326.000,00	85,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	165.320.000,00	140.994.000,00	24.326.000,00	85,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	10.474.100,00	10.474.100,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.474.100,00	10.474.100,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.339.550,00	501.835.595,00	17.503.955,00	96,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.998.250,00	77.937.540,00	60.710,00	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	77.998.250,00	77.937.540,00	60.710,00	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.998.250,00	77.937.540,00	60.710,00	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.516.000,00	107.438.796,00	2.077.204,00	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	109.516.000,00	107.438.796,00	2.077.204,00	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.516.000,00	107.438.796,00	2.077.204,00	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.258.300,00	91.257.590,00	710,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	91.258.300,00	91.257.590,00	710,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.258.300,00	91.257.590,00	710,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000,00	19.800.000,00	195.000,00	99,02	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	19.995.000,00	19.800.000,00	195.000,00	99,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	19.800.000,00	195.000,00	99,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.572.000,00	205.401.669,00	15.170.331,00	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	220.572.000,00	205.401.669,00	15.170.331,00	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.572.000,00	205.401.669,00	15.170.331,00	93,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.089.800,00	337.762.540,00	269.327.260,00	55,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	607.089.800,00	337.762.540,00	269.327.260,00	55,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	05.01	BELANJA OPERASI	407.089.800,00	167.767.540,00	239.322.260,00	41,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.729.800,00	167.767.540,00	87.962.260,00	65,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	05.02	BELANJA MODAL	200.000.000,00	169.995.000,00	30.005.000,00	85,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	169.995.000,00	30.005.000,00	85,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.695.933.000,00	2.527.983.034,00	167.949.966,00	93,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	112.773.550,00	19.226.450,00	85,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	112.773.550,00	19.226.450,00	85,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	112.773.550,00	19.226.450,00	85,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.563.933.000,00	2.415.209.484,00	148.723.516,00	94,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	2.563.933.000,00	2.415.209.484,00	148.723.516,00	94,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.563.933.000,00	2.415.209.484,00	148.723.516,00	94,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.884.500,00	118.134.613,00	749.887,00	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.884.500,00	118.134.613,00	749.887,00	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	75.884.500,00	75.135.613,00	748.887,00	99,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.884.500,00	75.135.613,00	748.887,00	99,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	05.02	BELANJA MODAL	43.000.000,00	42.999.000,00	1.000,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	42.999.000,00	1.000,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.351.772.900,00	14.390.106.682,00	2.961.666.218,00	82,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.351.772.900,00	14.390.106.682,00	2.961.666.218,00	82,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.751.813.200,00	12.971.745.982,00	2.780.067.218,00	82,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	15.718.513.200,00	12.938.745.982,00	2.779.767.218,00	82,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.337.383.200,00	5.724.193.379,00	1.613.189.821,00	78,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.04	Belanja Subsidi	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	1.166.577.397,00	86,07	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	05.02	BELANJA MODAL	33.300.000,00	33.000.000,00	300.000,00	99,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	33.000.000,00	300.000,00	99,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.599.959.700,00	1.418.360.700,00	181.599.000,00	88,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003	05.01	BELANJA OPERASI	1.599.959.700,00	1.418.360.700,00	181.599.000,00	88,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.149.600,00	68.120.700,00	8.028.900,00	89,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.520.000.100,00	1.346.430.000,00	173.570.100,00	88,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	11.152.202.605,00	7.553.744.492,00	3.598.458.113,00	67,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10.728.459.405,00	7.131.299.426,00	3.597.159.979,00	66,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	10.728.459.405,00	7.131.299.426,00	3.597.159.979,00	66,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	05.01	BELANJA OPERASI	10.528.459.405,00	6.931.644.070,00	3.596.815.335,00	65,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.506.079.405,00	6.909.264.070,00	3.596.815.335,00	65,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	05.02	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.655.356,00	344.644,00	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.655.356,00	344.644,00	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	423.743.200,00	422.445.066,00	1.298.134,00	99,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13.0007		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	423.743.200,00	422.445.066,00	1.298.134,00	99,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13.0007	05.01	BELANJA OPERASI	423.743.200,00	422.445.066,00	1.298.134,00	99,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.663.200,00	418.365.066,00	1.298.134,00	99,69	
				JUMLAH	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	7.223.726.566,00	80,68	
				SURPLUS/DEFISIT	(37.044.766.401,00)	(29.651.052.878,00)	(7.393.713.523,00)	80,04	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000		5	BELANJA	4.883.941.821,00	4.500.610.915,00	383.330.906,00	92,15	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	584.998.047,00	552.135.375,00	32.862.672,00	94,38	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	584.998.047,00	552.135.375,00	32.862.672,00	94,38	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	584.998.047,00	552.135.375,00	32.862.672,00	94,38	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	284.815.647,00	263.767.200,00	21.048.447,00	92,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.415.647,00	263.767.200,00	17.648.447,00	93,73	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	05.02	BELANJA MODAL	300.182.400,00	288.368.175,00	11.814.225,00	96,06	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.182.400,00	288.368.175,00	11.814.225,00	96,06	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	59.990.900,00	48.557.600,00	11.433.300,00	80,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.990.900,00	48.557.600,00	11.433.300,00	80,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	59.990.900,00	48.557.600,00	11.433.300,00	80,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	52.455.900,00	41.357.600,00	11.098.300,00	78,84	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.455.900,00	41.357.600,00	11.098.300,00	78,84	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003	05.02	BELANJA MODAL	7.535.000,00	7.200.000,00	335.000,00	95,55	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.535.000,00	7.200.000,00	335.000,00	95,55	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.663.072.874,00	3.471.107.044,00	191.965.830,00	94,76	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.006.200,00	23.835.900,00	1.170.300,00	95,32	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.006.200,00	23.835.900,00	1.170.300,00	95,32	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	25.006.200,00	23.835.900,00	1.170.300,00	95,32	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.006.200,00	23.835.900,00	1.170.300,00	95,32	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.424.874,00	2.607.881.187,00	170.543.687,00	93,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.716.164.874,00	2.545.661.187,00	170.503.687,00	93,72	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.716.164.874,00	2.545.661.187,00	170.503.687,00	93,72	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.716.164.874,00	2.545.661.187,00	170.503.687,00	93,72	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.260.000,00	62.220.000,00	40.000,00	99,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	62.260.000,00	62.220.000,00	40.000,00	99,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	62.260.000,00	62.220.000,00	40.000,00	99,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.935.800,00	270.572.147,00	7.363.653,00	97,35	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.060.700,00	107.042.359,00	18.341,00	99,98	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	107.060.700,00	107.042.359,00	18.341,00	99,98	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.060.700,00	107.042.359,00	18.341,00	99,98	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.002.700,00	15.002.600,00	100,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	15.002.700,00	15.002.600,00	100,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.700,00	15.002.600,00	100,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	4.400.000,00	1.600.000,00	73,33	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.400.000,00	1.600.000,00	73,33	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.400.000,00	1.600.000,00	73,33	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.874.400,00	134.129.188,00	5.745.212,00	95,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	139.874.400,00	134.129.188,00	5.745.212,00	95,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.874.400,00	134.129.188,00	5.745.212,00	95,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.760.000,00	46.470.000,00	3.290.000,00	93,39	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.600.000,00	32.970.000,00	2.630.000,00	92,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0001	05.02	BELANJA MODAL	35.600.000,00	32.970.000,00	2.630.000,00	92,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	32.970.000,00	2.630.000,00	92,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.160.000,00	13.500.000,00	660.000,00	95,34	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	14.160.000,00	13.500.000,00	660.000,00	95,34	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.160.000,00	13.500.000,00	660.000,00	95,34	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.716.000,00	453.186.810,00	9.529.190,00	97,94	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.100.000,00	73.800.789,00	8.299.211,00	89,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	82.100.000,00	73.800.789,00	8.299.211,00	89,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.100.000,00	73.800.789,00	8.299.211,00	89,89	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.616.000,00	379.386.021,00	1.229.979,00	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	380.616.000,00	379.386.021,00	1.229.979,00	99,68	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.616.000,00	379.386.021,00	1.229.979,00	99,68	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.230.000,00	69.161.000,00	69.000,00	99,90	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.600.000,00	53.531.000,00	69.000,00	99,87	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	53.600.000,00	53.531.000,00	69.000,00	99,87	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	53.531.000,00	69.000,00	99,87	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	103.939.000,00	99.976.846,00	3.962.154,00	96,19	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	103.939.000,00	99.976.846,00	3.962.154,00	96,19	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	103.939.000,00	99.976.846,00	3.962.154,00	96,19	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	103.939.000,00	99.976.846,00	3.962.154,00	96,19	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.899.000,00	99.976.846,00	1.922.154,00	98,11	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	79.984.000,00	42.129.700,00	37.854.300,00	52,67	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.984.000,00	42.129.700,00	37.854.300,00	52,67	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	79.984.000,00	42.129.700,00	37.854.300,00	52,67	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	79.984.000,00	42.129.700,00	37.854.300,00	52,67	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.984.000,00	42.129.700,00	37.854.300,00	52,67	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	391.957.000,00	286.704.350,00	105.252.650,00	73,15	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	391.957.000,00	286.704.350,00	105.252.650,00	73,15	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	75.634.000,00	44.325.400,00	31.308.600,00	58,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	75.634.000,00	44.325.400,00	31.308.600,00	58,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.634.000,00	44.325.400,00	31.308.600,00	58,61	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	227.666.000,00	185.784.650,00	41.881.350,00	81,60	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	227.666.000,00	185.784.650,00	41.881.350,00	81,60	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.666.000,00	185.784.650,00	41.881.350,00	81,60	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	88.657.000,00	56.594.300,00	32.062.700,00	63,84	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	88.657.000,00	56.594.300,00	32.062.700,00	63,84	
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.657.000,00	56.594.300,00	32.062.700,00	63,84	
				JUMLAH	4.883.941.821,00	4.500.610.915,00	383.330.906,00	92,15	
				SURPLUS/DEFISIT	(4.883.941.821,00)	(4.500.610.915,00)	(383.330.906,00)	92,15	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000		5	BELANJA	7.918.088.040,00	5.385.101.536,00	2.532.986.504,00	68,01	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.925.933.985,00	2.683.986.679,00	241.947.306,00	91,73	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.304.885,00	2.076.692.055,00	179.612.830,00	92,04	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.233.984.885,00	2.054.712.055,00	179.272.830,00	91,98	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.233.984.885,00	2.054.712.055,00	179.272.830,00	91,98	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.233.984.885,00	2.054.712.055,00	179.272.830,00	91,98	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.320.000,00	21.980.000,00	340.000,00	98,48	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	22.320.000,00	21.980.000,00	340.000,00	98,48	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.320.000,00	21.980.000,00	340.000,00	98,48	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.917.100,00	169.982.122,00	46.934.978,00	78,36	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.000,00	4.071.500,00	6.927.500,00	37,02	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	10.999.000,00	4.071.500,00	6.927.500,00	37,02	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.999.000,00	4.071.500,00	6.927.500,00	37,02	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.103.200,00	51.599.900,00	25.503.300,00	66,92	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	77.103.200,00	51.599.900,00	25.503.300,00	66,92	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.423.200,00	51.599.900,00	24.823.300,00	67,52	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.200,00	13.214.800,00	8.320.400,00	61,36	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	21.535.200,00	13.214.800,00	8.320.400,00	61,36	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.535.200,00	13.214.800,00	8.320.400,00	61,36	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.279.700,00	86.095.922,00	6.183.778,00	93,30	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	92.279.700,00	86.095.922,00	6.183.778,00	93,30	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.279.700,00	86.095.922,00	6.183.778,00	93,30	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.732.000,00	380.009.369,00	6.722.631,00	98,26	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	4.813.210,00	1.186.790,00	80,22	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.813.210,00	1.186.790,00	80,22	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.813.210,00	1.186.790,00	80,22	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.732.000,00	375.196.159,00	5.535.841,00	98,55	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	380.732.000,00	375.196.159,00	5.535.841,00	98,55	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.732.000,00	375.196.159,00	5.535.841,00	98,55	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.980.000,00	57.303.133,00	8.676.867,00	86,85	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.980.800,00	19.200,00	99,87	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.980.800,00	19.200,00	99,87	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.980.800,00	19.200,00	99,87	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.650.000,00	33.832.333,00	7.817.667,00	81,23	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	41.650.000,00	33.832.333,00	7.817.667,00	81,23	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	33.832.333,00	7.817.667,00	81,23	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000,00	8.490.000,00	840.000,00	91,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	9.330.000,00	8.490.000,00	840.000,00	91,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	8.490.000,00	840.000,00	91,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.851.960.955,00	2.590.645.597,00	2.261.315.358,00	53,39	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.604.000,00	50.393.200,00	25.210.800,00	66,65	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01.0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.604.000,00	50.393.200,00	25.210.800,00	66,65	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	75.604.000,00	50.393.200,00	25.210.800,00	66,65	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.604.000,00	50.393.200,00	25.210.800,00	66,65	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.776.356.955,00	2.540.252.397,00	2.236.104.558,00	53,18	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	185.359.800,00	155.393.887,00	29.965.913,00	83,83	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	185.359.800,00	155.393.887,00	29.965.913,00	83,83	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.359.800,00	155.393.887,00	29.965.913,00	83,83	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.590.997.155,00	2.384.858.510,00	2.206.138.645,00	51,95	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	472.914.700,00	378.818.637,00	94.096.063,00	80,10	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.520.000,00	6.840.000,00	3.680.000,00	65,02	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.394.700,00	371.978.637,00	90.416.063,00	80,45	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	2.112.042.582,00	48,71	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	2.112.042.582,00	48,71	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.193.100,00	39.686.260,00	506.840,00	98,74	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.193.100,00	39.686.260,00	506.840,00	98,74	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.193.100,00	39.686.260,00	506.840,00	98,74	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	23.742.900,00	23.236.260,00	506.640,00	97,87	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.742.900,00	23.236.260,00	506.640,00	97,87	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001	05.02	BELANJA MODAL	16.450.200,00	16.450.000,00	200,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.450.200,00	16.450.000,00	200,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	70.783.000,00	29.217.000,00	70,78	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	70.783.000,00	29.217.000,00	70,78	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100.000.000,00	70.783.000,00	29.217.000,00	70,78	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	70.783.000,00	29.217.000,00	70,78	
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	70.783.000,00	29.217.000,00	70,78	
				JUMLAH	7.918.088.040,00	5.385.101.536,00	2.532.986.504,00	68,01	
				SURPLUS/DEFISIT	(7.918.088.040,00)	(5.385.101.536,00)	(2.532.986.504,00)	68,01	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Organisasi : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000			PENDAPATAN DAERAH	245.100.000,00	24.720.000,00	220.380.000,00	10,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000								
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	2.904.014.529,00	91,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.136.777.257,00	4.687.529.771,00	449.247.486,00	91,25	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.205.000,00	86.371.400,00	25.833.600,00	76,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.740.000,00	48.172.800,00	1.567.200,00	96,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	49.740.000,00	48.172.800,00	1.567.200,00	96,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.740.000,00	48.172.800,00	1.567.200,00	96,85	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.465.000,00	38.198.600,00	24.266.400,00	61,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	62.465.000,00	38.198.600,00	24.266.400,00	61,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.465.000,00	38.198.600,00	24.266.400,00	61,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.463.955.357,00	3.240.553.868,00	223.401.489,00	93,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.377.555.357,00	3.168.713.868,00	208.841.489,00	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.377.555.357,00	3.168.713.868,00	208.841.489,00	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.377.555.357,00	3.168.713.868,00	208.841.489,00	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.400.000,00	71.840.000,00	14.560.000,00	83,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	86.400.000,00	71.840.000,00	14.560.000,00	83,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	86.400.000,00	71.840.000,00	14.560.000,00	83,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.034.900,00	249.853.280,00	16.181.620,00	93,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.420.000,00	16.407.500,00	12.500,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	16.420.000,00	16.407.500,00	12.500,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.420.000,00	16.407.500,00	12.500,00	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.011.600,00	95.020.000,00	5.991.600,00	94,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	101.011.600,00	95.020.000,00	5.991.600,00	94,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.011.600,00	95.020.000,00	5.991.600,00	94,07	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.475.300,00	28.585.000,00	4.890.300,00	85,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	33.475.300,00	28.585.000,00	4.890.300,00	85,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.475.300,00	28.585.000,00	4.890.300,00	85,39	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.128.000,00	84.840.780,00	287.220,00	99,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	85.128.000,00	84.840.780,00	287.220,00	99,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.128.000,00	84.840.780,00	287.220,00	99,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.113.092.000,00	964.151.540,00	148.940.460,00	86,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.500.000,00	243.412.407,00	87.087.593,00	73,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	330.500.000,00	243.412.407,00	87.087.593,00	73,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.500.000,00	243.412.407,00	87.087.593,00	73,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.592.000,00	720.739.133,00	61.852.867,00	92,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	782.592.000,00	720.739.133,00	61.852.867,00	92,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	782.592.000,00	720.739.133,00	61.852.867,00	92,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.490.000,00	146.599.683,00	34.890.317,00	80,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.050.000,00	30.610.721,00	439.279,00	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	31.050.000,00	30.610.721,00	439.279,00	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	30.610.721,00	439.279,00	98,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.750.000,00	55.565.962,00	10.184.038,00	84,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	65.750.000,00	55.565.962,00	10.184.038,00	84,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.750.000,00	55.565.962,00	10.184.038,00	84,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.800.000,00	30.960.000,00	840.000,00	97,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	31.800.000,00	30.960.000,00	840.000,00	97,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	30.960.000,00	840.000,00	97,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.890.000,00	29.463.000,00	23.427.000,00	55,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0010	05.01	BELANJA OPERASI	52.890.000,00	29.463.000,00	23.427.000,00	55,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.890.000,00	29.463.000,00	23.427.000,00	55,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20.846.006.200,00	19.208.409.155,00	1.637.597.045,00	92,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.846.006.200,00	19.208.409.155,00	1.637.597.045,00	92,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	20.846.006.200,00	19.208.409.155,00	1.637.597.045,00	92,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	20.816.606.200,00	19.179.019.155,00	1.637.587.045,00	92,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.000,00	2.040.000,00	240.000,00	89,47	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.814.326.200,00	19.176.979.155,00	1.637.347.045,00	92,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	05.02	BELANJA MODAL	29.400.000,00	29.390.000,00	10.000,00	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.400.000,00	29.390.000,00	10.000,00	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.216.013.452,00	5.403.046.094,00	812.967.358,00	86,92	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	6.216.013.452,00	5.403.046.094,00	812.967.358,00	86,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.307.924.952,00	3.628.054.200,00	679.870.752,00	84,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.442.174.952,00	2.850.624.662,00	591.550.290,00	82,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.950.000,00	9.350.000,00	2.600.000,00	78,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.224.952,00	2.841.274.662,00	588.950.290,00	82,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	05.02	BELANJA MODAL	865.750.000,00	777.429.538,00	88.320.462,00	89,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.750.000,00	579.441.500,00	86.308.500,00	87,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.988.038,00	2.011.962,00	98,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.908.088.500,00	1.774.991.894,00	133.096.606,00	93,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.269.088.500,00	1.152.777.094,00	116.311.406,00	90,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	123.560.000,00	122.840.000,00	720.000,00	99,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.528.500,00	1.029.937.094,00	115.591.406,00	89,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	05.02	BELANJA MODAL	639.000.000,00	622.214.800,00	16.785.200,00	97,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	639.000.000,00	622.214.800,00	16.785.200,00	97,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	140.110.000,00	135.907.360,00	4.202.640,00	97,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	40.110.000,00	39.939.700,00	170.300,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01.0001		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.110.000,00	39.939.700,00	170.300,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	40.110.000,00	39.939.700,00	170.300,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.110.000,00	39.939.700,00	170.300,00	99,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	95.967.660,00	4.032.340,00	95,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03.0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	95.967.660,00	4.032.340,00	95,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	95.967.660,00	4.032.340,00	95,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.967.660,00	4.032.340,00	95,97	
				JUMLAH	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	2.904.014.529,00	91,02	
				SURPLUS/DEFISIT	(32.093.806.909,00)	(29.410.172.380,00)	(2.683.634.529,00)	91,64	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Organisasi : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	6.736.053.598,00	59,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000								
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		5	BELANJA	16.311.342.401,00	10.846.652.071,00	5.464.690.330,00	66,50	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	684.000.000,00	663.887.984,00	20.112.016,00	97,06	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	212.610.000,00	211.211.400,00	1.398.600,00	99,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	212.610.000,00	211.211.400,00	1.398.600,00	99,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	05.01	BELANJA OPERASI	120.910.000,00	119.886.400,00	1.023.600,00	99,15	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.230.000,00	119.886.400,00	343.600,00	99,71	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	05.02	BELANJA MODAL	91.700.000,00	91.325.000,00	375.000,00	99,59	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.700.000,00	91.325.000,00	375.000,00	99,59	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.000.000,00	256.535.332,00	3.464.668,00	98,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	118.981.000,00	1.019.000,00	99,15	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.981.000,00	1.019.000,00	99,15	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.981.000,00	1.019.000,00	99,15	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.900.000,00	100.000,00	99,60	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	112.654.332,00	2.345.668,00	97,96	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	112.654.332,00	2.345.668,00	97,96	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	112.654.332,00	2.345.668,00	97,96	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.000.000,00	116.886.252,00	15.113.748,00	88,55	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	116.886.252,00	15.113.748,00	88,55	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	116.886.252,00	15.113.748,00	88,55	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	116.886.252,00	15.113.748,00	88,55	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.390.000,00	79.255.000,00	135.000,00	99,83	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.790.000,00	41.777.000,00	13.000,00	99,97	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	41.790.000,00	41.777.000,00	13.000,00	99,97	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.790.000,00	41.777.000,00	13.000,00	99,97	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000,00	37.478.000,00	122.000,00	99,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	37.600.000,00	37.478.000,00	122.000,00	99,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	37.478.000,00	122.000,00	99,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	289.580.000,00	272.543.100,00	17.036.900,00	94,12	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	289.580.000,00	272.543.100,00	17.036.900,00	94,12	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	289.580.000,00	272.543.100,00	17.036.900,00	94,12	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	270.276.000,00	253.239.100,00	17.036.900,00	93,70	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.276.000,00	153.413.500,00	16.862.500,00	90,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.825.600,00	174.400,00	99,83	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.195.809.500,00	1.134.189.900,00	61.619.600,00	94,85	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	523.483.100,00	504.850.800,00	18.632.300,00	96,44	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	523.483.100,00	504.850.800,00	18.632.300,00	96,44	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	509.233.100,00	490.600.800,00	18.632.300,00	96,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.553.100,00	332.591.400,00	15.961.700,00	95,42	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	160.000.000,00	157.329.400,00	2.670.600,00	98,33	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	672.326.400,00	629.339.100,00	42.987.300,00	93,61	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	672.326.400,00	629.339.100,00	42.987.300,00	93,61	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001	05.01	BELANJA OPERASI	668.022.400,00	625.035.100,00	42.987.300,00	93,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.022.400,00	625.035.100,00	42.987.300,00	93,56	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001	05.02	BELANJA MODAL	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.266.957.391,00	4.970.828.700,00	296.128.691,00	94,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.820.000,00	1.180.000,00	96,07	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.820.000,00	1.180.000,00	96,07	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.820.000,00	1.180.000,00	96,07	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.820.000,00	1.180.000,00	96,07	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.819.065.391,00	4.549.388.467,00	269.676.924,00	94,40	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.668.265.391,00	3.406.476.554,00	261.788.837,00	92,86	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0001	05.01 BELANJA OPERASI	3.668.265.391,00	3.406.476.554,00	261.788.837,00	92,86	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01 Belanja Pegawai	3.668.265.391,00	3.406.476.554,00	261.788.837,00	92,86	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.150.800.000,00	1.142.911.913,00	7.888.087,00	99,31	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0002	05.01 BELANJA OPERASI	1.150.800.000,00	1.142.911.913,00	7.888.087,00	99,31	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.01 Belanja Pegawai	37.000.000,00	36.730.000,00	270.000,00	99,27	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0002	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.113.800.000,00	1.106.181.913,00	7.618.087,00	99,32	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.892.000,00	392.620.233,00	25.271.767,00	93,95	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	417.892.000,00	392.620.233,00	25.271.767,00	93,95	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	05.01 BELANJA OPERASI	61.892.000,00	51.892.900,00	9.999.100,00	83,84	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.01 Belanja Pegawai	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	60.962.000,00	51.892.900,00	9.069.100,00	85,12	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	05.02 BELANJA MODAL	356.000.000,00	340.727.333,00	15.272.667,00	95,71	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.000.000,00	199.650.000,00	6.350.000,00	96,92	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	141.077.333,00	8.922.667,00	94,05	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7.638.000.110,00	3.189.301.235,00	4.448.698.875,00	41,76	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.570.000.000,00	377.030.464,00	4.192.969.536,00	8,25	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.200.000.000,00	190.639.764,00	4.009.360.236,00	4,54	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	05.01 BELANJA OPERASI	1.076.373.000,00	179.639.764,00	896.733.236,00	16,69	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1.01 Belanja Pegawai	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.066.303.000,00	179.639.764,00	886.663.236,00	16,85	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	05.02 BELANJA MODAL	3.123.627.000,00	11.000.000,00	3.112.627.000,00	0,35	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.430.000,00	11.000.000,00	430.000,00	96,24	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.112.197.000,00	0,00	3.112.197.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	88.102.500,00	181.897.500,00	32,63	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	05.01 BELANJA OPERASI	270.000.000,00	88.102.500,00	181.897.500,00	32,63	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	88.102.500,00	181.897.500,00	32,63	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	05.02 BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.288.200,00	1.711.800,00	98,29	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0009	05.01 BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.288.200,00	1.711.800,00	98,29	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0009	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.288.200,00	1.711.800,00	98,29	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.068.000.110,00	2.812.270.771,00	255.729.339,00	91,66	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.300.000.110,00	1.113.953.700,00	186.046.410,00	85,69	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	05.01 BELANJA OPERASI	1.272.005.300,00	1.086.103.700,00	185.901.600,00	85,39	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1.272.005.300,00	1.086.103.700,00	185.901.600,00	85,39	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	05.02 BELANJA MODAL	27.994.810,00	27.850.000,00	144.810,00	99,48	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.994.810,00	27.850.000,00	144.810,00	99,48	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.768.000.000,00	1.698.317.071,00	69.682.929,00	96,06	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	05.01	BELANJA OPERASI	647.334.400,00	606.474.885,00	40.859.515,00	93,69	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.254.400,00	602.394.885,00	40.859.515,00	93,65	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	05.02	BELANJA MODAL	1.120.665.600,00	1.091.842.186,00	28.823.414,00	97,43	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.665.600,00	144.858.000,00	24.807.600,00	85,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	951.000.000,00	946.984.186,00	4.015.814,00	99,58	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	465.204.100,00	390.864.100,00	74.340.000,00	84,02	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	465.204.100,00	390.864.100,00	74.340.000,00	84,02	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0003		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000,00	73.155.300,00	1.844.700,00	97,54	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.155.300,00	1.844.700,00	97,54	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.155.300,00	1.844.700,00	97,54	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	215.204.000,00	148.403.300,00	66.800.700,00	68,96	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	184.104.000,00	117.303.300,00	66.800.700,00	63,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.424.000,00	117.303.300,00	66.120.700,00	63,95	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	05.02	BELANJA MODAL	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	175.000.100,00	169.305.500,00	5.694.600,00	96,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	146.100.100,00	140.405.500,00	5.694.600,00	96,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.100.100,00	140.405.500,00	5.694.600,00	96,10	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007	05.02	BELANJA MODAL	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	771.791.300,00	225.037.052,00	546.754.248,00	29,16	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	580.000.000,00	90.064.525,00	489.935.475,00	15,53	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	430.000.000,00	38.155.945,00	391.844.055,00	8,87	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	401.890.000,00	38.155.945,00	363.734.055,00	9,49	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.890.000,00	38.155.945,00	363.734.055,00	9,49	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005	05.02	BELANJA MODAL	28.110.000,00	0,00	28.110.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.110.000,00	0,00	28.110.000,00	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	51.908.580,00	98.091.420,00	34,61	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	147.000.000,00	49.486.580,00	97.513.420,00	33,66	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	49.486.580,00	97.513.420,00	33,66	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006	05.02	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.422.000,00	578.000,00	80,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.422.000,00	578.000,00	80,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	191.791.300,00	134.972.527,00	56.818.773,00	70,37	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	191.791.300,00	134.972.527,00	56.818.773,00	70,37	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	160.862.600,00	105.170.527,00	55.692.073,00	65,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.862.600,00	105.170.527,00	55.692.073,00	65,38	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001	05.02	BELANJA MODAL	30.928.700,00	29.802.000,00	1.126.700,00	96,36	
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.928.700,00	29.802.000,00	1.126.700,00	96,36	
				JUMLAH	16.311.342.401,00	10.846.652.071,00	5.464.690.330,00	66,50	
				SURPLUS/DEFISIT	343.823.813,00	(927.539.455,00)	1.271.363.268,00	(269,77)	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000		5	BELANJA	7.120.529.717,00	6.676.487.735,00	444.041.982,00	93,76	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.607.783.617,00	3.350.668.790,00	257.114.827,00	92,87	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.099.900,00	29.078.400,00	21.500,00	99,93	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.099.900,00	29.078.400,00	21.500,00	99,93	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	29.099.900,00	29.078.400,00	21.500,00	99,93	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.099.900,00	29.078.400,00	21.500,00	99,93	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.873.153,00	2.103.768.266,00	177.104.887,00	92,24	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.673.153,00	2.081.988.266,00	176.684.887,00	92,18	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.258.673.153,00	2.081.988.266,00	176.684.887,00	92,18	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.258.673.153,00	2.081.988.266,00	176.684.887,00	92,18	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000,00	21.780.000,00	420.000,00	98,11	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	21.780.000,00	420.000,00	98,11	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.200.000,00	21.780.000,00	420.000,00	98,11	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.520.700,00	290.182.214,00	5.338.486,00	98,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.601.200,00	98.421.000,00	2.180.200,00	97,83	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	100.601.200,00	98.421.000,00	2.180.200,00	97,83	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.921.200,00	97.741.000,00	2.180.200,00	97,82	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.353.300,00	31.351.800,00	1.500,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	31.353.300,00	31.351.800,00	1.500,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.353.300,00	31.351.800,00	1.500,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	63,89	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	63,89	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	63,89	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.370.200,00	140.813.414,00	556.786,00	99,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	141.370.200,00	140.813.414,00	556.786,00	99,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.370.200,00	140.813.414,00	556.786,00	99,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.440.214,00	172.306.000,00	4.134.214,00	97,66	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.680.000,00	37.706.000,00	2.974.000,00	92,69	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002	05.01	BELANJA OPERASI	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002	05.02	BELANJA MODAL	40.000.000,00	37.026.000,00	2.974.000,00	92,57	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	37.026.000,00	2.974.000,00	92,57	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.760.214,00	134.600.000,00	1.160.214,00	99,15	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	12.499.000,00	12.400.000,00	99.000,00	99,21	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.099.000,00	9.000.000,00	99.000,00	98,91	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	123.261.214,00	122.200.000,00	1.061.214,00	99,14	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.261.214,00	122.200.000,00	1.061.214,00	99,14	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.900.000,00	640.942.520,00	53.957.480,00	92,24	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.500.000,00	99.033.875,00	21.466.125,00	82,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	120.500.000,00	99.033.875,00	21.466.125,00	82,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.500.000,00	99.033.875,00	21.466.125,00	82,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.400.000,00	541.908.645,00	32.491.355,00	94,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	574.400.000,00	541.908.645,00	32.491.355,00	94,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.400.000,00	541.908.645,00	32.491.355,00	94,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.949.650,00	114.391.390,00	16.558.260,00	87,36	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.479.850,00	52.479.850,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	52.479.850,00	52.479.850,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.479.850,00	52.479.850,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.470.000,00	12.130.000,00	16.340.000,00	42,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	28.470.000,00	12.130.000,00	16.340.000,00	42,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.470.000,00	12.130.000,00	16.340.000,00	42,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.800,00	49.781.540,00	218.260,00	99,56	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	49.999.800,00	49.781.540,00	218.260,00	99,56	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	760.000,00	680.000,00	80.000,00	89,47	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.239.800,00	49.101.540,00	138.260,00	99,72	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	409.353.600,00	347.380.745,00	61.972.855,00	84,86	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	409.353.600,00	347.380.745,00	61.972.855,00	84,86	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	49.999.000,00	36.814.000,00	13.185.000,00	73,63	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	49.999.000,00	36.814.000,00	13.185.000,00	73,63	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.000,00	36.814.000,00	13.185.000,00	73,63	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	113.300.000,00	86.909.231,00	26.390.769,00	76,71	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	61.870.000,00	37.209.231,00	24.660.769,00	60,14	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.870.000,00	37.209.231,00	24.660.769,00	60,14	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005	05.02	BELANJA MODAL	51.430.000,00	49.700.000,00	1.730.000,00	96,64	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.430.000,00	49.700.000,00	1.730.000,00	96,64	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	34.155.000,00	15.860.814,00	18.294.186,00	46,44	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	34.155.000,00	15.860.814,00	18.294.186,00	46,44	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.155.000,00	15.860.814,00	18.294.186,00	46,44	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media	11.899.800,00	11.664.000,00	235.800,00	98,02	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	11.899.800,00	11.664.000,00	235.800,00	98,02	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.899.800,00	11.664.000,00	235.800,00	98,02	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0012		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	149.999.800,00	148.257.700,00	1.742.100,00	98,84	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0012	05.01	BELANJA OPERASI	149.999.800,00	148.257.700,00	1.742.100,00	98,84	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	48.272.100,00	1.727.700,00	96,54	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.985.600,00	14.400,00	99,99	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.875.000,00	2.125.000,00	95,75	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013	05.01	BELANJA OPERASI	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013	05.02	BELANJA MODAL	44.575.000,00	42.450.000,00	2.125.000,00	95,23	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.575.000,00	42.450.000,00	2.125.000,00	95,23	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.021.657.700,00	2.908.084.000,00	113.573.700,00	96,24	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.808.660.000,00	2.741.640.500,00	67.019.500,00	97,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.808.660.000,00	2.741.640.500,00	67.019.500,00	97,61	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	2.768.170.000,00	2.701.280.500,00	66.889.500,00	97,58	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.768.170.000,00	2.701.280.500,00	66.889.500,00	97,58	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003	05.02	BELANJA MODAL	40.490.000,00	40.360.000,00	130.000,00	99,68	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.490.000,00	40.360.000,00	130.000,00	99,68	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	212.997.700,00	166.443.500,00	46.554.200,00	78,14	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	49.975.700,00	48.089.900,00	1.885.800,00	96,23	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0007	05.01	BELANJA OPERASI	49.975.700,00	48.089.900,00	1.885.800,00	96,23	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.975.700,00	48.089.900,00	1.885.800,00	96,23	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	163.022.000,00	118.353.600,00	44.668.400,00	72,60	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	05.01	BELANJA OPERASI	101.022.000,00	57.898.600,00	43.123.400,00	57,31	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.342.000,00	57.898.600,00	42.443.400,00	57,70	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	05.02	BELANJA MODAL	62.000.000,00	60.455.000,00	1.545.000,00	97,51	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.000.000,00	60.455.000,00	1.545.000,00	97,51	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.734.800,00	70.354.200,00	11.380.600,00	86,08	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	42.809.800,00	31.429.200,00	11.380.600,00	73,42	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	42.809.800,00	31.429.200,00	11.380.600,00	73,42	
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.809.800,00	31.429.200,00	11.380.600,00	73,42	
				JUMLAH	7.120.529.717,00	6.676.487.735,00	444.041.982,00	93,76	
				SURPLUS/DEFISIT	(7.120.529.717,00)	(6.676.487.735,00)	(444.041.982,00)	93,76	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.575.000,00	20.416.500,00	(1.841.500,00)	109,91	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000								
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		5	BELANJA	6.664.006.228,00	6.030.927.547,00	633.078.681,00	90,50	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.229.647.768,00	3.055.730.080,00	173.917.688,00	94,61	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.572.494.068,00	2.416.978.266,00	155.515.802,00	93,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.994.068,00	2.392.128.266,00	154.865.802,00	93,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.546.994.068,00	2.392.128.266,00	154.865.802,00	93,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.546.994.068,00	2.392.128.266,00	154.865.802,00	93,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.500.000,00	24.850.000,00	650.000,00	97,45	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	24.850.000,00	650.000,00	97,45	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	25.500.000,00	24.850.000,00	650.000,00	97,45	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.665.700,00	278.341.693,00	7.324.007,00	97,44	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.657.800,00	91.814.000,00	6.843.800,00	93,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	98.657.800,00	91.814.000,00	6.843.800,00	93,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.657.800,00	91.814.000,00	6.843.800,00	93,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.019.100,00	23.927.600,00	91.500,00	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	24.019.100,00	23.927.600,00	91.500,00	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.019.100,00	23.927.600,00	91.500,00	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.188.800,00	145.800.093,00	388.707,00	99,73	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	146.188.800,00	145.800.093,00	388.707,00	99,73	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.188.800,00	145.800.093,00	388.707,00	99,73	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.400.000,00	24.748.000,00	3.652.000,00	87,14	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000,00	24.748.000,00	3.652.000,00	87,14	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	14.650.000,00	11.850.000,00	2.800.000,00	80,89	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	11.850.000,00	2.400.000,00	83,16	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	13.750.000,00	12.898.000,00	852.000,00	93,80	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.750.000,00	12.898.000,00	852.000,00	93,80	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.088.000,00	335.662.121,00	7.425.879,00	97,84	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	30.983.241,00	7.016.759,00	81,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	30.983.241,00	7.016.759,00	81,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	30.983.241,00	7.016.759,00	81,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.088.000,00	304.678.880,00	409.120,00	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	305.088.000,00	304.678.880,00	409.120,00	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.088.000,00	304.678.880,00	409.120,00	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	98.610.100,00	95.967.094,00	2.643.006,00	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	98.610.100,00	95.967.094,00	2.643.006,00	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	98.610.100,00	95.967.094,00	2.643.006,00	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	98.610.100,00	95.967.094,00	2.643.006,00	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.610.100,00	95.967.094,00	2.643.006,00	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	185.515.800,00	176.137.763,00	9.378.037,00	94,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.515.800,00	176.137.763,00	9.378.037,00	94,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	185.515.800,00	176.137.763,00	9.378.037,00	94,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	185.515.800,00	176.137.763,00	9.378.037,00	94,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.515.800,00	176.137.763,00	9.378.037,00	94,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	404.673.093,00	85,51	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	404.673.093,00	85,51	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002		Pengembangan Usaha Mikro	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	404.673.093,00	85,51	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	404.673.093,00	85,51	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.206.952.560,00	1.802.279.467,00	404.673.093,00	81,66	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	577.000.000,00	577.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.000.000,00	56.187.400,00	1.812.600,00	96,87	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	56.187.400,00	1.812.600,00	96,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	56.187.400,00	1.812.600,00	96,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	56.187.400,00	1.812.600,00	96,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	56.187.400,00	1.812.600,00	96,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	86.818.000,00	84.130.979,00	2.687.021,00	96,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.818.000,00	84.130.979,00	2.687.021,00	96,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.818.000,00	84.130.979,00	2.687.021,00	96,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	86.818.000,00	84.130.979,00	2.687.021,00	96,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.778.000,00	84.130.979,00	647.021,00	99,24	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.286.000,00	157.507.264,00	8.778.736,00	94,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	166.286.000,00	157.507.264,00	8.778.736,00	94,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	83.393.000,00	83.271.000,00	122.000,00	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	83.393.000,00	83.271.000,00	122.000,00	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.393.000,00	83.271.000,00	122.000,00	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	82.893.000,00	74.236.264,00	8.656.736,00	89,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	82.893.000,00	74.236.264,00	8.656.736,00	89,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.213.000,00	74.236.264,00	7.976.736,00	90,30	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01.0004		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.896.000,00	17.707.500,00	29.188.500,00	37,76	
				JUMLAH	6.664.006.228,00	6.030.927.547,00	633.078.681,00	90,50	
				SURPLUS/DEFISIT	(6.645.431.228,00)	(6.010.511.047,00)	(634.920.181,00)	90,45	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000		5	BELANJA	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	2.632.221.633,00	94,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.632.387.810,00	27.541.898.300,00	1.090.489.510,00	96,19	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.166.750,00	83.250,00	99,73	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.166.750,00	83.250,00	99,73	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	31.250.000,00	31.166.750,00	83.250,00	99,73	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.166.750,00	83.250,00	99,73	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.362.986.414,00	9.877.851.128,00	485.135.286,00	95,32	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.270.586.414,00	9.785.621.128,00	484.965.286,00	95,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	10.270.586.414,00	9.785.621.128,00	484.965.286,00	95,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.270.586.414,00	9.785.621.128,00	484.965.286,00	95,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.400.000,00	92.230.000,00	170.000,00		
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	92.400.000,00	92.230.000,00	170.000,00	99,82	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	91.800.000,00	91.630.000,00	170.000,00	99,81	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.05.0003	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.359.474.400,00	2.319.950.693,00	39.523.707,00	98,32	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	751.734.400,00	750.241.141,00	1.493.259,00	99,80	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	751.734.400,00	750.241.141,00	1.493.259,00	99,80	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	2.460.000,00	1.360.000,00	1.100.000,00	55,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.274.400,00	748.881.141,00	393.259,00	99,95	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.470.000,00	108.362.250,00	107.750,00	99,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	108.470.000,00	108.362.250,00	107.750,00	99,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.470.000,00	108.362.250,00	107.750,00	99,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	789.610.000,00	752.330.624,00	37.279.376,00	95,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0008	05.01	BELANJA OPERASI	789.610.000,00	752.330.624,00	37.279.376,00	95,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.610.000,00	752.330.624,00	37.279.376,00	95,28	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	709.660.000,00	709.016.678,00	643.322,00	99,91	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	709.660.000,00	709.016.678,00	643.322,00	99,91	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.660.000,00	709.016.678,00	643.322,00	99,91	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.417.714.000,00	1.403.244.913,00	14.469.087,00	98,98	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.600.000,00	359.410.700,00	8.189.300,00	97,77	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	05.01	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	17.710.700,00	1.189.300,00	93,71	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.520.000,00	680.000,00	840.000,00	44,74	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	17.030.700,00	349.300,00	97,99	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	05.02	BELANJA MODAL	348.700.000,00	341.700.000,00	7.000.000,00	97,99	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	348.700.000,00	341.700.000,00	7.000.000,00	97,99	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	56.440.600,00	55.512.400,00	928.200,00	98,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005	05.01	BELANJA OPERASI	11.659.000,00	10.779.400,00	879.600,00	92,46	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.659.000,00	10.779.400,00	879.600,00	92,46	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005	05.02	BELANJA MODAL	44.781.600,00	44.733.000,00	48.600,00	99,89	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.781.600,00	44.733.000,00	48.600,00	99,89	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	993.673.400,00	988.321.813,00	5.351.587,00	99,46	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	246.220.000,00	244.750.702,00	1.469.298,00	99,40	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.860.000,00	243.390.702,00	1.469.298,00	99,40	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	747.453.400,00	743.571.111,00	3.882.289,00	99,48	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	747.453.400,00	743.571.111,00	3.882.289,00	99,48	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.587.653.170,00	4.554.228.646,00	33.424.524,00	99,27	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.810.000,00	441.667.797,00	18.142.203,00	96,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	459.810.000,00	441.667.797,00	18.142.203,00	96,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.810.000,00	441.667.797,00	18.142.203,00	96,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.127.843.170,00	4.112.560.849,00	15.282.321,00	99,63	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	4.127.843.170,00	4.112.560.849,00	15.282.321,00	99,63	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.127.843.170,00	4.112.560.849,00	15.282.321,00	99,63	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.909.510.500,00	5.815.747.364,00	93.763.136,00	98,41	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.775.000,00	474.968.555,00	1.806.445,00	99,62	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	476.775.000,00	474.968.555,00	1.806.445,00	99,62	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.775.000,00	474.968.555,00	1.806.445,00	99,62	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.787.198.000,00	4.702.573.570,00	84.624.430,00	98,23	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	4.787.198.000,00	4.702.573.570,00	84.624.430,00	98,23	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.670.000,00	2.040.000,00	630.000,00	76,40	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.784.528.000,00	4.700.533.570,00	83.994.430,00	98,24	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	16.900.000,00	16.761.000,00	139.000,00	99,18	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0005	05.01	BELANJA OPERASI	16.900.000,00	16.761.000,00	139.000,00	99,18	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	16.761.000,00	139.000,00	99,18	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	628.637.500,00	621.444.239,00	7.193.261,00	98,86	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	628.637.500,00	621.444.239,00	7.193.261,00	98,86	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.637.500,00	621.444.239,00	7.193.261,00	98,86	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.678.211.676,00	1.592.504.610,00	85.707.066,00	94,89	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.676,00	399.999.600,00	78.447.076,00	83,60	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0001	05.01	BELANJA OPERASI	478.446.676,00	399.999.600,00	78.447.076,00	83,60	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	478.446.676,00	399.999.600,00	78.447.076,00	83,60	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29.750.000,00	29.614.701,00	135.299,00	99,55	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0002	05.01	BELANJA OPERASI	29.750.000,00	29.614.701,00	135.299,00	99,55	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	29.614.701,00	135.299,00	99,55	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.170.015.000,00	1.162.890.309,00	7.124.691,00	99,39	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.170.015.000,00	1.162.890.309,00	7.124.691,00	99,39	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.015.000,00	1.162.890.309,00	7.124.691,00	99,39	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	523.345.250,00	523.013.763,00	331.487,00	99,94	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	523.345.250,00	523.013.763,00	331.487,00	99,94	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12.0001	05.01	BELANJA OPERASI	523.345.250,00	523.013.763,00	331.487,00	99,94	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.345.250,00	523.013.763,00	331.487,00	99,94	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	756.454.000,00	592.936.191,00	163.517.809,00	78,38	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.243.000,00	231.117.075,00	19.125.925,00	92,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	05.01	BELANJA OPERASI	248.393.000,00	229.817.075,00	18.575.925,00	92,52	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.713.000,00	229.137.075,00	18.575.925,00	92,50	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	05.02	BELANJA MODAL	1.850.000,00	1.300.000,00	550.000,00	70,27	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000,00	1.300.000,00	550.000,00	70,27	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	139.102.000,00	118.947.025,00	20.154.975,00	85,51	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002	05.01	BELANJA OPERASI	125.102.000,00	104.947.025,00	20.154.975,00	83,89	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.102.000,00	104.947.025,00	20.154.975,00	83,89	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002	05.02	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.849.000,00	104.407.621,00	67.441.379,00	60,76	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003	05.01	BELANJA OPERASI	165.849.000,00	98.407.621,00	67.441.379,00	59,34	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.849.000,00	98.407.621,00	67.441.379,00	59,34	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003	05.02	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0004		Konitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000,00	39.913.159,00	38.086.841,00	51,17	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0004	05.01	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	39.913.159,00	38.086.841,00	51,17	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	39.913.159,00	38.086.841,00	51,17	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117.260.000,00	98.551.311,00	18.708.689,00	84,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0005	05.01	BELANJA OPERASI	117.260.000,00	98.551.311,00	18.708.689,00	84,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.580.000,00	97.871.311,00	18.708.689,00	83,95	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.005.788.400,00	831.254.242,00	174.534.158,00	82,65	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	403.698.000,00	335.958.467,00	67.739.533,00	83,22	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001	05.01	BELANJA OPERASI	403.698.000,00	335.958.467,00	67.739.533,00	83,22	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.698.000,00	335.958.467,00	67.739.533,00	83,22	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	298.667.000,00	225.336.645,00	73.330.355,00	75,45	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0002	05.01	BELANJA OPERASI	298.667.000,00	225.336.645,00	73.330.355,00	75,45	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.667.000,00	225.336.645,00	73.330.355,00	75,45	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	303.423.400,00	269.959.130,00	33.464.270,00	88,97	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003	05.01	BELANJA OPERASI	294.213.400,00	262.609.130,00	31.604.270,00	89,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.213.400,00	262.609.130,00	31.604.270,00	89,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003	05.02	BELANJA MODAL	9.210.000,00	7.350.000,00	1.860.000,00	79,80	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.210.000,00	7.350.000,00	1.860.000,00	79,80	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.890.403.900,00	14.733.921.401,00	1.156.482.499,00	92,72	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01		strasi Tata Pemerintahan	775.599.500,00	726.346.347,00	49.253.153,00	93,65	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	152.265.800,00	151.302.611,00	963.189,00	99,37	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	130.365.800,00	129.402.611,00	963.189,00	99,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.365.800,00	129.402.611,00	963.189,00	99,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001	05.02	BELANJA MODAL	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	310.483.800,00	278.091.570,00	32.392.230,00	89,57	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	310.483.800,00	278.091.570,00	32.392.230,00	89,57	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.483.800,00	278.091.570,00	32.392.230,00	89,57	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	312.849.900,00	296.952.166,00	15.897.734,00	94,92	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	312.849.900,00	296.952.166,00	15.897.734,00	94,92	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.849.900,00	296.952.166,00	15.897.734,00	94,92	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.742.179.200,00	10.944.641.583,00	797.537.617,00	93,21	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.684.868.200,00	7.333.092.680,00	351.775.520,00	95,42	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	7.684.868.200,00	7.333.092.680,00	351.775.520,00	95,42	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.868.200,00	1.081.066.680,00	280.801.520,00	79,38	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	6.323.000.000,00	6.252.026.000,00	70.974.000,00	98,88	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	394.025.000,00	384.828.840,00	9.196.160,00	97,67	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	394.025.000,00	384.828.840,00	9.196.160,00	97,67	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.025.000,00	3.273.000,00	6.752.000,00	32,65	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	384.000.000,00	381.555.840,00	2.444.160,00	99,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.663.286.000,00	3.226.720.063,00	436.565.937,00	88,08	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	3.488.457.000,00	3.055.886.663,00	432.570.337,00	87,60	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	2.280.000,00	1.360.000,00	920.000,00	59,65	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.177.000,00	3.054.526.663,00	431.650.337,00	87,62	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	05.02	BELANJA MODAL	174.829.000,00	170.833.400,00	3.995.600,00	97,71	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.829.000,00	170.833.400,00	3.995.600,00	97,71	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	885.247.000,00	650.895.647,00	234.351.353,00	73,53	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	309.953.200,00	283.174.931,00	26.778.269,00	91,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	309.953.200,00	283.174.931,00	26.778.269,00	91,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.953.200,00	283.174.931,00	26.778.269,00	91,36	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	503.753.000,00	301.129.116,00	202.623.884,00	59,78	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	503.753.000,00	301.129.116,00	202.623.884,00	59,78	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.753.000,00	301.129.116,00	202.623.884,00	59,78	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	71.540.800,00	66.591.600,00	4.949.200,00	93,08	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	71.540.800,00	66.591.600,00	4.949.200,00	93,08	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.540.800,00	66.591.600,00	4.949.200,00	93,08	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.487.378.200,00	2.412.037.824,00	75.340.376,00	96,97	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.487.378.200,00	2.412.037.824,00	75.340.376,00	96,97	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.487.378.200,00	2.412.037.824,00	75.340.376,00	96,97	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.378.200,00	461.575.836,00	25.802.364,00	94,71	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.950.461.988,00	49.538.012,00	97,52	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.116.794.678,00	1.731.545.054,00	385.249.624,00	81,80	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	435.358.978,00	366.929.608,00	68.429.370,00	84,28	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	357.872.178,00	313.802.683,00	44.069.495,00	87,69	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	357.872.178,00	313.802.683,00	44.069.495,00	87,69	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.872.178,00	313.802.683,00	44.069.495,00	87,69	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	77.486.800,00	53.126.925,00	24.359.875,00	68,56	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	77.486.800,00	53.126.925,00	24.359.875,00	68,56	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.486.800,00	53.126.925,00	24.359.875,00	68,56	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	769.703.300,00	660.530.141,00	109.173.159,00	85,82	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	161.613.600,00	143.371.050,00	18.242.550,00	88,71	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	137.082.600,00	119.121.050,00	17.961.550,00	86,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.082.600,00	119.121.050,00	17.961.550,00	86,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001	05.02	BELANJA MODAL	24.531.000,00	24.250.000,00	281.000,00	98,85	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.531.000,00	24.250.000,00	281.000,00	98,85	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	142.204.800,00	131.459.839,00	10.744.961,00	92,44	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	142.204.800,00	131.459.839,00	10.744.961,00	92,44	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.204.800,00	131.459.839,00	10.744.961,00	92,44	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	465.884.900,00	385.699.252,00	80.185.648,00	82,79	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	465.884.900,00	385.699.252,00	80.185.648,00	82,79	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.884.900,00	385.699.252,00	80.185.648,00	82,79	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	791.633.400,00	656.757.005,00	134.876.395,00	82,96	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	272.555.400,00	256.907.655,00	15.647.745,00	94,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	272.555.400,00	256.907.655,00	15.647.745,00	94,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.555.400,00	256.907.655,00	15.647.745,00	94,26	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	350.642.000,00	294.586.036,00	56.055.964,00	84,01	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	346.521.000,00	294.586.036,00	51.934.964,00	85,01	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.521.000,00	294.586.036,00	51.934.964,00	85,01	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002	05.02	BELANJA MODAL	4.121.000,00	0,00	4.121.000,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.121.000,00	0,00	4.121.000,00	0,00	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	168.436.000,00	105.263.314,00	63.172.686,00	62,49	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	135.636.000,00	73.104.314,00	62.531.686,00	53,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.636.000,00	73.104.314,00	62.531.686,00	53,90	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003	05.02	BELANJA MODAL	32.800.000,00	32.159.000,00	641.000,00	98,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.800.000,00	32.159.000,00	641.000,00	98,05	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	120.099.000,00	47.328.300,00	72.770.700,00	39,41	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	120.099.000,00	47.328.300,00	72.770.700,00	39,41	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	120.099.000,00	47.328.300,00	72.770.700,00	39,41	
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.099.000,00	47.328.300,00	72.770.700,00	39,41	
				JUMLAH	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	2.632.221.633,00	94,36	
				SURPLUS/DEFISIT	(46.639.586.388,00)	(44.007.364.755,00)	(2.632.221.633,00)	94,36	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000		5	BELANJA	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.351.383.437,00	7.010.371.547,00	341.011.890,00	95,36	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.555.447.937,00	4.324.755.161,00	230.692.776,00	94,94	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.430.947.937,00	4.215.978.161,00	214.969.776,00	95,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	4.430.947.937,00	4.215.978.161,00	214.969.776,00	95,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.430.947.937,00	4.215.978.161,00	214.969.776,00	95,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.500.000,00	108.777.000,00	15.723.000,00	87,37	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	124.500.000,00	108.777.000,00	15.723.000,00	87,37	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	124.500.000,00	108.777.000,00	15.723.000,00	87,37	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	411.205.600,00	405.380.654,00	5.824.946,00	98,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	411.205.600,00	405.380.654,00	5.824.946,00	98,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05.0009	05.01	BELANJA OPERASI	411.205.600,00	405.380.654,00	5.824.946,00	98,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.205.600,00	405.380.654,00	5.824.946,00	98,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.727.500,00	1.082.593.404,00	4.134.096,00	99,62	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.500,00	12.995.620,00	4.880,00	99,96	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	13.000.500,00	12.995.620,00	4.880,00	99,96	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.500,00	12.995.620,00	4.880,00	99,96	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.641.000,00	8.100.657,00	540.343,00	93,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0003	05.01	BELANJA OPERASI	8.641.000,00	8.100.657,00	540.343,00	93,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.641.000,00	8.100.657,00	540.343,00	93,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.455.600,00	120.058.000,00	2.397.600,00	98,04	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	122.455.600,00	120.058.000,00	2.397.600,00	98,04	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.455.600,00	120.058.000,00	2.397.600,00	98,04	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.417.220,00	82.780,00	99,39	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.417.220,00	82.780,00	99,39	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.417.220,00	82.780,00	99,39	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	100,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	100,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.655.400,00	899.546.907,00	1.108.493,00	99,88	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	900.655.400,00	899.546.907,00	1.108.493,00	99,88	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.655.400,00	899.546.907,00	1.108.493,00	99,88	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.400.000,00	124.880.000,00	49.520.000,00	71,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.973.000,00	758.104.691,00	37.868.309,00	95,24	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.130.000,00	80.508.571,00	4.621.429,00	94,57	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	85.130.000,00	80.508.571,00	4.621.429,00	94,57	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.130.000,00	80.508.571,00	4.621.429,00	94,57	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.843.000,00	677.596.120,00	33.246.880,00	95,32	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	710.843.000,00	677.596.120,00	33.246.880,00	95,32	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	710.843.000,00	677.596.120,00	33.246.880,00	95,32	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.629.400,00	314.657.637,00	12.971.763,00	96,04	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.020.000,00	16.982.340,00	37.660,00	99,78	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	17.020.000,00	16.982.340,00	37.660,00	99,78	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.020.000,00	16.982.340,00	37.660,00	99,78	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.166.400,00	26.699.650,00	7.466.750,00	78,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	34.166.400,00	26.699.650,00	7.466.750,00	78,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.166.400,00	26.699.650,00	7.466.750,00	78,15	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.270.000,00	22.240.000,00	5.030.000,00	81,55	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	27.270.000,00	22.240.000,00	5.030.000,00	81,55	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.270.000,00	22.240.000,00	5.030.000,00	81,55	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.173.000,00	248.735.647,00	437.353,00	99,82	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	249.173.000,00	248.735.647,00	437.353,00	99,82	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.173.000,00	248.735.647,00	437.353,00	99,82	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.211.660.000,00	2.171.939.528,00	39.720.472,00	98,20	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.914.707.800,00	1.886.338.678,00	28.369.122,00	98,52	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	231.572.000,00	230.913.000,00	659.000,00	99,72	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	231.572.000,00	230.913.000,00	659.000,00	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.572.000,00	230.913.000,00	659.000,00	99,72	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	92.216.400,00	92.058.200,00	158.200,00	99,83	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	92.216.400,00	92.058.200,00	158.200,00	99,83	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.216.400,00	92.058.200,00	158.200,00	99,83	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	432.867.000,00	426.836.899,00	6.030.101,00	98,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	432.867.000,00	426.836.899,00	6.030.101,00	98,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	432.867.000,00	426.836.899,00	6.030.101,00	98,61	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	30.735.800,00	29.430.800,00	1.305.000,00	95,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	30.735.800,00	29.430.800,00	1.305.000,00	95,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.735.800,00	29.430.800,00	1.305.000,00	95,75	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	589.055.400,00	589.055.400,00	0,00	100,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	589.055.400,00	589.055.400,00	0,00	100,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.055.400,00	589.055.400,00	0,00	100,00	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	334.932.600,00	318.656.679,00	16.275.921,00	95,14	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	334.932.600,00	318.656.679,00	16.275.921,00	95,14	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.932.600,00	318.656.679,00	16.275.921,00	95,14	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	203.328.600,00	199.387.700,00	3.940.900,00	98,06	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	203.328.600,00	199.387.700,00	3.940.900,00	98,06	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.328.600,00	199.387.700,00	3.940.900,00	98,06	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	296.952.200,00	285.600.850,00	11.351.350,00	96,18	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	296.952.200,00	285.600.850,00	11.351.350,00	96,18	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	296.952.200,00	285.600.850,00	11.351.350,00	96,18	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.952.200,00	285.600.850,00	11.351.350,00	96,18	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	336.616.700,00	309.747.672,00	26.869.028,00	92,02	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	93.813.000,00	91.525.000,00	2.288.000,00	97,56	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	93.813.000,00	91.525.000,00	2.288.000,00	97,56	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	93.813.000,00	91.525.000,00	2.288.000,00	97,56	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.813.000,00	91.525.000,00	2.288.000,00	97,56	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	242.803.700,00	218.222.672,00	24.581.028,00	89,88	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20.123.000,00	15.177.000,00	4.946.000,00	75,42	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	20.123.000,00	15.177.000,00	4.946.000,00	75,42	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.123.000,00	15.177.000,00	4.946.000,00	75,42	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57.035.000,00	52.090.000,00	4.945.000,00	91,33	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	57.035.000,00	52.090.000,00	4.945.000,00	91,33	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.035.000,00	52.090.000,00	4.945.000,00	91,33	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.551.200,00	65.714.400,00	6.836.800,00	90,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	72.551.200,00	65.714.400,00	6.836.800,00	90,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.551.200,00	65.714.400,00	6.836.800,00	90,58	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	93.094.500,00	85.241.272,00	7.853.228,00	91,56	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	93.094.500,00	85.241.272,00	7.853.228,00	91,56	
06.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.094.500,00	85.241.272,00	7.853.228,00	91,56	
				JUMLAH	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	407.601.390,00	95,88	
				SURPLUS/DEFISIT	(9.899.660.137,00)	(9.492.058.747,00)	(407.601.390,00)	95,88	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000		5	BELANJA	9.502.580.380,00	9.010.005.452,00	492.574.928,00	94,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.878.729.130,00	5.588.597.725,00	290.131.405,00	95,06	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.002.611.080,00	3.731.751.755,00	270.859.325,00	93,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.875.011.080,00	3.604.811.755,00	270.199.325,00	93,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.875.011.080,00	3.604.811.755,00	270.199.325,00	93,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.875.011.080,00	3.604.811.755,00	270.199.325,00	93,03	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.600.000,00	126.940.000,00	660.000,00	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	127.600.000,00	126.940.000,00	660.000,00	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	127.500.000,00	126.840.000,00	660.000,00	99,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.372.700,00	356.024.879,00	347.821,00	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.999.000,00	1.000,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.999.000,00	1.000,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.999.000,00	1.000,00		
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.550.700,00	118.471.100,00	79.600,00	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	118.550.700,00	118.471.100,00	79.600,00	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.550.700,00	118.471.100,00	79.600,00	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.342.000,00	55.242.000,00	100.000,00	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	55.342.000,00	55.242.000,00	100.000,00	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.342.000,00	55.242.000,00	100.000,00	99,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.330.000,00	145.162.779,00	167.221,00	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	145.330.000,00	145.162.779,00	167.221,00	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.330.000,00	145.162.779,00	167.221,00	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.175.250,00	699.230.133,00	945.117,00	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.175.250,00	699.230.133,00	945.117,00	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011	05.01	BELANJA OPERASI	18.175.000,00	18.119.200,00	55.800,00	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.175.000,00	18.119.200,00	55.800,00	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011	05.02	BELANJA MODAL	682.000.250,00	681.110.933,00	889.317,00	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.000.250,00	451.420.933,00	579.317,00	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.070.100,00	654.941.218,00	11.128.882,00	98,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	326.748.100,00	319.403.669,00	7.344.431,00	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	319.420.000,00	319.403.669,00	16.331,00	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.420.000,00	319.403.669,00	16.331,00	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002	05.02	BELANJA MODAL	7.328.100,00	0,00	7.328.100,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.328.100,00	0,00	7.328.100,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.322.000,00	335.537.549,00	3.784.451,00	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	339.322.000,00	335.537.549,00	3.784.451,00	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.322.000,00	335.537.549,00	3.784.451,00	98,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.500.000,00	146.649.740,00	6.850.260,00	95,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.500.000,00	100.502.258,00	2.997.742,00	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	103.500.000,00	100.502.258,00	2.997.742,00	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	100.502.258,00	2.997.742,00	97,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	46.147.482,00	3.852.518,00	92,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.147.482,00	3.852.518,00	92,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.147.482,00	3.852.518,00	92,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.913.255.850,00	1.884.264.693,00	28.991.157,00	98,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	936.329.900,00	931.766.358,00	4.563.542,00	99,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	42.808.900,00	42.808.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	42.808.900,00	42.808.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.808.900,00	42.808.900,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	424.975.200,00	424.786.275,00	188.925,00	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	424.975.200,00	424.786.275,00	188.925,00	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.975.200,00	424.786.275,00	188.925,00	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	468.545.800,00	464.171.183,00	4.374.617,00	99,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	468.545.800,00	464.171.183,00	4.374.617,00	99,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.545.800,00	374.171.183,00	4.374.617,00	98,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	758.429.000,00	734.072.435,00	24.356.565,00	96,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	474.906.800,00	463.050.235,00	11.856.565,00	97,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	381.108.800,00	374.250.235,00	6.858.565,00	98,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.108.800,00	374.250.235,00	6.858.565,00	98,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	05.02	BELANJA MODAL	93.798.000,00	88.800.000,00	4.998.000,00	94,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.798.000,00	88.800.000,00	4.998.000,00	94,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0003		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	283.522.200,00	271.022.200,00	12.500.000,00	95,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	283.522.200,00	271.022.200,00	12.500.000,00	95,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.522.200,00	271.022.200,00	12.500.000,00	95,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	218.496.950,00	218.425.900,00	71.050,00	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	218.496.950,00	218.425.900,00	71.050,00	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	218.496.950,00	218.425.900,00	71.050,00	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.496.950,00	218.425.900,00	71.050,00	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	658.385.200,00	508.588.390,00	149.796.810,00	77,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	290.000.000,00	199.849.674,00	90.150.326,00	68,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000,00	52.510.193,00	47.489.807,00	52,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	52.510.193,00	47.489.807,00	52,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	52.510.193,00	47.489.807,00	52,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	190.000.000,00	147.339.481,00	42.660.519,00	77,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	166.000.000,00	123.341.481,00	42.658.519,00	74,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	123.341.481,00	42.658.519,00	74,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008	05.02	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.998.000,00	2.000,00	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.998.000,00	2.000,00	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	193.399.700,00	169.368.429,00	24.031.271,00	87,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	93.399.900,00	89.757.029,00	3.642.871,00	96,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	93.399.900,00	89.757.029,00	3.642.871,00	96,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.399.900,00	89.757.029,00	3.642.871,00	96,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	99.999.800,00	79.611.400,00	20.388.400,00	79,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0008	05.01	BELANJA OPERASI	99.999.800,00	79.611.400,00	20.388.400,00	79,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	79.611.400,00	20.388.400,00	79,61	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	174.985.500,00	139.370.287,00	35.615.213,00	79,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.995.500,00	83.940.102,00	16.055.398,00	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	99.995.500,00	83.940.102,00	16.055.398,00	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.995.500,00	83.940.102,00	16.055.398,00	83,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	74.990.000,00	55.430.185,00	19.559.815,00	73,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0008	05.01	BELANJA OPERASI	74.990.000,00	55.430.185,00	19.559.815,00	73,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.990.000,00	55.430.185,00	19.559.815,00	73,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	23.655.556,00	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	175.360.600,00	157.173.690,00	18.186.910,00	89,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01.0005		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	175.360.600,00	157.173.690,00	18.186.910,00	89,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01.0005	05.01	BELANJA OPERASI	175.360.600,00	157.173.690,00	18.186.910,00	89,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.360.600,00	121.173.690,00	18.186.910,00	86,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	516.190.400,00	513.228.370,00	2.962.030,00	99,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0003		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	241.463.200,00	241.260.200,00	203.000,00	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	241.463.200,00	241.260.200,00	203.000,00	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.463.200,00	192.260.200,00	203.000,00	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0010		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	274.727.200,00	271.968.170,00	2.759.030,00	99,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0010	05.01	BELANJA OPERASI	274.727.200,00	271.968.170,00	2.759.030,00	99,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.727.200,00	235.968.170,00	2.759.030,00	98,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	360.659.200,00	358.152.584,00	2.506.616,00	99,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	353.656.200,00	351.153.884,00	2.502.316,00	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	353.656.200,00	351.153.884,00	2.502.316,00	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.656.200,00	306.153.884,00	2.502.316,00	99,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	7.003.000,00	6.998.700,00	4.300,00	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0007	05.01	BELANJA OPERASI	7.003.000,00	6.998.700,00	4.300,00	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.003.000,00	6.998.700,00	4.300,00	99,94	
				JUMLAH	9.502.580.380,00	9.010.005.452,00	492.574.928,00	94,82	
				SURPLUS/DEFISIT	(9.502.580.380,00)	(9.010.005.452,00)	(492.574.928,00)	94,82	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.351.158.011,00	37.685.799.810,19	(2.334.641.799,19)	106,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.1.01	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	(96.258.510,24)	101,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	(2.238.383.288,95)	122,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.351.158.011,00	37.685.799.810,19	(2.334.641.799,19)	106,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000								
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	26.499.270.861,00	97,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	25.110.835.558,00	97,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	779.556.328.000,00	753.085.762.442,00	26.470.565.558,00	96,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000								
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	66.115.115.000,00	67.474.845.000,00	(1.359.730.000,00)	102,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000								
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	1.388.435.303,00	96,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	1.388.435.303,00	96,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	26.499.270.861,00	97,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000								
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	183.964.817,00	97,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000			JUMLAH PENDAPATAN	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	24.348.593.878,81	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000								
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		5	BELANJA	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	5.661.839.257,00	96,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.855.871.722,00	30.500.955.033,00	3.354.916.689,00	90,09	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.730.000,00	106.456.000,00	2.274.000,00	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.730.000,00	106.456.000,00	2.274.000,00	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	108.730.000,00	106.456.000,00	2.274.000,00	97,91	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.730.000,00	106.456.000,00	2.274.000,00	97,91
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.689.198.067,00	26.513.754.110,00	3.175.443.957,00	89,30
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.183.878.067,00	26.031.494.410,00	3.152.383.657,00	89,20
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	29.183.878.067,00	26.031.494.410,00	3.152.383.657,00	89,20
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	19.835.362.051,00	17.008.569.018,00	2.826.793.033,00	85,75
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.348.516.016,00	9.022.925.392,00	325.590.624,00	96,52
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	505.320.000,00	482.259.700,00	23.060.300,00	95,44
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	505.320.000,00	482.259.700,00	23.060.300,00	95,44
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	505.320.000,00	482.259.700,00	23.060.300,00	95,44
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	172.397.500,00	158.221.103,00	14.176.397,00	91,78
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	172.397.500,00	158.221.103,00	14.176.397,00	91,78
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	172.397.500,00	158.221.103,00	14.176.397,00	91,78
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.397.500,00	158.221.103,00	14.176.397,00	91,78
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.245.235.400,00	1.243.010.842,00	2.224.558,00	99,82
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	126.737.500,00	126.737.500,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	126.737.500,00	126.737.500,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.737.500,00	126.737.500,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.074.000,00	225.074.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	225.074.000,00	225.074.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.074.000,00	225.074.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.427.000,00	227.067.000,00	1.360.000,00	99,40
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	228.427.000,00	227.067.000,00	1.360.000,00	99,40
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.067.000,00	227.067.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.972.900,00	99.900.000,00	72.900,00	99,93
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	99.972.900,00	99.900.000,00	72.900,00	99,93
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.972.900,00	99.900.000,00	72.900,00	99,93
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.000.000,00	18.350.000,00	650.000,00	96,58
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.350.000,00	650.000,00	96,58
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.350.000,00	650.000,00	96,58
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.024.000,00	545.882.342,00	141.658,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	546.024.000,00	545.882.342,00	141.658,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.024.000,00	545.882.342,00	141.658,00	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	928.818.255,00	822.721.700,00	106.096.555,00	88,58
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	928.818.255,00	822.721.700,00	106.096.555,00	88,58
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	05.01	BELANJA OPERASI	161.207.000,00	160.018.200,00	1.188.800,00	99,26
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.127.000,00	155.938.200,00	1.188.800,00	99,24
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	05.02	BELANJA MODAL	767.611.255,00	662.703.500,00	104.907.755,00	86,33
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.611.255,00	662.703.500,00	104.907.755,00	86,33
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.304.000,00	1.357.773.478,00	54.530.522,00	96,14

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2		3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	793.632.000,00	751.473.494,00	42.158.506,00	94,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	793.632.000,00	751.473.494,00	42.158.506,00	94,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.632.000,00	751.473.494,00	42.158.506,00	94,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.672.000,00	606.299.984,00	12.372.016,00	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	618.672.000,00	606.299.984,00	12.372.016,00	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.672.000,00	606.299.984,00	12.372.016,00	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.188.500,00	299.017.800,00	170.700,00	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.738.500,00	189.573.800,00	164.700,00	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	189.738.500,00	189.573.800,00	164.700,00	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.738.500,00	189.573.800,00	164.700,00	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.450.000,00	109.444.000,00	6.000,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0010	05.01	BELANJA OPERASI	109.450.000,00	109.444.000,00	6.000,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.450.000,00	109.444.000,00	6.000,00	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	116.149.912.174,00	115.376.677.610,00	773.234.564,00	99,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.398.313.500,00	2.269.698.098,00	128.615.402,00	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	49.919.900,00	47.263.500,00	2.656.400,00	94,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	49.919.900,00	47.263.500,00	2.656.400,00	94,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.919.900,00	47.263.500,00	2.656.400,00	94,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.969.600,00	49.967.500,00	2.100,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	49.969.600,00	49.967.500,00	2.100,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.969.600,00	49.967.500,00	2.100,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	841.933.000,00	823.149.551,00	18.783.449,00	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	841.933.000,00	823.149.551,00	18.783.449,00	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.933.000,00	823.149.551,00	18.783.449,00	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	830.924.000,00	817.678.917,00	13.245.083,00	98,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	830.924.000,00	817.678.917,00	13.245.083,00	98,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.924.000,00	817.678.917,00	13.245.083,00	98,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	59.965.000,00	52.687.800,00	7.277.200,00	87,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	59.965.000,00	52.687.800,00	7.277.200,00	87,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.965.000,00	52.687.800,00	7.277.200,00	87,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	565.602.000,00	478.950.830,00	86.651.170,00	84,68	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0013	05.01	BELANJA OPERASI	565.602.000,00	478.950.830,00	86.651.170,00	84,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.602.000,00	478.950.830,00	86.651.170,00	84,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	950.000.000,00	896.490.872,00	53.509.128,00	94,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	390.251.000,00	386.513.235,00	3.737.765,00	99,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	390.251.000,00	386.513.235,00	3.737.765,00	99,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.251.000,00	386.513.235,00	3.737.765,00	99,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	137.903.000,00	131.834.697,00	6.068.303,00	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	137.903.000,00	131.834.697,00	6.068.303,00	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.903.000,00	131.834.697,00	6.068.303,00	95,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	89.967.200,00	86.740.400,00	3.226.800,00	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0006	05.01	BELANJA OPERASI	89.967.200,00	86.740.400,00	3.226.800,00	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.967.200,00	86.740.400,00	3.226.800,00	96,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108.220.000,00	107.331.440,00	888.560,00	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0007	05.01	BELANJA OPERASI	108.220.000,00	107.331.440,00	888.560,00	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.220.000,00	107.331.440,00	888.560,00	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	223.658.800,00	184.071.100,00	39.587.700,00	82,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0009	05.01	BELANJA OPERASI	223.658.800,00	184.071.100,00	39.587.700,00	82,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.658.800,00	184.071.100,00	39.587.700,00	82,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	399.975.000,00	208.206.500,00	191.768.500,00	52,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.118.500,00	22.938.200,00	180.300,00	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	23.118.500,00	22.938.200,00	180.300,00	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.118.500,00	22.938.200,00	180.300,00	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.358.600,00	71.196.700,00	9.161.900,00	88,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	80.358.600,00	71.196.700,00	9.161.900,00	88,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.358.600,00	71.196.700,00	9.161.900,00	88,60	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	55.964.000,00	48.810.400,00	7.153.600,00	87,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0005	05.01	BELANJA OPERASI	55.964.000,00	48.810.400,00	7.153.600,00	87,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.964.000,00	48.810.400,00	7.153.600,00	87,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	37.312.200,00	9.677.200,00	27.635.000,00	25,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0007	05.01	BELANJA OPERASI	37.312.200,00	9.677.200,00	27.635.000,00	25,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.312.200,00	9.677.200,00	27.635.000,00	25,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	112.140.000,00	43.947.500,00	68.192.500,00	39,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0010	05.01	BELANJA OPERASI	112.140.000,00	43.947.500,00	68.192.500,00	39,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.140.000,00	43.947.500,00	68.192.500,00	39,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.081.700,00	11.636.500,00	79.445.200,00	12,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0011	05.01	BELANJA OPERASI	91.081.700,00	11.636.500,00	79.445.200,00	12,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.081.700,00	11.636.500,00	79.445.200,00	12,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	112.401.623.674,00	112.002.282.140,00	399.341.534,00	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0009	05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	974.138.379,00	51,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	(574.796.845,00)	100,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0010	05.04	BELANJA TRANSFER	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	(574.796.845,00)	100,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.070.774,00	3.257.906.575,00	259.164.199,00	92,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.308.328.400,00	446.932.575,00	861.395.825,00	34,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.308.328.400,00	446.932.575,00	861.395.825,00	34,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	88.566.900,00	47.295.300,00	41.271.600,00	53,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	88.566.900,00	47.295.300,00	41.271.600,00	53,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.566.900,00	47.295.300,00	41.271.600,00	53,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	41.691.400,00	37.936.900,00	3.754.500,00	90,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	41.691.400,00	37.936.900,00	3.754.500,00	90,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.691.400,00	37.936.900,00	3.754.500,00	90,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	734.482.000,00	146.274.075,00	588.207.925,00	19,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	734.482.000,00	146.274.075,00	588.207.925,00	19,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.482.000,00	146.274.075,00	588.207.925,00	19,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	271.459.300,00	88.402.200,00	183.057.100,00	32,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0010	05.01	BELANJA OPERASI	271.459.300,00	88.402.200,00	183.057.100,00	32,57	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6,00	7
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.459.300,00	88.402.200,00	183.057.100,00	32,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.439.700,00	101.835.200,00	32.604.500,00	75,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0011	05.01	BELANJA OPERASI	134.439.700,00	101.835.200,00	32.604.500,00	75,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.439.700,00	101.835.200,00	32.604.500,00	75,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.689.100,00	25.188.900,00	12.500.200,00	66,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0012	05.01	BELANJA OPERASI	37.689.100,00	25.188.900,00	12.500.200,00	66,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.689.100,00	25.188.900,00	12.500.200,00	66,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.374.124.500,00	1.701.832.321,00	672.292.179,00	71,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.374.124.500,00	1.701.832.321,00	672.292.179,00	71,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	219.891.200,00	81.226.771,00	138.664.429,00	36,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	219.891.200,00	81.226.771,00	138.664.429,00	36,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.891.200,00	81.226.771,00	138.664.429,00	36,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	244.322.000,00	231.521.546,00	12.800.454,00	94,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	05.01	BELANJA OPERASI	15.322.000,00	15.021.546,00	300.454,00	98,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.962.000,00	13.661.546,00	300.454,00	97,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	05.02	BELANJA MODAL	229.000.000,00	216.500.000,00	12.500.000,00	94,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	216.500.000,00	216.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	548.706.400,00	482.740.548,00	65.965.852,00	87,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	548.706.400,00	482.740.548,00	65.965.852,00	87,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.706.400,00	482.740.548,00	65.965.852,00	87,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	102.077.600,00	54.056.496,00	48.021.104,00	52,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0011	05.01	BELANJA OPERASI	102.077.600,00	54.056.496,00	48.021.104,00	52,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.077.600,00	54.056.496,00	48.021.104,00	52,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	556.501.900,00	154.083.410,00	402.418.490,00	27,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0013	05.01	BELANJA OPERASI	556.501.900,00	154.083.410,00	402.418.490,00	27,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.501.900,00	154.083.410,00	402.418.490,00	27,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	702.625.400,00	698.203.550,00	4.421.850,00	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014	05.01	BELANJA OPERASI	602.625.400,00	598.858.550,00	3.766.850,00	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.625.400,00	598.858.550,00	3.766.850,00	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014	05.02	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.345.000,00	655.000,00	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.345.000,00	655.000,00	99,35	
				JUMLAH	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	5.661.839.257,00	96,32	
				SURPLUS/DEFISIT	780.759.195.219,00	762.072.440.597,19	18.686.754.621,81	97,61	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000		5	BELANJA	5.347.955.500,00	4.807.364.116,00	540.591.384,00	89,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.768.396.750,00	3.535.990.117,00	232.406.633,00	93,83	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.037.704.694,00	2.854.169.705,00	183.534.989,00	93,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.017.704.694,00	2.834.179.705,00	183.524.989,00	93,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.017.704.694,00	2.834.179.705,00	183.524.989,00	93,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.017.704.694,00	2.834.179.705,00	183.524.989,00	93,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.648.000,00	220.562.398,00	18.085.602,00	92,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.989.250,00	10.750,00	99,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.989.250,00	10.750,00	99,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.989.250,00	10.750,00	99,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.834.000,00	62.405.500,00	1.428.500,00	97,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	63.834.000,00	62.405.500,00	1.428.500,00	97,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.154.000,00	61.725.500,00	1.428.500,00	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	11.011.800,00	1.238.200,00	89,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	12.250.000,00	11.011.800,00	1.238.200,00	89,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	11.011.800,00	1.238.200,00	89,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00	98,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.564.000,00	127.355.848,00	208.152,00	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	127.564.000,00	127.355.848,00	208.152,00	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.564.000,00	127.355.848,00	208.152,00	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.080.056,00	401.918.579,00	25.161.477,00	94,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000,00	101.118.427,00	22.881.573,00	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	124.000.000,00	101.118.427,00	22.881.573,00	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	101.118.427,00	22.881.573,00	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.080.056,00	300.800.152,00	2.279.904,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	303.080.056,00	300.800.152,00	2.279.904,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.080.056,00	300.800.152,00	2.279.904,00	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.964.000,00	59.339.435,00	5.624.565,00	91,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.864.000,00	37.834.435,00	2.029.565,00	94,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	39.864.000,00	37.834.435,00	2.029.565,00	94,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.864.000,00	37.834.435,00	2.029.565,00	94,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.100.000,00	2.305.000,00	2.795.000,00	45,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	2.305.000,00	2.795.000,00	45,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	2.305.000,00	2.795.000,00	45,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.200.000,00	800.000,00	96,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.200.000,00	800.000,00	96,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	19.200.000,00	120.000,00	99,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.529.558.750,00	1.242.701.999,00	286.856.751,00	81,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	325.862.550,00	317.121.895,00	8.740.655,00	97,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	260.969.000,00	255.214.600,00	5.754.400,00	97,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	260.969.000,00	255.214.600,00	5.754.400,00	97,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.969.000,00	255.214.600,00	5.754.400,00	97,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.893.750,00	38.723.395,00	1.170.355,00	97,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0006	05.01	BELANJA OPERASI	39.893.750,00	38.723.395,00	1.170.355,00	97,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.893.750,00	38.723.395,00	1.170.355,00	97,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	24.999.800,00	23.183.900,00	1.815.900,00	92,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0011	05.01	BELANJA OPERASI	24.999.800,00	23.183.900,00	1.815.900,00	92,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800,00	23.183.900,00	1.815.900,00	92,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	623.131.300,00	465.108.764,00	158.022.536,00	74,64	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	510.062.000,00	364.297.964,00	145.764.036,00	71,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	510.062.000,00	364.297.964,00	145.764.036,00	71,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.062.000,00	364.297.964,00	145.764.036,00	71,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	113.069.300,00	100.810.800,00	12.258.500,00	89,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	113.069.300,00	100.810.800,00	12.258.500,00	89,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.069.300,00	100.810.800,00	12.258.500,00	89,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	550.565.000,00	447.382.240,00	103.182.760,00	81,26	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0003		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	266.884.800,00	208.404.740,00	58.480.060,00	78,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	266.884.800,00	208.404.740,00	58.480.060,00	78,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.884.800,00	208.404.740,00	58.480.060,00	78,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	283.680.200,00	238.977.500,00	44.702.700,00	84,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	283.680.200,00	238.977.500,00	44.702.700,00	84,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.680.200,00	238.977.500,00	44.702.700,00	84,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.900,00	13.089.100,00	16.910.800,00	43,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	29.999.900,00	13.089.100,00	16.910.800,00	43,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04.0007	05.01	BELANJA OPERASI	29.999.900,00	13.089.100,00	16.910.800,00	43,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	13.089.100,00	16.910.800,00	43,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.672.000,00	21.328.000,00	57,34	
				JUMLAH	5.347.955.500,00	4.807.364.116,00	540.591.384,00	89,89	
				SURPLUS/DEFISIT	(5.347.955.500,00)	(4.807.364.116,00)	(540.591.384,00)	89,89	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
			5	BELANJA	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	4.831.645.989,00	87,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.121.632.360,00	16.219.131.798,00	902.500.562,00	94,73	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.486.788.610,00	3.265.958.815,00	220.829.795,00	93,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.628.610,00	3.096.868.815,00	97.759.795,00	96,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.194.628.610,00	3.096.868.815,00	97.759.795,00	96,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.194.628.610,00	3.096.868.815,00	97.759.795,00	96,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.160.000,00	169.090.000,00	123.070.000,00	57,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	292.160.000,00	169.090.000,00	123.070.000,00	57,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	292.160.000,00	169.090.000,00	123.070.000,00	57,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.594.883.500,00	1.545.696.422,00	49.187.078,00	96,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.423.000,00	41.580.500,00	1.842.500,00	95,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	43.423.000,00	41.580.500,00	1.842.500,00	95,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.423.000,00	41.580.500,00	1.842.500,00	95,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.420.000,00	608.129.670,00	20.290.330,00	96,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	49.220.000,00	45.595.000,00	3.625.000,00	92,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	45.595.000,00	905.000,00	98,05	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	579.200.000,00	562.534.670,00	16.665.330,00	97,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.200.000,00	562.534.670,00	16.665.330,00		
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	404.867.500,00	395.424.000,00	9.443.500,00	97,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	404.867.500,00	395.424.000,00	9.443.500,00	97,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500,00	395.424.000,00	8.763.500,00	97,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.130.000,00	107.940.600,00	15.189.400,00	87,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	123.130.000,00	107.940.600,00	15.189.400,00	87,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.450.000,00	107.940.600,00	14.509.400,00	88,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000,00	118.581.000,00	1.419.000,00	98,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0006	05.01	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.581.000,00	1.419.000,00	98,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.581.000,00	1.419.000,00	98,82	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.043.000,00	274.040.652,00	1.002.348,00	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	275.043.000,00	274.040.652,00	1.002.348,00	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.043.000,00	274.040.652,00	1.002.348,00	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.090.000,00	1.196.797.577,00	105.292.423,00	91,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.250.000,00	117.697.551,00	7.552.449,00	93,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	125.250.000,00	117.697.551,00	7.552.449,00	93,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.250.000,00	117.697.551,00	7.552.449,00	93,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.840.000,00	1.079.100.026,00	97.739.974,00	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	1.176.840.000,00	1.079.100.026,00	97.739.974,00	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.840.000,00	1.079.100.026,00	97.739.974,00	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.862.000,00	455.953.503,00	15.908.497,00	96,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.807.000,00	198.617.464,00	7.189.536,00	96,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	205.807.000,00	198.617.464,00	7.189.536,00	96,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.807.000,00	198.617.464,00	7.189.536,00	96,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.475.000,00	63.736.519,00	1.738.481,00	97,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	65.475.000,00	63.736.519,00	1.738.481,00	97,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.475.000,00	63.736.519,00	1.738.481,00	97,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.150.000,00	45.340.900,00	5.809.100,00	88,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	51.150.000,00	45.340.900,00	5.809.100,00	88,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.150.000,00	45.340.900,00	5.809.100,00	88,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.430.000,00	148.258.620,00	1.171.380,00	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	149.430.000,00	148.258.620,00	1.171.380,00	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.750.000,00	148.258.620,00	491.380,00	99,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.263.452.250,00	8.901.534.811,00	361.917.439,00	96,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.074.542.250,00	8.715.424.211,00	359.118.039,00	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0001	05.01	BELANJA OPERASI	9.074.542.250,00	8.715.424.211,00	359.118.039,00	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.074.542.250,00	8.715.424.211,00	359.118.039,00	96,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	188.910.000,00	186.110.600,00	2.799.400,00	98,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0002	05.01	BELANJA OPERASI	188.910.000,00	186.110.600,00	2.799.400,00	98,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.230.000,00	186.110.600,00	2.119.400,00	98,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.002.556.000,00	853.190.670,00	149.365.330,00	85,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	981.010.000,00	849.996.500,00	131.013.500,00	86,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0001	05.01	BELANJA OPERASI	981.010.000,00	849.996.500,00	131.013.500,00	86,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.540.000,00	0,00	11.540.000,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.470.000,00	849.996.500,00	119.473.500,00	87,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	21.546.000,00	3.194.170,00	18.351.830,00	14,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0002	05.01	BELANJA OPERASI	21.546.000,00	3.194.170,00	18.351.830,00	14,82	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.546.000,00	3.194.170,00	18.351.830,00	14,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0004	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0004	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.858.043.650,00	18.928.898.223,00	3.929.145.427,00	82,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.459.967.600,00	1.642.255.975,00	817.711.625,00	66,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	332.378.000,00	304.172.200,00	28.205.800,00	91,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	332.378.000,00	304.172.200,00	28.205.800,00	91,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.378.000,00	304.172.200,00	28.205.800,00	91,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.534.204.000,00	1.319.019.075,00	215.184.925,00	85,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.534.204.000,00	1.319.019.075,00	215.184.925,00	85,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.204.000,00	1.319.019.075,00	215.184.925,00	85,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	593.385.600,00	19.064.700,00	574.320.900,00	3,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	593.385.600,00	19.064.700,00	574.320.900,00	3,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.385.600,00	19.064.700,00	574.320.900,00	3,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.077.522.800,00	838.952.133,00	238.570.667,00	77,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS	17.718.600,00	16.553.600,00	1.165.000,00	93,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	17.718.600,00	16.553.600,00	1.165.000,00	93,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.718.600,00	16.553.600,00	1.165.000,00	93,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.718.600,00	15.542.800,00	2.175.800,00	87,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	17.718.600,00	15.542.800,00	2.175.800,00	87,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.718.600,00	15.542.800,00	2.175.800,00	87,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD	328.769.000,00	175.421.300,00	153.347.700,00	53,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0003	05.01	BELANJA OPERASI	328.769.000,00	175.421.300,00	153.347.700,00	53,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.769.000,00	175.421.300,00	153.347.700,00	53,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perubahan	322.800.800,00	242.776.433,00	80.024.367,00	75,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0004	05.01	BELANJA OPERASI	322.800.800,00	242.776.433,00	80.024.367,00	75,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.800.800,00	242.776.433,00	80.024.367,00	75,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	390.515.800,00	388.658.000,00	1.857.800,00	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0006	05.01	BELANJA OPERASI	390.515.800,00	388.658.000,00	1.857.800,00	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.515.800,00	388.658.000,00	1.857.800,00	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.047.264.050,00	4.027.983.380,00	1.019.280.670,00	79,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.139.890.000,00	1.085.586.492,00	54.303.508,00	95,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.139.890.000,00	1.085.586.492,00	54.303.508,00	95,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.890.000,00	1.085.586.492,00	54.303.508,00	95,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.123.510.000,00	672.408.104,00	451.101.896,00	59,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.123.510.000,00	672.408.104,00	451.101.896,00	59,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.510.000,00	672.408.104,00	451.101.896,00	59,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	890.192.000,00	770.269.638,00	119.922.362,00	86,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0003	05.01	BELANJA OPERASI	890.192.000,00	770.269.638,00	119.922.362,00	86,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.192.000,00	770.269.638,00	119.922.362,00	86,53	

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1			2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	885.588.000,00	660.543.548,00	225.044.452,00	74,59
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0004	05.01	BELANJA OPERASI	885.588.000,00	660.543.548,00	225.044.452,00	74,59
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.588.000,00	660.543.548,00	225.044.452,00	74,59
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0005		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	779.406.000,00	639.679.498,00	139.726.502,00	82,07
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0005	05.01	BELANJA OPERASI	779.406.000,00	639.679.498,00	139.726.502,00	82,07
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.406.000,00	639.679.498,00	139.726.502,00	82,07
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	228.678.050,00	199.496.100,00	29.181.950,00	87,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0008	05.01	BELANJA OPERASI	228.678.050,00	199.496.100,00	29.181.950,00	87,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.678.050,00	199.496.100,00	29.181.950,00	87,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.077.775.800,00	1.728.638.467,00	1.349.137.333,00	56,17
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	328.630.000,00	240.026.352,00	88.603.648,00	73,04
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0001	05.01	BELANJA OPERASI	328.630.000,00	240.026.352,00	88.603.648,00	73,04
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.630.000,00	240.026.352,00	88.603.648,00	73,04
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	2.198.112.000,00	1.084.717.515,00	1.113.394.485,00	49,35
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0002	05.01	BELANJA OPERASI	2.198.112.000,00	1.084.717.515,00	1.113.394.485,00	49,35
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.112.000,00	1.084.717.515,00	1.113.394.485,00	49,35
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0004	05.01	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	260.000.000,00	225.000.000,00	35.000.000,00	86,54
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0005	05.01	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	225.000.000,00	35.000.000,00	86,54
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	225.000.000,00	35.000.000,00	86,54
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0007		Penyusunan Program Kerja DPRD	11.533.800,00	0,00	11.533.800,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0007	05.01	BELANJA OPERASI	11.533.800,00	0,00	11.533.800,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.533.800,00	0,00	11.533.800,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	239.500.000,00	178.894.600,00	60.605.400,00	74,70
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0008	05.01	BELANJA OPERASI	239.500.000,00	178.894.600,00	60.605.400,00	74,70
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.500.000,00	178.894.600,00	60.605.400,00	74,70
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.376.329.400,00	6.038.567.007,00	337.762.393,00	94,70
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0001		Punjungan Kerja dalam Daerah	3.465.902.000,00	3.441.167.007,00	24.734.993,00	99,29
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0001	05.01	BELANJA OPERASI	3.465.902.000,00	3.441.167.007,00	24.734.993,00	99,29
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.465.902.000,00	3.441.167.007,00	24.734.993,00	99,29
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses	2.910.427.400,00	2.597.400.000,00	313.027.400,00	89,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0003	05.01	BELANJA OPERASI	2.910.427.400,00	2.597.400.000,00	313.027.400,00	89,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.427.400,00	2.597.400.000,00	313.027.400,00	89,24
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	128.641.600,00	0,00	128.641.600,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0001		Penyusunan Kode Etik DPRD	99.959.000,00	0,00	99.959.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	99.959.000,00	0,00	99.959.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.959.000,00	0,00	99.959.000,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0002		Pengawasan Kode Etik DPRD	28.682.600,00	0,00	28.682.600,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	28.682.600,00	0,00	28.682.600,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.682.600,00	0,00	28.682.600,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	4.690.542.400,00	4.652.501.261,00	38.041.139,00	99,19
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.623.738.000,00	4.598.666.261,00	25.071.739,00	99,46
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0001	05.01	BELANJA OPERASI	4.623.738.000,00	4.598.666.261,00	25.071.739,00	99,46
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.623.738.000,00	4.598.666.261,00	25.071.739,00	99,46

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	66.804.400,00	53.835.000,00	12.969.400,00	80,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	12.804.400,00	0,00	12.804.400,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.804.400,00	0,00	12.804.400,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002	05.02	BELANJA MODAL	54.000.000,00	53.835.000,00	165.000,00	99,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.000.000,00	53.835.000,00	165.000,00	99,69	
				JUMLAH	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	4.831.645.989,00	87,91	
				SURPLUS/DEFISIT	(39.979.676.010,00)	(35.148.030.021,00)	(4.831.645.989,00)	87,91	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIBERUT UTARA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000		5	BELANJA	3.256.555.352,00	3.173.146.435,00	83.408.917,00	97,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.714.952,00	2.807.974.935,00	76.740.017,00	97,34	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.000,00	39.914.500,00	84.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.000,00	39.914.500,00	84.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	39.999.000,00	39.914.500,00	84.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.000,00	39.914.500,00	84.500,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.376.029.352,00	2.299.575.635,00	76.453.717,00	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.064.352,00	2.143.802.835,00	76.261.517,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.220.064.352,00	2.143.802.835,00	76.261.517,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.220.064.352,00	2.143.802.835,00	76.261.517,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.965.000,00	155.772.800,00	192.200,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	155.965.000,00	155.772.800,00	192.200,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	24.000.000,00	23.920.000,00	80.000,00	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.965.000,00	131.852.800,00	112.200,00	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.131.600,00	231.929.800,00	201.800,00	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.412.500,00	2.329.500,00	83.000,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.412.500,00	2.329.500,00	83.000,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.500,00	2.329.500,00	83.000,00	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.198.100,00	82.198.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	66.402.400,00	66.402.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.402.400,00	66.402.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004	05.02	BELANJA MODAL	15.795.700,00	15.795.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.795.700,00	15.795.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.001.000,00	144.882.200,00	118.800,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	145.001.000,00	144.882.200,00	118.800,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.001.000,00	144.882.200,00	118.800,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.555.000,00	44.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.095.000,00	28.095.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	28.095.000,00	28.095.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.095.000,00	28.095.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.434.000,00	81.389.000,00	45.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	81.434.000,00	81.389.000,00	45.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	81.434.000,00	81.389.000,00	45.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	75.434.000,00	75.389.000,00	45.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.434.000,00	75.389.000,00	45.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003	05.02	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77.082.400,00	76.830.000,00	252.400,00	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.082.400,00	76.830.000,00	252.400,00	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.007.400,00	40.755.000,00	252.400,00	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	41.007.400,00	40.755.000,00	252.400,00	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.007.400,00	40.755.000,00	252.400,00	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	135.115.000,00	134.950.000,00	165.000,00	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	135.115.000,00	134.950.000,00	165.000,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.115.000,00	34.950.000,00	165.000,00	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	35.115.000,00	34.950.000,00	165.000,00	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.115.000,00	34.950.000,00	165.000,00	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.209.000,00	72.002.500,00	6.206.500,00	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.209.000,00	72.002.500,00	6.206.500,00	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	78.209.000,00	72.002.500,00	6.206.500,00	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	78.209.000,00	72.002.500,00	6.206.500,00	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.209.000,00	72.002.500,00	6.206.500,00	92,06	
				JUMLAH	3.256.555.352,00	3.173.146.435,00	83.408.917,00	97,44	
				SURPLUS/DEFISIT	(3.256.555.352,00)	(3.173.146.435,00)	(83.408.917,00)	97,44	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIBERUT TENGAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000		5	BELANJA	2.350.524.531,00	2.247.048.903,00	103.475.628,00	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.061.478.828,00	1.965.282.203,00	96.196.625,00	95,33	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.990.000,00	69.750.000,00	240.000,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.990.000,00	69.750.000,00	240.000,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	69.990.000,00	69.750.000,00	240.000,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.990.000,00	69.750.000,00	240.000,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.489.412.848,00	1.395.502.003,00	93.910.845,00	93,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.316.775.848,00	1.225.116.903,00	91.658.945,00	93,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.316.775.848,00	1.225.116.903,00	91.658.945,00	93,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.316.775.848,00	1.225.116.903,00	91.658.945,00	93,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.637.000,00	170.385.100,00	2.251.900,00	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	172.637.000,00	170.385.100,00	2.251.900,00	98,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.237.000,00	155.985.100,00	2.251.900,00	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.473.500,00	197.821.200,00	1.652.300,00	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.500,00	9.978.000,00	14.500,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	9.992.500,00	9.978.000,00	14.500,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.500,00	9.978.000,00	14.500,00	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.200.000,00	700.000,00	92,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.200.000,00	700.000,00	92,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.200.000,00	700.000,00	92,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.581.000,00	108.643.200,00	937.800,00	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	109.581.000,00	108.643.200,00	937.800,00	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.581.000,00	108.643.200,00	937.800,00	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.202.480,00	57.089.000,00	113.480,00	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.219.000,00	32.200.000,00	19.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0002	05.02	BELANJA MODAL	32.219.000,00	32.200.000,00	19.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.219.000,00	32.200.000,00	19.000,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.983.480,00	24.889.000,00	94.480,00	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	1.344.480,00	1.300.000,00	44.480,00	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.480,00	1.300.000,00	44.480,00	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	23.639.000,00	23.589.000,00	50.000,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.639.000,00	23.589.000,00	50.000,00	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.400.000,00	245.120.000,00	280.000,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.720.000,00	280.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.720.000,00	280.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.720.000,00	280.000,00	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.400.000,00	239.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	239.400.000,00	239.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.400.000,00	239.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.995.603,00	63.525.000,00	470.603,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.995.603,00	63.525.000,00	470.603,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.995.603,00	63.525.000,00	470.603,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	63.995.603,00	63.525.000,00	470.603,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.995.603,00	63.525.000,00	470.603,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.159.600,00	60.538.700,00	6.620.900,00	90,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.349.600,00	33.044.000,00	6.305.600,00	83,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.349.600,00	33.044.000,00	6.305.600,00	83,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	39.349.600,00	33.044.000,00	6.305.600,00	83,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.349.600,00	33.044.000,00	6.305.600,00	83,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.810.000,00	27.494.700,00	315.300,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.810.000,00	27.494.700,00	315.300,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	27.810.000,00	27.494.700,00	315.300,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.810.000,00	27.494.700,00	315.300,00	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.987.500,00	79.800.000,00	187.500,00	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.987.500,00	79.800.000,00	187.500,00	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	79.987.500,00	79.800.000,00	187.500,00	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	79.987.500,00	79.800.000,00	187.500,00	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.987.500,00	79.800.000,00	187.500,00	99,77	
				JUMLAH	2.350.524.531,00	2.247.048.903,00	103.475.628,00	95,60	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.350.524.531,00)	(2.247.048.903,00)	(103.475.628,00)	95,60	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIBERUT BARAT

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000		5	BELANJA	2.248.815.330,00	2.082.893.596,00	165.921.734,00	92,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.991.976.830,00	1.833.936.596,00	158.040.234,00	92,07	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.496.500,00	57.945.000,00	3.551.500,00	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.496.500,00	57.945.000,00	3.551.500,00	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	61.496.500,00	57.945.000,00	3.551.500,00	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.496.500,00	57.945.000,00	3.551.500,00	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.399.576.330,00	1.273.176.986,00	126.399.344,00	90,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.090.672.330,00	974.101.986,00	116.570.344,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.090.672.330,00	974.101.986,00	116.570.344,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.090.672.330,00	974.101.986,00	116.570.344,00	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	308.904.000,00	299.075.000,00	9.829.000,00	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	308.904.000,00	299.075.000,00	9.829.000,00	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	20.400.000,00	18.700.000,00	1.700.000,00	91,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.504.000,00	280.375.000,00	8.129.000,00	97,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.331.610,00	172.820.610,00	16.511.000,00	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.844.000,00	4.276.000,00	1.568.000,00	73,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	5.844.000,00	4.276.000,00	1.568.000,00	73,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.844.000,00	4.276.000,00	1.568.000,00	73,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.281.200,00	40.656.200,00	6.625.000,00	85,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	47.281.200,00	40.656.200,00	6.625.000,00	85,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.281.200,00	40.656.200,00	6.625.000,00	85,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.508.410,00	2.508.410,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	2.508.410,00	2.508.410,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.508.410,00	2.508.410,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.698.000,00	125.380.000,00	8.318.000,00	93,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	133.698.000,00	125.380.000,00	8.318.000,00	93,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.698.000,00	125.380.000,00	8.318.000,00	93,78	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.428.390,00	65.250.000,00	5.178.390,00	92,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.763.090,00	34.500.000,00	1.263.090,00	96,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0002	05.02	BELANJA MODAL	35.763.090,00	34.500.000,00	1.263.090,00	96,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.763.090,00	34.500.000,00	1.263.090,00	96,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.665.300,00	30.750.000,00	3.915.300,00	88,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	34.665.300,00	30.750.000,00	3.915.300,00	88,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.665.300,00	30.750.000,00	3.915.300,00	88,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.144.000,00	251.744.000,00	6.400.000,00	97,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	21.500.000,00	2.500.000,00	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	21.500.000,00	2.500.000,00	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	21.500.000,00	2.500.000,00	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.144.000,00	230.244.000,00	3.900.000,00	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	234.144.000,00	230.244.000,00	3.900.000,00	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.144.000,00	230.244.000,00	3.900.000,00	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.400.000,00	38.185.000,00	7.215.000,00	84,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.400.000,00	38.185.000,00	7.215.000,00	84,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.400.000,00	38.185.000,00	7.215.000,00	84,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	45.400.000,00	38.185.000,00	7.215.000,00	84,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	38.185.000,00	7.215.000,00	84,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.446.000,00	39.996.000,00	450.000,00	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.446.000,00	39.996.000,00	450.000,00	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.984.000,00	18.534.000,00	450.000,00	97,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	18.984.000,00	18.534.000,00	450.000,00	97,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.984.000,00	18.534.000,00	450.000,00	97,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	95.861.000,00	95.861.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95.861.000,00	95.861.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73.535.000,00	73.535.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	73.535.000,00	73.535.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.535.000,00	73.535.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.326.000,00	22.326.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	22.326.000,00	22.326.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.326.000,00	22.326.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.131.500,00	74.915.000,00	216.500,00	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.131.500,00	74.915.000,00	216.500,00	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.131.500,00	74.915.000,00	216.500,00	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	75.131.500,00	74.915.000,00	216.500,00	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.131.500,00	74.915.000,00	216.500,00	99,71	
				JUMLAH	2.248.815.330,00	2.082.893.596,00	165.921.734,00	92,62	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.248.815.330,00)	(2.082.893.596,00)	(165.921.734,00)	92,62	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000		5	BELANJA	2.205.429.062,00	1.925.994.058,00	279.435.004,00	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.908.005.062,00	1.712.108.658,00	195.896.404,00	89,73	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.991.000,00	38.233.200,00	21.757.800,00	63,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.991.000,00	38.233.200,00	21.757.800,00	63,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	59.991.000,00	38.233.200,00	21.757.800,00	63,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.991.000,00	38.233.200,00	21.757.800,00	63,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.370.471.362,00	1.238.032.158,00	132.439.204,00	90,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.179.157.362,00	1.067.743.258,00	111.414.104,00	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.179.157.362,00	1.067.743.258,00	111.414.104,00	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.179.157.362,00	1.067.743.258,00	111.414.104,00	90,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.314.000,00	170.288.900,00	21.025.100,00	89,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	191.314.000,00	170.288.900,00	21.025.100,00	89,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	28.500.000,00	14.800.000,00	13.700.000,00	51,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.814.000,00	155.488.900,00	7.325.100,00	95,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.299.700,00	170.021.300,00	24.278.400,00	87,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.997.500,00	4.241.400,00	2.756.100,00	60,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	6.997.500,00	4.241.400,00	2.756.100,00	60,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.997.500,00	4.241.400,00	2.756.100,00	60,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.695.800,00	44.659.200,00	7.036.600,00	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	51.695.800,00	44.659.200,00	7.036.600,00	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.695.800,00	44.659.200,00	7.036.600,00	86,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.400,00	8.605.700,00	3.394.700,00	71,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	12.000.400,00	8.605.700,00	3.394.700,00	71,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.400,00	8.605.700,00	3.394.700,00	71,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.606.000,00	112.515.000,00	11.091.000,00	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	123.606.000,00	112.515.000,00	11.091.000,00	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.606.000,00	112.515.000,00	11.091.000,00	91,03	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07.0005	05.02	BELANJA MODAL	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.971.000,00	0,00	14.971.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.272.000,00	238.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.272.000,00	226.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	226.272.000,00	226.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.272.000,00	226.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	27.550.000,00	2.450.000,00	91,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	27.550.000,00	2.450.000,00	91,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.550.000,00	2.450.000,00	91,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.550.000,00	2.450.000,00	91,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0011	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.480.000,00	18.903.900,00	23.576.100,00	44,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.480.000,00	18.903.900,00	23.576.100,00	44,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.480.000,00	18.903.900,00	23.576.100,00	44,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	42.480.000,00	18.903.900,00	23.576.100,00	44,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.480.000,00	18.903.900,00	23.576.100,00	44,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.946.000,00	43.164.500,00	26.781.500,00	61,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.946.000,00	43.164.500,00	26.781.500,00	61,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.991.000,00	33.164.500,00	1.826.500,00	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	34.991.000,00	33.164.500,00	1.826.500,00	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.991.000,00	33.164.500,00	1.826.500,00	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.955.000,00	10.000.000,00	24.955.000,00	28,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	34.955.000,00	10.000.000,00	24.955.000,00	28,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.955.000,00	10.000.000,00	24.955.000,00	28,61	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000,00	120.170.000,00	4.830.000,00	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.000.000,00	120.170.000,00	4.830.000,00	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	20.170.000,00	4.830.000,00	80,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	20.170.000,00	4.830.000,00	80,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.170.000,00	4.830.000,00	80,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.998.000,00	31.647.000,00	28.351.000,00	52,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.998.000,00	31.647.000,00	28.351.000,00	52,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.998.000,00	31.647.000,00	28.351.000,00	52,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	59.998.000,00	31.647.000,00	28.351.000,00	52,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.998.000,00	31.647.000,00	28.351.000,00	52,75	
				JUMLAH	2.205.429.062,00	1.925.994.058,00	279.435.004,00	87,33	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.205.429.062,00)	(1.925.994.058,00)	(279.435.004,00)	87,33	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIBERUT SELATAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000		5	BELANJA	2.708.984.716,00	2.571.982.141,00	137.002.575,00	94,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.416.468.666,00	2.295.811.591,00	120.657.075,00	95,01	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.455.500,00	39.176.250,00	279.250,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.455.500,00	39.176.250,00	279.250,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	39.455.500,00	39.176.250,00	279.250,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.455.500,00	39.176.250,00	279.250,00	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.817.714.836,00	1.718.290.211,00	99.424.625,00	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.174.836,00	1.629.550.211,00	89.624.625,00	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.719.174.836,00	1.629.550.211,00	89.624.625,00	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.719.174.836,00	1.629.550.211,00	89.624.625,00	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.540.000,00	88.740.000,00	9.800.000,00	90,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	98.540.000,00	88.740.000,00	9.800.000,00	90,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	24.000.000,00	14.400.000,00	9.600.000,00	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.540.000,00	74.340.000,00	200.000,00	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.932.330,00	200.655.130,00	20.277.200,00	90,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.250,00	7.998.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	7.998.250,00	7.998.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.998.250,00	7.998.250,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.096.080,00	6.096.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	6.096.080,00	6.096.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.096.080,00	6.096.080,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.106.000,00	49.806.000,00	300.000,00	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	50.106.000,00	49.806.000,00	300.000,00	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.106.000,00	49.806.000,00	300.000,00	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.640.000,00	11.008.000,00	12.632.000,00	46,57	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0008	05.01	BELANJA OPERASI	23.640.000,00	11.008.000,00	12.632.000,00	46,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	11.008.000,00	12.632.000,00	46,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.092.000,00	117.746.800,00	7.345.200,00	94,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	125.092.000,00	117.746.800,00	7.345.200,00	94,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.092.000,00	117.746.800,00	7.345.200,00	94,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	23.872.700,00	23.872.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0005	05.02	BELANJA MODAL	23.872.700,00	23.872.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.872.700,00	23.872.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.344.000,00	202.278.000,00	66.000,00	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.934.000,00	66.000,00	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.934.000,00	66.000,00	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.934.000,00	66.000,00	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.344.000,00	190.344.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	190.344.000,00	190.344.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.344.000,00	190.344.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.369.300,00	93.759.300,00	610.000,00	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.870.000,00	10.260.000,00	610.000,00	94,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	10.870.000,00	10.260.000,00	610.000,00	94,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	10.260.000,00	610.000,00	94,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0011	05.01	BELANJA OPERASI	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.858.900,00	49.112.150,00	8.746.750,00	84,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.059.000,00	15.885.000,00	8.174.000,00	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.059.000,00	15.885.000,00	8.174.000,00	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.059.000,00	15.885.000,00	8.174.000,00	66,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.059.000,00	15.885.000,00	8.174.000,00	66,03	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.799.900,00	33.227.150,00	572.750,00	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.799.900,00	33.227.150,00	572.750,00	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	33.799.900,00	33.227.150,00	572.750,00	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.799.900,00	33.227.150,00	572.750,00	98,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.497.650,00	39.819.900,00	3.677.750,00	91,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.497.650,00	39.819.900,00	3.677.750,00	91,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.499.900,00	23.499.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	23.499.900,00	23.499.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.499.900,00	23.499.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.997.750,00	16.320.000,00	3.677.750,00	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	19.997.750,00	16.320.000,00	3.677.750,00	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.750,00	16.320.000,00	3.677.750,00	81,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.203.000,00	104.845.000,00	1.358.000,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.203.000,00	104.845.000,00	1.358.000,00	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.264.000,00	81.255.000,00	9.000,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	81.264.000,00	81.255.000,00	9.000,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.264.000,00	81.255.000,00	9.000,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.939.000,00	23.590.000,00	1.349.000,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	24.939.000,00	23.590.000,00	1.349.000,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.939.000,00	23.590.000,00	1.349.000,00	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.956.500,00	82.393.500,00	2.563.000,00	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.956.500,00	82.393.500,00	2.563.000,00	96,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.994.500,00	59.273.500,00	721.000,00	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	59.994.500,00	59.273.500,00	721.000,00	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.500,00	59.273.500,00	721.000,00	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.962.000,00	23.120.000,00	1.842.000,00	92,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0009	05.01	BELANJA OPERASI	24.962.000,00	23.120.000,00	1.842.000,00	92,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.962.000,00	23.120.000,00	1.842.000,00	92,62	
				JUMLAH	2.708.984.716,00	2.571.982.141,00	137.002.575,00	94,94	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
				SURPLUS/DEFISIT	(2.708.984.716,00)	(2.571.982.141,00)	(137.002.575,00)	94,94	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIPORA UTARA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000		5	BELANJA	2.659.876.413,00	2.526.873.740,00	133.002.673,00	95,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.474.306.813,00	2.343.225.240,00	131.081.573,00	94,70	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.546.476.428,00	1.420.761.818,00	125.714.610,00	91,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.976.428,00	1.399.261.818,00	125.714.610,00	91,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.524.976.428,00	1.399.261.818,00	125.714.610,00	91,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.524.976.428,00	1.399.261.818,00	125.714.610,00	91,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.539.600,00	234.093.850,00	1.445.750,00	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0003	05.02	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.928.800,00	77.925.600,00	3.200,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	77.928.800,00	77.925.600,00	3.200,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.928.800,00	77.925.600,00	3.200,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.505.800,00	12.375.800,00	130.000,00	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	12.505.800,00	12.375.800,00	130.000,00	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.505.800,00	12.375.800,00	130.000,00	98,96	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.105.000,00	102.792.450,00	1.312.550,00	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	104.105.000,00	102.792.450,00	1.312.550,00	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.105.000,00	102.792.450,00	1.312.550,00	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.564.270,00	128.525.800,00	38.470,00	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	33.259.000,00	33.259.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	05.01	BELANJA OPERASI	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	05.02	BELANJA MODAL	33.024.000,00	33.024.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.024.000,00	33.024.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.305.270,00	75.276.800,00	28.470,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	05.01	BELANJA OPERASI	777.570,00	776.800,00	770,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.570,00	776.800,00	770,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	74.527.700,00	74.500.000,00	27.700,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.527.700,00	74.500.000,00	27.700,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0011	05.02	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.990.000,00	10.000,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.448.000,00	334.954.897,00	2.493.103,00	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	23.636.897,00	2.363.103,00	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	23.636.897,00	2.363.103,00	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	23.636.897,00	2.363.103,00	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.448.000,00	311.318.000,00	130.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	311.448.000,00	311.318.000,00	130.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.448.000,00	311.318.000,00	130.000,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.937.415,00	149.547.775,00	1.389.640,00	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0001	05.01	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	23.968.000,00	32.000,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.968.000,00	32.000,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.968.000,00	32.000,00	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.350.000,00	10.335.000,00	15.000,00	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	10.350.000,00	10.335.000,00	15.000,00	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	10.335.000,00	15.000,00	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.587.415,00	82.244.775,00	1.342.640,00	98,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0011	05.01	BELANJA OPERASI	83.587.415,00	82.244.775,00	1.342.640,00	98,39	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.907.415,00	81.564.775,00	1.342.640,00	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.037.200,00	53.036.500,00	700,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	53.037.200,00	53.036.500,00	700,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	29.999.900,00	29.999.800,00	100,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0002	05.01	BELANJA OPERASI	29.999.900,00	29.999.800,00	100,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	29.999.800,00	100,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.037.300,00	23.036.700,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	23.037.300,00	23.036.700,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.037.300,00	23.036.700,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.242.400,00	19.372.000,00	1.870.400,00	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.242.400,00	19.372.000,00	1.870.400,00	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.242.400,00	19.372.000,00	1.870.400,00	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	21.242.400,00	19.372.000,00	1.870.400,00	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.242.400,00	19.372.000,00	1.870.400,00	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.290.000,00	66.240.000,00	50.000,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.290.000,00	66.240.000,00	50.000,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	66.290.000,00	66.240.000,00	50.000,00	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	66.290.000,00	66.240.000,00	50.000,00	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.290.000,00	66.240.000,00	50.000,00	99,92	
				JUMLAH	2.659.876.413,00	2.526.873.740,00	133.002.673,00	95,00	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.659.876.413,00)	(2.526.873.740,00)	(133.002.673,00)	95,00	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIPORA SELATAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000		5	BELANJA	3.160.345.080,00	2.957.937.248,00	202.407.832,00	93,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.854.757.580,00	2.676.048.148,00	178.709.432,00	93,74	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.146.976.080,00	2.038.113.798,00	108.862.282,00	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.064.956.080,00	1.958.213.798,00	106.742.282,00	94,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.064.956.080,00	1.958.213.798,00	106.742.282,00	94,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.064.956.080,00	1.958.213.798,00	106.742.282,00	94,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.020.000,00	79.900.000,00	2.120.000,00	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	82.020.000,00	79.900.000,00	2.120.000,00	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	46.020.000,00	43.900.000,00	2.120.000,00	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.471.500,00	147.060.350,00	65.411.150,00	69,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.400.000,00	600.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.400.000,00	600.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.400.000,00	600.000,00	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	2.330.000,00	2.670.000,00	46,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0003	05.02	BELANJA MODAL	5.000.000,00	2.330.000,00	2.670.000,00	46,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	2.330.000,00	2.670.000,00	46,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.740.000,00	63.670.650,00	7.069.350,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	70.740.000,00	63.670.650,00	7.069.350,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.740.000,00	63.670.650,00	7.069.350,00	90,01	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.732.000,00	66.660.200,00	55.071.800,00	54,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	121.732.000,00	66.660.200,00	55.071.800,00	54,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.732.000,00	66.660.200,00	55.071.800,00	54,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.600.000,00	60.100.000,00	2.500.000,00	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	05.01	BELANJA OPERASI	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	05.02	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.400.000,00	41.900.000,00	2.500.000,00	94,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	44.400.000,00	41.900.000,00	2.500.000,00	94,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.400.000,00	41.900.000,00	2.500.000,00	94,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.000.000,00	352.064.000,00	1.936.000,00	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00	328.064.000,00	1.936.000,00	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	328.064.000,00	1.936.000,00	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	328.064.000,00	1.936.000,00	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0004		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0004	05.01	BELANJA OPERASI	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.999.900,00	99.975.600,00	24.300,00	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	49.975.700,00	24.300,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0002	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	49.975.700,00	24.300,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.975.700,00	24.300,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.975.700,00	24.300,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.999.900,00	34.949.900,00	15.050.000,00	69,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000,00	14.950.000,00	15.050.000,00	49,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	14.950.000,00	15.050.000,00	49,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	14.950.000,00	15.050.000,00	49,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	14.950.000,00	15.050.000,00	49,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06.0001		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.587.700,00	77.034.700,00	8.553.000,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.587.700,00	77.034.700,00	8.553.000,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.587.700,00	77.034.700,00	8.553.000,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	85.587.700,00	77.034.700,00	8.553.000,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.587.700,00	77.034.700,00	8.553.000,00	90,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.000.000,00	69.928.900,00	71.100,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000,00	69.928.900,00	71.100,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70.000.000,00	69.928.900,00	71.100,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.928.900,00	71.100,00	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.928.900,00	71.100,00	99,90	
				JUMLAH	3.160.345.080,00	2.957.937.248,00	202.407.832,00	93,60	
				SURPLUS/DEFISIT	(3.160.345.080,00)	(2.957.937.248,00)	(202.407.832,00)	93,60	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN PAGAI UTARA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000		5	BELANJA	2.406.977.607,00	2.263.726.982,00	143.250.625,00	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.066.913.067,00	1.945.777.682,00	121.135.385,00	94,14	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.258.717,00	1.337.372.338,00	120.886.379,00	91,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.302.495.717,00	1.182.104.538,00	120.391.179,00	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.302.495.717,00	1.182.104.538,00	120.391.179,00	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.302.495.717,00	1.182.104.538,00	120.391.179,00	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.763.000,00	155.267.800,00	495.200,00	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	155.763.000,00	155.267.800,00	495.200,00	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	37.200.000,00	36.840.000,00	360.000,00	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.563.000,00	118.427.800,00	135.200,00	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.422.350,00	282.305.555,00	116.795,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.784.250,00	22.781.000,00	3.250,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	22.784.250,00	22.781.000,00	3.250,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.784.250,00	22.781.000,00	3.250,00	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.691.600,00	58.691.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	58.691.600,00	58.691.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.691.600,00	58.691.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.121.500,00	10.121.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	10.121.500,00	10.121.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.121.500,00	10.121.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.825.000,00	190.711.455,00	113.545,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	190.825.000,00	190.711.455,00	113.545,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.825.000,00	190.711.455,00	113.545,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.232.000,00	326.099.789,00	132.211,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.232.000,00	314.099.789,00	132.211,00	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	314.232.000,00	314.099.789,00	132.211,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.232.000,00	314.099.789,00	132.211,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.759.640,00	115.547.500,00	4.212.140,00	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.477.840,00	64.266.300,00	4.211.540,00	93,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.477.840,00	64.266.300,00	4.211.540,00	93,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	61.227.840,00	57.016.300,00	4.211.540,00	93,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.227.840,00	57.016.300,00	4.211.540,00	93,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003	05.02	BELANJA MODAL	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51.281.800,00	51.281.200,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.281.800,00	51.281.200,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	51.281.800,00	51.281.200,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.281.800,00	51.281.200,00	600,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123.956.900,00	122.060.200,00	1.896.700,00	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	123.956.900,00	122.060.200,00	1.896.700,00	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	108.370.000,00	106.498.400,00	1.871.600,00	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	108.370.000,00	106.498.400,00	1.871.600,00	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.370.000,00	106.498.400,00	1.871.600,00	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.586.900,00	15.561.800,00	25.100,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	15.586.900,00	15.561.800,00	25.100,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.586.900,00	15.561.800,00	25.100,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96.348.000,00	80.341.600,00	16.006.400,00	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.348.000,00	80.341.600,00	16.006.400,00	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60.027.000,00	44.038.600,00	15.988.400,00	73,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0002	05.01	BELANJA OPERASI	60.027.000,00	44.038.600,00	15.988.400,00	73,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.027.000,00	44.038.600,00	15.988.400,00	73,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0018		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	36.321.000,00	36.303.000,00	18.000,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0018	05.01	BELANJA OPERASI	36.321.000,00	36.303.000,00	18.000,00	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.321.000,00	36.303.000,00	18.000,00	99,95	
				JUMLAH	2.406.977.607,00	2.263.726.982,00	143.250.625,00	94,05	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.406.977.607,00)	(2.263.726.982,00)	(143.250.625,00)	94,05	

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN SIKAKAP

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000		5	BELANJA	3.321.848.770,00	3.212.361.927,00	109.486.843,00	96,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.106.624.770,00	3.009.752.927,00	96.871.843,00	96,88	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.577.553.670,00	2.486.845.372,00	90.708.298,00	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.284.670,00	2.254.667.572,00	90.617.098,00	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	2.345.284.670,00	2.254.667.572,00	90.617.098,00	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.345.284.670,00	2.254.667.572,00	90.617.098,00	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.269.000,00	232.177.800,00	91.200,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	232.269.000,00	232.177.800,00	91.200,00	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.589.000,00	158.497.800,00	91.200,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.199.100,00	303.176.555,00	6.022.545,00	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.570.500,00	29.500,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.570.500,00	29.500,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.570.500,00	29.500,00	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.177.500,00	75.497.500,00	680.000,00	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002	05.01	BELANJA OPERASI	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.992.600,00	69.868.100,00	124.500,00	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	69.992.600,00	69.868.100,00	124.500,00	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.992.600,00	69.868.100,00	124.500,00	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.429.000,00	149.240.455,00	5.188.545,00	96,64	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	154.429.000,00	149.240.455,00	5.188.545,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.429.000,00	149.240.455,00	5.188.545,00	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.272.000,00	205.131.000,00	141.000,00	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	32.859.000,00	141.000,00	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.859.000,00	141.000,00	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.859.000,00	141.000,00	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.272.000,00	172.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	172.272.000,00	172.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.272.000,00	172.272.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.600.000,00	16.400.000,00	1.200.000,00	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.600.000,00	16.400.000,00	1.200.000,00	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17.600.000,00	16.400.000,00	1.200.000,00	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	16.400.000,00	1.200.000,00	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	16.400.000,00	1.200.000,00	93,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.730.000,00	55.530.000,00	1.200.000,00	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.730.000,00	55.530.000,00	1.200.000,00	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.180.000,00	21.980.000,00	1.200.000,00	94,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	23.180.000,00	21.980.000,00	1.200.000,00	94,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.180.000,00	21.980.000,00	1.200.000,00	94,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.394.000,00	102.389.000,00	5.000,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.394.000,00	102.389.000,00	5.000,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.672.000,00	95.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	95.672.000,00	95.672.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.672.000,00	95.672.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.722.000,00	6.717.000,00	5.000,00	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	6.722.000,00	6.717.000,00	5.000,00	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.000,00	6.717.000,00	5.000,00	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.500.000,00	28.290.000,00	10.210.000,00	73,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.500.000,00	28.290.000,00	10.210.000,00	73,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.500.000,00	28.290.000,00	10.210.000,00	73,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	28.290.000,00	10.210.000,00	73,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	28.290.000,00	10.210.000,00	73,48	
				JUMLAH	3.321.848.770,00	3.212.361.927,00	109.486.843,00	96,70	
				SURPLUS/DEFISIT	(3.321.848.770,00)	(3.212.361.927,00)	(109.486.843,00)	96,70	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Organisasi : KECAMATAN PAGAI SELATAN

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000		5	BELANJA	2.464.102.664,00	2.346.185.294,00	117.917.370,00	95,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.111.664,00	2.124.899.494,00	109.212.170,00	95,11	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.754.000,00	99.753.600,00	400,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.754.000,00	99.753.600,00	400,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01.0007	05.01	BELANJA OPERASI	99.754.000,00	99.753.600,00	400,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.754.000,00	99.753.600,00	400,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.113.664,00	1.404.580.697,00	99.532.967,00	93,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.299.870.664,00	1.204.765.597,00	95.105.067,00	92,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.299.870.664,00	1.204.765.597,00	95.105.067,00	92,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.299.870.664,00	1.204.765.597,00	95.105.067,00	92,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.243.000,00	199.815.100,00	4.427.900,00	97,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0002	05.01	BELANJA OPERASI	204.243.000,00	199.815.100,00	4.427.900,00	97,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	72.180.000,00	70.850.000,00	1.330.000,00	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.063.000,00	128.965.100,00	3.097.900,00	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.989.000,00	246.685.255,00	303.745,00	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0001	05.01	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0002	05.02	BELANJA MODAL	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.174.000,00	46.983.000,00	191.000,00	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004	05.01	BELANJA OPERASI	43.174.000,00	42.983.000,00	191.000,00	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.174.000,00	42.983.000,00	191.000,00	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004	05.02	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0005	05.01	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.115.000,00	177.002.255,00	112.745,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0009	05.01	BELANJA OPERASI	177.115.000,00	177.002.255,00	112.745,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.115.000,00	177.002.255,00	112.745,00	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0002	05.02	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.120.000,00	311.924.942,00	7.195.058,00	97,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00	39,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0002	05.01	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00	39,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00	39,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.320.000,00	310.024.942,00	4.295.058,00	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0004	05.01	BELANJA OPERASI	314.320.000,00	310.024.942,00	4.295.058,00	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.320.000,00	310.024.942,00	4.295.058,00	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.135.000,00	19.955.000,00	2.180.000,00	90,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.925.000,00	75.000,00	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0002	05.01	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.925.000,00	75.000,00	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.925.000,00	75.000,00	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0006	05.01	BELANJA OPERASI	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0009	05.01	BELANJA OPERASI	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	34.942.800,00	57.200,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000,00	34.942.800,00	57.200,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000,00	34.942.800,00	57.200,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04.0003	05.01	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.942.800,00	57.200,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.942.800,00	57.200,00	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.997.000,00	38.269.000,00	6.728.000,00	85,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.997.000,00	38.269.000,00	6.728.000,00	85,05	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	13.400.000,00	6.600.000,00	67,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.400.000,00	6.600.000,00	67,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.400.000,00	6.600.000,00	67,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.997.000,00	24.869.000,00	128.000,00	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	24.997.000,00	24.869.000,00	128.000,00	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.997.000,00	24.869.000,00	128.000,00	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.998.000,00	74.647.800,00	350.200,00	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.998.000,00	74.647.800,00	350.200,00	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0001		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00	49.850.000,00	150.000,00	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0001	05.01	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.850.000,00	150.000,00	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.850.000,00	150.000,00	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.998.000,00	24.797.800,00	200.200,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0008	05.01	BELANJA OPERASI	24.998.000,00	24.797.800,00	200.200,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.000,00	24.797.800,00	200.200,00	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.996.000,00	73.426.200,00	1.569.800,00	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.996.000,00	73.426.200,00	1.569.800,00	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.996.000,00	73.426.200,00	1.569.800,00	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01.0003	05.01	BELANJA OPERASI	74.996.000,00	73.426.200,00	1.569.800,00	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	73.426.200,00	1.569.800,00	97,91	
				JUMLAH	2.464.102.664,00	2.346.185.294,00	117.917.370,00	95,21	
				SURPLUS/DEFISIT	(2.464.102.664,00)	(2.346.185.294,00)	(117.917.370,00)	95,21	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.492.873.779,00	1.366.641.684,00	126.232.095,00	91,54	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.029.189.279,00	945.834.677,00	83.354.602,00	91,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	986.589.279,00	917.754.677,00	68.834.602,00	93,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	986.589.279,00	917.754.677,00	68.834.602,00	93,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	986.589.279,00	917.754.677,00	68.834.602,00	93,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000,00	28.080.000,00	14.520.000,00	65,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	28.080.000,00	14.520.000,00	65,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	42.600.000,00	28.080.000,00	14.520.000,00	65,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.549.500,00	159.044.530,00	11.504.970,00	93,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.530.700,00	61.186.700,00	10.344.000,00	85,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.530.700,00	61.186.700,00	10.344.000,00	85,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.530.700,00	61.186.700,00	10.344.000,00	85,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.490.000,00	8.000.000,00	490.000,00	94,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.490.000,00	8.000.000,00	490.000,00	94,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	8.000.000,00	490.000,00	94,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.529.000,00	71.858.030,00	670.970,00	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	72.529.000,00	71.858.030,00	670.970,00	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.529.000,00	71.858.030,00	670.970,00	99,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.499.000,00	44.742.945,00	11.756.055,00	79,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.219.000,00	22.650.000,00	9.569.000,00	70,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0002	05.02	BELANJA MODAL	32.219.000,00	22.650.000,00	9.569.000,00	70,30	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.219.000,00	22.650.000,00	9.569.000,00	70,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.280.000,00	22.092.945,00	2.187.055,00	90,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0006	05.02	BELANJA MODAL	24.280.000,00	22.092.945,00	2.187.055,00	90,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.280.000,00	22.092.945,00	2.187.055,00	90,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.144.000,00	189.759.532,00	17.384.468,00	91,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	10.515.532,00	13.484.468,00	43,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	10.515.532,00	13.484.468,00	43,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	10.515.532,00	13.484.468,00	43,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.144.000,00	179.244.000,00	3.900.000,00	97,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.144.000,00	179.244.000,00	3.900.000,00	97,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.144.000,00	179.244.000,00	3.900.000,00	97,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.492.000,00	27.260.000,00	2.232.000,00	92,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.992.000,00	19.260.000,00	732.000,00	96,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.992.000,00	19.260.000,00	732.000,00	96,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.992.000,00	19.260.000,00	732.000,00	96,34	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	84,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	84,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	84,21	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	37.978.270,00	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	37.978.270,00	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	37.978.270,00	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	37.978.270,00	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.138.500,00	1.125.160.230,00	37.978.270,00	96,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.491.490.600,00	21.457.099.010,00	34.391.590,00	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.491.490.600,00	21.457.099.010,00	34.391.590,00	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21.433.472.600,00	21.432.244.610,00	1.227.990,00	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.433.472.600,00	21.432.244.610,00	1.227.990,00	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	21.433.472.600,00	21.432.244.610,00	1.227.990,00	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.018.000,00	24.854.400,00	33.163.600,00	42,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.018.000,00	24.854.400,00	33.163.600,00	42,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.018.000,00	24.854.400,00	33.163.600,00	42,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74.052.900,00	22.425.200,00	51.627.700,00	30,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74.052.900,00	22.425.200,00	51.627.700,00	30,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74.052.900,00	22.425.200,00	51.627.700,00	30,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.052.900,00	22.425.200,00	51.627.700,00	30,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.052.900,00	22.425.200,00	51.627.700,00	30,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	324.072.050,00	201.691.187,00	122.380.863,00	62,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	324.072.050,00	201.691.187,00	122.380.863,00	62,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	123.153.150,00	70.145.500,00	53.007.650,00	56,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.338.000,00	64.165.500,00	9.172.500,00	87,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.338.000,00	64.165.500,00	9.172.500,00	87,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.815.150,00	5.980.000,00	43.835.150,00	12,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.815.150,00	5.980.000,00	43.835.150,00	12,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74.996.900,00	13.261.300,00	61.735.600,00	17,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.996.900,00	13.261.300,00	61.735.600,00	17,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.900,00	13.261.300,00	61.735.600,00	17,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.922.000,00	118.284.387,00	7.637.613,00	93,93	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	125.922.000,00	118.284.387,00	7.637.613,00	93,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.922.000,00	118.284.387,00	7.637.613,00	93,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	341.981.500,00	192.880.321,00	149.101.179,00	56,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	341.981.500,00	192.880.321,00	149.101.179,00	56,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.053.900,00	36.432.090,00	17.621.810,00	67,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.053.900,00	36.432.090,00	17.621.810,00	67,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.053.900,00	36.432.090,00	17.621.810,00	67,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.818.000,00	41.178.760,00	14.639.240,00	73,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.818.000,00	41.178.760,00	14.639.240,00	73,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.818.000,00	41.178.760,00	14.639.240,00	73,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.799.800,00	28.560.920,00	26.238.880,00	52,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.799.800,00	28.560.920,00	26.238.880,00	52,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.799.800,00	28.560.920,00	26.238.880,00	52,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	177.309.800,00	86.708.551,00	90.601.249,00	48,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.309.800,00	86.708.551,00	90.601.249,00	48,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.309.800,00	86.708.551,00	90.601.249,00	48,90	
				JUMLAH	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	521.711.697,00	97,90	
				SURPLUS/DEFISIT	(24.889.129.329,00)	(24.367.417.632,00)	(521.711.697,00)	97,90	

Tuapejat, 15 Agustus 2025
 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	414.255.861.670,00	362.878.462.262,02	157.466.769.038,00	130.536.707.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.366.854.939,00	186.208.973.096,00	27.285.982.447,00	24.318.672.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	208.366.854.939,00	186.208.973.096,00	27.285.982.447,00	24.318.672.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.287.044.022,00	156.003.910.523,00	2.011.678.110,00	2.011.678.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.757.700.982,00	155.542.118.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	75.628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	75.628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.866.400,00	217.852.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	99.549.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.004.000,00	42.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.862.400,00	58.301.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000,00	47.269.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000,00	47.269.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.476.640,00	121.041.140,00	2.011.678.110,00	2.011.678.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.750.000,00	66.314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.726.640,00	54.726.640,00	2.011.678.110,00	2.011.678.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.939.272.017,00	30.068.499.073,00	25.274.304.337,00	22.306.994.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.374.713.506,00	16.449.939.581,00	16.187.481.214,00	14.155.704.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	101.122.000,00	72.055.000,00	337.928.000,00	290.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	199.629.200,00	147.048.200,00	708.315.300,00	619.549.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.089.600,00	43.954.600,00	350.208.104,00	350.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	222.594.800,00	176.017.200,00	2.204.764.646,00	1.823.611.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	30.305.600,00	1.943.800,00	545.800.000,00	545.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10.721.962.000,00	10.651.480.000,00	4.050.038.000,00	3.922.762.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.413.224.400,00	4.289.603.315,00	2.600.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	676.131.000,00	412.494.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	227.213.800,00	177.700.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000,00	49.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	135.484.106,00	56.761.300,00	1.695.220.144,00	1.534.525.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	304.703.800,00	202.023.500,00	3.972.053.400,00	3.477.111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	64.200.000,00	58.425.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	155.053.200,00	111.253.200,00	2.320.553.620,00	1.589.367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.211.319.711,00	9.494.704.392,00	9.050.823.123,00	8.115.291.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	12.360.000,00	5.100.000,00	1.000.758.000,00	809.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	64.349.600,00	10.244.600,00	224.000.000,00	222.999.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	288.226.000,00	259.192.200,00	2.368.201.000,00	2.008.484.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.765.420.000,00	5.504.701.000,00	2.200.000.000,00	2.071.314.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.062.338.600,00	2.915.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	374.366.700,00	273.378.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	207.645.000,00	152.150.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	162.315.800,00	140.434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	268.118.011,00	231.409.011,00	2.321.619.000,00	2.209.797.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.180.000,00	3.060.000,00	936.245.123,00	792.696.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.036.663.900,00	2.566.432.800,00	36.000.000,00	35.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.229.038.600,00	1.038.259.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	197.521.400,00	197.135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	145.935.400,00	145.512.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000,00	127.939.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.214.168.500,00	959.117.300,00	36.000.000,00	35.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.467.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.316.574.900,00	1.557.422.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.994.900,00	147.382.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.166.580.000,00	1.410.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.538.900,00	136.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900,00	136.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	140.538.900,00	136.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	130.360.068.969,00	111.486.878.125,02	9.557.106.424,00	9.305.493.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	88.326.587.015,00	78.637.878.375,00	6.700.774.210,00	6.493.869.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.827.010.975,00	55.566.552.286,00	52.583.000,00	51.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.664.400,00	63.739.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.664.400,00	33.799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.422.577.675,00	54.730.677.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.370.977.675,00	53.963.638.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.600.000,00	767.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	45.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	45.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.968.900,00	202.442.720,00	52.583.000,00	51.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.500,00	14.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	52.583.000,00	51.194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.658.000,00	56.657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.745.000,00	17.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.995.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.076.400,00	90.025.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.800.000,00	504.811.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.800.000,00	131.232.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	373.579.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	19.868.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.868.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.727.432.940,00	22.019.372.784,00	6.648.191.210,00	6.442.674.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.223.184.186,00	4.632.326.286,00	5.496.359.000,00	5.373.109.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.815.385.600,00	2.391.063.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	183.580.000,00	168.108.400,00	5.271.044.000,00	5.150.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.101.432,00	60.545.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	259.404.400,00	188.296.787,00	212.535.000,00	211.724.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.605.712.854,00	1.596.325.945,00	12.780.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	69.999.900,00	32.673.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.000.000,00	195.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.504.248.754,00	17.387.046.498,00	1.151.832.210,00	1.069.564.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	415.944.000,00	384.906.690,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	539.890.750,00	236.673.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	260.825.300,00	179.608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	250.000.000,00	246.022.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	102.974.100,00	98.934.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	144.817.100,00	121.770.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86.000.000,00	80.198.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99.999.900,00	95.740.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	69.000.000,00	53.535.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71.725.500,00	66.148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	120.443.900,00	106.197.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	70.774.814,00	59.435.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	83.000.000,00	79.670.426,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	76.516.100,00	57.287.300,00	20.400.000,00	20.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	317.496.500,00	308.261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.000.000,00	18.305.400,00	28.000.000,00	27.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	397.711.000,00	336.615.542,00	904.910.000,00	904.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	28.747.300,00	28.747.300,00	21.252.210,00	21.252.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	99.999.800,00	93.275.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	73.277.000,00	60.345.121,00	20.125.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	501.212.000,00	473.648.424,00	54.000.000,00	41.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.319.934.240,00	13.114.111.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	204.427.750,00	98.539.050,00	45.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	399.999.900,00	328.652.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	470.146.800,00	424.090.300,00	17.200.000,00	16.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100.000.000,00	83.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000,00	93.362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	77.385.000,00	59.848.100,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	816.635.400,00	227.366.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	24.720.800,00	24.566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.720.800,00	24.566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	791.914.600,00	202.800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	791.914.600,00	202.800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	268.100.900,00	244.392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85.386.900,00	75.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85.386.900,00	75.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.714.000,00	168.722.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.714.000,00	168.722.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	687.406.800,00	580.194.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.315.000,00	346.484.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	420.315.000,00	346.484.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.091.800,00	233.709.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	267.091.800,00	233.709.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20.773.824.421,00	15.518.225.803,00	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.031.752.368,00	10.705.433.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.089.953.168,00	6.435.524.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.223.168,00	1.552.834.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.755.730.000,00	4.882.689.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.259.200,00	429.923.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.802.000,00	25.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.328.800,00	313.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.128.400,00	91.055.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.536.620.000,00	2.954.262.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.500.000,00	372.290.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.066.120.000,00	2.581.971.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.920.000,00	885.722.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.300.000,00	295.078.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.620.000,00	590.643.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.742.072.053,00	4.812.792.676,00	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.858.378.053,00	3.952.441.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.725.110.000,00	873.092.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000,00	255.151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.871.908.053,00	2.824.197.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.694.000,00	860.351.473,00	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	883.694.000,00	860.351.473,00	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		PUSKESMAS MAPADDEGAT	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	47.889.000,00	47.863.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	47.889.000,00	47.863.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	47.889.000,00	47.863.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.985.403.304,00	2.771.407.451,20	47.889.000,00	47.863.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003		PUSKESMAS SIOBAN	1.793.258.771,00	1.698.307.433,82	10.641.050,00	10.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.793.258.771,00	1.698.307.433,82	10.641.050,00	10.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.793.258.771,00	1.698.307.433,82	10.641.050,00	10.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.793.258.771,00	1.698.307.433,82	10.641.050,00	10.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		PUSKESMAS BOSUA	821.927.200,00	424.418.512,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	821.927.200,00	424.418.512,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	821.927.200,00	424.418.512,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	821.927.200,00	424.418.512,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005		PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	10.990.000,00	10.939.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	10.990.000,00	10.939.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	10.990.000,00	10.939.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.716.260.200,00	1.289.687.724,00	10.990.000,00	10.939.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006		PUSKESMAS PEIPEI	1.628.536.550,00	925.580.956,00	11.407.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.628.536.550,00	925.580.956,00	11.407.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.628.536.550,00	925.580.956,00	11.407.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.628.536.550,00	925.580.956,00	11.407.150,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.501.893.720,00	1.143.015.512,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	4.025.000,00	3.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	4.025.000,00	3.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	4.025.000,00	3.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.881.335.950,00	1.677.954.132,00	4.025.000,00	3.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009		PUSKESMAS BETAET	878.011.698,00	791.127.671,00	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	878.011.698,00	791.127.671,00	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	878.011.698,00	791.127.671,00	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	878.011.698,00	791.127.671,00	2.405.514,00	2.405.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011		PUSKESMAS SIKAKAP	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	7.625.000,00	7.599.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	7.625.000,00	7.599.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	7.625.000,00	7.599.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.345.690.000,00	1.895.139.352,00	7.625.000,00	7.599.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012		PUSKESMAS MALAKOPA	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.251.372.000,00	1.060.962.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013		PUSKESMAS BULASAT	1.010.469.730,00	810.814.425,00	6.330.000,00	5.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.010.469.730,00	810.814.425,00	6.330.000,00	5.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.010.469.730,00	810.814.425,00	6.330.000,00	5.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.010.469.730,00	810.814.425,00	6.330.000,00	5.882.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014		PUSKESMAS SAREREIKET	756.136.100,00	653.993.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	756.136.100,00	653.993.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	756.136.100,00	653.993.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	756.136.100,00	653.993.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015		PUSKESMAS SIMATALU	840.874.400,00	635.444.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.874.400,00	635.444.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.874.400,00	635.444.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	840.874.400,00	635.444.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016		PUSKESMAS SIGAPOKNA	494.188.190,00	387.259.547,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	494.188.190,00	387.259.547,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	494.188.190,00	387.259.547,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	494.188.190,00	387.259.547,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017		PUSKESMAS SAUMANGANYA	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	16.570.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	16.570.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	16.570.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.354.299.720,00	1.165.660.357,00	16.570.000,00	16.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.015.875.696,00	32.488.273.543,00	102.988.277.807,00	83.761.085.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.747.983.696,00	31.081.305.228,00	101.209.555.807,00	82.482.804.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.402.354.443,00	6.108.044.828,00	19.075.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.910.200,00	46.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.910.200,00	46.848.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.846.247.543,00	5.565.658.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.476.700,00	330.194.546,00	19.075.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.862.500,00	23.860.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.889.000,00	22.789.000,00	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.952.800,00	17.842.800,00	7.650.000,00	7.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.361.400,00	102.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.145.000,00	32.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.266.000,00	67.547.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.500.000,00	14.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.750.000,00	125.188.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.750.000,00	86.382.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	38.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.970.000,00	40.155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.970.000,00	40.155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.213.171.900,00	4.367.830.749,00	9.767.438.000,00	9.353.173.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.035.583.900,00	3.229.513.861,00	9.615.000.000,00	9.215.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	1.784.678.000,00	1.547.467.334,00	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	428.989.900,00	352.812.600,00	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.821.916.000,00	1.329.233.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.177.588.000,00	1.138.316.888,00	152.438.000,00	137.418.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.177.588.000,00	1.138.316.888,00	152.438.000,00	137.418.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.966.642.100,00	2.544.479.261,00	3.978.765.130,00	3.694.493.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.966.642.100,00	2.544.479.261,00	3.978.765.130,00	3.694.493.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	398.178.100,00	380.035.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	310.258.400,00	95.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	555.208.000,00	330.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	171.310.000,00	155.907.852,00	2.155.337.930,00	1.942.278.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	132.877.616,00	0,00	29.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.531.687.600,00	1.449.405.493,00	1.823.427.200,00	1.722.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	865.832.600,00	658.153.760,00	193.636.200,00	185.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	865.832.600,00	658.153.760,00	193.636.200,00	185.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	865.832.600,00	658.153.760,00	193.636.200,00	185.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.729.404.700,00	2.388.239.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	415.520.011,00	279.368.100,00	1.262.010.670,00	1.141.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.520.011,00	279.368.100,00	1.262.010.670,00	1.141.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	262.005.011,00	146.666.100,00	1.262.010.670,00	1.141.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	153.515.000,00	132.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.561.138.893,00	1.166.261.375,00	2.509.461.208,00	2.279.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.561.138.893,00	1.166.261.375,00	2.509.461.208,00	2.279.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.280.533.893,00	1.046.278.925,00	2.504.561.208,00	2.279.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	280.605.000,00	119.982.450,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	16.180.954.749,00	12.260.812.033,00	83.451.059.599,00	65.781.745.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	16.180.954.749,00	12.260.812.033,00	83.451.059.599,00	65.781.745.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.075.828.000,00	1.875.483.868,00	145.913.200,00	92.794.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.972.385.070,00	2.681.145.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	872.995.000,00	569.465.284,00	23.911.445.660,00	19.761.831.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	4.054.153.165,00	3.590.802.468,00	50.147.987.499,00	41.490.012.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	239.394.000,00	145.086.832,00	1.102.203.040,00	1.102.203.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.386.538.960,00	1.071.343.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	325.743.500,00	149.793.923,00	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	825.635.000,00	638.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.428.282.054,00	1.538.987.915,00	87.856.200,00	76.249.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.412.964.300,00	1.308.115.164,00	28.110.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	169.638.800,00	150.047.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	169.638.800,00	150.047.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.243.325.500,00	1.158.067.795,00	28.110.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.243.325.500,00	1.158.067.795,00	28.110.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	327.185.000,00	272.219.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.185.000,00	272.219.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.185.000,00	272.219.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0001	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.185.000,00	272.219.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004		UPT Pengelolaan Air Minum Daerah	1.940.707.000,00	1.134.748.388,00	1.778.722.000,00	1.278.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.940.707.000,00	1.134.748.388,00	1.778.722.000,00	1.278.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.940.707.000,00	1.134.748.388,00	1.778.722.000,00	1.278.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0004	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.940.707.000,00	1.134.748.388,00	1.778.722.000,00	1.278.281.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.171.034.438,00	13.495.132.740,00	2.599.758.020,00	2.595.615.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.171.034.438,00	13.495.132.740,00	2.599.758.020,00	2.595.615.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.183.156.238,00	2.899.222.613,00	173.758.020,00	171.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.266.255.538,00	2.058.322.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.224.555.538,00	2.028.622.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.810.800,00	221.296.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	28.832.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	69.810.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.000.000,00	24.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.810.800,00	80.575.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.361.900,00	0	173.758.020,00	171.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.361.900,00	0	173.758.020,00	171.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.328.000,00	547.859.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000,00	89.130.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.328.000,00	458.729.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.400.000,00	71.742.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.500.000,00	35.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.500.000,00	23.007.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	13.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.931.796.000,00	3.758.500.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.999.900,00	39.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	49.999.900,00	39.563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	145.000.000,00	84.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	145.000.000,00	84.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.602.701.100,00	3.511.602.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	878.227.300,00	843.286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.724.473.800,00	2.668.315.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	134.095.000,00	122.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	134.095.000,00	122.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.090.708.700,00	5.989.482.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.090.708.700,00	5.989.482.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.776.074.300,00	5.742.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	162.699.900,00	135.415.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	151.934.500,00	111.243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	965.373.500,00	847.927.351,00	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	965.373.500,00	847.927.351,00	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	906.760.500,00	789.910.851,00	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.04.0000	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	58.613.000,00	58.016.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.247.804.951,00	13.505.086.118,00	14.958.215.840,00	10.482.926.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.338.087.644,00	8.043.503.542,00	6.797.220.000,00	6.697.915.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.797.944,00	5.745.155.783,00	7.920.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.144.944.344,00	3.040.169.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.033.464.344,00	2.928.689.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.301.600,00	179.171.705,00	7.920.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	17.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	7.920.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.790.000,00	62.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.999.800,00	17.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.311.800,00	79.226.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.403.192.000,00	2.346.051.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.720.000,00	15.374.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.378.472.000,00	2.330.677.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.360.000,00	179.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000,00	30.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.970.000,00	140.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.279.665.800,00	1.239.672.750,00	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.235.253.800,00	1.195.260.750,00	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.093.124.800,00	1.053.287.150,00	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	142.129.000,00	141.973.600,00	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	44.412.000,00	44.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.141.623.900,00	1.058.675.009,00	6.688.350.000,00	6.589.928.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	988.942.300,00	914.204.345,00	6.651.300.000,00	6.552.928.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	216.147.000,00	215.915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	244.759.900,00	193.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	528.035.400,00	504.316.645,00	6.651.300.000,00	6.552.928.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	152.681.600,00	144.470.664,00	37.050.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	152.681.600,00	144.470.664,00	37.050.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.909.717.307,00	5.461.582.576,00	8.160.995.840,00	3.785.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.438.458.407,00	4.089.679.436,00	7.900.000,00	7.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.480.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.480.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.633.364.607,00	2.375.090.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.451.134.607,00	2.268.800.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.230.000,00	106.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.996.700,00	287.008.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.862.500,00	72.747.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.030.000,00	17.871.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.604.200,00	182.289.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.320.000,00	1.072.316.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	46.638.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.320.000,00	1.025.677.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.297.100,00	342.463.999,00	7.900.000,00	7.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.750.000,00	63.291.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.707.250,00	97.707.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.010.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.829.850,00	166.054.680,00	7.900.000,00	7.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.515.544.650,00	682.847.486,00	108.811.000,00	108.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	158.591.600,00	56.545.700,00	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	158.591.600,00	56.545.700,00	45.511.000,00	45.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	913.143.800,00	340.506.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.223.000,00	54.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	599.068.800,00	207.532.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	238.852.000,00	78.565.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	393.813.250,00	249.987.046,00	63.300.000,00	63.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	221.651.250,00	143.068.216,00	63.300.000,00	63.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	172.162.000,00	106.918.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.996.000,00	35.807.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	49.996.000,00	35.807.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	955.714.250,00	689.055.654,00	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	955.714.250,00	689.055.654,00	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.1.06.0.00.05.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	955.714.250,00	689.055.654,00	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.094.222.677,00	5.694.118.640,00	77.428.500,00	72.914.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.094.222.677,00	5.694.118.640,00	77.428.500,00	72.914.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.138.034.177,00	3.893.093.582,00	55.930.500,00	51.895.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.203.100,00	8.737.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.203.100,00	8.737.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.283.642.727,00	3.069.912.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.210.742.727,00	2.997.012.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.762.350,00	205.811.872,00	46.455.000,00	42.516.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.080.000,00	480.000,00	41.955.000,00	38.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.667.100,00	48.663.100,00	4.500.000,00	4.245.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.208.000,00	4.207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.307.250,00	143.961.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	9.475.500,00	9.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0	9.475.500,00	9.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.710.000,00	509.139.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.950.000,00	50.649.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.760.000,00	458.490.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.716.000,00	99.491.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.150,00	22.919.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.128.800,00	20.378.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.920.000,00	21.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.667.050,00	34.342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	209.797.300,00	205.552.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	209.797.300,00	205.552.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54.207.000,00	51.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	84.520.300,00	83.398.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71.070.000,00	70.459.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.336.478.300,00	1.292.489.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.336.478.300,00	1.292.489.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	108.559.000,00	108.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	169.090.000,00	137.853.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	70.910.000,00	65.151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	987.919.300,00	980.994.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	62.217.900,00	60.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62.217.900,00	60.803.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.583.000,00	23.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	37.634.900,00	36.874.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	347.695.000,00	242.179.700,00	21.498.000,00	21.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	347.695.000,00	242.179.700,00	21.498.000,00	21.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	328.502.000,00	226.519.900,00	21.498.000,00	21.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	19.193.000,00	15.659.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	89.664.750.909,00	76.825.381.643,00	6.291.849.926,00	4.060.966.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	337.271.547,00	305.124.800,00	307.717.400,00	295.568.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	337.271.547,00	305.124.800,00	307.717.400,00	295.568.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.815.647,00	263.767.200,00	300.182.400,00	288.368.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	284.815.647,00	263.767.200,00	300.182.400,00	288.368.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	284.815.647,00	263.767.200,00	300.182.400,00	288.368.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	52.455.900,00	41.357.600,00	7.535.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.455.900,00	41.357.600,00	7.535.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	52.455.900,00	41.357.600,00	7.535.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.080.403.150,00	1.031.802.520,00	80.210.700,00	77.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	832.337.550,00	851.373.620,00	57.410.000,00	57.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	498.534.200,00	473.150.820,00	16.910.000,00	16.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	157.041.600,00	152.039.600,00	16.910.000,00	16.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	56.548.600,00	56.406.100,00	16.910.000,00	16.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.493.000,00	95.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	341.492.600,00	321.111.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	341.492.600,00	321.111.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.502.700,00	47.685.600,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.502.700,00	39.209.200,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.502.700,00	39.209.200,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	8.476.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	8.476.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	166.500.950,00	155.174.400,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	166.500.950,00	155.174.400,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	94.604.050,00	89.866.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.896.900,00	65.308.200,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	126.799.700,00	175.362.800,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.265.400,00	64.065.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	66.265.400,00	64.065.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	53.862.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	53.862.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.534.300,00	57.434.900,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	60.534.300,00	57.434.900,00	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001		UPTD PPA	248.065.600,00	180.428.900,00	22.800.700,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35.006.400,00	21.465.400,00	22.800.700,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.006.400,00	21.465.400,00	22.800.700,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.006.400,00	21.465.400,00	22.800.700,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	213.059.200,00	158.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.059.200,00	158.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0001	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	213.059.200,00	158.963.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.919.706.375,00	7.301.741.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.640.712.875,00	7.176.095.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.997.000,00	26.124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.997.000,00	26.124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.443.417.125,00	6.997.142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.298.750,00	69.996.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.018.750,00	7.996.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.250.000,00	56.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.030.000,00	5.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	82.830.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	82.830.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	278.993.500,00	125.645.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	178.999.500,00	99.792.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	99.000.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	79.999.500,00	38.042.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	17.278.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	17.278.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	19.994.000,00	8.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	19.994.000,00	8.575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.960.061.099,00	5.535.526.010,00	326.810.857,00	303.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	6.960.061.099,00	5.535.526.010,00	326.810.857,00	303.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.634.194,00	3.776.697.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.357.560,00	4.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.211.560,00	2.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.146.000,00	2.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.474.888.762,00	2.209.360.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.488.762,00	2.189.010.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.400.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.691.414,00	270.393.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.604.500,00	6.523.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.496.514,00	151.339.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	9.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.990.400,00	96.975.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.798.000,00	830.019.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.550.000,00	40.233.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	841.248.000,00	789.786.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.898.458,00	462.692.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.459.858,00	82.259.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.328.600,00	370.322.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	800.555.400,00	740.806.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	800.555.400,00	740.806.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	800.555.400,00	740.806.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.980.300,00	51.427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	55.980.300,00	51.427.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.240.300,00	45.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	5.740.000,00	5.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	93.000.900,00	62.495.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	93.000.900,00	62.495.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	93.000.900,00	62.495.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	35.415.165,00	34.895.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	23.141.240,00	23.128.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	23.141.240,00	23.128.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.273.925,00	11.766.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12.273.925,00	11.766.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.677.875.180,00	685.736.851,00	97.125.000,00	88.883.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.677.875.180,00	685.736.851,00	97.125.000,00	88.883.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	850.032.680,00	318.108.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	827.842.500,00	367.627.919,00	97.125.000,00	88.883.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	193.599.960,00	183.466.871,00	229.685.857,00	214.559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	145.862.960,00	135.975.271,00	229.685.857,00	214.559.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	58.625.600,00	54.264.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	55.281.600,00	49.915.616,00	166.422.350,00	156.465.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	31.955.760,00	31.795.000,00	63.263.507,00	58.094.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	47.737.000,00	47.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	47.737.000,00	47.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.790.685.336,00	4.485.358.638,00	21.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.790.685.336,00	4.485.358.638,00	21.800.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.113.161.636,00	3.854.986.950,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.576.313.936,00	2.390.152.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.993.936,00	2.368.552.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.320.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.881.900,00	309.466.309,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.422.000,00	7.392.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.830.600,00	125.010.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.999.900,00	69.509.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.229.400,00	93.153.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.416.000,00	930.938.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	44.490.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.416.000,00	886.448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.549.800,00	224.429.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.565.000,00	25.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.984.800,00	198.864.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	482.611.800,00	440.503.809,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	329.518.000,00	323.879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	329.518.000,00	323.879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	153.093.800,00	116.624.509,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	153.093.800,00	116.624.509,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	170.436.000,00	165.603.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	170.436.000,00	165.603.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	170.436.000,00	165.603.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.475.900,00	24.264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	24.475.900,00	24.264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	24.475.900,00	24.264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.508.561.984,00	5.174.356.421,00	33.130.000,00	32.013.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.508.561.984,00	5.174.356.421,00	33.130.000,00	32.013.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.791.106.384,00	4.516.911.471,00	33.130.000,00	32.013.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.359.000,00	43.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.359.000,00	43.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.866.884,00	2.892.325.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.072.666.884,00	2.870.125.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.930.500,00	180.012.119,00	33.130.000,00	32.013.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	33.130.000,00	32.013.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.113.000,00	59.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.482.500,00	22.481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.635.000,00	87.959.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.425.560.000,00	1.358.861.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000,00	26.840.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.387.760.000,00	1.332.020.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.390.000,00	42.358.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.968.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	396.678.200,00	340.809.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	396.678.200,00	340.809.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	84.982.000,00	72.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	89.173.000,00	47.374.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	45.626.100,00	45.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.384.500,00	5.364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23.019.800,00	23.001.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	59.999.900,00	59.743.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	49.137.900,00	48.296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	39.355.000,00	39.095.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	320.777.400,00	316.635.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	320.777.400,00	316.635.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	86.165.400,00	84.622.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	234.612.000,00	232.012.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.534.460.000,00	1.597.679.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	163.800.000,00	65.354.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.800.000,00	65.354.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	43.800.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000,00	47.354.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.743.060.000,00	1.001.949.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.086.000.000,00	644.761.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	108.161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	496.000.000,00	287.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	88.794.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	104.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	129.000.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	129.000.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	252.810.000,00	122.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	223.510.000,00	116.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.800.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	275.250.000,00	140.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	271.500.000,00	140.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	627.600.000,00	530.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	291.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	291.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	327.600.000,00	239.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	156.000.000,00	120.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.13.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	171.600.000,00	118.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.909.521.628,00	29.716.445.706,00	486.774.100,00	456.123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		DINAS PERHUBUNGAN	36.909.521.628,00	29.716.445.706,00	486.774.100,00	456.123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.638.846.123,00	8.005.249.888,00	253.474.100,00	223.468.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.940.599.273,00	4.732.528.106,00	10.474.100,00	10.474.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.770.429.273,00	4.586.684.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.170.000,00	145.844.000,00	10.474.100,00	10.474.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.339.550,00	501.835.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.998.250,00	77.937.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.516.000,00	107.438.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.258.300,00	91.257.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.995.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.572.000,00	205.401.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.089.800,00	167.767.540,00	200.000.000,00	169.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	407.089.800,00	167.767.540,00	200.000.000,00	169.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.695.933.000,00	2.527.983.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	112.773.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.563.933.000,00	2.415.209.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.884.500,00	75.135.613,00	43.000.000,00	42.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.884.500,00	75.135.613,00	43.000.000,00	42.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.318.472.900,00	14.357.106.682,00	33.300.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.318.472.900,00	14.357.106.682,00	33.300.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.718.513.200,00	12.938.745.982,00	33.300.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.599.959.700,00	1.418.360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	10.952.202.605,00	7.354.089.136,00	200.000.000,00	199.655.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10.528.459.405,00	6.931.644.070,00	200.000.000,00	199.655.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	10.528.459.405,00	6.931.644.070,00	200.000.000,00	199.655.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	423.743.200,00	422.445.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	423.743.200,00	422.445.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.677.038.703,00	6.253.942.535,00	361.756.214,00	352.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.677.038.703,00	6.253.942.535,00	361.756.214,00	352.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.444.522.403,00	3.191.442.790,00	163.261.214,00	159.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.099.900,00	29.078.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.099.900,00	29.078.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.280.873.153,00	2.103.768.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.673.153,00	2.081.988.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.520.700,00	290.182.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.000,00	14.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.601.200,00	98.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.353.300,00	31.351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.370.200,00	140.813.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.179.000,00	13.080.000,00	163.261.214,00	159.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.000,00	680.000,00	40.000.000,00	37.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.499.000,00	12.400.000,00	123.261.214,00	122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.900.000,00	640.942.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.500.000,00	99.033.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.400.000,00	541.908.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.949.650,00	114.391.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.479.850,00	52.479.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.470.000,00	12.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.800,00	49.781.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	313.348.600,00	255.230.745,00	96.005.000,00	92.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	313.348.600,00	255.230.745,00	96.005.000,00	92.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	49.999.000,00	36.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	61.870.000,00	37.209.231,00	51.430.000,00	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	34.155.000,00	15.860.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	11.899.800,00	11.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	149.999.800,00	148.257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.425.000,00	5.425.000,00	44.575.000,00	42.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.919.167.700,00	2.807.269.000,00	102.490.000,00	100.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.768.170.000,00	2.701.280.500,00	40.490.000,00	40.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.768.170.000,00	2.701.280.500,00	40.490.000,00	40.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.997.700,00	105.988.500,00	62.000.000,00	60.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	49.975.700,00	48.089.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	101.022.000,00	57.898.600,00	62.000.000,00	60.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.292.256.228,00	5.702.496.404,00	13.750.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.292.256.228,00	5.702.496.404,00	13.750.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.215.897.768,00	3.042.832.080,00	13.750.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.572.494.068,00	2.416.978.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.994.068,00	2.392.128.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.500.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.665.700,00	278.341.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.657.800,00	91.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.019.100,00	23.927.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.188.800,00	145.800.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.650.000,00	11.850.000,00	13.750.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.650.000,00	11.850.000,00	13.750.000,00	12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.088.000,00	335.662.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	30.983.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.088.000,00	304.678.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	98.610.100,00	95.967.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	98.610.100,00	95.967.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	98.610.100,00	95.967.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	185.515.800,00	176.137.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.515.800,00	176.137.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	185.515.800,00	176.137.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	2.792.232.560,00	2.387.559.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.189.192.874,00	3.853.447.940,00	49.760.000,00	46.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.189.192.874,00	3.853.447.940,00	49.760.000,00	46.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.613.312.874,00	3.424.637.044,00	49.760.000,00	46.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.006.200,00	23.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.006.200,00	23.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.424.874,00	2.607.881.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.716.164.874,00	2.545.661.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.260.000,00	62.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.935.800,00	270.572.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.000,00	9.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.060.700,00	107.042.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.002.700,00	15.002.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.874.400,00	134.129.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	49.760.000,00	46.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0	35.600.000,00	32.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	14.160.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.716.000,00	453.186.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.100.000,00	73.800.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.616.000,00	379.386.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.230.000,00	69.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.600.000,00	53.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000,00	15.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	103.939.000,00	99.976.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	103.939.000,00	99.976.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	103.939.000,00	99.976.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	79.984.000,00	42.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	79.984.000,00	42.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	79.984.000,00	42.129.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	391.957.000,00	286.704.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	391.957.000,00	286.704.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	75.634.000,00	44.325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	227.666.000,00	185.784.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.2.07.0.00.18.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	88.657.000,00	56.594.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.039.831.500,00	1.941.437.984,00	129.558.000,00	129.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.039.831.500,00	1.941.437.984,00	129.558.000,00	129.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	592.300.000,00	572.562.984,00	91.700.000,00	91.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	120.910.000,00	119.886.400,00	91.700.000,00	91.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	120.910.000,00	119.886.400,00	91.700.000,00	91.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.000.000,00	256.535.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	118.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	112.654.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.000.000,00	116.886.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	116.886.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.390.000,00	79.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.790.000,00	41.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000,00	37.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	270.276.000,00	253.239.100,00	19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.276.000,00	253.239.100,00	19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	270.276.000,00	253.239.100,00	19.304.000,00	19.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.177.255.500,00	1.115.635.900,00	18.554.000,00	18.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	509.233.100,00	490.600.800,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	509.233.100,00	490.600.800,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	668.022.400,00	625.035.100,00	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.26.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	668.022.400,00	625.035.100,00	4.304.000,00	4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	81.734.800,00	70.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81.734.800,00	70.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81.734.800,00	70.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.734.800,00	70.354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	38.925.000,00	38.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.16.0000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	42.809.800,00	31.429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	560.470.300,00	493.055.697,00	346.050.000,00	312.676.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	560.470.300,00	493.055.697,00	346.050.000,00	312.676.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	425.025.000,00	370.264.637,00	40.050.000,00	38.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	226.503.000,00	197.150.137,00	32.200.000,00	30.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	226.503.000,00	197.150.137,00	32.200.000,00	30.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	198.522.000,00	173.114.500,00	7.850.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	198.522.000,00	173.114.500,00	7.850.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	135.445.300,00	122.791.060,00	306.000.000,00	274.478.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	135.445.300,00	122.791.060,00	306.000.000,00	274.478.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	135.445.300,00	122.791.060,00	306.000.000,00	274.478.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.659.812.485,00	3.268.592.403,00	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.659.812.485,00	3.268.592.403,00	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.925.933.985,00	2.683.986.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.304.885,00	2.076.692.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.233.984.885,00	2.054.712.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.320.000,00	21.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.917.100,00	169.982.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.000,00	4.071.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.103.200,00	51.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.200,00	13.214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.279.700,00	86.095.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.732.000,00	380.009.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	4.813.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.732.000,00	375.196.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.980.000,00	57.303.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.980.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.650.000,00	33.832.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000,00	8.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	733.878.500,00	584.605.724,00	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.604.000,00	50.393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.604.000,00	50.393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.274.500,00	534.212.524,00	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	185.359.800,00	155.393.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.23	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	472.914.700,00	378.818.637,00	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	123.742.900,00	94.019.260,00	16.450.200,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	123.742.900,00	94.019.260,00	16.450.200,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.742.900,00	23.236.260,00	16.450.200,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.742.900,00	23.236.260,00	16.450.200,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.742.900,00	23.236.260,00	16.450.200,00	16.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	70.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	70.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.23.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100.000.000,00	70.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	46.417.860.806,00	40.843.850.813,00	6.857.512.110,00	3.565.713.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.804.756.909,00	28.005.858.042,00	1.534.150.000,00	1.429.034.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		DINAS PERIKANAN	30.804.756.909,00	28.005.858.042,00	1.534.150.000,00	1.429.034.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.136.777.257,00	4.687.529.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.205.000,00	86.371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.740.000,00	48.172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.465.000,00	38.198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.463.955.357,00	3.240.553.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.377.555.357,00	3.168.713.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.400.000,00	71.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.034.900,00	249.853.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.420.000,00	16.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.011.600,00	95.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.475.300,00	28.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.128.000,00	84.840.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.113.092.000,00	964.151.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.500.000,00	243.412.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.592.000,00	720.739.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.490.000,00	146.599.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.050.000,00	30.610.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.750.000,00	55.565.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.800.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.890.000,00	29.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20.816.606.200,00	19.179.019.155,00	29.400.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.816.606.200,00	19.179.019.155,00	29.400.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	20.816.606.200,00	19.179.019.155,00	29.400.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.711.263.452,00	4.003.401.756,00	1.504.750.000,00	1.399.644.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.711.263.452,00	4.003.401.756,00	1.504.750.000,00	1.399.644.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.442.174.952,00	2.850.624.662,00	865.750.000,00	777.429.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.269.088.500,00	1.152.777.094,00	639.000.000,00	622.214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	140.110.000,00	135.907.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	40.110.000,00	39.939.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.110.000,00	39.939.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	95.967.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	95.967.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.391.626.791,00	7.212.387.568,00	4.750.326.110,00	1.563.643.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	9.391.626.791,00	7.212.387.568,00	4.750.326.110,00	1.563.643.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.910.957.391,00	4.630.101.367,00	356.000.000,00	340.727.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.819.065.391,00	4.549.388.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.668.265.391,00	3.406.476.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.150.800.000,00	1.142.911.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.892.000,00	51.892.900,00	356.000.000,00	340.727.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.892.000,00	51.892.900,00	356.000.000,00	340.727.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.365.712.700,00	2.058.609.049,00	4.272.287.410,00	1.130.692.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.446.373.000,00	366.030.464,00	3.123.627.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.076.373.000,00	179.639.764,00	3.123.627.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	88.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.919.339.700,00	1.692.578.585,00	1.148.660.410,00	1.119.692.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.272.005.300,00	1.086.103.700,00	27.994.810,00	27.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	647.334.400,00	606.474.885,00	1.120.665.600,00	1.091.842.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	405.204.100,00	330.864.100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	405.204.100,00	330.864.100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000,00	73.155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	184.104.000,00	117.303.300,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	146.100.100,00	140.405.500,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	709.752.600,00	192.813.052,00	62.038.700,00	32.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	548.890.000,00	87.642.525,00	31.110.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	401.890.000,00	38.155.945,00	28.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	147.000.000,00	49.486.580,00	3.000.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	160.862.600,00	105.170.527,00	30.928.700,00	29.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.26.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	160.862.600,00	105.170.527,00	30.928.700,00	29.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.863.477.106,00	5.310.072.060,00	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.863.477.106,00	5.310.072.060,00	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.065.922.000,00	1.912.010.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.600.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.600.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.250.000,00	80.148.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.260.000,00	70.158.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.857.042.000,00	1.791.038.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.030.000,00	20.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.030.000,00	15.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.694.344.806,00	3.361.197.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.114.439.600,00	1.047.260.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.114.439.600,00	1.047.260.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	45.822.906,00	34.733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	45.822.906,00	34.733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.982.600,00	25.446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	29.982.600,00	25.446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.504.099.700,00	2.253.757.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.504.099.700,00	2.253.757.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	76.939.500,00	22.837.495,00	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000,00	6.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	30.000.000,00	6.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	46.939.500,00	16.176.495,00	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	46.939.500,00	16.176.495,00	573.036.000,00	573.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.270.800,00	14.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	26.270.800,00	14.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26.270.800,00	14.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	311.104.000,00	297.825.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	311.104.000,00	297.825.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.000.000,00	56.187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	56.187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	56.187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	86.818.000,00	84.130.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.818.000,00	84.130.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.818.000,00	84.130.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.286.000,00	157.507.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	166.286.000,00	157.507.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	83.393.000,00	83.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	82.893.000,00	74.236.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	46.896.000,00	17.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.896.000,00	17.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	46.896.000,00	17.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	46.896.000,00	17.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	46.896.000,00	17.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	84.555.886.398,00	77.131.228.595,00	2.063.376.000,00	2.024.166.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	45.209.410.388,00	42.599.568.244,00	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000		SEKRETARIAT DAERAH	45.209.410.388,00	42.599.568.244,00	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.460.392.810,00	26.383.244.189,00	1.171.995.000,00	1.158.654.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.250.000,00	31.166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.362.986.414,00	9.877.851.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.270.586.414,00	9.785.621.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.400.000,00	92.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.359.474.400,00	2.319.950.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	751.734.400,00	750.241.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.470.000,00	108.362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	789.610.000,00	752.330.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	709.660.000,00	709.016.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.779.000,00	273.240.802,00	1.140.935.000,00	1.130.004.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.900.000,00	17.710.700,00	348.700.000,00	341.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.659.000,00	10.779.400,00	44.781.600,00	44.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.220.000,00	244.750.702,00	747.453.400,00	743.571.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.587.653.170,00	4.554.228.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.810.000,00	441.667.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.127.843.170,00	4.112.560.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.909.510.500,00	5.815.747.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.775.000,00	474.968.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.787.198.000,00	4.702.573.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.900.000,00	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	628.637.500,00	621.444.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.678.211.676,00	1.592.504.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	478.446.676,00	399.999.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29.750.000,00	29.614.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.170.015.000,00	1.162.890.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	523.345.250,00	523.013.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	523.345.250,00	523.013.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	734.604.000,00	571.636.191,00	21.850.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	248.393.000,00	229.817.075,00	1.850.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.102.000,00	104.947.025,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	165.849.000,00	98.407.621,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000,00	39.913.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	117.260.000,00	98.551.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	996.578.400,00	823.904.242,00	9.210.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	403.698.000,00	335.958.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	298.667.000,00	225.336.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	294.213.400,00	262.609.130,00	9.210.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.693.674.900,00	14.541.188.001,00	196.729.000,00	192.733.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	753.699.500,00	704.446.347,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	130.365.800,00	129.402.611,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Wilayah	310.483.800,00	278.091.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	312.849.900,00	296.952.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.567.350.200,00	10.773.808.183,00	174.829.000,00	170.833.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.684.868.200,00	7.333.092.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	394.025.000,00	384.828.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.488.457.000,00	3.055.886.663,00	174.829.000,00	170.833.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	885.247.000,00	650.895.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	309.953.200,00	283.174.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	503.753.000,00	301.129.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	71.540.800,00	66.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.487.378.200,00	2.412.037.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.487.378.200,00	2.412.037.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.055.342.678,00	1.675.136.054,00	61.452.000,00	56.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	435.358.978,00	366.929.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	357.872.178,00	313.802.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	77.486.800,00	53.126.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	745.172.300,00	636.280.141,00	24.531.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	137.082.600,00	119.121.050,00	24.531.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	142.204.800,00	131.459.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	465.884.900,00	385.699.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	754.712.400,00	624.598.005,00	36.921.000,00	32.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	272.555.400,00	256.907.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	346.521.000,00	294.586.036,00	4.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	135.636.000,00	73.104.314,00	32.800.000,00	32.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	120.099.000,00	47.328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.3.29.2.10.41.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	120.099.000,00	47.328.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	39.346.476.010,00	34.531.660.351,00	633.200.000,00	616.369.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000		SEKRETARIAT DPRD	39.346.476.010,00	34.531.660.351,00	633.200.000,00	616.369.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.542.432.360,00	15.656.597.128,00	579.200.000,00	562.534.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.486.788.610,00	3.265.958.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.628.610,00	3.096.868.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.160.000,00	169.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.015.683.500,00	983.161.752,00	579.200.000,00	562.534.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.423.000,00	41.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.220.000,00	45.595.000,00	579.200.000,00	562.534.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	404.867.500,00	395.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.130.000,00	107.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000,00	118.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.043.000,00	274.040.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.090.000,00	1.196.797.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.250.000,00	117.697.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.840.000,00	1.079.100.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.862.000,00	455.953.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.807.000,00	198.617.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.475.000,00	63.736.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.150.000,00	45.340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.430.000,00	148.258.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.263.452.250,00	8.901.534.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.074.542.250,00	8.715.424.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	188.910.000,00	186.110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.002.556.000,00	853.190.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	981.010.000,00	849.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	21.546.000,00	3.194.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.804.043.650,00	18.875.063.223,00	54.000.000,00	53.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.459.967.600,00	1.642.255.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	332.378.000,00	304.172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.534.204.000,00	1.319.019.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	593.385.600,00	19.064.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.077.522.800,00	838.952.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	17.718.600,00	16.553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.718.600,00	15.542.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	328.769.000,00	175.421.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	322.800.800,00	242.776.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	390.515.800,00	388.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.047.264.050,00	4.027.983.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.139.890.000,00	1.085.586.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.123.510.000,00	672.408.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	890.192.000,00	770.269.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	885.588.000,00	660.543.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	779.406.000,00	639.679.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	228.678.050,00	199.496.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.077.775.800,00	1.728.638.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	328.630.000,00	240.026.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.198.112.000,00	1.084.717.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	260.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	11.533.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	239.500.000,00	178.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.376.329.400,00	6.038.567.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.465.902.000,00	3.441.167.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.910.427.400,00	2.597.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	128.641.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	99.959.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	28.682.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.636.542.400,00	4.598.666.261,00	54.000.000,00	53.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.623.738.000,00	4.598.666.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.42.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	12.804.400,00	0	54.000.000,00	53.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	54.218.411.397,00	48.069.027.534,00	1.918.737.605,00	1.772.457.433,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.01			PERENCANAAN	7.643.243.830,00	7.187.541.875,00	807.126.350,00	793.908.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.643.243.830,00	7.187.541.875,00	807.126.350,00	793.908.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.189.400.780,00	4.907.486.792,00	689.328.350,00	681.110.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.002.611.080,00	3.731.751.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.875.011.080,00	3.604.811.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127.600.000,00	126.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.372.700,00	356.024.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.550.700,00	118.471.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.342.000,00	55.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.330.000,00	145.162.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.175.000,00	18.119.200,00	682.000.250,00	681.110.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.175.000,00	18.119.200,00	682.000.250,00	681.110.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.742.000,00	654.941.218,00	7.328.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.420.000,00	319.403.669,00	7.328.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.322.000,00	335.537.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.500.000,00	146.649.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.500.000,00	100.502.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	46.147.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.819.457.850,00	1.795.464.693,00	93.798.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	936.329.900,00	931.766.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	42.808.900,00	42.808.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	424.975.200,00	424.786.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	468.545.800,00	464.171.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	664.631.000,00	645.272.435,00	93.798.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	381.108.800,00	374.250.235,00	93.798.000,00	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	283.522.200,00	271.022.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	218.496.950,00	218.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	218.496.950,00	218.425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	634.385.200,00	484.590.390,00	24.000.000,00	23.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	266.000.000,00	175.851.674,00	24.000.000,00	23.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000,00	52.510.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166.000.000,00	123.341.481,00	24.000.000,00	23.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	193.399.700,00	169.368.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	93.399.900,00	89.757.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	99.999.800,00	79.611.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	174.985.500,00	139.370.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.995.500,00	83.940.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	74.990.000,00	55.430.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02			KEUANGAN	40.190.001.867,00	35.045.566.899,00	1.096.611.255,00	978.548.500,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	40.190.001.867,00	35.045.566.899,00	1.096.611.255,00	978.548.500,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.088.260.467,00	29.838.251.533,00	767.611.255,00	662.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.730.000,00	106.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.730.000,00	106.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.689.198.067,00	26.513.754.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.183.878.067,00	26.031.494.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	505.320.000,00	482.259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	172.397.500,00	158.221.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	172.397.500,00	158.221.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.245.235.400,00	1.243.010.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	126.737.500,00	126.737.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.074.000,00	225.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.427.000,00	227.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.972.900,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.000.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.024.000,00	545.882.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.207.000,00	160.018.200,00	767.611.255,00	662.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.207.000,00	160.018.200,00	767.611.255,00	662.703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.412.304.000,00	1.357.773.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	793.632.000,00	751.473.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.672.000,00	606.299.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.188.500,00	299.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.738.500,00	189.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.450.000,00	109.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.748.288.500,00	3.374.395.470,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.398.313.500,00	2.269.698.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	49.919.900,00	47.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.969.600,00	49.967.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	841.933.000,00	823.149.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	830.924.000,00	817.678.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	59.965.000,00	52.687.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	565.602.000,00	478.950.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	950.000.000,00	896.490.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	390.251.000,00	386.513.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	137.903.000,00	131.834.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	89.967.200,00	86.740.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108.220.000,00	107.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	223.658.800,00	184.071.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	399.975.000,00	208.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.118.500,00	22.938.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.358.600,00	71.196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	55.964.000,00	48.810.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	37.312.200,00	9.677.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	112.140.000,00	43.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.081.700,00	11.636.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.308.328.400,00	446.932.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.308.328.400,00	446.932.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	88.566.900,00	47.295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	41.691.400,00	37.936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	734.482.000,00	146.274.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	271.459.300,00	88.402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.439.700,00	101.835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.689.100,00	25.188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.045.124.500,00	1.385.987.321,00	329.000.000,00	315.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.045.124.500,00	1.385.987.321,00	329.000.000,00	315.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	219.891.200,00	81.226.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	15.322.000,00	15.021.546,00	229.000.000,00	216.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	548.706.400,00	482.740.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	102.077.600,00	54.056.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	556.501.900,00	154.083.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.52.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	602.625.400,00	598.858.550,00	100.000.000,00	99.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.282.955.500,00	4.778.692.116,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.282.955.500,00	4.778.692.116,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.753.396.750,00	3.535.990.117,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.037.704.694,00	2.854.169.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.017.704.694,00	2.834.179.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.648.000,00	220.562.398,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.989.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.834.000,00	62.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.250.000,00	11.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.564.000,00	127.355.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.080.056,00	401.918.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000,00	101.118.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.080.056,00	300.800.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.964.000,00	59.339.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.864.000,00	37.834.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.100.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.529.558.750,00	1.242.701.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	325.862.550,00	317.121.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	260.969.000,00	255.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	39.893.750,00	38.723.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	24.999.800,00	23.183.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	623.131.300,00	465.108.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	510.062.000,00	364.297.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	113.069.300,00	100.810.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	550.565.000,00	447.382.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	266.884.800,00	208.404.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	283.680.200,00	238.977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.999.900,00	13.089.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	29.999.900,00	13.089.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.000.000,00	28.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.000.000,00	28.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.000.000,00	28.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	50.000.000,00	28.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.53.0000	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000,00	28.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.052.210.200,00	1.028.554.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	175.360.600,00	157.173.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	175.360.600,00	157.173.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	516.190.400,00	513.228.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	241.463.200,00	241.260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	274.727.200,00	271.968.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	360.659.200,00	358.152.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	353.656.200,00	351.153.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.51.0000	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	7.003.000,00	6.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.725.260.137,00	9.367.178.747,00	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	9.725.260.137,00	9.367.178.747,00	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000		INSPEKTORAT	9.725.260.137,00	9.367.178.747,00	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.176.983.437,00	6.885.491.547,00	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.555.447.937,00	4.324.755.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.430.947.937,00	4.215.978.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.500.000,00	108.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	411.205.600,00	405.380.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	411.205.600,00	405.380.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.727.500,00	1.082.593.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.500,00	12.995.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.641.000,00	8.100.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.455.600,00	120.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.417.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.655.400,00	899.546.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	174.400.000,00	124.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.973.000,00	758.104.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.130.000,00	80.508.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.843.000,00	677.596.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.629.400,00	314.657.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.020.000,00	16.982.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.166.400,00	26.699.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.270.000,00	22.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.173.000,00	248.735.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.211.660.000,00	2.171.939.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.914.707.800,00	1.886.338.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	231.572.000,00	230.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	92.216.400,00	92.058.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	432.867.000,00	426.836.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	30.735.800,00	29.430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	589.055.400,00	589.055.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	334.932.600,00	318.656.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	203.328.600,00	199.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	296.952.200,00	285.600.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	296.952.200,00	285.600.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	336.616.700,00	309.747.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	93.813.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	93.813.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	242.803.700,00	218.222.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20.123.000,00	15.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57.035.000,00	52.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.551.200,00	65.714.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.61.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	93.094.500,00	85.241.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	26.196.070.285,00	24.746.190.424,00	587.389.240,00	561.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	26.196.070.285,00	24.746.190.424,00	587.389.240,00	561.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000		KECAMATAN SIBERUT UTARA	3.234.759.652,00	3.151.350.735,00	21.795.700,00	21.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.868.919.252,00	2.792.179.235,00	15.795.700,00	15.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.000,00	39.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.000,00	39.914.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.376.029.352,00	2.299.575.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.064.352,00	2.143.802.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.965.000,00	155.772.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.335.900,00	216.134.100,00	15.795.700,00	15.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.412.500,00	2.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.402.400,00	66.402.400,00	15.795.700,00	15.795.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.001.000,00	144.882.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.555.000,00	44.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.095.000,00	28.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.434.000,00	75.389.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.434.000,00	75.389.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.434.000,00	75.389.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77.082.400,00	76.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.082.400,00	76.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.007.400,00	40.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	135.115.000,00	134.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	135.115.000,00	134.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.115.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.209.000,00	72.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.209.000,00	72.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.71.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	78.209.000,00	72.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000		KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2.294.666.531,00	2.191.259.903,00	55.858.000,00	55.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.005.620.828,00	1.909.493.203,00	55.858.000,00	55.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.990.000,00	69.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.990.000,00	69.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.489.412.848,00	1.395.502.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.316.775.848,00	1.225.116.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.637.000,00	170.385.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.473.500,00	197.821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.500,00	9.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.581.000,00	108.643.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.344.480,00	1.300.000,00	55.858.000,00	55.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0	32.219.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.344.480,00	1.300.000,00	23.639.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.400.000,00	245.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.400.000,00	239.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.995.603,00	63.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.995.603,00	63.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.995.603,00	63.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.159.600,00	60.538.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.349.600,00	33.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.349.600,00	33.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.810.000,00	27.494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.810.000,00	27.494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	77.903.000,00	77.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.987.500,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.987.500,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.72.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	79.987.500,00	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000		KECAMATAN SIBERUT BARAT	2.178.386.940,00	2.017.643.596,00	70.428.390,00	65.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.921.548.440,00	1.768.686.596,00	70.428.390,00	65.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.496.500,00	57.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.496.500,00	57.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.399.576.330,00	1.273.176.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.090.672.330,00	974.101.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	308.904.000,00	299.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.331.610,00	172.820.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.844.000,00	4.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.281.200,00	40.656.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.508.410,00	2.508.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.698.000,00	125.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	70.428.390,00	65.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0	35.763.090,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	34.665.300,00	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.144.000,00	251.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.144.000,00	230.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.400.000,00	38.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.400.000,00	38.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.400.000,00	38.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.446.000,00	39.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.446.000,00	39.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.984.000,00	18.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	95.861.000,00	95.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95.861.000,00	95.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	73.535.000,00	73.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.326.000,00	22.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.131.500,00	74.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.131.500,00	74.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.73.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75.131.500,00	74.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2.190.458.062,00	1.925.994.058,00	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.893.034.062,00	1.712.108.658,00	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.991.000,00	38.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.991.000,00	38.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.370.471.362,00	1.238.032.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.179.157.362,00	1.067.743.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.314.000,00	170.288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.299.700,00	170.021.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.997.500,00	4.241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.695.800,00	44.659.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.400,00	8.605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.606.000,00	112.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.272.000,00	238.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.272.000,00	226.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.480.000,00	18.903.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.480.000,00	18.903.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.480.000,00	18.903.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.946.000,00	43.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.946.000,00	43.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.991.000,00	33.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.955.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000,00	120.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.000.000,00	120.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	20.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.998.000,00	31.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.998.000,00	31.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.74.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.998.000,00	31.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000		KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2.667.332.016,00	2.530.329.441,00	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.374.815.966,00	2.254.158.891,00	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.455.500,00	39.176.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.455.500,00	39.176.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.817.714.836,00	1.718.290.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.174.836,00	1.629.550.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.540.000,00	88.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.932.330,00	200.655.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.250,00	7.998.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.096.080,00	6.096.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.106.000,00	49.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.640.000,00	11.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.092.000,00	117.746.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	41.652.700,00	41.652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0	23.872.700,00	23.872.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.344.000,00	202.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.344.000,00	190.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.369.300,00	93.759.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.870.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.858.900,00	49.112.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.059.000,00	15.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.059.000,00	15.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.799.900,00	33.227.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.799.900,00	33.227.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.497.650,00	39.819.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.497.650,00	39.819.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.499.900,00	23.499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.997.750,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.203.000,00	104.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.203.000,00	104.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	81.264.000,00	81.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.939.000,00	23.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.956.500,00	82.393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.956.500,00	82.393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	59.994.500,00	59.273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.75.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.962.000,00	23.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000		KECAMATAN SIPORA UTARA	2.497.324.713,00	2.364.359.740,00	162.551.700,00	162.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.311.755.113,00	2.180.711.240,00	162.551.700,00	162.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.341.100,00	75.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.546.476.428,00	1.420.761.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.524.976.428,00	1.399.261.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.539.600,00	199.093.850,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.928.800,00	77.925.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.505.800,00	12.375.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.105.000,00	102.792.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.012.570,00	1.011.800,00	127.551.700,00	127.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	235.000,00	235.000,00	33.024.000,00	33.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	777.570,00	776.800,00	74.527.700,00	74.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0	20.000.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.448.000,00	334.954.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	23.636.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.448.000,00	311.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.937.415,00	149.547.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000,00	23.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.350.000,00	10.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.587.415,00	82.244.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.037.200,00	53.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	53.037.200,00	53.036.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	29.999.900,00	29.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.037.300,00	23.036.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.242.400,00	19.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.242.400,00	19.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.242.400,00	19.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.290.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.290.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.76.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	66.290.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000		KECAMATAN SIPORA SELATAN	3.110.945.080,00	2.913.707.248,00	49.400.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.357.580,00	2.631.818.148,00	49.400.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.146.976.080,00	2.038.113.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.064.956.080,00	1.958.213.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.020.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.471.500,00	144.730.350,00	5.000.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0	5.000.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.740.000,00	63.670.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.732.000,00	66.660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	44.400.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	44.400.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.000.000,00	352.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00	328.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.999.900,00	99.975.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	49.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000,00	49.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.999.900,00	34.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.587.700,00	77.034.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.587.700,00	77.034.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.587.700,00	77.034.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70.000.000,00	69.928.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000,00	69.928.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.77.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	70.000.000,00	69.928.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000		KECAMATAN PAGAI UTARA	2.376.943.357,00	2.233.695.982,00	30.034.250,00	30.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.044.128.817,00	1.922.996.682,00	22.784.250,00	22.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.258.717,00	1.337.372.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.302.495.717,00	1.182.104.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.763.000,00	155.267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.638.100,00	259.524.555,00	22.784.250,00	22.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	22.784.250,00	22.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.691.600,00	58.691.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.121.500,00	10.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.825.000,00	190.711.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.232.000,00	326.099.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.232.000,00	314.099.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	112.509.640,00	108.297.500,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.227.840,00	57.016.300,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.227.840,00	57.016.300,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51.281.800,00	51.281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.281.800,00	51.281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123.956.900,00	122.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	123.956.900,00	122.060.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	108.370.000,00	106.498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.586.900,00	15.561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96.348.000,00	80.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96.348.000,00	80.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60.027.000,00	44.038.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.78.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	36.321.000,00	36.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000		KECAMATAN PAGAI SELATAN	2.398.902.664,00	2.280.985.294,00	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.168.911.664,00	2.059.699.494,00	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.754.000,00	99.753.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.754.000,00	99.753.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.504.113.664,00	1.404.580.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.299.870.664,00	1.204.765.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.243.000,00	199.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.789.000,00	223.485.255,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.174.000,00	42.983.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.115.000,00	177.002.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.120.000,00	311.924.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.320.000,00	310.024.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.135.000,00	19.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.105.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	34.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000,00	34.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000,00	34.942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.997.000,00	38.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.997.000,00	38.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.997.000,00	24.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.998.000,00	74.647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.998.000,00	74.647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.998.000,00	24.797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.996.000,00	73.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.996.000,00	73.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.79.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	74.996.000,00	73.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000		KECAMATAN SIKAKAP	3.246.351.270,00	3.136.864.427,00	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.031.127.270,00	2.934.255.427,00	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.577.553.670,00	2.486.845.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.284.670,00	2.254.667.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.269.000,00	232.177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.701.600,00	227.679.055,00	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.600.000,00	8.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000,00	0	75.497.500,00	75.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.992.600,00	69.868.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.429.000,00	149.240.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.272.000,00	205.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	32.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.272.000,00	172.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.600.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.600.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17.600.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.730.000,00	55.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.730.000,00	55.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.180.000,00	21.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.394.000,00	102.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.394.000,00	102.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	95.672.000,00	95.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.722.000,00	6.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.500.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.500.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.80.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.500.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.782.815.179,00	24.316.694.687,00	106.314.150,00	50.722.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.782.815.179,00	24.316.694.687,00	106.314.150,00	50.722.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000		KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.782.815.179,00	24.316.694.687,00	106.314.150,00	50.722.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.436.374.779,00	1.321.898.739,00	56.499.000,00	44.742.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.029.189.279,00	945.834.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	986.589.279,00	917.754.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.549.500,00	159.044.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.530.700,00	61.186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.800,00	7.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.490.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.529.000,00	71.858.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	56.499.000,00	44.742.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0	32.219.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	24.280.000,00	22.092.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.144.000,00	189.759.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	10.515.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.144.000,00	179.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.492.000,00	27.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.992.000,00	19.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasikbraka	1.164.658.500,00	1.126.680.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.491.490.600,00	21.457.099.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.491.490.600,00	21.457.099.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21.433.472.600,00	21.432.244.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	58.018.000,00	24.854.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74.052.900,00	22.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74.052.900,00	22.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74.052.900,00	22.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	274.256.900,00	195.711.187,00	49.815.150,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	274.256.900,00	195.711.187,00	49.815.150,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	73.338.000,00	64.165.500,00	49.815.150,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74.996.900,00	13.261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.922.000,00	118.284.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	341.981.500,00	192.880.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	341.981.500,00	192.880.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.053.900,00	36.432.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.818.000,00	41.178.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	54.799.800,00	28.560.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.08.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	177.309.800,00	86.708.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00



Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	74.953.685.319,04	94.948.877.650,50
SUBTOTAL (1-2)	0,00	(697.499.996,00)
SILPA/(SIKPA)	81.541.900.707,20	74.953.685.319,04
SUBTOTAL (3+4)	81.541.900.707,20	74.256.185.323,04
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	697.499.996,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	81.541.900.707,20	74.953.685.319,04

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	901.555.610.851,19	879.679.571.495,21	21.876.039.355,98	2,49
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	53.718.125.567,19	48.298.281.365,21	5.419.844.201,98	11,22
7.1.01	Pajak Daerah-LO	9.609.461.618,24	8.732.369.171,00	877.092.447,24	10,04
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	15.609.390.428,00	13.592.672.949,00	2.016.717.479,00	14,84
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	16.476.655.254,00	14.907.522.965,00	1.569.132.289,00	10,53
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	12.022.618.266,95	11.065.716.280,21	956.901.986,74	8,65
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	53.718.125.567,19	48.298.281.365,21	5.419.844.201,98	11,22
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	821.697.658.024,00	820.298.761.084,00	1.398.896.940,00	0,17
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	751.416.175.442,00	756.544.364.389,00	(5.128.188.947,00)	(0,68)
7.2.01.01	Dana Bagi Hasil	15.162.656.814,00	19.852.823.305,00	(4.690.166.491,00)	(23,62)
7.2.01.02	Dana Alokasi Umum	593.136.045.604,00	569.588.001.480,00	23.548.044.124,00	4,13
7.2.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	60.558.056.051,00	89.054.044.924,00	(28.495.988.873,00)	(32,00)
7.2.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	82.559.416.973,00	78.049.494.680,00	4.509.922.293,00	5,78
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	751.416.175.442,00	756.544.364.389,00	56.391.984.857,00	7,45
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.978.611.000,00	19.459.955.000,00	(19.459.955.000,00)	100,00
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	19.459.955.000,00	(19.459.955.000,00)	(100,00)
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	20.978.611.000,00	0,00	20.978.611.000,00	100,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.978.611.000,00	19.459.955.000,00	(19.459.955.000,00)	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.302.871.582,00	44.294.441.695,00	5.008.429.887,00	11,31
7.2.02	Bantuan Keuangan	49.302.871.582,00	44.294.441.695,00	5.008.429.887,00	11,31
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.302.871.582,00	44.294.441.695,00	5.008.429.887,00	11,31
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	821.697.658.024,00	753.121.088.249,00	68.576.569.775,00	9,11

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	26.139.827.260,00	11.082.529.046,00	15.057.298.214,00	135,87
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	18.194.804.877,00	4.067.960.314,00	14.126.844.563,00	347,27
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.945.022.383,00	7.014.568.732,00	930.453.651,00	13,26
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	26.139.827.260,00	11.082.529.046,00	15.057.298.214,00	135,87
	JUMLAH PENDAPATAN	901.555.610.851,19	879.679.571.495,21	21.876.039.355,98	2,49
8	BEBAN	878.789.720.284,98	818.070.598.467,34	60.719.121.817,64	7,42
8.1	BEBAN OPERASI	672.835.688.284,43	621.846.939.763,34	50.988.748.521,09	8,20
8.1.01	Beban Pegawai	331.088.804.278,00	274.844.651.251,00	56.244.153.027,00	20,46
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	297.816.984.656,07	317.601.602.138,68	(19.784.617.482,61)	(6,23)
8.1.04	Beban Subsidi	7.208.422.603,00	7.585.855.000,00	(377.432.397,00)	(4,98)
8.1.05	Beban Hibah	35.433.087.998,00	20.591.050.126,00	14.842.037.872,00	72,08
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	941.555.840,00	980.807.665,00	(39.251.825,00)	(4,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	346.832.909,36	242.973.582,66	103.859.326,70	42,75
	JUMLAH BEBAN OPERASI	672.835.688.284,43	576.307.230.876,83	96.528.457.407,60	16,75
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.447.983.860,55	134.707.134.318,00	5.740.849.542,55	4,26
8.1.08.01	Beban Penyusutan dan Peralatan Mesin	27.682.479.035,17	26.745.277.673,00	937.201.362,17	3,50
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.702.738.278,00	13.912.629.755,00	790.108.523,00	5,68
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.742.779.472,00	93.752.301.240,00	2.990.478.232,00	3,19
8.1.08.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.319.987.075,38	296.925.650,00	1.023.061.425,38	344,55
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.447.983.860,55	134.707.134.318,00	5.740.849.542,55	4,26
8.3	BEBAN TRANSFER	64.480.186.519,00	60.597.292.380,00	3.882.894.139,00	6,41
8.3.01	Beban Bagi Hasil	3.257.906.575,00	1.962.033.191,00	1.295.873.384,00	66,05
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	61.222.279.944,00	58.635.259.189,00	2.587.020.755,00	4,41
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	64.480.186.519,00	60.597.292.380,00	3.882.894.139,00	6,41
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	1.025.861.621,00	919.232.006,00	106.629.615,00	11,60
8.2.01	Beban Tidak Terduga	1.025.861.621,00	919.232.006,00	106.629.615,00	11,60
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	1.025.861.621,00	919.232.006,00	106.629.615,00	11,60
	JUMLAH BEBAN	878.789.720.284,98	818.070.598.467,34	60.719.121.817,64	7,42
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	22.765.890.566,21	61.608.973.027,87	(38.843.082.461,66)	(63,05)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	5.372.399,87	(5.372.399,87)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	5.372.399,87	(5.372.399,87)	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	5.372.399,87	(5.372.399,87)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(5.372.399,87)	5.372.399,87	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00	(38.837.710.061,79)	(63,04)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00	(38.837.710.061,79)	(63,04)

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(2.340.174.103,86)	(15.754.768.342,73)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
KOREKSI KAS	(26.520.000,00)	(99.933.134,95)
KOREKSI PIUTANG	1.879.233.352,00	(3.946.795.542,45)
KOREKSI INVESTASI	(856.410.125,86)	(6.478.617.641,33)
KOREKSI ASET TETAP	(2.798.675.307,00)	(5.039.352.024,00)
KOREKSI ASET LAINNYA	(138.051.063,00)	(190.070.000,00)
KOREKSI UTANG	(399.750.960,00)	
EKUITAS AKHIR	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.155.724.653.157,52	2.134.858.612.488,89
1.1	ASET LANCAR	109.345.362.300,77	97.329.170.945,73
1.1.01	Kas dan Setara Kas	81.800.332.964,21	75.217.072.264,09
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	76.605.490.586,30	70.030.184.857,69
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	16.000.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.359.999,42
1.1.01.05	Kas Dana BOS	0,00	388.390.595,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.420.322.199,96	2.201.801.176,98
1.1.01.07	Kas Lainnya	79.064.597,95	2.575.335.635,00
	Kas Dana BOSP	419.227.687,00	
	Kas Dana BOK Puskesmas	2.276.227.893,00	
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	7.056.668.243,00	6.390.425.708,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	683.168.404,00	441.026.549,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.656.686.710,45	3.971.962.209,12
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	17.281.034.849,00	11.885.571.768,00
1.1.09	Piutang Lainnya	349.721.076,36	349.721.076,36
1.1.10	Penyisihan Piutang	(9.404.022.815,41)	(9.057.189.906,05)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	69.472.222,22	51.375.000,00
1.1.12	Persediaan	5.852.300.646,94	8.079.206.277,21
	JUMLAH ASET LANCAR	109.345.362.300,77	97.329.170.945,73
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44
1.3	ASET TETAP	1.874.259.229.396,36	1.861.884.753.801,53
1.3.01	Tanah	83.765.763.996,00	83.456.093.696,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02	Peralatan dan Mesin	413.056.186.352,30	399.214.891.749,30
1.3.03	Gedung dan Bangunan	788.628.146.683,94	762.229.234.027,94
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.626.537.273.094,03	1.528.401.837.503,03
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	23.943.373.914,00	22.744.893.094,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	83.400.216.814,00	78.704.126.643,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.145.071.731.457,91)	(1.012.866.322.911,74)
	JUMLAH ASET TETAP	1.874.259.229.396,36	1.861.884.753.801,53
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	80.769.159.313,81	83.437.375.469,19
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	4.673.871.279,00	4.712.877.342,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402.790.000,00	402.790.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	9.377.393.876,82	9.065.150.876,82
1.5.04	Aset Lain-lain	238.783.143.792,00	231.648.748.744,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.723.617.126,82)	(7.403.630.051,44)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(163.744.422.507,19)	(156.658.148.442,19)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.669.587.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	80.769.159.313,81	83.437.375.469,19
	JUMLAH ASET	2.155.724.653.157,52	2.134.858.612.488,89
2	KEWAJIBAN	1.119.612.553,28	679.288.347,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.119.612.553,28	679.288.347,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	250.482.566,00	287.404.926,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	54.833.333,33	6.800.000,00
2.1.06	Utang Belanja	814.296.653,95	385.083.421,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.119.612.553,28	679.288.347,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.119.612.553,28	679.288.347,00
3	EKUITAS	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89
3.1	EKUITAS	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89
3.1.01	Ekuitas	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89
	JUMLAH EKUITAS	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.155.724.653.157,52	2.134.858.612.488,89

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Uraian	Dalam Rupiah	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	9.112.561.267,24	8.514.261.917,00
Penerimaan Retribusi Daerah	15.367.248.573,00	13.344.054.501,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	14.907.522.965,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	12.096.583.288,95	10.416.938.845,54
Penerimaan Dana Bagi Hasil	16.832.243.814,00	20.072.513.537,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	593.136.045.604,00	569.588.001.480,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	60.558.056.051,00	89.054.044.924,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	82.559.416.973,00	78.049.494.680,00
Penerimaan Dana Insentif	0,00	19.459.955.000,00
Penerimaan Dana Desa	46.496.234.000,00	46.289.511.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	43.907.408.501,00	41.977.007.014,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	1.660.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.945.022.383,00	7.014.568.732,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	925.466.086.709,19	920.347.874.595,54
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	331.088.804.278,00	274.844.651.251,00
Pembayaran Barang dan Jasa	289.506.143.986,02	309.205.396.703,00
Pembayaran Subsidi	7.208.422.603,00	7.585.855.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	35.433.087.998,00	20.513.398.438,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	941.555.840,00	980.807.665,00
Pembayaran Tak Terduga	1.025.861.621,00	919.232.006,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	3.257.906.575,00	1.962.033.191,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	107.718.513.944,00	104.924.770.189,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	776.180.296.845,02	720.936.144.443,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	149.285.789.864,17	199.411.730.152,54
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	637.310.100,00

Uraian	2024	2023
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	0,00	637.310.100,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Perolehan Tanah	213.300.000,00	199.222.800,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	23.182.154.448,00	33.569.000.163,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	26.067.914.028,00	65.815.959.222,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.142.885.630,00	118.659.040.585,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.775.475.370,00	1.666.699.814,00
Perolehan Aset Lainnya	315.845.000,00	134.310.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	142.697.574.476,00	220.044.232.584,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(142.697.574.476,00)	(219.406.922.484,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.458.594,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	10.458.594,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47.380.954,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	47.380.954,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(36.922.360,00)	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	6.551.293.028,17	(19.995.192.331,46)
Saldo Awal Kas	74.484.067.946,04	94.538.782.580,50
Koreksi SiLPA	0,00	(59.522.303,00)
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	74.484.067.946,04	94.479.260.277,50
Saldo Akhir Kas	81.035.360.974,21	74.484.067.946,04

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Informasi Umum
	1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA
	2.4 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
	3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijaka Akuntansi
	4.1 Dasar Penyajian Laporan Keuangan
	4.2 Entitas Pelapaoran Keuangan
	4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan
	4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyususna Laporan
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
	5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
	5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
	5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Pengungkapan Informasi Lainnya
BAB V	Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Peningkatan pengelolaan keuangan secara Transparan dan Akuntabilitas merupakan salah satu upaya agar tata kelola pemerintahan yang baik dan aman dapat diwujudkan. Semua proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dapat mencerminkan dan memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin komplek, sehingga prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat terpenuhi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas serta aman, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan. Agar Laporan Keuangan lebih jelas dan informatif sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami isi dari pada laporan keuangan dimaksud dan memudahkan pengguna dalam memahami isi Laporan Keuangan dan menghindari kesalahan dalam membaca Laporan Keuangan, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini akan dijelaskan secara rinci dan wajar yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 5 September 2024.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. LPSAL 2024 merupakan salah satu dasar dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang tersaji dalam laporan ini tertanggal 31 Desember 2024.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode pelaporan yaitu per 31 Desember 2024, serta saldo



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

a. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2024. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi kewenangannya. Laporan Keuangan SKPD ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disampaikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada publik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah, adapun landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2019. Daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai berbeda dengan kabupaten/kota lain yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, dimana datarannya terpisah dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, dengan perbatasan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Siberut, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia yang terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara Selatan dan 98 pulau kecil lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari 99 Pulau tersebut, satu pulau telah dinyatakan hilang, yaitu Pulau Sibikti yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya.

Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara daratan, sungai, dan bukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerah seluruh kecamatan dari permukaan laut adalah dua meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara, untuk mencapai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, harus ditempuh melalui jalur laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing Ibu kota Kecamatan ke Kota Padang ataupun ke Ibu kota Kabupaten harus ditempuh melalui jalur laut kecuali dari Padang ke Ibukota Kabupaten (PP) bisa ditempuh melalui jalur udara dua kali seminggu.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 Kecamatan, 43 desa dan dusun menjadi 341 dusun yakni:

Tabel 2.1.1. Data Wilayah Kab. Kep. Mentawai

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
1.	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2.	Sikakap	Taikako	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	25
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9.	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi	3	29
	Jumlah		43	341

(sumber data BPS: KKMDA – 2024)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 berjumlah 91.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,56%. Berikut laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023 (%) dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan:

Tabel 2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai



(sumber data BPS: KKMDA – 2024)

Jika dilihat dari persentase penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat rata-rata penyebaran penduduk di sepuluh kecamatan sebesar 9,99%, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 2.1.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.1.4. Persentase Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024



(sumber data BPS: KKMDA – 2024)

Dari gambar dapat dilihat persentase penduduk terbanyak yaitu di kecamatan Sipora Utara, hal ini disebabkan wilayah Sipora Utara merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Tuapejat.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua masa pemerintahan diemban oleh Penjabat Bupati kepulauan Mentawai Bapak Fernando Jongguran Sirait yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI untuk melanjutkan tugas dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati definitif untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2024 telah dilakukan Pemilihan Umum serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun hasil pemilihan umum serentak tersebut terpilih 20 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berjumlah 4 orang, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 4 orang, Partai Demokrat terpilih 4 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 3 orang, Partai Golongan Karya (GOLKAR) terpilih 1 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berjumlah 1 orang dan dari Partai PSI berjumlah 1 orang. Pada tanggal 2 September 2024 telah dilakukan Pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 sekaligus pembubaran anggota DPRD periode 2019-2024 tersebut oleh Bapak Syafrizal Ketua Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 171-615-2024 tanggal tertanggal 26 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah melaksanakan pemilihan umum serentak yaitu pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif periode 2025-2030, dari tiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Dr.Rinto Wardana, S.H, M.H dan Jakop Saguruk, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang kepala daerah dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil yang berjumlah 2.347 orang, terdiri dari 10 orang pegawai golongan I, 413 orang pegawai golongan II, 1.641 orang pegawai golongan III, 283 orang golongan IV dan 1.013 orang Pegawai PPPK. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki berjumlah 1.169 orang dan Pegawai Perempuan berjumlah 1.278 orang, sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan jabatan eselon antara lain; pegawai Eselon II berjumlah 27 orang, pejabat eselon III berjumlah 102 orang, pejabat eselon IV berjumlah 130 orang. Pada Tahun 2024 terdapat tenaga fungsional bidang Pendidikan sebanyak 781 orang, tenaga fungsional bidang kesehatan sebanyak 303 dan fungsional lainnya sebanyak 211 orang.

2.2 Indikator Ekonomi Makro

Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi trigger bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi. dengan penguatan sektor layanan dasar dan layanan publik melalui alokasi anggaran yang memadai maka diharapkan pada akhir tahun 2023 berbagai persoalan dalam penerapan standar pelayanan minimal dapat di minimalisir dan pada akhirnya mampu mengurangi beban msyarakat khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nasional terutama dalam penguatan pelayanan

dasar, peningkatan ekonomi dan mengurangi beban dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2023 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting.
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi sebagai prasyarat pengembangan layanan dasar dan sektor ekonomi senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Membuka akses dan memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk mendorong aktivitas sektor riil, jasa, dan industri berjalan normal.
4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah.
5. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan krisis keuangan global pada kelesuan pasar ekspor dan tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing. Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) Tahun terakhir (2017 - 2022) dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mencapai 63,13 sedangkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2022 mencapai 62,19 jika dibandingkan dengan Tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 0,94 poin. Gambaran IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Jika dilihat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung meningkat dari 61,26 menjadi 63,13.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebesar Rp3.191.296.230.000 sedangkan Tahun 2021 PDRB sebesar Rp3.041.549.230.000. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2021 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp149.746.230.000,00 atau 4,69% dari Tahun sebelumnya. Distribusi PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditopang oleh kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 51,08%, kontribusi konsumsi Pemerintah sebesar 14,86%, kontribusi pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,94%.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94%, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding Tahun 2021 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,89% artinya meningkat sebesar 2,04%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada tahun 2022 yang tertinggi adalah pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,72% sedangkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 3,66%. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,36%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai diatas Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumatera Barat, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 13,72% sedangkan Provinsi Sumatera Barat dikisaran 9,36%.

4) Tingkat Inflasi

Persentase laju inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih merujuk pada laju inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena jumlah komoditas dan pasar belum memenuhi dan masih banyak barang-barang komoditas yang didatangkan dan dibawa dari Kota Padang.

Menurut data BPS pada bulan November Tahun 2023 Secara agregat, inflasi *m-to-m* gabungan 2 kota tercatat sebesar 0,57 persen. Hingga November 2023, secara *year to date* (*y-to-d*) laju inflasi Kota Padang sebesar 2,20 persen dan laju inflasi Kota Bukittinggi sebesar 2,02 persen. Secara agregat, inflasi *y-to-d* gabungan 2 kota tercatat sebesar 2,18 persen. Pada November 2023, inflasi *year on year* (*y-on-y*) Kota Padang sebesar 3,20 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,22 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 117,18. Secara agregat, inflasi *y-on-y* gabungan 2 kota sebesar 3,14 persen dengan IHK sebesar 117,22.

Pada November 2023, secara *month to month* (*m-to-m*) terjadi inflasi di Kota Padang sebesar 0,60 persen dan di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,34 persen.

Kebijakan fiskal/keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun anggaran 2024 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2024;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2024;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023;
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-414 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.
6. Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-415 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Kerja/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.3 Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun anggaran berjalan terjadi 2 kali perubahan penjabaran APBD dalam rangka penyesuaian anggaran karena adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan dari pemerintah daerah. Perubahan anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan atau pergeseran anggaran pertama dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pergeseran anggaran I dilakukan untuk:
 - memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung transformasi teknologi kesehatan untuk menunjang satu data kesehatan pada platform satu sehat perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk penyediaan layanan sistem informasi Puskesmas berbasis elektronik atau sejenisnya;
 - memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024.
- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Pergeseran II), tanggal 10 Juni 2024. Pergeseran II APBD Tahun 2024 dilaksanakan untuk:
 - Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 48.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap SiLPA yang berdampak pada penyesuaian anggaran
 - untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangundangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya;
- 3) pada akhir triwulan 3 tahun 2024 dilakukan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 5 September 2024. Perubahan APBD Tahun 2024 pada prinsipnya dilakukan karena mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodir dalam APBD yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:
 - a. Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya perubahan pencapaian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- target pendapatan antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Lain-Lain Pendapatan Daerah.
- b. Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
 - c. Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Juli 2024 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana Pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara total penyesuaian APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.1. Penyesuaian APBD Kab. Kep. Mentawai Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Sebelum	Setelah	Tambah/
		Perubahan	Perubahan	Kurang
1	Pendapatan	957.523.946.703,00	962.731.203.206,00	(5.207.256.503,00)
2	Belanja	1.007.198.699.186,00	1.037.684.888.525,00	(30.486.189.339,00)
3	Surplus/Defisit	(49.674.752.483,00)	(74.953.685.319,00)	25.278.932.836,00
4	Pembiayaan :			
	- Penerimaan	49.674.752.483,00	74.953.685.319,00	(25.278.932.836,00)
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	- Pembiayaan Netto	49.674.752.483,00	74.953.685.319,00	(25.278.932.836,00)
5	SILPA/SIKPA	0,00	0,00	0,00

2.4 Kebijakan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganut Prinsip Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jelas dan terukur yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD;
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD;
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya.

Kemampuan keuangan daerah tahun 2024 dapat digambarkan dari evaluasi selama satu tahun pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD selama satu tahun terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran seperti adanya kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi, stunting, kemiskinan ekstrem serta pengendalian Inflasi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyeimbangkan antara potensi pertumbuhan pendapatan yang belum maksimal dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Maka pada perubahan APBD dilakukan penyesuaian belanja terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 serta menyesuaikan target pendapatan daerah dengan tambahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Semua alokasi dana transfer tersebut telah dicatat dalam Perubahan APBD.

Alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam skema anggaran Dana Insentif Fiskal dan penyesuaian DAU yang ditentukan penggunaannya. Alokasi dana transfer pemerintah daerah diberikan dalam bentuk dana bagi hasil Provinsi Sumatera Barat serta Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat.

2.4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin membesarkan peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:
 - Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
 - Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak.
 - Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pajak Badan Keuangan Daerah pada sector-sektor penghasil.
- d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, sumber daya manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
- f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
- g) Penyuluhan peraturan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran pajak daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Transfer diantaranya adalah:

- a. Pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana transfer.
- b. Melakukan updating data secara berkelanjutan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.4.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

2) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan prediksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama TA 2024 antara lain:

- a) Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di puskesmas dan rujukan ke RSUD.
- c) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkungan urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
- d) Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
- e) Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal yang berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
- g) Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *pro-environment* yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara untuk menghindari degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
- h) Pemanfaatan sisa dana dari kegiatan tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dalam bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.
- i) Efektivitas dan efisiensi serta rasionalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2024 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan manajemen daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam keadaan defisit sebesar (Rp74.953.685.319,00) maka dilakukan kebijakan dengan menggunakan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.953.685.319,04.

2.4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pasca tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2024.
- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga).

Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.

2.4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok hutang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- 1) Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- 3) Pembayaran pokok hutang adalah jumlah pembayaran pokokhutang yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- 4) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

2.5 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp925.466.086.709,19 atau 96,13% dari target pendapatan sebesar Rp962.731.203.206,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp920.985.184.695,54 atau 97,54%, maka mengalami peningkatan sebesar Rp4.480.902.013,65 atau 0,45%.

Realisasi belanja daerah Tahun anggaran 2024 sebesar Rp**918.877.871.321,02** atau 88,55% dari anggaran Rp1.037.684.888.525,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp940.980.377.027,00 atau 88,94% dari anggaran Rp1.058.006.803.243,00, maka mengalami penurunan sebesar (Rp22.102.505.705,98) atau 2,35%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami surplus sebesar Rp6.588.215.388,17.

Pembiayaan TA 2024 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.953.685.319,04 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp81.541.900.707,21.

2.6 Capaian Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, menunjukkan Pendapatan-LO sebesar Rp901.555.825.988,19 jika dibandingkan dengan pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp879.679.571.495,21, maka terdapat peningkatan sebesar Rp21.876.039.355,98 atau 2,49%.

Beban-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp 878.789.720.284,98, apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2023 sebesar Rp Rp818.070.598.467,34 maka terdapat peningkatan sebesar Rp60.719.121.817,64 atau 7,42%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan-LO dan beban-LO pada Tahun 2024 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp22.765.890.566,21. Apabila dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2023 sebesar Rp61.608.973.027,87 maka diperoleh penurunan sebesar (Rp38.843.082.461,66) atau (63,05%).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun 2024 Surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp0,00) sedangkan Tahun 2023 terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp5.372.399,89. Pada Tahun 2024 tidak terdapat surplus/defisit dari Pos Luar Biasa begitu juga dengan tahun sebelumnya, dengan demikian Tahun 2024 terdapat surplus sebesar Rp22.765.890.566,21 namun jika dibandingkan dengan surplus/defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp Rp61.603.600.628,00, maka terdapat penurunan surplus/defisit – LO sebesar (Rp38.837.710.061,79) atau turun sebesar (63,04%) dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Kinerja Keuangan-LRA

Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp925.466.086.709,19 atau 96,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp962.731.203.206,00. Realisasi belanja daerah sebesar Rp918.877.871.321,02 Atau 88,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.037.684.888.525,00 dan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah diperoleh Surplus sebelum Pembiayaan Netto sebesar Rp6.588.215.388,17.

Berikut ini uraian realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	53.053.048.383,19
Pendapatan Transfer	Rp	864.468.015.943,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	7.945.022.383,00
Jumlah	Rp	925.466.086.709,19

Adapun SKPD yang mengelola pendapatan pada Tahun 2024 sebanyak 8 SKPD dari 36 SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Tabel 3.1.1 Daftar SKPD yang Mengelola Pendapatan Daerah

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	44,64	4.165.074.316,00
2	Dinas Kesehatan	85.000.000,00	75.636.500,00	88,98	74.709.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1.526.387.472,00	608.807.789,00	39,89	1.084.166.995,00
4	Dinas Perhubungan	351.529.327,00	521.516.284,00	148,36	304.236.690,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	18.575.000,00	20.416.500,00	109,91	20.717.500,00
6	Dinas Perikanan	245.100.000,00	24.720.000,00	10,09	132.150.000,00
7	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	59,56	7.563.000.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	934.447.432.015,00	910.098.838.136,19	97,39	907.641.130.194,54
	Jumlah	962.731.203.206,00	925.445.670.209,19	96,13	920.985.184.695,54

2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Operasi	Rp 664.178.014.705,02
Belanja Modal	Rp 142.697.574.476,00
Belanja Tak Terduga	Rp 1.025.861.621,00
Belanja Transfer	Rp 110.976.420.519,00
Jumlah	Rp 918.877.871.321,02

Urusan pemerintahan dan organisasi pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh 36 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi Belanja Daerah masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Rincian Realisasi Belanja Daerah Per SKPD

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.347.955.500,00	4.807.364.116,00	89,89	5.823.929.320,00
2	Badan Keuangan Daerah	153.688.236.796,14	148.026.397.539,00	96,32	137.493.115.351,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.070.713.147,00	9.246.593.576,00	61,35	6.096.085.360,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.502.580.380,00	9.010.005.452,00	94,82	8.314.104.366,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.918.088.040,00	5.385.101.536,00	68,01	9.234.454.804,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.812.485.336,00	4.505.358.638,00	93,62	4.773.197.821,00
7	Dinas Kesehatan	116.416.538.972,86	102.572.608.676,02	88,01	92.375.558.731,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.356.219.481,00	13.184.849.279,00	91,84	15.998.653.459,00
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	7.120.529.717,00	6.676.487.735,00	93,76	6.886.607.500,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	6.664.006.228,00	6.030.927.547,00	90,50	8.439.021.490,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.286.871.956,00	5.838.969.410,00	80,13	5.391.477.376,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga	16.311.342.401,00	10.846.652.071,00	66,50	13.536.584.510,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	143.004.153.503,00	116.249.359.250,00	81,29	156.973.152.195,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.076.151.984,00	6.804.049.687,00	84,25	7.942.239.539,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.883.941.821,00	4.500.610.915,00	92,15	3.930.129.421,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.559.357.686,00	211.333.377.223,00	89,34	226.062.375.164,00
17	Dinas Perhubungan	37.396.295.728,00	30.172.569.162,00	80,68	21.283.741.959,00
18	Dinas Perikanan	32.338.906.909,00	29.434.892.380,00	91,02	23.747.208.189,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)	16.770.792.458,00	16.090.747.998,00	95,95	19.830.302.195,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.332.265.027,00	6.876.745.810,00	93,79	9.008.932.841,00
21	Inspektorat	9.899.660.137,00	9.492.058.747,00	95,88	8.659.566.831,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	24.889.129.329,00	24.367.417.632,00	97,90	10.530.640.167,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	2.464.102.664,00	2.346.185.294,00	95,21	2.086.789.256,00
24	Kecamatan Pagai Utara	2.406.977.607,00	2.263.726.982,00	94,05	2.265.704.837,00
25	Kecamatan Siberut Barat	2.248.815.330,00	2.082.893.596,00	92,62	1.950.517.244,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	2.205.429.062,00	1.925.994.058,00	87,33	1.999.626.202,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	2.708.984.716,00	2.571.982.141,00	94,94	2.332.253.309,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.350.524.531,00	2.247.048.903,00	95,60	1.907.509.564,00
29	Kecamatan Siberut Utara	3.256.555.352,00	3.173.146.435,00	97,44	2.887.341.990,00
30	Kecamatan Sikakap	3.321.848.770,00	3.212.361.927,00	96,70	2.966.996.270,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	3.160.345.080,00	2.957.937.248,00	93,60	2.986.179.645,00
32	Kecamatan Sipora Utara	2.659.876.413,00	2.526.873.740,00	95,00	2.392.130.686,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	23.500.636.421,00	18.219.763.226,00	77,53	26.734.167.873,00
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.135.307.644,00	14.741.418.616,00	97,40	6.354.076.611,00
35	Sekretariat Daerah	46.639.586.388,00	44.007.364.755,00	94,36	51.523.925.947,00
36	Sekretariat DPRD	39.979.676.010,00	35.148.030.021,00	87,91	30.262.079.004,00
	TOTAL	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	88,55	940.980.377.027,00

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Rincian Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 74.953.685.319,04

Jumlah Penerimaan Rp 74.953.685.319,04

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Netto Rp 74.953.685.319,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO Tahun 2024

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan pendapatan-LO sebesar Rp901.555.610.851,19 dan Beban-LO sebesar Rp878.789.720.284,98 sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp22.765.890.566,21

Pendapatan-LO sebesar Rp899.397.833.506,19 terdiri dari:

Tabel 3.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	:	Rp	53.718.125.567,19
Pendapatan Pajak Daerah – LO	:	Rp	9.609.461.618,24
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	:	Rp	15.609.390.428,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	:	Rp	16.476.655.254,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	:	Rp	12.022.618.266,95
Pendapatan Transfer – LO	:	Rp	819.539.880.679,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	:	Rp	772.394.786.442,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	:	Rp	49.302.871.582,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	:	Rp	26.139.827.260,00
Pendapatan Hibah – LO	:	Rp	18.194.804.877,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	:	Rp	7.945.022.383,00
Jumlah Pendapatan-LO	:	Rp	901.555.610.851,19

2. Beban-LO Tahun 2024

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Beban-LO sebesar Rp878.789.720.284,98 terdiri dari:

Tabel 3.2.2. Beban-LO

No	URAIAN	BEBAN - LO 2024
		(Rp)
1	Beban Pegawai – LO	331.088.804.278,00
2	Beban Barang	72.800.125.006,09
3	Beban Jasa	118.092.920.735,98
4	Beban Pemeliharaan	23.839.661.767,00
5	Beban Perjalanan Dinas	56.113.458.147,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.814.638.000,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	16.156.181.000,00
8	Beban Bunga	0,00
9	Beban Subsidi	7.208.422.603,00
10	Beban Hibah	35.433.087.998,00
11	Beban Bantuan Sosial	941.555.840,00
12	Beban Penyisihan Piutang	346.832.909,36
13	Beban Penyusutan Aset Tetap	139.127.996.785,17
14	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.319.987.075,38
15	Beban Bagi Hasil	3.257.906.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	BEBAN - LO 2024
		(Rp)
16	Beban Bantuan Keuangan	61.222.279.944,00
17	Beban Tidak Terduga	1.025.861.621,00
	JUMLAH	878.789.720.284,98

3. Surplus/Defisit dari operasi-LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.765.890.566,21.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5. Beban Luar Biasa - LO

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target yang telah ditetapkan belum maksimal, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar 96,13% antara lain disebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah tersebut antara lain:

- Tidak terealisasinya pendapatan akibat belum optimalnya penghitungan target pendapatan di beberapa OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana adanya perubahan tarif retribusi disektor pariwisata.
- Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus balik nama atas hak tanah yang sudah dibelinya akibat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengurusannya yang masih terasa sulit.
- kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar PBB sektor dan belum optimalnya sosialisasi tentang PBB dan pemungutan pajak oleh sekretaris desa selaku pemungut pajak.
- Pajak sarang burung wallet yang belum maksimal, disebabkan belum adanya keterbukaan oleh wajib pajak atas jual beli yang dilakukan (belum adanya kesadaran wajib pajak), namun bidang pajak optimis kedepannya untuk mengoptimalkan dengan upaya melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perizinan.
- h. Belum adanya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- i. Tidak disiplinnya wajib retribusi untuk membayar retribusi yang disebabkan masih kurangnya mamfaat fasilitas yang diterima atau dirasakan masyarakat seperti pelayanan air bersih yang sering mati.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 88,55%. Terdapat penurunan penyerapan belanja daerah jika dibandingkan dengan Tahun anggaran 2023, hal ini menunjukkan bahwa Program dan kegiatan yang sudah dianggarkan belum maksimal dilaksanakan, dimana banyak proses pengadaan barang dan jasa di SKPD mulai dilaksanakan dipenghujung tahun setelah anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya terutama kegiatan-kegiatan fisik sementara diakhir tahun kondisi alam di Kabupaten Kepulauan Mentawai sering mengalami curah hujan yang tinggi dan cuaca yang kurang baik yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Disamping itu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) banyak yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya akibat dari kurangnya pemahaman PPTK atau SKPD pelaksana tidak tertib pada jadwal dan tidak memahami petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK yang akhirnya mengakibatkan pelaksanaannya terlambat dan putus kontrak serta lambatnya penyampaian Laporan pelaksanaan fisik tahap pertahap dan mekanismenya yang harus melewati tahap reuiu Inspektorat sehingga keterlambatan penyampaian laporan mengakibatkan penundaan atau tidak disalurkan anggarannya.

3. Pembiayaan

Penyerapan pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.953.685.319,04 atau 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi Kesenambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa *“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”*. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa *“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD”*. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 terdiri dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Inspektorat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Pagai Utara
28. Kecamatan Sipora Selatan
29. Kecamatan Sipora Utara
30. Kecamatan Siberut Selatan
31. Kecamatan Siberut Barat Daya
32. Kecamatan Siberut Tengah
33. Kecamatan Siberut Utara
34. Kecamatan Siberut Barat
35. Kecamatan Pagai Selatan
36. Kecamatan Sikakap

Laporan pertanggungjawaban yang merupakan tanggungjawab SKPD berupa konsolidasian laporan keuangan yang menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 memiliki komponen-komponen yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua yang diuraikan sebagai berikut:

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2. Klasifikasi Pendapatan-LRA

a. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- 1) urusan pemerintahan daerah;
- 2) organisasi;
- 3) kelompok.

c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :

- 1) jenis;
- 2) objek;
- 3) rincian objek pendapatan.

d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

e. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualain, dan lain-lain pendapatan.

i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
- 2) transfer pemerintah pusat lainnya;
- k. transfer pemerintah provinsi.
- l. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1) dana bagi hasil;
 - 2) dana alokasi umum;
- m. dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
- n. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- o. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- p. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
- q. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
- r. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
- s. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- t. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- u. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- v. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada table :

Tabel 4.3.1. Klasifikasi Pendapatan

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan – LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah – LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah - LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah - LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA
4.1.4		Lain-lain PAD yang sah - LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer – LRA	
4.2.1		Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4.2.2.		Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Akun	Kelompok	Jenis
		PemerintahLainnya - LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.2.4.		BantuanKeuangan – LRA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA	
4.3.1.		PendapatanHibah - LRA
4.3.2.		Dana Darurat - LRA
4.3.3.		PendapatanLainnya - LRA

3. Pengakuan

a. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- 2) diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan OPD; dan
- 3) diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

b. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

c. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

d. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

e. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

f. Pendapatan Kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya melalui mekanisme pengesahan pendapatan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang dan Jasa
 - a. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.
 - b. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.
5. Pengukuran
 - a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - c. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
 - d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
6. Penyajian
 - a. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
 - b. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Klasifikasi Beban

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :

Beban Operasi-LO

- Beban Pegawai;
- Beban Barang dan Jasa;
- Beban Bunga;
- Beban Subsidi;
- Beban Hibah;
- Beban Bantuan Sosial;
- Beban Penyusutan dan amortisasi;
- Beban Penyisihan Piutang;
- Beban Lain-lain.

Beban Transfer

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa;
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya;
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus;

Defisit Non Operasional

Beban Luar Biasa

- d. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- e. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- f. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
- g. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
- h. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- i. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
 - j. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - k. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - l. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
 - m. Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
 - n. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan
- a. Beban diakui pada saat :
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset;
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.
 - c. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e. Pengakuan Beban dapat dikelompokkan atas pengakuan beban SKPD dan pengakuan beban pada PPKD.
 - f. Pengakuan Beban pada SKPD terdiri atas :
 - 1) beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jika pembayarannya dilakukan melalui LS sedangkan pembayaran melalui UP/GU/ TU diakui ketika pembayaran atas beban tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 2) beban barang dan jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

g. Pengakuan Beban pada PPKD yaitu :

- 1) beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- 2) beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- 3) beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
- 4) beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
- 5) beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.
- 6) beban transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

4. Pencatatan

- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) perpektual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - 2) periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- b. Penyusutan/ amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) metode garis lurus (*straight line method*)
 - 2) metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
 - 3) metode unit produksi (*unit of production method*)
- c. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

5. Pengukuran
 - a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
6. Penyajiandan Pelaporan
 - a. Beban disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas beban dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain :
 - 1) pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran beban daerah;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Klasifikasi Belanja-LRA
 - a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 - b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi :

 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Bunga;
 - Subsidi;
 - Hibah;
 - Bantuan Sosial.

Belanja Modal:

 - Belanja Aset Tetap;
 - Belanja Aset Lainnya;

Belanja Lain-lain/ Tak Terduga

Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

- belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang-barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- belanja pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis.

- d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

Pelayanan Umum	xxx
Pertahanan	xxx
Ketertiban dan Keamanan	xxx
Ekonomi	xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perumahan dan Permukiman	xxx
Kesehatan	xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx
Agama	xxx
Pendidikan	xxx
Perlindungan sosial	xxx

- f. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

- a. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomi/efesien;
 - bertambah umur ekonomis;
 - bertambah volume;
 - bertambah kapasitas produksi.
 - 2) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Pengeluaran belanja pemeliharaan atau dengan istilah lainnya Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) akan diperlakukan sebagai belanja modal yang memenuhi kapitalisasi aset akan dibahas pada lampiran kebijakan akuntansi ini pada lampiran tentang aset tetap.
- c. Penganggaran belanja pemeliharaan/pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi aset yang dimaksud dalam poin.III.6 dianggarkan dalam rekening belanja modal.

4. Pengakuan

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- a. belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c. dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum.
- d. khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5. Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Penyajian

- a. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- c. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
 - b) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan-LRA

- a. Definisi
Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Klasifikasi
 - a) Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - d) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- c. Pengakuan
 - 1) Pengakuan pembiayaan juga dibagi atas klasifikasi pembiayaan.
 - 2) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - 3) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- d. Pengukuran
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- e. Penyajian
 - a) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

2) Klasifikasi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - (a) urusan pemerintahan daerah;
 - (b) organisasi;
 - (c) kelompok.
- c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - (a) jenis;
 - (b) objek;
 - (c) rincian objek pendapatan.
- d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- e. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.
- i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
 - (a) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - (b) transfer pemerintah pusat lainnya;
 - (c) transfer pemerintah provinsi.
 - k. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
 - (a) dana bagi hasil;
 - (b) dana alokasi umum;
 - (c) dana alokasi khusus.
 - l. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
 - m. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
 - n. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - o. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
 - p. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
 - q. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - (a) hibah;
 - (b) dana darurat;
 - (c) pendapatan lainnya.
 - r. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - s. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
 - t. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 - u. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Pendapatan Operasional
 - a. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*).
 - b. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.
 - c. Disamping itu adakalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.
- 4) Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran
 - a. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:
 - (a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
 - (b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk pemerintah daerah;
 - (c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
 - (d) penghapusan utang;
 - (e) sumbangan dari masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat;
 - (f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.
 - b. Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi dibawah ini dipenuhi, yaitu apabila:
 - (a) pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - (b) klaim atas sumber daya dapat dilaksanakan secara legal;
 - (c) besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
 - (d) jumlahnya dapat diestimasi.
 - c. Aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.
 - d. Pengakuan pendapatan daerah pada pendapatan operasional non pertukaran dipengaruhi oleh metode pemungutan pendapatan daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
 - e. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *self assessment* antara lain SPTPD, Faktur, Bill, Karcis, Kupon, Stiker, Surat Keterangan, nota dan sejenisnya.
 - f. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut berdasarkan metode *official assessment* antara lain : SKPD, SKRD, SPPT, STPD, SKPDKB, kontrak kerja, kontrak sewa dan perjanjian lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. Berikut secara rinci pengakuan atas pendapatan :

Tabel 4.3.2. Pengakuan atas Pendapatan

SKPD	Jenis	Pengakuan
Dinas Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	SPTPD dan BILL
	Pajak Restoran	SPTPD dan BILL
	Pajak Hiburan	Karcis
	Pajak Reklame	SKPD
	Pajak Penerangan Jalan	Nota
	Pajak Material bukan Logam dan Batuan	STPD
	Pajak Air Tanah	SKPD
	Pajak Sarang Burung Walet	STPD
	PBB P2	SPPT
	BPHTB	SSPD-BPHTB
	Retribusi Kekayaan Daerah(Kendaraan Dinas)	SKRD
Dinas pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
	Denda Keterlantaran Pelaksanaan Pekerjaan	SS
KP2T	Ret.Izin mendirikan Bangunan (IMB)	SS
	Ret.Izin Gangguan/Keamanan (HO)	SS
	Ret.Izin Usaha Perikanan	SS
Dinas Kelautan & Perikanan	Ret. Tempat Pelelangan Ikan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Kesbang polinmas	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Stiker
DPPKAD	Jasa Giro	Nota
	Bunga Deposito	Nota
	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	SS
	Perusahaan Patungan/Milik Swasta	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Temuan Inspektorat	SS
	Pendapatan dari Pengambilan Temuan Pemeriksaan BPK	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	SS
	Pend. Dari pengemb. keleb. Pemby.gaji & tunjangan hasil Pengolahan dana bergulir	SS
	Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Nota atau Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengakuan
	Pendapatan Hibah	Nota atau Laporan
	Pendapatan Bantuan Keuangan	Nota atau Laporan
RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Karcis dan Surat Keterangan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Ret. Pemakaian kekayaan Daerah	SKRD
	Ret. Tempat Penginapan	Kontrak Kerja dan Sewa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KK Baru	
	KK Penggantian	
	Surat Pindah Datang	
	Penerbitan e-KTP	
	Akte perkawinan	
	Surat keterangan dari Bidan	
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Ret. Parkir di tepi jalan umum	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.PKB (Keur)	Surat keterangan
	Ret.Teminal	Karcis
	Ret. Khusus tempat Parkir	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.Izin Trayek	Surat Keterangan
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	SKRD
	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)	SS
Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	Surat Keterangan
	Ret. Pelayanan Umum	Karcis
	Ret. Jamkesmas/askes sosial/ jampersal dr pusat	SS
	Ret. Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Surat Keterangan
	Ret. Pelkes askes sosial kapasitas dr PT.Askes	SS
	Ret.pelkes jamkesda kapitasi dr PT Askes	SS
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Perindakkop UM &KM	Ret. Pasar	Karcis dan SKRD
Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan	Ret. Pelayanan Persampahan/kebersihan	Kupon dan Karcis
Dinas pertanian Perkebunan &Pernakan	Ret.Pelayanan Pasar Hewan	Karcis dan Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Jenis	Pengakuan
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Karcis
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	Kontrak kerja dan Sewa
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	SS

- 5) Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran
- Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/ atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.
 - Suatu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) terjadi bila satu pihak menerima aset/ jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.
 - Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
 - Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat, bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah, royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah, dan deviden atau lainnya yang setara dengan deviden atas hasil investasi pemerintah.
- 6) Pengakuan
- Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
 - pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).
 - Pengakuan pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan atas jenis pendapatan dan pengelola pendapatan tersebut yaitu pengakuan pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD.
 - Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.
 - Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.
 - Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD melalui penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- PAD tanpa penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- PAD dari hasil eksekusi jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanyakas pada RekeningKas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(d) Pendapatan Non operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- g. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- h. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
- (a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
 - (c) kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 7) Pengukuran
- a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus di akui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- 8) Penyajian
- a. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
 - (a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan /dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Laporan Keuangan mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2) Klasifikasi Kas dan Setara Kas

- Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :
 - kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
 - kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- Tabel berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas:

Tabel 4.3.3. Struktur Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

3) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - rincian kas dan setara kas;
 - kebijakan manajemen setara kas; dan
 - informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2) Klasifikasi Piutang

- a. Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- b. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:
 - (a) piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
 - (c) piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
 - (d) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
 - (e) piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
- d. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
- e. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
- f. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.
- g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).
- h. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa lain pada poin III.3 huruf a, b, c, dan d.
- i. Piutang jangka panjang dapat berupa :
 - (a) piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
 - (b) piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya;
- j. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima pembayaran tersebut.

3) Pengakuan

- a. Piutang diakui saat:
 - (a) diterbitkan surat ketetapan; atau
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa mendasarinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
 - (a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- d. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (b) jumlah piutang dapat diukur;
 - (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - (a) piutang dana bagi hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) piutang dana alokasi umum, apabila pada akhir Tahun Anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu Tahun Anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu;
 - (c) piutang dana alokasi khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
 - (d) piutang transfer lainnya diakui bila :
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah;
 - dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
 - (e) piutang bagi hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah;

- (f) piutang transfer antar daerah, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai Piutang Pemerintah Daerah.
 - f. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka.
 - g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria :
 - (a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - (b) telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPPKS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - (c) dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - h. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.
- 5) Pengukuran
- a. Piutang dicatat dan diukur sebesar:
 - (a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
 - (b) nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).
 - b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
 - c. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
 - d. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut :
 - (a) untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
 - (b) untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (b) piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (c) piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (d) piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima;
 - (e) piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.
 - f. Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
 - g. Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - (a) dana bagi hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) dana alokasi umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - (c) dana alokasi khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - h. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS.
- 6) Penyisihan Piutang
- 1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
 - 2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.
 - 3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.
 - 4. Kriteria Kualitas Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - (1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - (2) Upaya penagihan.
- b) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) kualitas lancar;
 - (2) kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- c) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- d) Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
 - (1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan:
 - (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e)) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f)) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e)) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c)) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (d)) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e)) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d)) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e)) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d)) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d)) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - (2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar
 - (1)) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1)) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan
 - (1)) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet
 - (1)) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - (3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - (a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

5. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahu (periode pelaporan) ditentukan:

- kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

6. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.3.4. Jurnal Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx x.	x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)	xxx	

*) *Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)*

*) *Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang*

7. Pelaporan

Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

- beban penyisihan piutang;
- penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca.

Tabel 4.3.5. Format LO

DINAS X

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	20XX
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURFLUS (DEFISIT)- LO	xxx

Tabel 4.3.6. Format Neraca
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....
SKPD.....
NERACA
31 Desember 20XX

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan		Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset		Kewajiban:	
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

8. Penghapusan

- a) Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- b) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
 - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - (a) piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - (b) debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - (c) debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - (d) debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (e) debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - (f) debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - (g) debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - (2) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (3) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (a) dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan/atau
 - (b) objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
 - (4) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
 - (6) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c) Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- (1) penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- (2) penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- (3) penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (4) penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- (5) penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- (6) penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain;
- (7) penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
 - (a) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

9. Penghapusan Piutang

- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.
- b) Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).
- d) Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada poin VII.4, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- e) Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f) Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.
10. Inventarisasi Piutang untuk Pelaporan
- a) Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :
- (1) pembayaran/pelunasan;
 - (2) penundaan pelunasan piutang;
 - (3) pembatalan surat penetapan;
 - (4) keputusan pengadilan;
 - (5) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan.
- b) Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.
- c) Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.
11. Penyajian
- a) Piutang disajikan pada Neraca.
- b) Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.
- c) Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- d) Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.
- e) Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :

- (1) nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
 - (2) nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang.
- f) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada aset lain-lain.
- g) Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- h) Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- i) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (2) rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (4) dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

a) Definisi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- 3) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 4) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- 5) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 6) Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 7) Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.
- b) **Klasifikasi Investasi**
 - 1) Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
 - 2) Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c) berisiko rendah.
 - 3) Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada poin III.2, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - c) surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
 - 4) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
 - b) pembelian surat utang negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d) Reksa dana;
 - 5) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - 6) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 7) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
- a) penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 8) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
- a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi Non Permanen Lainnya.
- 9) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.
- 10) Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
- 11) Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- c) Pengakuan Investasi
- 1) Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - (a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - 2) Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

- 3) Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- 4) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
- 5) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dan untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
- 6) Pengakuan Investasi diakui pada saat diterbitkannya SP2D untuk penyaluran dana investasi.
- 7) Secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) pada neraca. Net reliazable value diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dikurangi dengan penyisihan investasi yang tidak tertagih.
- 8) Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (aging analysis) yang ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
 - (b) kurang lancar, apabila telah melampau jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%;
 - (c) diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%;
 - (d) macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.
- d) Pengukuran Investasi
 - 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 6) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 7) Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 8) Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 9) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 10) Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
- 11) Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
- 12) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- 13) Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter.
- 14) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 15) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 16) Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premi. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
 - 17) Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.
- e) Metode Penilaian Investasi
- 1) Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (a) metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (b) metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - 2) Penggunaan metode pada paragraf diatas tentang metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
 - 3) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- 4) Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah tersebut.
- 5) Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
- f) Pengakuan Hasil Investasi
 - a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - b. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 - d. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

- e. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- g. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
- h. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- i. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.
- j. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- g) Pelepasan dan Pemindahan Investasi
 - a. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
 - b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/ kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- h) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

 - 1) kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - 2) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - 3) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
 - 4) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - 5) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - 6) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
 - 7) Investasi yang disajikan dengan nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - 8) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - 9) Perubahan klasifikasi pos investasi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 10) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi;

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

b. Klasifikasi Persediaan

- 1) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa barang pakai habis seperti alat / bahan untuk kegiatan kantor, barang tak pakai habis seperti komponen dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Klasifikasi persediaan sebagai berikut:

Tabel 4.3.7. Klasifikasi Persediaan

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
	7. Natura dan pakan
	8. Persediaan penelitian
	9. Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen bekas dan pipa bekas

- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- 3) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- 4) Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 - 6) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuainya dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Pengakuan
- 1) Persediaan diakui pada saat :
 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 2) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).
 - a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
 - 3) Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
 - 4) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - 5) Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- d. Metode Pencatatan
- 1) Persediaan dicatat dengan metode periodik, dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK, barang cetakan, materai dan bahan kebersihan di sekretariat SKPD. Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

- 2) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan pengendalian yang kuat, contohnya obat-obatan dan tiket kapal. Dengan metode perpetual pencatatan dilakukan setiap ada persediaan masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu termutakhirkan.

e. Pengukuran

- 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
- 2) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO);
- 3) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing;
- 4) Harga pokok produksidan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- 5) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

f. Beban Persediaan

- 1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of good);
- 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
- 3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
- 4) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- 5) Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

g. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) kondisi persediaan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - b) hak atas tanah.
- 3) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

b. Klasifikasi Aset Tetap

- 1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - a) tanah;
 - b) peralatan dan mesin;
 - c) gedung dan bangunan;
 - d) jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e) aset tetap lainnya; dan
 - f) konstruksi dalam pengerjaan.
- 2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 5) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif;
 - c) tidak dapat dipindah-pindahkan;
 - d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 7) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - 8) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Pengakuan
- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f) memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
 - a) alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
 - b) peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.500.000,00;
 - c) gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp25.000.000,00.
 - 3) Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
 - 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
- 6) Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 7) Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
 - a) penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;
 - b) pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian;
 - c) pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
- d. Pengukuran
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
 - 3) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Penilaian Awal Aset Tetap
 - 1) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - 2) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - 3) Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

- 4) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi poin 5.b bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti Poin 5.a. Penilaian kembali yang dimaksud dan poin yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 5) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

f. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat berfungsi untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya persiapan tempat;
 - b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e) biaya konstruksi;
 - f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.

- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk dalam harga perolehan gedung dan bangunan adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/PHO.
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :
 - a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 11) Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) Belanja perencanaan yang fisiknya tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.
 - 2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - 3) Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- h. Perolehan Secara Gabungan
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- i. Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)
- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
- j. Aset Donasi
- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- 3) Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- k. *Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure)*
 - 1) Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
 - 2) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - 3) Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
 - 4) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 5) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - 6) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - 7) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 - 8) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400m² menjadi 500m².



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 9) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - a) Alat-alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
 - b) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat-alat besar sebesar Rp1.500.000,00.
- 10) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan;
 - b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00, maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp300.000,00 maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.
- 13) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada Lampiran 1.
- l. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- m. Penyusutan
 - 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - 2) Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.
- n. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
 - 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - 2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- o. Akuntansi Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.
- 2) Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
- 3) Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan yang tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut :
 - a) dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;
 - c) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - d) perlakuan tanah yang masih dalam sengketa /proses pengadilan :
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

p. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

- 1) Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 3) Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- 5) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- 6) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 7) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 8) Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.
- q. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)
- 1) Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - 2) Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
 - 3) Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
- r. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
- 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 4) Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- s. Pengungkapan
- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 2) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) jika ada, nama penilai independen;
 - d) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

- a. Definisi
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
 - b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
 - c. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
 - d. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
 - e. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
 - b) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - (a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - (c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 - c) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
 - 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- c. Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- d. Biaya Konstruksi
 - 1) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - 2) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 3) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- 4) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 5) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 6) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
- 7) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- 8) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- 9) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- 10) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- 11) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 12) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 - 13) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - 14) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin IV.3. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
- e. Pengungkapan
- 1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) uang muka kerja yang diberikan;
 - e) retensi.
 - 2) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Lainnya

a. Definisi

- 1) Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

b. Klasifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.8. Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Uraian
1. Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
3. Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Hak Cipta atau Hak Paten
	Royalti
	<i>Software</i>
	Lisensi dan <i>Franchise</i>
	Hasil Kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
4. Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

- 2) Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
- 3) Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
- tagihan jangka panjang;
 - kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - aset lain-lain.
- 4) Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
- aset tak berwujud; dan
 - aset lain-lain.
- c. Pengakuan
- 1) Tagihan Jangka Panjang
- Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- Tagihan penjualan angsuran
- Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- Tagihan tuntutan kerugian daerah
- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak paten atau hak cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Perlakuan khusus dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

i. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah.

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a) Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

(b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstall ke *hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

(c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

(a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

(b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

ii. Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

(a) Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

(b) apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;

(c) berapa lama izin penggunaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- (c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

iii. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi *terhadap* pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (a) Meningkatkan fungsi *software*;
- (b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- (1) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- (2) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(1) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(a)) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- (1)) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- (2)) Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- (3)) Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- (4)) Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(b)) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- (1)) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- (2)) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- (3)) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- (4)) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- (5)) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- (6)) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

(2) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

g) Aset tak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

h) Aset tak berwujud lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biayaperolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- i) Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)
- (1) Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(2) Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

(3) Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

(4) Cara Perolehan Aset Tak Berwujud

(a) Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

(b) Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

(c) **Pertukaran**

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

(d) **Kerjasama**

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

(e) **Donasi/hibah**

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

(f) **Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)**

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

(5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

(a) **ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)**

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

(b) **ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)**

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4) Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

- (a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
- (b) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM);

2) Kemitraan dengan pihak ketiga

- a) Sewa di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
- b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
- d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

4) Biaya untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal terdiri dari:

a) Pembelian

- (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) **Pertukaran**
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - c) **Kerjasama**
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
 - d) **Donasi/Hibah**
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 5) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b) pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
 - c) aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 6) Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.
- 7) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Amortisasi

- 1) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).
- 2) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 3) Masa manfaat aset tak berwujud adalah 5 (lima) tahun.
- 4) Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
- 5) Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.
- 6) Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

f. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- 1) dijual;
- 2) dipertukarkan;
- 3) dihibahkan; atau
- 4) dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

h. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 2) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 3) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

- 4) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi Kewajiban
 - 1) Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
 - 3) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 4) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
 - 5) Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
 - 6) Pendapatan diterima dimuka adalah nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
 - 7) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui
 - 8) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 9) Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
- 10) Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
- (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.9. Bagan Akun Standar

Kode Akun	U r a i a n	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.		Utang Kepada Pihak Ketiga
2.1.2.		Utang Bunga
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.3.		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.		Kewajiban Lancar Lainnya
2.1.5.		Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan
		Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan
		Perubahan valuta asing
		Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.6.		Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	
2.2.1.		Utang Dalam Negeri
2.2.2.		Utang Jangka Panjang Lainnya

c. Pengakuan Kewajiban

- 1) Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- 2) Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
- 3) Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
- 4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 5) Kewajiban dapat timbul dari:
 - (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 - (a) Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
 - (b) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - (c) Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

- (d) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- (e) Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (f) Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
- (g) Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada poin IV.6 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
 - 1) badan legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
 - 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
 - 3) Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.

- (h) Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.
- (i) Pengukuran Kewajiban
 - (1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - (2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - (3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

V.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

- Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.
- Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

V.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

V.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

V.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

V.5 Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.6 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*)
- utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (*traded debt*)

V.6.1 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

- Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
- Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti *IMF*, *World Bank*, *ADB* dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
- Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

V.6.2 Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

- Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
- Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
- Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

- Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai par. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
- Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

V.7 Perubahan Valuta Asing

- Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
- Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
- Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
- Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
- Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.8 Pendapatan Diterima Dimuka

- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Tunggakan

- 1) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
- 2) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
- 3) Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
- 4) Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

f. Restrukturisasi Utang

- 1) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
- 2) Restrukturisasi dapat berupa :
 - a. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan dapat berbentuk:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Penambahan masa tenggang; atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- 3) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
- 4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
- 5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 6) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
- 7) Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.
- g. Penghapusan Utang
 - 1) Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
 - 2) Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
 - 3) Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada poin VIII.5 berlaku.
 - 4) Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan poin VIII.5, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
- 5) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
 - (b) biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
- 6) Penilaian kembali aset pada poin VIII.1.5 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah
- 1) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
- a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - c. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
 - d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- 2) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
- 3) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada poin IX.4
- 4) Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
- 5) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

i. Penyajian

- 1) Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
- 2) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - (a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - (b) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - (c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - (d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - (f) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - (g) biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

1) Definisi

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
6. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
7. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
8. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
 - (a) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - (b) mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
 - (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam mengalokasikan beban pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
9. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

2) Objek Penyusutan

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
2. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada poin III.2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - (a) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (b) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam poin III.4 huruf (a) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam poin III.5 huruf (b) mengatur :
 - (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
 - (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
 - (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
 7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
 - (a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
 - (b) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
 - (1) dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - (2) dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.
- 3) Nilai Yang Dapat Disusutkan
1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
 2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin IV.1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
 3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
 4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.
 5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada poin IV.4 yaitu :
 - (a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - (b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - (c) dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
 6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
 7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas:
 - (a) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - (b) nilai akumulasi penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
 9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
 10. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.
- 4) Masa Manfaat
- a. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - (a) daya pakai; dan
 - (b) tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
 - c. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal:
 - (a) terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
 - (b) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - (c) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
 - d. Perbaikan yang dimaksud pada poin V.2 huruf (b) meliputi :
 - (a) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
 - (b) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
 - (c) *overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
 - e. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
 - f. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
 - g. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan pendekatan Tahunan dengan penyajian penyusutan secara tahunan.
Masa manfaat untuk setiap aset tetap terdapat pada Lampiran 2.

5) METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dan formulanya:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri dengan perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap masa periode untuk dihitung akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode atau suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintah dan /atau pelayanan publik.

6) PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

7) PENYAJIAN

- 1) Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
- 3) Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) nilai penyusutan;
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- 5) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada VIII.3 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.3.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- 1) Definisi
 - a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
 - b. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.
- 2) Klasifikasi Ekuitas
 - a. Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan.
 - b. Saldo Ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.
 - c. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA.
 - d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
- 3) Penyajian

Ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

- a. Koreksi Kesalahan
 - a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
 - b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
 - c. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
 - d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik;
- b. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- c. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- d. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
- e. Koreksi Pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- f. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- h. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
- i. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam pendapatan LRA- dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- k. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- l. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- m. Contoh koreksi kesalahan belanja :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain LRA;
 - (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
 - (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- n. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- o. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :
- (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;
- (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- p. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- q. Contoh koreksi kesalahan beban :
- (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salahperhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO;
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- r. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuanganperiode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- s. Contoh koreksi kesalahan pendapatan LRA :
- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh :
- a. Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
- b. Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- t. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas
- u. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - v. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - w. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas
 - x. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :
 - (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.
 - y. Koreksi kesalahan tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - z. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban :
 - 1) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahkan kewajiban;
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambahkan kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
 - aa. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- bb. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- cc. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- dd. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- ee. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada poin II.29 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- ff. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin II.10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- gg. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- hh. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- ii. Perubahan Kebijakan Akuntansi
 - a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
 - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
 - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

- f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

mm. Perubahan Estimasi Akuntansi

- a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

nn. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, penjualan, hibah dan lain-lain.
- 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - (a) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand*(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
 - (b) fungsi tersebut tetap ada;
 - (c) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) menutup suatu fasilitas yang berutilitas amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.18 Kebijakan Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

1) Definisi

- a. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- b. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
- c. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
 - (a) piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
 - (b) beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
 - (c) persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
 - (d) investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
 - (e) aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
 - (f) aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
 - (g) utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
 - (h) pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
 - (i) ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Tahapan Penyajian Kembali

a. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

- (a) menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
- (b) menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

b. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.10. Jurnal Standar

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikandengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tahun Anggaran 2019 (periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).
- 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, tanggal 26 Desember 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4 PENJELASAN POS –POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp925.466.086.709,19 atau 96,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp962.731.203.206,00. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp918.877.871.321,02 dari target belanja sebesar Rp1.037.684.888.525,00 atau 88,55% sehingga diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebesar Rp6.588.215.388,17. Surplus tersebut selanjutnya ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp74.953.685.319,04 sehingga pada akhirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun menjadi sebesar Rp81.541.900.707,21.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp925.466.086.709,19 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	Rp 53.053.048.383,19
Pendapatan Transfer	Rp 864.468.015.943,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 7.945.022.383,00
Jumlah	Rp 925.466.086.709,19

Sedangkan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp918.877.871.321,02 atau mencapai 88,55%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp 664.178.014.705,02
Belanja Modal	Rp 142.697.574.476,00
Belanja Tak Terduga	Rp 1.025.861.621,00
Belanja Transfer	Rp 110.976.420.519,00
Jumlah	Rp 918.877.871.321,02



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>53.053.048.383,19</u>	<u>47.820.088.328,54</u>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp53.053.048.383,19 atau mencapai 83,37% dari target anggaran sebesar Rp63.634.929.202,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Daerah	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	101,07	8.514.261.917,00
2	Retribusi Daerah	28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33	13.344.054.501,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	100,00	14.907.522.965,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	122,71	11.054.248.945,54
Jumlah		63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	83,37	47.820.088.328,54

5.1.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>9.112.561.267,24</u>	<u>8.514.261.917,00</u>

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.112.561.267,24 atau 101,07% dari target anggaran sebesar Rp9.016.302.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Hotel	2.855.000.000,00	2.642.993.978,15	92,57	2.848.331.962,00
2	Pajak Restoran	2.008.000.000,00	1.655.196.756,09	82,43	1.750.643.214,00
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	17.941.845,00	35,88	11.405.000,00
4	Pajak Reklame	18.391.725,00	1.498.500,00	8,15	1.782.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.914.000.000,00	2.243.304.399,00	117,21	1.997.416.802,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	15.954.800,00	15,95	74.750.163,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.020.971.032,00	563.854.689,00	55,23	814.051.976,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
9	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	999.940.000,00	1.971.816.300,00	197,19	1.011.630.800,00
Jumlah		9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	101,07	8.514.261.917,00

Dilihat dari tabel diatas, realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp9.113.588.047,24 atau 101,08% dari target pagu anggaran sebesar Rp9.016.302.757,00. Dibanding dengan tahun 2023 Realsisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp599.326.130,24 atau 7,04%.

5.1.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		15.367.248.573,00	13.344.054.501,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.367.248.573,00 atau 54,33% dari target anggaran sebesar Rp28.283.771.191,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Retribusi Jasa Umum	9.762.864.650,00	4.497.194.609,00	46,06	4.507.090.395,00
2	Retribusi Jasa Usaha	18.020.906.541,00	10.535.234.000,00	58,46	8.524.836.190,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	334.819.964,00	66,96	312.127.916,00
	Jumlah	28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33	13.344.054.501,00

Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
I	Retribusi Jasa Umum	9.762.864.650,00	4.497.194.609,00	46,06	4.507.090.395,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.487.013.178,00	4.272.675.384,00	45,04	4.239.783.316,00
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	275.851.472,00	224.519.225,00	81,39	267.307.079,00
II	Retribusi Jasa Usaha	18.020.906.541,00	10.535.234.000,00	58,46	8.524.836.190,00
1	Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor	750.536.000,00	49.468.600,00	6,59	504.732.000,00
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	18.575.000,00	20.416.500,00	109,91	20.717.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	99.288.300,00	113.214.400,00	114,03	83.541.500,00
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	59,56	7.563.000.000,00
5	Retribusi Penyeberangan di Air	252.241.027,00	408.301.884,00	161,87	220.695.190,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.100.000,00	24.720.000,00	10,09	132.150.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	334.819.964,00	66,96	312.127.916,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	334.819.964,00	66,96	312.127.916,00
Jumlah		28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33	13.344.054.501,00

Dilihat dari tabel retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi di tahun 2023 berkisar 57,14%, sedangkan di tahun 2024 hanya terealisasi sebesar 54,33%. Dilihat dari masing-masing sumber pendapatan retribusi daerah terdapat 3 jenis pendapatan retribusi daerah yang realisasinya mencapai lebih dari 100%, yaitu Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Pelayanan Penyeberangan di air.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pada masing-masing SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.1.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Per SKPD

No	SKPD	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	85.000.000,00	75.636.500,00	88,98	74.709.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.402.013.178,00	4.197.038.884,00	44,64	4.165.074.316,00
3	Dinas PUPR	Retribusi pengolahan limbah Cair (Rumah Tangga)	275.851.472,00	224.519.225,00	81,39	267.307.079,00
		Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	750.536.000,00	49.468.600,00	6,59	504.732.000,00
		Retribusi Persetujuan Bangunan	500.000.000,00	334.819.964,00	66,96	312.127.916,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		Gedung				
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	99.288.300,00	113.214.400,00	114,03	83.541.500,00
		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	252.241.027,00	408.301.884,00	161,87	220.695.190,00
5	Dinas Perikanan	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.550.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	179.550.000,00	24.720.000,00	13,77	128.550.000,00
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tempat rekreasi dan olahraga	16.655.166.214,00	9.919.112.616,00	59,56	7.563.000.000,00
7	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	18.575.000,00	20.416.500,00	109,91	20.717.500,00
Jumlah			28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33	13.344.054.501,00

Dari tabel diatas, menunjukan adanya kenaikan realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2024 sebagaimana uraian berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Pada Tahun 2024 retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas mengalami kenaikan sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya.
2. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 44,64% sedangkan ditahun 2023 sebesar 35,95%, terjadi kenaikan yakni sebesar 0,77%.
3. Retribusi pengolahan limbah Cair merupakan retribusi Rumah Tangga berupa pelayanan penyediaan air PDAM atau Retribusi Pelayanan Air Bersih yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Tangga pada tahun 2024 terealisasi sebesar 81,39%, dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi retribusi pengolahan limbah cair (rumah tangga) sebesar 111,91% terjadi penurunan secara signifikan yaitu sebesar 16,01%.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp49.468.600,00 atau sebesar 6,59%. Dibanding dengan tahun lalu terealisasi sebesar Rp504.732.000,00, terjadi penurunan sebesar 90,20% atau sebesar (Rp455,263,400,00).
5. Pada tahun 2024 terdapat retribusi persetujuan bangunan gedung yang terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rp334.819.964,00 atau sebesar 66,96% dari target anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Dibanding dengan tahun lalu terealisasi sebesar Rp312.127.916,00 terjadi peningkatan sebesar 7,27% atau sebesar Rp22.692.048,00
6. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp113.214.400,00 atau 114,03% tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp83.541.500,00 mengalami kenaikan sebesar 35,52% dibanding dari tahun sebelumnya. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp408.301.884,00 atau sebesar 161,87%. Dibanding Tahun 2023 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang terealisasi sebesar Rp220.695.190,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp187.606.694,00 atau kenaikan sebesar 85.01%.
7. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha pada Dinas Perikanan Tahun 2024 tidak terealisasi, dibanding tahun lalu terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 terjadi penurunan sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp24.720.000,00 atau 13.77% dari pagu anggaran sebesar Rp179.550.000,00. Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp128.550.000,00, atau terjadi penurunan sebesar (Rp103.830.000,00) atau sebesar 80,77%.
8. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tahun 2024 sebesar Rp9.919.112.616,00 dari target anggaran sebesar Rp16.655.166.214,00 atau sebesar 59,56%. Dibanding tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.563.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp9.725.800.000,00. Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp2.356.112.616,00 atau 31,15% dari tahun sebelumnya.
9. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan pada Dinas Koperindag dan UKM tahun 2024 terealisasi sebesar Rp20.416.500,00. Atau 109,91% melebihi anggaran yang ditargetkan. Retribusi ini merupakan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kecamatan Sipora Selatan (Sioban) dan pasar di Kecamatan Siberut Utara (Muara Sikabalu). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp301.000,00) sebesar 1,45%.

5.1.4.1.3	Pendapatan Hasil	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	Pengelolaan	(Rp)	(Rp)
	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	14.907.522.965,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD atau hasil dari investasi yang ditanamkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan BPR Sipora berupa Deviden bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.476.655.254,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp16.476.655.254,00, sedangkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 juga terealisasi 100% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp14.907.522.965,00. Jika dibandingkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.569.132.289,00 atau 10,53%.

Untuk bagi hasil dari investasi penyertaan modal pada PT BPR Pagai Utara Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan Perusahaan Daerah Mentawai Sejahtera sampai Tahun 2024 belum memberikan kontribusi berupa deviden karena kedua perusahaan tersebut masih mengalami kerugian atau belum memenuhi kriteria dalam pembagian deviden sesuai peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK).

5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	12.096.583.288,95	11.054.248.945,54

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.096.583.288,95 atau 122,71% dari target anggaran sebesar Rp9.858.200.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp11.054.248.945,54 dengan target anggaran sebesar Rp10.158.200.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.041.307.563,41 atau 9,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.6. Rincian Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.135.000.000,00	0,00	0,00	637.310.100,00
2	Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan / sewa BMD	450.000.000,00	100.000.000,00	22,22	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.678.192.155,00	55,94	2.036.676.685,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	4.119.080.290,29	100,00	3.059.580.212,21
5	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	427.447.930,07	100,00	124.198.160,40
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.416.356.432,34	100,00	901.915.983,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	54.296.904,00	100,00	0,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	3.573.200.000,00	2.564.104.408,25	71,76	3.482.060.287,93
9	Pendapatan dari Pengembalian	700.000.000,00	737.105.169,00	105,30	812.507.517,00
	Jumlah	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	122,71	11.054.248.945,54



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari tabel pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi Hasil Penjualan BMD/Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp637.310.100,00.
2. Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada tahun 2024 yang ditargetkan senilai Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 22,22%, sedangkan tahun 2023 tidak terdapat realisasi.
3. Realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2024 sebesar Rp1.678.192.155,00 atau 55,94% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp358.484,530,00) atau 17,60%.
4. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR tahun 2024 sebesar Rp 4.119.080.290,29 meskipun tidak ada target anggarannya. Realisasi TGR tersebut bersumber dari pengembalian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.059.580.212,21, mengalami peningkatan sebesar Rp1.059.500.078,08 atau sebesar 34,63%.
5. Penerimaan Komisi, Potongan atau Lainnya Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp427.447.930,07, penerimaan ini merupakan penerimaan lain-lain yang tidak terdapat rekening pendapatannya sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.
6. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp2.416.356.432,34 dengan target anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada dinas teknis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan denda keterlambatan meningkat sebesar 167,91%.
7. Pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp54.296.904,00 dengan target anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan denda pajak ini merupakan denda dari tahun 2014-2024. Jika dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar Rp54.296.904,00
8. Sedangkan Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.564.104.408,25 atau sebesar 71,76% dari target anggaran sebesar Rp3.573.200.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelum mengalami penurunan sebesar 26,36% hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pembangunan fisik yang putus kontrak dan tidak selesai sesuai waktu kontrak sehingga jaminan pelaksanaan pekerjaannya dapat diklaim atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Tahun 2024 terdapat realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp737.105.169,00 atau 105,30% dari target anggaran sebesar Rp700.000.000,00 yang merupakan kelebihan belanja Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, kelebihan belanja hibah, belanja Pemeliharaan Jalan dan subsidi, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 9,28%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		864.468.015.943,00	866.150.527.635,00

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp864.468.015.943,00 atau 97,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp890.967.286.804,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp866.150.527.635,00 atau 96,43% dari target anggaran Rp898.190.007.690,00 maka terjadi penurunan sebesar (Rp1.682.511.692,00) atau 0,19% .

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Transfer sebesar Rp864.468.015.943,00 terdiri atas:

Tabel 5.1.7. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	97,03	822.513.520.621,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	96,93	43.637.007.014,00
	Jumlah	890.967.286.804,00	864.468.015.943,00	97,03	866.150.527.635,00

Pendapatan Transfer dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

5.1.4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		820.560.607.442,00	822.513.520.621,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp820.560.607.442,00 atau 97,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp845.671.443.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp822.513.520.621,00 atau 97,92% dari target anggaran Rp840.006.026.799 terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp1.952.913.179,00 atau 0,24%. Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat ini besarnya sangat tergantung dari kondisi keuangan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari tiga bagian yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1.8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Perimbangan	779.556.328.000,00	753.085.762.442,00	96,60	756.764.054.621,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	19.459.955.000,00
3	Dana Desa	45.136.504.000,00	46.496.234.000,00	103,01	46.289.511.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	20.978.611.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	845.671.443.000,00	820.560.607.442,00	97,03	822.513.520.621,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari 4 bagian yakni dana perimbangan sebesar Rp753.085.762.442,00, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp0,00, Dana Desa sebesar Rp46.496.234.000,00, untuk 43 Desa, Insentif Fiskal sebesar Rp20.978.611.000,00 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

Rincian pendapatan transfer pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.9. Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.139.199.000,00	16.832.243.814,00	111,18	20.072.513.537,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	602.341.290.000,00	593.136.045.604,00	98,47	569.588.001.480,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.705.967.000,00	60.558.056.051,00	84,45	89.054.044.924,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.369.872.000,00	82.559.416.973,00	91,36	78.049.494.680,00
	Jumlah	779.556.328.000,00	753.085.762.442,00	96,60	756.764.054.621,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp16.832.243.814,00 atau 111,18%, melebihi dari target yang dianggarkan yakni sebesar Rp15.139.199.000,00. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp20.072.513.537,00 atau 156,42% terdapat penurunan pendapatan Dana Bagi Hasil sebesar (Rp3.240.269.723,00) atau 16,14% dari tahun sebelumnya. Berikut rincian Realisasi Dana Tranfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.1.10. Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.375.555.000,00	2.375.555.000,00	100,00	2.470.845.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	3.173.796.000,00	4.745.228.814,00	149,51	5.079.920.497,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	120.263.000,00	0,00	182.203.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	37.292.000,00	103,75	41.353.040,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.689.000,00	636.960.200,00	476,45	198.141.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan	629.089.000,00	125.817.800,00	20,00	835.653.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Batubara-Royalty				
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.567.423.000,00	2.567.423.000,00	100,00	4.094.066.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.223.704.000,00	6.223.704.000,00	100,00	7.170.332.000,00
	Jumlah	15.139.199.000,00	16.832.243.814,00	111,18	20.072.513.537,00

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp593.136.045.604,00 atau terealisasi 98,47% dengan target anggaran sebesar Rp602.341.290.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp569.588.001.480,00 atau 100,10% dari target anggaran Rp569.037.573.000,00, terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 23.548.044.124,00 atau 4,13%, hal ini disebabkan karena adanya tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berikut rincian pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2024:

Tabel 5.1.11. Realisasi Dana Alokasi Umum

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	386.314.645.000,00	389.483.403.000,00	100,82	546.182.421.480,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	30.386.565.000,00	18.012.562.604,00	59,28	23.405.580.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	67.812.544.000,00	67.812.544.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	29.600.531.000,00	29.600.531.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	88.227.005.000,00	88.227.005.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	602.341.290.000,00	593.136.045.604,00	98,47	569.588.001.480,00

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp60.558.056.051,00 atau 84,45% dari anggarannya sebesar Rp71.705.967.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp89.054.044.924,00 atau 83,32% dari target anggaran Rp106.880.270.000,00 terdapat penurunan realisasi pendapatan dana alokasi khusus sebesar (Rp28.495.988.873,00) atau 32,00%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.12. Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	942.538.000,00	753.953.000,00	79,99	829.110.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.433.706.000,00	4.503.594.200,00	70,00	12.688.303.200,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.417.913.000,00	2.407.539.100,00	70,44	7.786.557.605,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	7.976.448.770,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.471.091.010,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	989.524.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.750.991.000,00	3.997.153.674,00	84,13	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan			0,00	807.179.771,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	36.057.626.000,00	31.744.415.000,00	88,04	44.869.418.300,00
10	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.378.500.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	130.700.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	390.600.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.855.669.000,00	1.660.145.850,00	21,13	8.469.829.768,00
14	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	9.658.000.000,00	6.760.600.000,00	70,00	1.735.716.500,00
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	1.600.000.000,00	1.426.360.000,00	89,15	520.590.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	0,00	752.204.200,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	336.140.877,00	0,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	41.967.000,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	6.173.983.150,00	0,00	0,00
	Jumlah	71.705.967.000,00	60.558.056.051,00	84,45	89.054.044.924,00

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp82.559.416.973,00 atau 91,36% dari target anggaran sebesar Rp90.369.872.000,00 sedangkan Tahun 2023 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp78.049.494.680,00 atau 91,28% dari target anggaran Rp85.505.996.000,00 sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp4.509.922.293,00 atau sebesar 5,78% dari tahun sebelumnya.

Rincian Realisasi pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.13. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	22.007.420.000,00	21.937.765.287,00	99,68	20.867.694.180,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	730.000.000,00	730.000.000,00	100,00	815.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	19.818.721.000,00	19.495.020.000,00	98,37	18.253.555.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.471.560.000,00	1.471.560.000,00	100,00	1.676.500.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	22.505.272.000,00	26.820.536.000,00	119,17	19.692.348.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.189.650.000,00	935.071.300,00	78,60	956.985.400,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.166.580.000,00	923.370.000,00	79,15	1.550.763.700,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	9.935.449.696,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	378.541.971,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	905.289.000,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.957.000,00	215.256.400,00	54,92	363.124.800,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.534.460.000,00	1.278.246.252,00	50,43	1.215.442.933,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.522.256.000,00	997.963.409,00	28,33	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	268.101.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.595.137.000,00	7.754.628.325,00	66,88	0,00
16	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	3.168.758.000,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	438.800.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	90.369.872.000,00	82.559.416.973,00	91,36	78.049.494.680,00

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah Tahun 2024 terdapat realisasi karena tahun ini Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat.

3. Dana Desa (DD)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.496.234.000,00 atau 103,01% dari Anggaran yang ditargetkan yakni sebesar Rp45.136.504.000,00 sedangkan Tahun 2023 realisasi Dana Desa sebesar Rp46.289.511.000,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp46.289.511.000,00 terdapat peningkatan realisasi dana desa sebesar Rp206.723.000, atau 0,45% dari Tahun sebelumnya. Rincian dana desa pada 43 desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dilampiran 4.

4. Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal tahun per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.978.611.000,00 atau 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.978.611.000,00, sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mendapat Insentif Fiskal dari pemerintah Pusat.

5.1.4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		43.907.408.501,00	43.637.007.014,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi pendapatan transfer antar daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi adalah sebesar Rp43.907.408.501,00 atau 96,93% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.295.843.804,00. Jika dibandingkan Tahun 2023 realisasi Rp43.637.007.014,00 dengan target anggaran sebesar Rp58.183.980.891,00 maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp270.401.487,00 atau 0,62%. Pendapatan transfer antar daerah Tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 5.1.14. Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	96,93	41.977.007.014,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.660.000.000,00
	JUMLAH	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	96,93	43.637.007.014,00

Untuk lebih rincinya Pendapatan transfer antar daerah dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Terdiri dari :

Tabel 5.1.15. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.646.636.517,00	12.789.719.362,00	101,13	11.226.491.036,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.223.917.503,00	6.340.704.220,00	101,88	5.995.089.098,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.146.617.931,00	14.051.967.977,00	92,77	16.661.844.505,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	117.021.146,00	84.871.037,00	72,53	86.398.410,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.161.650.707,00	10.640.145.905,00	95,33	8.007.183.965,00
	JUMLAH	45.295.843.804,00	43.907.408.501,00	96,93	41.977.007.014,00

Sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat merupakan Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

5.1.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		7.945.022.383,00	7.014.568.732,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.945.022.383,00 atau 97,74% dari target anggaran sebesar Rp8.128.987.200,00 sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.014.568.732,00 atau 86,29% dari target anggaran sebesar Rp8.128.987.200,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.16. Rincian lain-lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0,00	0
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	7.014.568.732,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	97,74	0
	Jumlah	8.128.987.200,00	7.945.022.383,00	97,74	7.014.568.732,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 diantaranya adalah realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD sebesar Rp 7.945.022.383,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN dan BPJS Kesehatan. Pada Tahun 2023 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD berada pada akun Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD, untuk tahun 2023 tidak ada di anggarakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut rincian realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Tabel 5.1.17. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Mapadegat	1.239.881.710	0,00
2	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sioban	869.007.484	0,00
3	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sikakap	1.018.321.745	0,00
4	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Sikabalu	749.342.550	0,00
5	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Siberut	745.104.756	0,00
6	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Betaet	318.667.696	0,00
7	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saibi Samukop	551.878.000	0,00
8	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Peipei	664.526.919	0,00
9	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saumanganya	491.339.950	0,00
10	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Malakopa	524.160.128	0,00
11	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bosua	205.958.804	0,00
12	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bulasat	278.754.212	0,00
13	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sarereiket	112.765.592	0,00
14	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sigapokna	82.669.818	0,00
15	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Simatalu	92.643.019	0,00
	Jumlah	7.945.022.383,00	0,00

5.1.4.4	BELANJA	REALISASI 2024	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)
		918.877.871.321,02	940.980.377.027,00

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp918.877.871.321,02 atau mencapai 88,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.037.684.888.525,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp940.980.377.027,00 atau 87,21% menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp22.102.505.705,98) atau 2,34%.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp918.877.871.321,02 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.18. Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	88,58	613.130.109.057,00
2	Belanja Modal	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	81,32	220.044.232.584,00
3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.025.861.621,00	51,29	919.232.006,00
4	Belanja Transfer	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	100,52	106.886.803.380,00
	Jumlah	1.037.684.888.525,00	918.877.871.321,02	88,55	940.980.377.027,00

Adapun realisasi belanja berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.4.4.1 Belanja Operasi	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	664.178.014.705,02	613.130.109.057,00

Rincian realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp664.178.014.705,02 atau 88,58% dari anggaran sebesar Rp749.816.916.782,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp613.130.109.057,00 dengan target anggaran Rp685.157.285.825,00 mengalami peningkatan sebesar Rp51.047.905.648,02 atau 8,33%.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.19. Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	372.950.582.176,14	331.088.804.278,00	88,78	274.844.651.251,00
2	Belanja Barang dan Jasa	331.367.493.905,86	289.506.143.986,02	87,37	309.205.396.703,00
3	Subsidi	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	86,07	7.585.855.000,00
4	Hibah	36.112.240.700,00	35.433.087.998,00	98,12	20.513.398.438,00
5	Bantuan Sosial	1.011.600.000,00	941.555.840,00	93,08	980.807.665,00
	Jumlah	749.816.916.782,00	664.178.014.705,02	88,58	613.130.109.057,00

Realisasi Belanja Operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	331.088.804.278,00	274.844.651.251,00

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp331.088.804.278,00 atau 88,78% dari anggaran sebesar Rp372.950.582.176,14, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp274.844.651.251,00 mengalami peningkatan sebesar Rp56.244.153.027,00 atau 16,99%. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.20. Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	242.398.683.873,14	207.465.088.650,00	85,59	167.702.800.670,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	68.217.539.655,00	63.597.099.293,00	93,23	56.382.292.934,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.697.592.514,00	50.869.096.132,00	96,53	41.549.203.300,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.934.764.834,00	8.589.443.239,00	96,14	8.708.754.347,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	99.201.224,00	77.364,00	0,08	0
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	602.800.076,00	567.999.600,00	94,23	501.600.000,00
	Jumlah	372.950.582.176,14	331.088.804.278,00	88,78	274.844.651.251,00

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.21. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	178.515.469.936,00	156.571.034.958,00	87,71	125.044.650.436,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.717.620.418,00	14.243.830.207,00	85,20	12.013.984.998,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.003.780.000,00	3.729.220.000,00	93,14	4.720.950.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.407.369.117,00	10.350.486.000,00	71,84	5.393.895.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.337.747.537,00	2.031.690.000,00	60,87	2.491.150.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.588.381.546,00	8.796.784.980,00	91,74	7.923.146.310,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.484.956.100,00	539.442.811,00	36,33	298.902.519,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.417.253,00	2.194.350,00	19,22	1.906.333,00
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	11.737.342.536,14	9.937.518.880,00	84,67	8.789.244.833,00
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	756.751.212,00	315.722.394,00	41,72	256.243.391,00
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.120.662.630,00	947.164.070,00	84,52	768.726.650,00
12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	717.185.588,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	242.398.683.873,14	207.465.088.650,00	85,59	167.702.800.670

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.1.22. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.771.591.073,00	31.645.367.195,00	93,70	27.806.644.518,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.711.008.734,00	1.527.349.184,00	89,27	1.413.146.663,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	651.260.153,00	499.452.713,00	76,69	345.838.808,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32.083.679.695,00	29.924.930.201,00	93,27	26.816.662.945,00
	JUMLAH	68.217.539.655,00	63.597.099.293,00	93,23	56.382.292.934,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.1.23. Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.436.751.588,00	18.063.331.900,00	97,97	18.215.236.900,00
2	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.379.487.800,00	16.379.403.600,00	100,00	17.555.686.400,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	821.560.000,00	821.500.000,00	99,99	2.484.430.000,00
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	584.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Honorarium	4.781.654.606,00	3.961.695.900,00	82,85	3.179.340.000,00
6	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	33.600.000,00	0,00	0,00	114.510.000,00
7	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.746.980.520,00	1.731.658.832,00	99,12	0,00
8	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	8.867.158.000,00	8.866.005.900,00	99,99	0,00
9	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	52.697.592.514,00	50.869.096.132,00	96,23	41.549.203.300,00

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.1.24. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	445.095.000,00	98,63	446.565.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.180.600,00	33.482.421,00	52,99	38.026.821,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.848.800,00	49.462.860,00	58,99	49.752.540,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00	38.062.500,00	84,34	38.209.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	645.387.750,00	98,63	647.519.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.178.350,00	51.125.550,00	58,64	60.016.950,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.488.500.000,00	98,75	2.488.500.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00	388.500.000,00	92,50	630.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	49.000.000,00	5.203.130,00	10,62	223.704,00
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.713.982.584,00	1.657.839.028,00	96,72	1.675.190.582,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.652.000.000,00	2.617.000.000,00	98,68	2.619.000.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169.785.000,00	169.785.000,00	100,00	15.750.000,00
	Jumlah	8.934.764.834,00	8.589.443.239,00	96,14	8.708.754.347,00

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.1.25. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.563.320,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.694.624,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.630.000,00	77.364,00	1,37	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	99.201.224,00	77.364,00	0,08	0,00

Pada Tahun 2024 belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp77.364,00 dari pagu anggaran sebesar Rp99.201.224,00 atau sebesar 0,08%. Realisasi tersebut terdapat pada rekening Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH. Untuk rekening lainnya tidak terealisasi pada Tahun 2024. Pada Tahun 2023 tidak terealisasi untuk belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.1.26. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	83,33	201.600.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	401.200.076,00	399.999.600,00	99,70	300.000.000,00
	JUMLAH	602.800.076,00	567.999.600,00	94,23	501.600.000,00

Adapun realisasi belanja pegawai per SKPD dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.27. Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD

NO	SKPD	LRA	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.039.064.694,00	2.854.849.705,00	93,94	2.606.094.257,00
2	Badan Keuangan Daerah	20.347.482.051,14	17.496.268.718,00	85,99	14.702.873.249,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.633.944.607,00	2.376.790.757,00	90,24	2.240.595.042,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.258.511.080,00	3.987.651.755,00	93,64	3.310.234.322,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.267.504.885,00	2.083.532.055,00	91,89	2.001.245.767,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.577.748.736,00	2.390.832.603,00	92,75	2.461.122.666,00
7	Dinas Kesehatan	63.068.907.675,00	54.053.608.437,00	85,71	31.822.712.192,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	7.473.637.125,00	7.018.662.890,00	93,91	6.608.045.586,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	2.287.073.153,00	2.109.208.266,00	92,22	1.988.561.335,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	2.583.894.068,00	2.425.258.266,00	93,86	2.289.874.071,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2.477.008.762,00	2.210.040.974,00	89,22	2.301.180.048,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	3.722.385.391,00	3.447.966.554,00	92,63	3.588.675.037,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.028.687.543,00	6.452.203.166,00	91,80	5.711.935.854,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.094.866.884,00	2.892.325.883,00	93,46	2.719.400.991,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.783.864.874,00	2.607.881.187,00	93,68	2.395.864.327,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	176.021.390.788,00	155.716.057.045,00	88,46	123.137.507.668,00
17	Dinas Perhubungan	4.973.509.273,00	4.764.078.106,00	95,79	4.151.503.571,00
18	Dinas Perikanan	3.601.745.357,00	3.374.783.868,00	93,7	3.106.087.399,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	2.290.285.538,00	2.058.322.878,00	89,87	2.078.063.903,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.285.002.727,00	3.071.272.879,00	93,49	3.014.000.219,00
21	Inspektorat	4.555.447.937,00	4.324.755.161,00	94,94	3.460.797.660,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.030.709.279,00	947.354.677,00	91,91	858.425.831,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	1.372.050.664,00	1.275.615.597,00	92,97	1.101.980.056,00
24	Kecamatan Pagai Utara	1.339.695.717,00	1.218.944.538,00	90,99	1.214.842.966,00
25	Kecamatan Siberut Barat	1.111.072.330,00	992.801.986,00	89,36	919.916.544,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.207.657.362,00	1.082.543.258,00	89,64	1.117.635.202,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	1.743.174.836,00	1.643.950.211,00	94,31	1.553.527.318,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.331.175.848,00	1.239.516.903,00	93,11	1.123.053.264,00
29	Kecamatan Siberut Utara	2.244.064.352,00	2.167.722.835,00	96,60	1.970.285.490,00
30	Kecamatan Sikakap	2.419.644.670,00	2.328.347.572,00	96,23	2.209.311.970,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	2.114.776.080,00	2.005.913.798,00	94,85	1.876.178.001,00
32	Kecamatan Sipora Utara	1.547.156.428,00	1.421.441.818,00	91,87	1.326.799.269,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	4.534.953.168,00	1.735.076.974,00	38,26	10.020.863.602,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.151.694.344,00	3.046.429.204,00	96,66	2.862.366.000,00
35	Sekretariat Daerah	10.852.483.090,00	10.285.410.728,00	94,77	9.385.076.632,00
36	Sekretariat DPRD	12.578.310.860,00	11.981.383.026,00	95,25	11.608.013.942,00
JUMLAH		372.950.582.176,14	331.088.804.278,00	88,78	274.844.651.251,00

b. Belanja Barang dan Jasa

REALISASI 2024
(Rp)

289.506.143.986,02

REALISASI 2023
(Rp)

309.205.396.703,00

Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp289.506.143.986,02 atau sebesar 87,37% dari anggaran sebesar Rp331.367.493.905,86. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp309.205.396.703,00 dari target anggaran Rp352.312.221.695,00 menunjukkan penurunan sebesar (Rp19.699.252.716,98) atau 6,37%, rincian belanja barang dan jasa tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.28. Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	75.599.010.549,86	66.907.874.869,82	88,50	73.179.396.980,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	133.583.517.443,00	118.220.608.379,20	88,50	132.084.149.372,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.190.586.937,00	21.293.383.590,00	78,31	17.057.886.700,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.124.296.976,00	56.113.458.147,00	83,60	57.145.644.873,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	11.382.700.000,00	10.814.638.000,00	95,01	11.956.355.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.487.382.000,00	16.156.181.000,00	97,99	17.781.963.778,00
	Jumlah	331.367.493.905,86	289.506.143.986,02	87.37	309.205.396.703,00

Belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja barang dan belanja jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rekapitulasi belanja barang dan jasa terdiri dari:

1) Belanja Barang

Realisasi belanja barang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.29. Belanja Barang

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.106.269.779,86	66.511.541.236,82	88,56	73.179.396.980,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	19.150.770,00	12.250.000,00	63,97	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	473.590.000,00	384.083.633,00	81,10	0,00
	Jumlah	75.599.010.549,86	66.907.874.869,82	88,50	73.179.396.980,00

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.511.541.236,82 atau 88,56% dari target anggaran sebesar Rp75.106.269.779,86, jika dibandingkan dengan realiasi belanja bahan pakai habis Tahun 2023 sebesar Rp73.179.396.980,00 menunjukkan peningkatan penurunan sebesar (Rp6.667.855.743,18) atau sebesar 9,11%.

Rincian Belanja Bahan Pakai Habis terdapat pada Lampiran 5.

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Pada Tahun 2024 belanja barang tak habis pakai terealisasi sebesar Rp12.250.000,00 dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp19.150.770,00 sedangkan Tahun 2023 tidak terealisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.30. Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	17.100.000,00	12.000.000,00	70,18	0
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	250.770,00	250.000,00	99,69	0
	Jumlah	19.150.770,00	12.250.000,00	63,97	0,00

c) Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Pada tahun 2024 realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp 384.083.633,00 atau 81,10% dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp473.590.000,00. Tahun 2023 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tidak di anggarakan dan tidak terealisasi.

2) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Bahan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp118.220.608.379,20 atau 88,50% dari anggaran sebesar Rp133.583.517.443,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.31. Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	88.172.084.501,00	79.070.507.153,20	89,68	88.347.353.957,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.352.188.932,00	13.884.597.835,00	96,74	10.259.052.857,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	76.400.000,00	15.920.000,00	20,84	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.219.254.840,00	8.359.972.603,00	81,81	10.043.652.267,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	583.250.000,00	464.250.000,00	79,6	866.973.660,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.985.000,00	99,93	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.253.738.170,00	9.683.130.169,00	79,02	14.025.649.402,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.310.181.000,00	4.018.382.969,00	93,23	4.801.211.629,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	246.100.000,00	226.720.000,00	92,13	158.695.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.350.320.000,00	2.477.142.650,00	73,94	3.581.560.600,00
	JUMLAH	133.583.517.443,00	118.220.608.379,20	88,5	132.084.149.372,00

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.074.907.462,20 atau 89,68% dari target anggaran sebesar Rp88.172.084.501,00 sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp88.347.353.957,00. Rincian belanja jasa kantor dapat dilihat pada Lampiran 6.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.32. Realisasi Iuran Jaminan/Asuransi

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	958.974.000,00	848.393.448,00	88,47	664.550.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.858.806.666,00	4.798.135.561,00	98,75	4.364.869.509,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	128.990.760,00	100.294.375,00	77,75	3.009.848.598,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	161.238.456,00	125.367.969,00	77,75	2.219.784.250,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	144.866.250,00	63.536.882,00	43,86	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	4.820.210.000,00	4.731.470.000,00	98,16	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	3.279.102.800,00	3.217.399.600,00	98,12	0,00
	Jumlah	14.352.188.932,00	13.884.597.835,00	96,74	10.259.052.857,00

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi belanja sewa Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.33. Realisasi Belanja Sewa Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	14.520.000,00	19,36	0,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	76.400.000,00	15.920.000,00	20,84	0,00

d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.34. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	288.000.000,00	71.684.298,00	24,89	199.878.030,00
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	30.000.000,00	29.999.805,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	320.150.000,00	304.500.000,00	95,11	252.254.054,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	17.100.000,00	16.000.000,00	93,57	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	9.468.617.000,00	7.869.433.500,00	83,11	9.424.665.183,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.500.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	2.787.840,00	2.780.000,00	99,72	0,00
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	50.000.000,00	24.975.000,00	49,95	24.975.000,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah	10.219.254.840,00	8.359.972.603,00	81,81	10.043.652.267,00

e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja sewa gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.35. Realisasi Sewa Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	85.600.000,00	95,11	235.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	28.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	189.800.000,00	129.550.000,00	68,26	275.800.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.250.000,00	15.500.000,00	63,92	58.950.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	49.420.780,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	81.600.000,00	42.600.000,00	52,21	159.302.880,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	112.600.000,00	106.000.000,00	94,14	60.500.000,00
	JUMLAH	583.250.000,00	464.250.000,00	79,60	866.973.660,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.1.36. Realisasi Belanja Sewa Aset tetap Lainnya

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	20.000.000,00	19.985.000,00	99.93	0,00
	Jumlah	20.000.000,00	19.985.000,00	99.93	0,00

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.1.37. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	513.828.000,00	396.568.728,00	77,18	443.670.255,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	14.105.000,00	13.990.000,00	99,18	25.490.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	582.500.000,00	540.408.430,00	92,77	221.048.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.029.262.000,00	985.752.214,00	95,77	470.220.800,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.200.000.000,00	984.877.000,00	82,07	1.739.277.493,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	448.995.000,00	446.555.690,00	99,46	1.999.280.402,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	202.663.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.066.298.500,00	1.066.288.866,00	100,00	494.200.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	161.800.000,00	159.999.063,00	98,89	59.701.350,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	73.950.000,00	73.904.957,00	99,94	80.444.475,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.414.048.600,00	643.646.210,00	45,52	1.734.636.045,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.841.622.070,00	2.739.284.287,00	96,40	3.782.785.549,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.216.609.000,00	993.341.300,00	81,65	1.114.882.829,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	111.400.000,00	11.400.000,00	10,23	0
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.000.000.000,00	396.814.000,00	39,68	394.948.300,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	559.320.000,00	230.299.424,00	41,17	1.259.400.200,00
	Jumlah	12.253.738.170,00	9.683.130.169,00	79,02	14.025.649.402,00

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Tabel 5.1.38. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	298.102.344,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	147.000.000,00	46.500.000,00	31,63	195.757.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	200.000.000,00	196.692.000,00	98,35	273.653.850,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	341.240.000,00	340.812.042,00	99,87	356.103.430,00
5.1.02.02.09.0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.301.941.000,00	2.119.654.775,00	92,08	3.677.595.005,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	70.000.000,00	69.000.000,00	98,57	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	350.000.000,00	345.724.152,00	98,78	0,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	4.310.181.000,00	4.018.382.969,00	93,23	4.801.211.629,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Table 5.1.39. Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	246.100.000,00	226.720.000,00	92,13	158.695.000,00
	JUMLAH	246.100.000,00	226.720.000,00	92,13	158.695.000,00

j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.1.40. Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.890.270.000,00	2.087.363.650,00	72,22	2.801.161.600,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	45.564.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	125.800.000,00	67.300.000,00	53,50	399.050.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	334.250.000,00	322.479.000,00	96,48	335.785.000,00
	JUMLAH	3.350.320.000,00	2.477.142.650,00	73,94	3.581.560.600,00

3) Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.1.41. Realisasi Belanja Pemeliharaan

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.709.833.600,00	7.010.008.994,00	90,92	6.011.808.600,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.887.335.611,00	4.526.212.294,00	76,88	5.744.281.558,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.593.417.726,00	9.757.162.302,00	71,78	5.301.796.542,00
	JUMLAH	27.190.586.937,00	21.293.383.590,00	78,31	17.057.886.700,00

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.1.42. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	137.469.000,00	111.499.929,00	81,11	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	99.500.000,00	84.987.900,00	85,41	58.289.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.761.274.600,00	1.626.509.871,00	92,35	1.713.376.148,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.720.000,00	2.356.816,00	49,93	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	56.062.250,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	195.440.000,00	166.421.900,00	85,15	161.239.040,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.200.000,00	24.195.000,00	99,98	24.993.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	159.400.000,00	145.968.950,00	91,57	98.568.800,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.029.000.000,00	3.812.946.400,00	94,64	2.563.757.567,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	42.440.000,00	33.000.000,00	77,76	32.385.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	90.400.000,00	52.186.500,00	57,73	169.498.670,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.900.000,00	16.761.000,00	99,18	16.789.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	318.420.000,00	304.582.177,00	95,65	319.997.778,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	9.915.482,00	66,10	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	16.000.000,00	8.000.000,00	50,00	28.588.300,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	85.000.000,00	0,00	0,00	71.918.900,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	40.000.000,00	39.940.000,00	99,85	59.950.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	140.000.000,00	136.885.200,00	97,78	133.105.650,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	297.110.000,00	265.072.919,00	89,22	296.418.499,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	142.560.000,00	118.787.950,00	83,32	94.724.180,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00	9.991.000,00	99,91	9.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	97.806.318,00
	Jumlah	7.709.833.600,00	7.010.008.994,00	90,92	6.011.808.600,00

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.1.43. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.063.761.611,00	3.550.310.108,00	87,37	5.289.089.586,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.719.574.000,00	872.018.996,00	50,71	0,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	137.226.438,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	16.000.000,00	15.998.950,00	99,99	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	88.000.000,00	87.884.240,00	99,87	215.367.884,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	31.872.650,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	70.725.000,00
	JUMLAH	5.887.335.611,00	4.526.212.294,00	76,88	5.744.281.558,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.1.44. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.676.488.521,00	1.222.839.279,00	72,94	1.131.806.770,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	110.000.000,00	109.925.797,00	99,93	91.852.355,00
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	9.893.679.205,00	6.720.234.362,00	67,92	1.154.445.095,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	508.825.563,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	983.250.000,00	981.150.000,00	99,79	880.889.922,00
5.1.02.03.04.0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	400.000.000,00	199.500.000,00	49,88	0,00
5.1.02.03.04.0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	570.762.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	180.000.000,00	179.389.559,00	99,66	59.486.565,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	100.000.000,00	99.539.800,00	99,54	49.938.900,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	250.000.000,00	244.583.505,00	97,83	316.261.200,00
5.1.02.03.04.0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	0,00	0,00	0,00	323.166.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.945.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.416.772,00
	JUMLAH	13.593.417.726,00	9.757.162.302,00	71,78	5.301.796.542,00

4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisai Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.113.558.147,00 atau 83,60% dari target anggaran sebesar Rp67.124.296.976,00 sedangkan realisasi belanja perjalanan dinas Tahun 2023 sebesar Rp57.145.644.873,00. Belanja perjalanan dinas Tahun 2024 terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut :

a) Perjalanan dinas dalam negeri

Tabel 5.1.45. Realisasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.628.762.174,00	32.679.504.542,00	84,60	32.810.972.840,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.322.335.600,00	1.016.594.670,00	76,88	1.451.659.232,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.904.234.202,00	22.188.003.935,00	82,47	22.380.696.390,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.075.000,00	59.655.000,00	70,95	109.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	184.890.000,00	169.700.000,00	91,78	171.425.000,00
	JUMLAH	67.124.296.976,00	56.113.458.147,00	83,60	56.924.503.462,00

b) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel 5.1.46. Realisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	221.141.411,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	221.141.411,00

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp10.814.638.000,00 atau 95,01% dari target anggaran sebesar Rp11.382.700.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp11.696.555.000,00. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan rincian terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.1.47. Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	237.200.000,00	214.500.000,00	90,43	188.730.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.051.400.000,00	2.700.138.000,00	88,49	3.627.825.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.905.000.000,00	7.885.000.000,00	99,75	7.630.000.000,00
	JUMLAH	11.193.600.000,00	10.799.638.000,00	96,48	11.696.555.000,00

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.1.48. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	189.100.000,00	15.000.000,00	7,93	259.800.000,00
	JUMLAH	189.100.000,00	15.000.000,00	7,93	259.800.000,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2024 sebesar Rp16.156.181.000,00 atau 97,99% dari pagu anggaran sebesar Rp16.487.382.000,00. Sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.781.963.778,00 atau 97,22%. Belanja barang dan Jasa BOS terdiri dari Belanja Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Belanja Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belanja barang BOS masing - masing sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja barang dan jasa BOS SD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.392.911.888,00 dengan rincian pada Lampiran 7.

a. Belanja barang dan jasa BOS SMP Tahun 2024 sebesar Rp5.256.605.974,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.49. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS SMP Tahun 2024 dan 2023

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BARJAS 2024	BARJAS 2023
1	SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan	SIKAKAP	624.076.400	654.551.300
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	210.369.250	185.595.000
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	164.659.800	161.490.700
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	64.140.000	77.010.102



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BARJAS 2024	BARJAS 2023
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	284.569.000	233.434.000
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	73.800.000	69.450.000
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	67.400.000	68.100.000
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	170.130.000	219.224.000
9	SMPN 2 Pagai Utara	Pagai Utara	72.400.000	0,00
10	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	284.018.419	313.603.906
11	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	120.640.000	153.617.458
12	SMP NEGERI 3 SIPORA SELATAN	Sipora Selatan	71.110.400	59.714.000
13	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	103.399.100	91.749.036
14	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	441.641.175	361.591.650
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	410.174.600	425.737.600
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	166.240.800	171.930.600
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	285.661.900	310.500.000
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	160.853.000	157.688.000
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	209.420.000	202.183.000
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	110.635.600	116.546.900
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	102.850.000	68.377.000
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	128.620.000	152.296.158
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	75.022.000	71.371.000
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	220.091.030	211.770.400
25	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	360.373.500	397.916.000
26	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	102.490.000	113.741.000
27	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	98.120.000	88.553.700
28	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	73.700.000	88.460.000
TOTAL			5.256.605.974	5.226.202.510

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 288.981.660.207,02 dengan uraian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.50. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.293.890.806,00	1.952.514.411,00	85,12	3.216.680.063,00
2	Badan Keuangan Daerah	19.842.519.816,00	17.549.298.181,00	88,44	14.048.233.466,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.275.772.700,00	3.084.791.819,00	72,15	2.400.427.718,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.436.942.950,00	4.228.444.764,00	95,30	4.531.040.044,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.516.050.500,00	1.279.079.608,00	84,37	1.680.212.291,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.212.936.600,00	2.094.526.035,00	94,65	1.838.544.655,00
7	Dinas Kesehatan	46.317.336.873,86	41.725.752.944,02	89,83	46.687.249.043,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.169.446.356,00	5.533.150.389,00	89,69	8.826.212.173,00
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	4.371.700.350,00	4.115.102.869,00	94,13	4.679.291.465,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	3.489.362.160,00	3.015.771.281,00	86,43	5.945.138.437,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.483.052.337,00	3.325.485.036,00	74,18	1.640.998.198,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga	7.449.072.900,00	5.448.703.998,00	73,15	6.308.034.571,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	32.987.188.153,00	26.036.070.377,00	78,93	32.910.803.861,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.948.155.100,00	3.879.710.444,00	78,41	5.050.360.548,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.742.599.547,00	1.550.691.553,00	88,99	1.534.265.094,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.447.166.451,00	27.192.994.110,00	92,35	37.680.879.868,00
17	Dinas Perhubungan	21.891.012.255,00	16.397.514.997,00	74,91	8.680.164.413,00
18	Dinas Perikanan	27.203.011.552,00	24.631.074.174,00	90,55	20.109.427.845,00
19	Dinas Perumahan dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	11.880.748.900,00	11.436.809.862,00	96,26	12.503.377.292,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.312.123.100,00	3.094.648.281,00	93,43	4.572.834.115,00
21	Inspektorat	5.169.812.200,00	5.042.423.586,00	97,54	4.718.714.717,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.318.633.300,00	1.937.095.400,00	83,54	1.834.487.336,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	1.026.852.000,00	1.005.369.697,00	97,91	984.809.200,00
24	Kecamatan Pagai Utara	1.037.247.640,00	1.014.751.444,00	97,83	1.006.851.871,00
25	Kecamatan Siberut Barat	1.067.314.610,00	1.024.841.610,00	96,02	955.675.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	982.800.700,00	843.450.800,00	85,82	881.991.000,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	924.157.180,00	886.379.230,00	95,91	778.725.991,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	963.490.683,00	951.743.000,00	98,78	758.863.500,00
29	Kecamatan Siberut Utara	990.695.300,00	983.627.900,00	99,29	901.606.500,00
30	Kecamatan Sikakap	826.706.600,00	808.516.855,00	97,80	745.894.300,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	996.169.000,00	907.793.450,00	91,13	802.656.644,00
32	Kecamatan Sipora Utara	950.168.285,00	942.917.922,00	99,24	1.060.114.417,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	16.238.871.253	13.783.148.829	84,88	14.825.159.461
34	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.186.393.300,00	4.997.074.338,00	96,35	3.309.578.809,00
35	Sekretariat Daerah	25.649.927.298,00	23.730.113.688,00	92,52	32.311.840.435,00
36	Sekretariat DPRD	26.768.165.150,00	22.550.277.325,00	84,24	18.484.251.662,00
	JUMLAH	331.367.493.905,86	288.981.660.207,02	87,17	309.205.396.703,00

Dari total realisasi belanja barang dan jasa, terdapat sebesar Rp7.616.414.466,02 diantaranya merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN/FKTP tahun anggaran 2024, dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.1.51. Realisasi Belanja Barang dan Jasa JKN/FKTP

No	Puskesmas	REALISASI BELANJA BARJAS (Rp)	
		2024	2023
1	Puskesmas Bulasat	272.811.728,00	623.044.114,00
2	Puskesmas Bosua	193.552.862,00	583.582.500,00
3	Puskesmas Betaet	316.252.835,00	389.236.796,00
4	Puskesmas Saibi Samukop	536.524.300,00	623.532.369,00
5	Puskesmas Saumanganya	406.801.320,00	1.099.809.577,00
6	Puskesmas Pei-pe	582.030.100,00	902.284.000,00
7	Puskesmas Ma. Sikabalu	743.030.970,00	448.046.000,00
8	Puskesmas Mapaddegat	1.156.467.510,20	673.036.730,00
9	Puskesmas Sikakap	1.008.338.297,00	754.542.740,00
10	Puskesmas Malakopa	520.281.284,00	250.273.260,00
11	Puskesmas Ma. Siberut	734.162.224,00	194.630.160,00
12	Puskesmas Sioban	855.184.230,82	318.914.865,00
13	Puskesmas Sarereiket	140.922.000,00	83.668.252,00
14	Puskesmas Sigapokna	57.210.747,00	78.517.344,00
15	Puskesmas Simatalu	92.844.058,00	102.655.323,00
	Total	7.616.414.466,02	7.125.774.030,00

	REALISASI 2024	REALISASI 2023
c. Belanja Subsidi	(Rp)	(Rp)
	7.208.422.603,00	7.585.855.000,00

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.208.422.603,00 atau 86,07% dari anggaran sebesar Rp 8.375.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi Tahun 2023 sebesar Rp7.585.855.000,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

81,13%, terdapat penurunan belanja sebesar (Rp377.431.397,00) atau 4,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.52. Realisasi Belanja Subsidi

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.4.02.02.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	86,07	7.585.855.000,00
	JUMLAH	8.375.000.000,00	7.208.422.603,00	86,07	7.585.855.000,00

Belanja subsidi yang terealisasi Tahun 2024 adalah belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta berupa pemberian subsidi kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah (NPSD) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera sesuai dengan NPSD tentang Pemberian Subsidi Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan Antara Padang-Sikakap (PP), rute Padang-Siberut-Sikabalu (PP), dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat antar pulau dengan Rute Penyeberangan Antara Tuapejat - Sikakap (PP) dan Tuapejat - Siberut - Sikabalu (PP).

Pemberian subsidi kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera untuk Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Tahun 2024 dapat dirinci sebagaimana dalam Lampiran 8.

	REALISASI 2024	REALISASI 2023
d. Belanja Hibah	(Rp)	(Rp)
	35.433.087.998,00	20.513.398.438,00

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp35.433.087.998,00 atau 98,12% dari alokasi anggaran Rp36.112.240.700,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 belanja hibah terealisasi sebesar Rp20.513.398.438,00 atau 95,97% maka terdapat peningkatan belanja sebesar Rp14.919.689.560,00 atau 72,73%.

Rincian Belanja Hibah Tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.53. Rincian Belanja Hibah

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	20.806.244.600,00	20.806.244.600,00	100,00	7.200.000.000,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	231.415.174,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.678.768.100,00	14.000.843.388,00	95,38	12.454.755.264,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	626.000.010,00	99,80	627.228.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Jumlah	36.112.240.700,00	35.433.087.998,00	95,97	20.513.398.438,00

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah pusat merupakan hibah kepada Badan pengawas Pemilu Daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan DPR, DPRD tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.54. Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	No SP2D
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.806.244.600,00	4.808.244.000,00	13.09/04.0/000045/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024
2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	13.698.000.600,00	13.09/04.0/000046/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024
3	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.500.000.000,00	13.09/04.0/000049/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024
4	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	800.000.000,00	13.09/04.0/000054/LS/8.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024
	Jumlah	20.806.244.600,00	20.806.244.600,00	

2. Belanja Hibah kepada BUMN tahun 2024 tidak terealisasi dan tidak dianggarkan.
3. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp 14.000.843.388,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.55. Realisasi belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.556.230.000,00	2.545.111.300,00	99,57	2.707.749.100,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.060.000.000,00	2.010.461.988,00	97,60	2.000.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.880.000.000,00	6.629.026.000,00	96,35	4.694.310.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.622.538.100,00	2.259.103.500,00	86,14	3.052.695.189,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	360.000.000,00	357.140.600,00	99,21	0,00
	Jumlah	14.678.768.100,00	14.000.843.388,00	95,38	12.454.755.264,00

4. Pada Tahun 2024 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp626.000.010,00 atau 99,80% dari target anggaran seperti hal nya pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.56. Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	No.SP2D / Dok. Sumber	Tanggal
1	PARTAI POLITIK DPC-PDI PERJUANGAN KAB. KEP. MENTAWAI	120.264.677,00	120.264.677,00	13.09/04.0/000033/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000092/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
2	PARTAI POLITIK GOLKAR KAB.KEP MENTAWAI	90.351.333,00	90.351.333,00	13.09/04.0/000037/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000091/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
3	PARTAI POLITIK GARUDA KAB.KEP MENTAWAI	26.866.657,00	25.638.667,00	13.09/04.0/000038/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024	21/06/2024
4	PARTAI POLITIK PAN KAB.KEP MENTAWAI	28.644.000,00	28.644.000,00	13.09/04.0/000035/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024	21/06/2024, 22/11/2024
5	PARTAI POLITIK PERINDO KAB.KEP MENTAWAI	76.948.333,00	76.948.333,00	13.09/04.0/000034/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000088/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
6	PARTAI POLITIK DEMOKRAT KAB.KEP MENTAWAI	62.179.000,00	62.179.000,00	13.09/04.0/000040/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000090/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
7	PARTAI POLITIK GERINDRA KAB.KEP MENTAWAI	61.992.000,00	61.992.000,00	13.09/04.0/000039/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000089/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
8	PARTAI POLITIK NASDEM KAB.KEP MENTAWAI	77.041.667,00	77.041.667,00	13.09/04.0/000036/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000093/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
9	PARTAI POLITIK HANURA KAB. MENTAWAI	68.315.333,00	68.315.333,00	13.09/04.0/000041/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/M/6/2024, 13.09/04.0/000087/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/11/2024	21/06/2024, 22/11/2024
	PARTAI POLITIK PSI KAB. MENTAWAI	14.625.000,00	14.625.000,00	13.09/04.0/000101/LS/8.01.0.0 0.0.00.08.0000/PR/12/2024	17/12/2024
	Jumlah	627.228.000,00	626.000.010,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Belanja Bantuan Sosial	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	941.555.840,00	980.807.665,00

Realisasi belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp941.555.840,00 atau 93,08% dari target anggaran Rp1.011.600.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp980.807.665,00 dari target anggaran Rp1.094.430.000,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan sosial sebesar (Rp39.251.825,00) atau 4,00%.

Rincian Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.57. Realisasi Bantuan Sosial

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	577.500.000,00	560.000.000,00	96,97	942.857.665,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	434.100.000,00	381.555.840,00	87,90	37.950.000,00
	Jumlah	1.011.600.000,00	941.555.840,00	93,08	980.807.665,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2024 terealisasi Rp560.000.000,00 atau 96,97% dari target anggaran Rp577.500.000,00. Belanja bantuan berupa bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Belanja bantuan sosial kepada individu Tahun 2024 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp560.000.000,00 berupa belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan di luar panti, gangguan jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.58. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

No	Uraian	Bantuan Sosial	No. SP2D	Tanggal SP2D
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Pada Keg. Resos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandanga Diluar Panti Sosial Daerah Kab/Kota Sub Keg. Penyediaan Permakanan	80.000.000,00	13.09/04.0/0000 75/LS/1.06.2.08. 0.00.06.0000/PR /10/2024	31/10/2024
2	Pembayaran Belanja Bansos Uang yang direncanakan Kepada Individu An. Leni Susilawati disabilitas Pasca kecelakaan Berdasarkan SK Bupati Nonor: 100.3.3.2/453/Tahun 2024 tgl 30 Sep 2024 sub. Keg. Fas Ban Sos Kesejahteraan Keluarga, sumber Dana (DAU-SG)	10.000.000,00	13.09/04.0/0000 91/LS/1.06.2.08. 0.00.06.0000/PR /11/2024	22/11/2024
3	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu/bantuan Sosial uang kepada keluarga/orang dalam gangguan jiwa (ODMK) /kelompok rentan An.Tuti Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2/454 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, pada kegiatan 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial dan Sub	5.000.000,00	13.09/06.0/0006 79/UP/1.06.2.08. 0.00.06.0000/PR /12/2024	03/12/2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Bantuan Sosial	No. SP2D	Tanggal SP2D
	Kegiatan 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.			
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu/bantuan Sosial uang kepada keluarga/orang dalam gangguan /kelompok rentan An.Amos berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2/454 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, pada kegiatan 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial dan Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.	5.000.000,00	13.09/06.0/000680/UP/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/12/2024	03/12/2024
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu/bantuan Sosial uang kepada keluarga/orang dalam gangguan jiwa (ODMK) /kelompok rentan An.Rohayati berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2/454 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, pada kegiatan 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial dan Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.	5.000.000,00	13.09/06.0/000678/UP/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/12/2024	03/12/2024
6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial An. ERNAWATI SALELEUBAJA Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2/456 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024	2.500.000,00	13.09/06.0/000695/UP/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/12/2024	29/12/2024
7	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial An. Rongan Kerei Sagulu Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 100.3.3.2/456 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024	2.500.000,00	13.09/06.0/000704/UP/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/12/2024	29/12/2024
JUMLAH		110.000.000,00		

Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp450.000.000,00 merupakan Bantuan Sosial Barang berupa pemberian bantuan Perumahan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.59. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang di Rencanakan Kepada Individu

No	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Tanggal SP2D
1	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu pada sub. Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Berdasarkan Surat Perjanian Kerja SPK/Pesanan Nomor: 810/13/SPK/PERMAKINAN/DSP3A/2024	82.000.000,00	13.09/04.0/000079/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	04/11/2024
2	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu pada sub. Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Berdasarkan Surat Perjanian Kerja SPK/Pesanan Nomor: 810/03/SPK/PERMAKINAN/DSP3A/2024	100.000.000,00	13.09/04.0/000082/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	04/11/2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Bansos (Rp)	No. SP2D	Tanggal SP2D
3	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu pada sub. Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja SPK/Pesanan Nomor: 810/05/SPK/PERMAKINAN/DSP3A/2024	84.000.000,00	13.09/04.0/000078/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	04/11/2024
4	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu pada sub. Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja SPK/Pesanan Nomor: 810/07/SPK/PERMAKINAN/DSP3A/2024	59.000.000,00	13.09/04.0/000084/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	04/11/2024
5	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu pada sub. Kegiatan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja SPK/Pesanan Nomor: 810/11/SPK/PERMAKINAN/DSP3A/2024	58.000.000,00	13.09/04.0/000085/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	04/11/2024
6	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu/Penyediaan Permakanan Bagi kelompok rentan Berdasarkan SPK/Pesanan Nomor: 810/09/SPK/Permakanan/DSP3A/2024 tanggal 09 September 2024 Sumber Dana DAU-SG	67.000.000,00	13.09/04.0/000093/LS/1.06.2.08.0.00.06.0000/PR/11/2024	02/12/2024
	JUMLAH	450.000.000,00		

- 2) Tahun 2024 realisasi belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp381.555.840,00 atau 87,90% dari target anggaran sebesar Rp434.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.60. Realisasi Bantuan Sosial Kepada Keluarga

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	50.100.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	384.000.000,00	381.555.840,00	99,36	0,00
	Jumlah	434.100.000,00	381.555.840,00	87,90	37.950.000,00

Belanja bantuan sosial kepada keluarga Tahun 2024 sebesar Rp381.555.840,00 tersebut merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga berupa bantuan uang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.61. Rincian bantuan Sosial kepada Keluarga

No	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah	No dan Tgl SK Bansos	Nomor SP2D
1	Bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	381.555.840,00	OPD Sekretariat Daerah	13.09/04.0/000362/LS/4.01.3.29.2.10.41.0000/PR/12/2024
	Jumlah	381.555.840,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.4.2 Belanja Modal	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	142.697.574.476,00	220.044.232.584,00

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp142.697.574.476,00 atau 81,32% dari target anggaran sebesar Rp175.466.348.069,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp220.044.232.584,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp77.346.658.108,00) atau 35,71%.

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode/tahun. Belanja Modal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1.62. Realisasi Belanja Modal

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.752.470.851,00	213.300.000,00	5,68	199.222.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.307.471.798,00	23.182.154.448,00	92,61	33.569.000.163,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	65.815.959.222,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.740.126.118,00	91.142.885.630,00	82,30	118.659.040.585,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	65,54	1.666.699.814,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	362.320.000,00	315.845.000,00	87,17	134.310.000,00
	JUMLAH	175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	80,62	220.044.232.584,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.63. Realisasi Belanja Modal Per SKPD

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2	Badan Keuangan Daerah	1.096.611.255,00	978.548.500,00	89,23	935.973.250,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.160.995.840,00	3.785.011.000,00	46,38	1.455.062.600,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	807.126.350,00	793.908.933,00	98,36	472.830.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.134.532.655,00	2.022.489.873,00	48,92	5.552.996.746,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.800.000,00	20.000.000,00	91,74	473.530.500,00
7	Dinas Kesehatan	6.830.294.424,00	6.603.956.354,00	96,69	13.600.018.279,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	573.036.000,00	573.036.000,00	100,00	564.395.700,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	361.756.214,00	352.191.000,00	97,36	218.754.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13.750.000,00	12.898.000,00	93,80	204.008.982,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	326.810.857,00	303.443.400,00	92,85	1.449.299.130,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.879.884.110,00	1.692.826.519,00	34,69	3.639.874.902,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.988.277.807,00	83.761.085.707,00	81,33	118.118.997.306,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.130.000,00	32.013.360,00	96,63	172.478.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	357.477.400,00	342.038.175,00	95,68	0,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.632.032.447,00	24.631.348.430,00	89,14	60.204.133.339,00
17	Dinas Perhubungan	486.774.100,00	456.123.456,00	93,70	279.318.000,00
18	Dinas Perikanan	1.534.150.000,00	1.429.034.338,00	93,15	531.692.945,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.599.758.020,00	2.595.615.258,00	99,84	5.248.861.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	157.639.200,00	150.824.650,00	95,68	560.870.059,00
21	Inspektorat	174.400.000,00	124.880.000,00	71,61	480.054.454,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	106.314.150,00	50.722.945,00	47,71	10.499.000,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	65.200.000,00	65.200.000,00	100,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	30.034.250,00	30.031.000,00	99,99	44.010.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	70.428.390,00	65.250.000,00	92,65	74.925.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	41.652.700,00	41.652.700,00	100,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	55.858.000,00	55.789.000,00	99,88	25.592.800,00
29	Kecamatan Siberut Utara	21.795.700,00	21.795.700,00	100,00	15.450.000,00
30	Kecamatan Sikakap	75.497.500,00	75.497.500,00	100,00	11.790.000,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	49.400.000,00	44.230.000,00	89,53	307.345.000,00
32	Kecamatan Sipora Utara	162.551.700,00	162.514.000,00	99,98	5.217.000,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	99,07	1.888.144.810,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.797.220.000,00	6.697.915.074,00	98,54	182.131.802,00
35	Sekretariat Daerah	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	98,44	3.145.008.880,00
36	Sekretariat DPRD	633.200.000,00	616.369.670,00	97,34	169.813.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
Total Belanja Modal		175.466.348.069,00	142.697.574.476,00	81,32	220.044.232.584,00

Dari total belanja modal, terdapat sebesar Rp91.714.380,00 diantaranya merupakan belanja modal yang bersumber dari dana JKN/FKTP dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.1.64. Belanja Modal dari Dana JKN/FKTP

NO	Puskesmas	2024	2023
1	Bulasat	5.882.400,00	26.671.000,00
2	Bosua	0,00	3.876.000,00
3	Betaet	2.405.514,00	29.135.475,00
4	Saibi Samukop	0,00	72.273.000,00
5	Pei-pe	1.500.000,00	23.475.000,00
6	Ma. Sikabalu	3.999.996,00	109.446.200,00
7	Mapadegat	47.863.996,00	36.365.500,00
8	Sikakap	7.599.996,00	85.865.000,00
9	malakopa	0,00	67.454.000,00
10	sioban	10.641.000,00	102.732.527,00
11	sarereiket	0,00	15.000.000,00
12	Muara Siberut	10.939.992,00	0
13	Sigapokna	3.000.000,00	8.372.700,00
14	simatalu	0,00	24.880.000,00
15	saumanganya	16.254.000,00	46.308.814,00
	Jumlah	110.086.894,00	651.855.216,00

Belanja modal dari dana JKN/FKTP Tahun 2024 pada 15 (limabelas) puskesmas berupa belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian antara lain :

Tabel 5.1.65. Belanja Modal dari Dana JKN/FKTP pada Puskesmas

No Rek	Uraian	BM JKN 2024	BM JKN 2023
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.500.000,00	6.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	11.500.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	89.925.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	8.387.144,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	14.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	15.209.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	17.620.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	17.434.000,00	70.602.700,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18.000.000,00	11.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	750.000,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.999.980,00	7.900.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	19.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	BM JKN 2024	BM JKN 2023
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	16.482.527,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	17.956.400,00	58.468.656,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.307.514,00	39.825.175,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	1.811.250,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.500.000,00	2.820.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	5.275.000,00	10.294.750,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.430.000,00	219.909.014,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	8.334.000,00	30.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.600.000,00	
	Jumlah	110.086.894,00	651.855.216,00

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Belanja Modal Tanah	(Rp)	(Rp)
	213.300.000,00	199.222.800,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.300.000,00 atau 5,68% dari anggaran sebesar Rp 3.752.470.851,00, jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah Tahun 2023 sebesar Rp199.222.800,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp14.077.200,00 atau 7,07%. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah antara lain :

Tabel 5.1.66. Realisasi Belanja Modal Tanah

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	405.000.000,00	213.300.000,00	52,67	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.347.470.851,00	0,00	0,00	199.222.800,00
	JUMLAH	3.752.470.851,00	213.300.000,00	5,68	199.222.800,00

Belanja modal tanah Tahun 2024 merupakan pengadaan tanah pada dinas kearsipan dan perpustakaan untuk pembangunan gedung perpustakaan.

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	23.182.154.448,00	33.569.000.163,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.182.154.448,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar Rp24.307.471.798,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp33.569.000.163,00 atau 92,93%, maka terdapat penurunan belanja sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Rp10.386.845.715,00) atau 30.94%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

Tabel 5.1.67. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	618.559.200,00	596.970.000,00	96,51	308.944.700,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.574.777.090,00	6.421.149.000,00	97,66	8.071.310.125,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.600.000,00	11.585.000,00	99,87	207.193.494,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	698.857.000,00	612.355.000,00	87,62	190.105.945,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.673.588.921,00	2.434.186.959,00	91,05	3.509.491.590,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.002.629.733,00	1.829.505.162,00	91,36	2.554.201.937,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.637.094.514,00	3.586.975.687,00	98,62	8.567.553.028,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.598.350,00	16.225.000,00	82,79	1.515.782.250,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.528.784.790,00	3.339.340.395,00	94,63	5.205.999.416,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	63.644.600,00	44.362.500,00	69,70	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	79.200.000,00	70.897.920,00	89,52	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	18.492.600,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.399.137.600,00	4.218.601.825,00	95,90	3.384.925.078,00
	Jumlah	24.307.471.798,00	23.182.154.448,00	95,37	33.569.00.163,00

Dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut terdapat belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS SMP sebesar Rp1.850.900.400,00 yang terealisasi dari anggaran Dana BOS sebesar Rp1.537.134.251,00. Rincian belanja modal peralatan masing-masing SD sebagaimana terlampir dalam Lampiran 9.

Sedangkan rincian belanja modal peralatan masing-masing SMP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.68. Rincian Belanja Modal SMP

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI 2024 (Rp)
1	SMP Negeri 1 Pagai Utara Selatan	SIKAKAP	204.264.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	22.100.000,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	18.250.000,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	11.850.000,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	56.315.000,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	8.600.000,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	19.000.000,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	26.000.000,00
9	SMPN 2 Pagai Utara	Pagai Utara	13.000.000,00
10	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	21.940.381,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI 2024 (Rp)
11	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	15.900.000,00
12	SMP Negeri 3 Sipora Selatan	Sipora Selatan	29.150.000,00
13	SMP Negeri 1 Sipora Utara	Sipora Utara	23.987.300,00
14	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	126.000.000,00
15	SMP Negeri 1 Siberut Selatan	Siberut Selatan	140.868.000,00
16	SMP Negeri 2 Siberut Selatan	Siberut Selatan	22.400.000,00
17	SMP Negeri 1 Siberut Tengah	Siberut Tengah	133.440.000,00
18	SMP Negeri 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	58.550.000,00
19	SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	70.800.000,00
20	SMP Negeri 2 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	76.500.000,00
21	SMP Negeri 3 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	33.750.000,00
22	SMP Negeri 1 Siberut Barat	Siberut Barat	39.450.000,00
23	SMP Negeri 2 Siberut Barat	Siberut Barat	12.150.000,00
24	SMP Negeri 3 Siberut Barat	Siberut Barat	81.249.570,00
25	SMP Negeri 1 Siberut Utara	Siberut Utara	68.700.000,00
26	SMP Negeri 2 Siberut Utara	Siberut Utara	27.100.000,00
27	SMP Negeri 3 Siberut Utara	Siberut Utara	8.600.000,00
28	SMP Negeri 4 Siberut Utara	Siberut Utara	25.600.000,00
29	SMP YOS SUDARSO 2	Sipora Utara	181.828.000,00
30	SMP LENTERA HARAPAN	Siberut Selatan	111.621.974,00
	TOTAL		1.688.964.225,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD Tahun 2024 yaitu:

Tabel 5.1.69. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	15.000.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
2	Badan Keuangan Daerah	780.111.255,00	662.703.500,00	84,95	672.820.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.711.000,00	116.521.000,00	99,84	29.832.600,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	577.126.350,00	564.218.933,00	97,76	472.830.000,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.450.200,00	16.450.000,00	100,00	1.009.003.651,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.800.000,00	20.000.000,00	91,74	473.530.500,00
7	Dinas Kesehatan	1.966.332.424,00	1.887.522.754,00	95,99	11.273.803.513,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	361.756.214,00	352.191.000,00	97,36	218.754.700,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13.750.000,00	12.898.000,00	93,80	54.810.580,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	326.810.857,00	303.443.400,00	92,85	1.449.299.130,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	666.687.110,00	604.765.000,00	90,71	703.192.869,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.552.708.678,00	1.355.104.002,00	87,27	4.469.791.696,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.130.000,00	32.013.360,00	96,63	172.478.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	357.477.400,00	342.038.175,00	95,68	0,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.513.787.600,00	4.330.020.825,00	95,93	5.317.732.505,00
17	Dinas Perhubungan	86.774.100,00	86.473.100,00	99,65	279.318.000,00
18	Dinas Perikanan	1.334.150.000,00	1.231.046.300,00	92,27	531.692.945,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	173.758.020,00	171.800.000,00	98,87	201.212.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	157.639.200,00	150.824.650,00	95,68	163.376.230,00
21	Inspektorat	174.400.000,00	124.880.000,00	71,61	345.744.454,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	106.314.150,00	50.722.945,00	47,71	10.499.000,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	65.200.000,00	65.200.000,00	100,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	30.034.250,00	30.031.000,00	99,99	44.010.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	70.428.390,00	65.250.000,00	92,65	74.925.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	14.971.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	41.652.700,00	41.652.700,00	100,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	55.858.000,00	55.789.000,00	99,88	25.592.800,00
29	Kecamatan Siberut Utara	21.795.700,00	21.795.700,00	100,00	15.450.000,00
30	Kecamatan Sikakap	75.497.500,00	75.497.500,00	100,00	11.790.000,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	49.400.000,00	44.230.000,00	89,53	307.345.000,00
32	Kecamatan Sipora Utara	142.551.700,00	142.524.000,00	99,98	5.217.000,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	2.726.812.000,00	2.701.537.423,00	99,07	1.888.144.810,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.597.220.000,00	5.498.844.000,00	98,24	32.976.400,00
35	Sekretariat Daerah	1.430.176.000,00	1.407.796.511,00	98,44	3.142.858.380,00
36	Sekretariat DPRD	633.200.000,00	616.369.670,00	97,34	169.813.400,00
JUMLAH		24.307.471.798,00	23.182.154.448,00	95,37	33.569.000.163,00

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu

Tabel 5.1.70. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bantu

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	439.000.000,00	425.000.000,00	96,81	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	137.000.000,00	135.500.000,00	98,91	105.666.500,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	37.172.000,00	36.470.000,00	98,11	188.278.200,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	Selam				
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.387.200,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	618.559.200,00	596.970.000,00	96,51	308.944.700,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Tabel 5.1.71. Realisasi Belanja Modal –Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	264.500.000,00	257.500.000,00	97,35	1.858.400.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.678.200.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.254.177.090,00	1.130.806.000,00	90,16	1.061.639.125,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	46.243.000,00	92,49	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	645.000.000,00	625.500.000,00	96,98	545.597.600,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	6.513.677.090,00	6.360.049.000,00	97,64	5.143.836.725,00

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor

Tabel 5.1.72. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	61.100.000,00	61.100.000,00	100,00	2.904.430.400,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.043.000,00
	Jumlah	61.100.000,00	61.100.000,00	100,00	2.927.473.400,00

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Tabel 5.1.73. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	49.567.050,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	49.567.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Tabel 5.1.74. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	24.989.300,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	24.989.300,00

6) Belanja Modal Alat Ukur

Tabel 5.1.75. Realisasi Belanja Modal Alat Ukur

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	11.600.000,00	11.585.000,00	99,87	132.637.144,00
	Jumlah	11.600.000,00	11.585.000,00	99,87	132.637.144,00

7) Belanja Modal Alat Pengolahan

Tabel 5.1.76. Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	98.857.000,00	98.555.000,00	99,69	62.954.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	600.000.000,00	513.800.000,00	85,63	127.151.945,00
	Jumlah	698.857.000,00	612.355.000,00	87,62	190.105.945,00

8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kantor

Tabel 5.1.77. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	8.074.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	48.000.000,00	97,96	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	106.177.921,00	99.265.850,00	93,49	1.004.656.297,00
	Jumlah	155.177.921,00	147.265.850,00	94,90	1.012.730.797,00

9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Rumah Tangga

Tabel 5.1.78. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Rumah Tangga

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	707.222.000,00	643.733.866,00	91,02	1.041.236.815,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	14.000.344,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	628.459.000,00	545.150.760,00	86,74	508.562.769,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	7.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	397.680.000,00	362.236.083,00	91,09	726.183.965,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	714.800.000,00	665.590.000,00	93,12	36.876.400,00
	Jumlah	2.463.411.000,00	2.231.960.709,00	90,60	2.334.060.293,00

10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Tabel 5.1.79. Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	72.281.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	45.000.000,00	44.960.400,00	99,91	80.419.500,00
	Jumlah	55.000.000,00	54.960.400,00	99,93	162.700.500,00

11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Studio

Tabel 5.1.80. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Studio

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	57.471.000,00	54.036.000,00	94,02	342.704.930,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.280.853.533,00	1.150.354.037,00	89,81	327.857.627,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.784.200,00	9.718.050,00	99,32	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	305.837.000,00	282.546.040,00	92,38	582.767.110,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	257.934.000,00	242.826.035,00	94,14	453.337.270,00
	Jumlah	1.911.879.733,00	1.739.480.162,00	90,98	1.706.666.937,00

12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Komunikasi

Tabel 5.1.81. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Komunikasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	0,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00	9.600.000,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	68.871.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	625.664.000,00
	Jumlah	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63	747.035.000,00

13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Pemancar

Tabel 5.1.82. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Pemancar

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	50.000.000,00	49.875.000,00	99,75	0,00
5.2.02.06.03.0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	50.000.000,00	49.875.000,00	99,75	0,00

14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi

Tabel 5.1.83. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	750.000,00	700.000,00	93,33	0,00
	Jumlah	750.000,00	700.000,00	93,33	100.500.000,00

15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kedokteran

Tabel 5.1.84. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kedokteran

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	131.112.514,00	122.854.514,00	93,70	6.840.020.443,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	1.811.250,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	130.700.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	39.000.000,00	33.600.000,00	86,15	0,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	8.649.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	1.471.091.010,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	2.450.000.000,00	2.426.567.423,00	99,04	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	985.982.000,00	973.715.000,00	98,76	115.280.425,00
	Jumlah	3.606.094.514,00	3.556.736.937,00	98,63	8.567.553.028,00

16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kesehatan Umum

Tabel 5.1.85. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Kesehatan Umum

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	28.000.000,00	27.370.000,00	97,75	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.000.000,00	2.868.750,00	95,63	0,00
	Jumlah	31.000.000,00	30.238.750,00	97,54	0,00

17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Pengadaan Unit Alat Laboratorium

Tabel 5.1.86. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Unit Alat Laboratorium

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	6.818.350,00	5.275.000,00	77,36	77.282.250,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	12.780.000,00	10.950.000,00	85,68	0,00
	Jumlah	19.598.350,00	16.225.000,00	82,79	77.282.250,00

18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Tabel 5.1.87. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.258.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.258.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Tabel 5.1.88. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00

20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer Unit

Tabel 5.1.89. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer Unit

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	12.879.100,00	1.200.000,00	9,32	26.793.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.136.499.370,00	2.061.876.758,00	96,51	4.025.915.263,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.023.185.900,00	991.384.187,00	96,89	855.934.200,00
	Jumlah	3.172.564.370,00	3.054.460.945,00	96,28	4.908.642.463,00

21) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Komputer

Tabel 5.1.90. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Komputer

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	262.961.320,00	242.105.350,00	92,07	234.076.153,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	32.935.000,00	32.300.000,00	98,07	45.249.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.324.100,00	10.474.100,00	17,36	18.031.800,00
	Jumlah	356.220.420,00	284.879.450,00	79,97	297.356.953,00

22) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Sumur

Tabel 5.1.91. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Sumur

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Pelindung

Tabel 5.1.92. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Pelindung

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	5.250.000,00	5.062.500,00	96,43	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	7.250.000,00	5.862.500,00	80,86	0,00

24) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat SAR

Tabel 5.1.93. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Belanja Modal Alat SAR

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	56.394.600,00	38.500.000,00	68,27	0,00
	Jumlah	56.394.600,00	38.500.000,00	68,27	0,00

25) Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

Tabel 5.1.94. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin–Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	79.200.000,00	70.897.920,00	89,52	0,00
	Jumlah	79.200.000,00	70.897.920,00	89,52	0,00

26) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat

Tabel 5.1.95. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.492.600,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	18.492.600,00

27) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan Olahraga

Tabel 5.1.96. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan Olahraga

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28) Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.1.97. Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin–Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.399.137.600,00	4.218.601.825,00	95,90	3.384.925.078,00
	Jumlah	4.399.137.600,00	4.218.601.825,00	95,90	3.384.925.078,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	26.067.914.028,00	65.815.959.222,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.067.914.028,00 atau 75,66% dari anggaran sebesar Rp34.453.058.902,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp65.815.959.222,00 atau 79,29% terdapat Penurunan (Rp39.748.045.194,00) atau 60,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.98. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	65.522.629.516,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	202.307.200,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	91.022.506,00
	Jumlah	34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	65.815.959.222,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada 13 SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.99. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	230.000.000,00	229.690.000,00	99,87	0,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	48,71	4.153.781.525,00
3	Dinas Kesehatan	204.435.000,00	204.033.600,00	99,80	2.095.257.216,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	149.155.402,00
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.213.197.000,00	1.088.061.519,00	25,83	2.833.068.828,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	149.198.402,00
7	Dinas Perusahaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000.000,00	2.595.520.371,00	86,52	1.830.227.480,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.267.344.447,00	18.525.852.235,00	87,11	53.675.993.540,00
9	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.655.356,00	99,83	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
10	Kecamatan Sipora Utara	20.000.000,00	19.990.000,00	99,95	0,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.200.000.000,00	1.199.071.074,00	99,92	0,00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	531.783.000,00
13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	397.493.829,00
JUMLAH		34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	65.815.959.222,00

Rincian objek Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Tabel 5.1.100. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	24.271.779.447,00	21.125.518.206,00	87,04	25.975.213.577,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.200.000.000,00	1.199.071.074,00	99,92	289.988.847,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.118.082.455,00	2.006.039.873,00	48,71	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	199.655.356,00	99,83	40.584.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.413.197.000,00	1.287.949.519,00	29,18	3.744.347.648,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	250.000.000,00	249.680.000,00	99,87	49.250.000,00
Jumlah		34.453.058.902,00	26.067.914.028,00	75,66	30.099.384.072,00

2) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Tabel 5.1.101. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	202.307.200,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	202.307.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Menara Perambuan

Tabel 5.1.102. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan–Pengadaan Menara Perambuan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.03.03.01.0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	0,00	0,00	0,00	91.022.506,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	91.022.506,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	REALISASI 2024	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)
	91.142.885.630,00	118.659.040.585,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 sebesar Rp 91.142.885.630,00 atau 82,30% dari anggaran sebesar Rp 110.740.126.118,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 118.659.040.585,00 atau 85,98% terdapat penurunan belanja sebesar Rp27.516.154.955,00 atau 23,19%. Rincian belanja modal - Jalan, irigasi dan jaringan antara lain:

Tabel 5.1.103. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	74.561.942.348,00	65.112.878.453,00	87,33	99.362.947.204,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	40,45	4.006.476.516,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.332.284.840,00	3.947.296.913,00	47,37	3.935.005.559,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	86,58	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.200.000.000,00	1.079.866.800,00	89,99	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	2.295.689.220,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.983.707.000,00	3.957.450.000,00	99,34	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	630.000.000,00	554.950.000,00	88,09	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	200.000.000,00	169.995.000,00	85,00	598.500.000,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	4.161.537.930,00	3.846.039.464,00	92,42	8.460.422.086,00
	Jumlah	110.740.126.118,00	91.142.885.630,00	82,30	118.659.040.585,00

Belanja modal - jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2024 terdapat pada 9 SKPD dengan rincian masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.104. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	45,60	1.425.230.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.613.707.000,00	4.512.400.000,00	97,80	230.957.550,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	573.036.000,00	573.036.000,00	100,00	564.395.700,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	103613205
5	Dinas Perusahaan Umum dan Penataan Ruang	94.683.098.278,00	79.597.161.334,00	84,07	111.818.978.130,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	4.515.866.000,00
7	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	169.995.000,00	85,00	0,00
8	Dinas Perikanan	200.000.000,00	197.988.038,00	98,99	0,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.426.000.000,00	2.423.815.258,00	99,91	0,00
JUMLAH		110.740.126.118,00	91.142.885.630,00	82,30	118.659.040.585,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan

Tabel 5.1.105. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jalan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	70.591.358.348,00	61.150.254.195,00	86,63	94.801.180.719,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	971.548.000,00	965.773.000,00	99,41	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.999.036.000,00	2.996.851.258,00	99,93	4.561.766.485,00
	Jumlah	74.561.942.348,00	65.112.878.453,00	87,33	99.362.947.204,00

2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jembatan

Tabel 5.1.106. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jembatan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	40,45	2.543.168.959,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.463.307.557,00
	Jumlah	8.055.654.000,00	3.258.654.000,00	40,45	4.006.476.516,00

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Tabel 5.1.107. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	8.044.284.840,00	3.668.490.000,00	45,60	1.761.844.726,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	88.000.000,00	80.818.875,00	91,84	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00	197.988.038,00	98,99	2.173.160.833,00
	Jumlah	8.332.284.840,00	3.947.296.913,00	47,37	3.935.005.559,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Tabel 5.1.108. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	86,58	0,00
	Jumlah	2.975.000.000,00	2.575.755.000,00	86,58	0,00

5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan– Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku

Tabel 5.1.109. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	100,00	0,00

6) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan– Pengadaan Bangunan Air Kotor

Tabel 5.1.110. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Bangunan Air Kotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.200.000.000,00	1.079.866.800,00	89,99	0,00
	Jumlah	1.200.000.000,00	1.079.866.800,00	89,99	0,00

7) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Air Kotor

Tabel 5.1.111. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Air Kotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	2.295.689.220,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.295.689.220,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi Pembangkit Listrik

Tabel 5.1.112. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi
Pembangkit Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	3.983.707.000,00	3.957.450.000,00	99,34	0,00
	Jumlah	3.983.707.000,00	3.957.450.000,00	99,34	0,00

9) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Instalasi Pengaman

Tabel 5.1.113. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan
Instalasi Pengaman

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	630.000.000,00	554.950.000,00	88,09	0,00
	Jumlah	630.000.000,00	554.950.000,00	88,09	0,00

10) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Listrik

Tabel 5.1.114. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan
Jaringan Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00	169.995.000,00	85,00	598.500.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	169.995.000,00	85,00	598.500.000,00

11) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Jaringan Gas

Tabel 5.1.115. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan
Jaringan Gas

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	4.161.537.930,00	3.846.039.464,00	92,42	8.460.422.086,00
	Jumlah	4.161.537.930,00	3.846.039.464,00	92,42	8.460.422.086,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi 2024
(Rp)

1.775.475.370,00

Realisasi 2023
(Rp)

1.666.699.814,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp1.775.475.379,00 atau 95,92% dari anggaran sebesar Rp1.850.900.400,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.666.699.814,00 terdapat



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penurunan belanja sebesar (Rp453.622.032,00) atau 27,22% sebagaimana rincian belanja dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.116. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	190.988.770,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	265.303.750,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.210.407.294,00
	Jumlah	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.666.699.814,00

Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya terdapat pada masing-masing SKPD yaitu:

Tabel 5.1.117. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	263.153.250,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	190.988.770,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.210.407.294,00
6	Sekretariat Daerah			0,00	2.150.500,00
	JUMLAH	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.666.699.814,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan Tercetak

Tabel 5.1.118. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan Tercetak

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	190.988.770,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	190.988.770,00

2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.1.119. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tidak Berwujud

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	265.303.750,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	265.303.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tetap Lainnya BOS

Tabel 5.1.120. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Aset Tetap Lainnya BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.210.407.294,00
	Jumlah	1.850.900.400,00	1.775.475.370,00	95,92	1.210.407.294,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	315.845.000,00	134.310.000,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp315.845.000,00 atau 87,17% dari anggaran sebesar Rp362.320.000,00, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp134.310.000,00 atau 89,54% dari target anggaran sebesar Rp150.000.000,00, belanja ini mengalami peningkatan sebesar Rp181.535.000,00 atau 135,16% sebagaimana rincian belanja dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.121. Belanja Modal Aset Lainnya

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	362.320.000,00	315.845.000,00	87,17	134.310.000,00
	Jumlah	362.320.000,00	315.845.000,00	87,17	134.310.000,00

Pada tahun 2024 Belanja Modal Aset Lainnya terdapat pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp315.845.000,00 atau 99,79% dari target pagu anggaran sebesar Rp316.500.000,00.
2. Dinas Kesehatan tidak ada realisasi dari pagu anggaran sebesar Rp45.820.000,00.

5.1.4.4.3	Belanja Tidak Terduga	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		1.025.861.621,00	919.232.006,00

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 1.025.861.621,00, dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,00 atau 51,29%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp919.232.006,00 dari target anggaran Rp Rp4.497.167.877,00, maka terdapat peningkatan senilai Rp106.629.615,00 atau 11,60%.

Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024 diantaranya digunakan untuk pembayaran belanja tak terduga sebesar Rp605.861.621,00, korban kebakaran sebesar Rp315.000.000,00, pemulangan jenazah



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp90.000.000,00 dan Korban bencana alam sebesar Rp15.000.000,00., untuk lebih jelasnya dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.122. Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengadaan dan Pemasangan Pompa Beserta Jaringan Pipa Transmisi Air Baku pada Bidang PSDA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024	532.745.000,00	530.531.621,00	100.3.3.2-130 Tahun
2	Pembayaran Biaya Pengamanan Pasukan Polres Kepulauan Mentawai Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Pemilu Tahun 2024 Pada Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	75.330.000,00	75.330.000,00	
	JUMLAH	608.075.000,00	605.861.621,00	

Tabel 5.1.123. Belanja Tidak Terduga untuk Korban Kebakaran

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima Bansos	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An Julianus Tarek Lalai Kejadian Tanggal 28 November 2023 di Dusun Timur Desa Mongan Poula Kec Siberut Utara Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Julianus Tarek Lalai		100.3.3.2-23 Tahun 2024
2	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An Andi Saogo Kejadian Tanggal 26 Juni 2023 di Dusun Makalo Desa Makalo Kec Pagai Selatan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Andi Saogo		100.3.3.2-23 Tahun 2024
3	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Jerita Saputra Hebat pada tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Dusun Makalo Desa Makalo Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak TA 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Jerita Saputra Hebat		100.3.3.2-23 Tahun 2024
4	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Delson Kejadian Tanggal 27 November 2023 di Desa Bosua Kec. Sipora Selatan Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Delson		100.3.3.2-109 Tahun 2024
5	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Donni Lerin Sakerebau Kejadian Tanggal 28 Januari 2024 di Desa Silabu Kec. Pagai Utara Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Donni Lerin Sakerebau		100.3.3.2-109 Tahun 2024
6	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Agusman Kejadian Tanggal 16 Januari 2024 di Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Agusman		100.3.3.2-109 Tahun 2024
7	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Eddy Sumarlin Kejadian Tanggal 02 November 2023 di Dusun Surat Aban Jago Laggai Desa Bulasat Kec. Pagai	15.000.000,00	15.000.000,00	Eddy Sumarlin		100.3.3.2-23 Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima Bansos	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
	Selatan Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024					
8	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Desi Rismawati pada tanggal 01 Maret 2024 bertempat di Dusun Sosoroat Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Desi Rismawati		100.3.3.2-149 Tahun 2024
9	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah an. Marcelinus Sakoikoi pada tanggal 07 Februari 2024 bertempat di Dusun Masapaket Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Marcelinus Sakoikoi		100.3.3.2-149 Tahun 2024
10	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Jeltius Sababalat Kejadian Tanggal 17 Februari 2024 di Dusun Sikirine Desa Saureinu Kec Sipora Selatan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Jeltius Sababalat		100.3.3.2-149 Tahun 2024
11	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An Nerius Kejadian Tanggal 20 Desember 2023 di Dusun Surat Aban Desa Bulasat Kec Pagai Selatan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Nerius		100.3.3.2-183 Tahun 2024
12	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Lermin Sakeru Kejadian Tanggal 03 April 2024 di Dusun Aban Baga Desa Sinaka Kec Pagai Selatan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Lermin Sakeru		100.3.3.2-217 Tahun 2024
13	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Liberti Sangaimang Kejadian Tanggal 29 April 2024 di Dusun Kaleak Girisit Desa Saibi Samukop Kec Sib Tengah Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Liberti Sangaimang		100.3.3.2-307 Tahun 2024
14	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Petrus Siribaru Kejadian Tanggal 20 April 2024 di Dusun Sirilogui Desa Sirilogui Kec Siberut Utara Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Petrus Siribaru		100.3.3.2-307 Tahun 2024
15	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Andy Sakerebau Kejadian Tanggal 30 April 2024 di Dusun Betumonga Barat Desa Betumonga Kec Pagai Utara Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Andy Sakerebau		100.3.3.2-307 Tahun 2024
16	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Rostelina Samongilailai Kejadian Tanggal 07 April 2024 di Dusun	15.000.000,00	15.000.000,00	Rostelina Samongilailai		100.3.3.2-306 Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima Bansos	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
	Silaoinan Selatan Desa Taikako Kec Sikakap Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024					
17	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Rohmadi Kejadian Tanggal 07 Juli 2024 di Dusun Sinabak Desa Sidomakmur Kec Sipora Utara Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Rohmadi		100.3.3.2-375 Tahun 2024
18	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Sorti Bina Kejadian Tanggal 13 Juni 2024 di Dusun Takuman Desa Sioban Kec Sipora Selatan Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Sorti Bina		100.3.3.2-375 Tahun 2024
19	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Zakeus Saleleusik Kejadian Tanggal 21 Juni 2024 di Dusun Atateitei Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Zakeus Saleleusik		100.3.3.2-399 Tahun 2024
20	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Mateus Taprimanai Sabola Kejadian Tanggal 26 Juni 2024 di Dusun Tiop Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Mateus Taprimanai Sabola		100.3.3.2-399 Tahun 2024
21	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah An. Nikson Andreas Kejadian Tanggal 24 Juni 2024 di Dusun Silaoinan Desa Taikako Kec Sikakap Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Nikson Andreas		100.3.3.2-484Tahun 2024
	jumlah	315.000.000,00	315.000.000,00			

Belanja Tidak Terduga tahun 2024 juga digunakan untuk bantuan sosial untuk Fasilitas Pemulasaran Jenazah masyarakat yang tidak mampu yang meninggal di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar sebagaimana rincian bantuan sosial dari Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.124. Belanja Tidak Terduga untuk Pemulasaran Jenazah

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An Ertina (Almh) dari Padang menuju Desa Matotonan Kec Siberut Selatan Pada 24 November Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-22 Tahun 2024
2	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Terdius Samangilailai (Alm) dari Padang menuju Sikakap Kec Sikakap Pada Tgl 3 Juni	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-108 Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
	2023 Pada Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024					
3	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Saulus Tapouruk (Alm) dari Padang Sidempuan menuju Simalegi Kec Siberut Barat Pada Tgl 23 Nov 2023 Pada Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-108 Tahun 2024
4	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Ceni Ati (Almh) dari Padang menuju Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara Pada Tgl 15 Januari 2024 Pada Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-108 Tahun 2024
5	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Maria Magdalena Sabalai (Almh) dari Padang menuju Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya Pada Tanggal 11 Februari 2024 Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-150 Tahun 2024
6	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Sopar Samaloisa (Alm) dari Padang menuju Desa Taikako Kec Sikakap Pada Tanggal 29 April 2024 Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-217 Tahun 2024
7	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Pariyanto Alm dari Padang menuju Desa Muntei Kec Siberut Selatan Pada Tanggal 30 Juni 2024 Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-374 Tahun 2024
8	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An. Daniel Tatebburuk Alm dari Padang menuju Desa Muntei Kec Siberut Selatan Pada Tanggal 09 Juni 2024 Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-374 Tahun 2024
9	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Pemulasaran Jenazah An Rosti Sakerebau (Almh) dari Padang menuju Desa Sikakap Kec Sikakap Pada 01 Agustus 2024 Pada Sub Keg Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	10.000.000,00	10.000.000,00			100.3.3.2-470 Tahun 2024
	Jumlah	90.000.000,00	90.000.000,00			

Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2024 juga digunakan untuk bantuan Sosial bagi masyarakat korban bencana alam berupa korban longsor di dusun sinabak desa sidomakmur Kecamatan Sipora Utara terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.125 Belanja Tidak Terduga untuk Korban Bencana Alam

No	Uraian	Jumlah SP2D	Jumlah SPJ	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima	No. dan Tgl SK/Perkada
1	Pembayaran Bantuan Sosial Korban Longsor an. Bambang Sitorus pada tanggal 26 Februari 2024 bertempat di Dusun Sinabak Desa Sidomakmur Kecamatan Sipora Utara Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00	15.000.000,00	Bambang Sitorus		100.3.3.2-148 Tahun 2024
	Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00			

5.1.4.5 BELANJA TRANSFER

Realisasi 2024

(Rp)

110.976.420.519,00

Realisasi 2023

(Rp)

106.886.803.380,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp110.976.420.519,00 atau mencapai 100,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp110.401.623.674,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp106.886.803.380,00 atau mencapai 99,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp107.720.464.569,00. maka terdapat peningkatan sebesar Rp4.089.617.139,00 atau 3,83%. Belanja Transfer Tahun 2024 terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.1.126. Realisasi Belanja Transfer

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.517.070.774,00	3.257.906.575,00	92,63	1.962.033.191,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.884.552.900,00	107.718.513.944,00	100,78	104.924.770.189,00
	JUMLAH	110.401.623.674,00	110.976.420.519,00	100,52	106.886.803.380,00

1. Belanja Bagi hasil tahun 2024 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa yang terealisasi sebesar Rp835.191.384,00 atau 92,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp901.630.276,00 dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terealisasi sebesar Rp2.422.715.191,00 atau 92,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.615.440.498,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bagi hasil Tahun 2023, maka terdapat peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp1.295.873.384,00 atau 66,05%.
2. Sedangkan belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada 43 pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2024 terdapat realisasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp107.718.513.944,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp106.884.552.900,0000,00 atau 100,78%.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.6 SURPLUS/DEFISIT	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
	6.588.215.388,17	(19.995.192.331,46)

Realisasi surplus Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.588.215.388,17 atau mencapai (8,79%) dari alokasi anggaran sebesar (Rp74.953.685.319,00). Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 mengalami defisit sebesar (Rp19.995.192.331,46)

5.1.4.7 PEMBIAYAAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
	74.953.685.319,04	94.948.877.650,50

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.953.685.319,04 atau 100% dengan anggaran sebesar Rp74.953.685.319,00. sedangkan Pengeluaran pembiayaan Tahun anggaran 2023 bernilai Rp94.948.877.650,50. Rincian Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.127. Rincian Pembiayaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	43.777.287.372,00	43.777.287.372,00	100,00	-75.915.154,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	26.010.870.540,00	26.010.870.540,04	100,00	90.891.503.020,50
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	5.165.527.407,00	5.165.527.407,00	100,00	4.133.289.784,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	74.953.685.319,00	74.953.685.319,04	100,00	94.948.877.650,50

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp74.953.685.319,04 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp74.953.685.319,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp94.948.877.650,50 atau 100,74% dari target anggaran sebesar Rp94.251.377.654,00 terdapat penurunan sebesar (Rp19.995.192.331,46) atau 21,06%.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar (Rp74.953.685.319,04) antara lain merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer Pusat terdiri dari:

1. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp24.885.307.790,00
2. Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebesar Rp3.490.997.655,00
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp9.785.070.179,00
 4. Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan sebesar Rp4.702.391.754,00.
 5. Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal sebesar Rp913.519.994,00.
 6. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Rp26.010.870.540,04
 7. Sisa Belanja Lainnya sebesar 5.165.527.407,00 yang terdiri dari Sisa Dana BOS sebesar Rp398.508.927,00, Sisa Dana Kapitasi sebesar Rp2.201.801.177,00 dan Sisa Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.565.217.303,00

5.1.4.8 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
	81.541.900.707,21	74.953.685.319,04

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp81.541.900.707,21 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

1.	Realisasi Pendapatan	Rp	925.466.086.709,19
2.	Realisasi Belanja	Rp	918.877.871.321,02
3.	Surplus/Defisit (2 - 1)	Rp	6.588.215.388,17
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023	Rp	74.953.685.319,04
5.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
6.	SILPA Tahun Berjalan (3 s.d. 5)	Rp	81.541.900.707,21

Berikut ini rincian SILPA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 antara lain:

Tabel 5.1.128. Rincian SILPA

NO	URAIAN	2024	2023
1	DAK FISIK	1.971.458.201,00	8.193.389.409,00
2	DAK NON FISIK	7.586.160.116,00	9.785.070.179,00
3	DBH DR (Dana Reboisasi)	10.901.777.255,00	24.885.307.790,00
4	Dana Insentif Fiskal (DIF)	1.597.442.020,00	913.519.994,00
5	DAU SG	31.764.568.533,00	0,00
6	Dana Bantuan Bencana BPBD	730.411.850,00	730.411.850,00
7	Rekening Kas Umum Daerah	21.795.240.354,30	25.280.458.690,06
8	Sisa Dana JKN/FKTP Kapitasi	2.420.322.199,96	2.201.801.176,98
9	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.276.227.893,00	2.565.217.303,00
10	Sisa Dana BOS SD	0,00	248.058.187,00
11	Sisa Dana BOS SMP	0,00	140.332.408,00
12	Sisa Dana BOSP	419.227.687,00	0,00
13	Kas Lainnya Dana Bos	79.064.597,95	10.118.332,00
	Jumlah	81.541.900.707,21	74.953.685.319,04



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2. LPSAL	81.541.900.707,21	74.953.685.319,04

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Rincian LPSAL Tahun 2024 dan 2023

NO.	URAIAN	2024	2023
1	SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	74.953.685.319,04	94.251.377.654,50
2	PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	74.953.685.319,04	94.948.877.650,50
3	SUBTOTAL (1-2)	0,00	(697.499.996,00)
4	SILPA/(SIKPA)	81.541.900.707,21	74.953.685.319,04
5	SUBTOTAL (3+4)	81.541.900.707,21	74.256.185.323,04
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	697.499.996,00
7	LAIN-LAIN	0,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	81.541.900.707,21	74.953.685.319,04

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp74.953.685.319,00.

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL tahun 2024 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp74.953.685.319,04.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA nilai SILPA pada akhir tahun 2024 sebesar Rp81.541.900.707,21.

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dan lain-lain. Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp81.541.900.707,21.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai aset sebesar Rp2.155.724.653.157,52 kewajiban sebesar Rp1.119.612.553,28 dan ekuitas sebesar Rp2.154.605.040.604,24 Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1 Aset Lancar	(Rp)	(Rp)
	109.345.362.300,77	97.329.170.945,73

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp109.345.362.300,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	76.605.490.586,30	70.030.184.857,69
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	16.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.359.999,42
4	Kas Dana BOS	0,00	388.390.595,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.420.322.199,96	2.201.801.176,98
6	Kas Lainnya	79.064.597,95	2.575.335.635,00
7	Kas Dana BOSP	419.227.687,00	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.276.227.893,00	0,00
9	Piutang Pajak Daerah	7.056.668.243,00	6.390.425.708,00
10	Piutang Retribusi	683.168.404,00	441.026.549,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.656.686.710,45	3.971.962.209,12
12	Piutang Tranfer Antar Daerah	17.281.034.849,00	11.885.571.768,00
13	Piutang Lainnya	349.721.076,36	349.721.076,36
14	Penyisihan Piutang	(9.404.022.815,41)	(9.057.189.906,05)
15	Beban Dibayar Dimuka	69.472.222,22	51.375.000,00
16	Persediaan	5.852.300.646,94	8.079.206.277,21
	JUMLAH	109.345.362.300,77	97.329.170.945,73

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	(Rp)	(Rp)
	76.605.490.586,30	70.030.184.857,69

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.605.490.586,30 Saldo ini merupakan saldo kas daerah hasil rekonsiliasi yang berada pada pengelola Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang disimpan di rekening Bank Nagari Cabang Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bank Negara Indonesia Cabang Mentawai di lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian saldo Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.2. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

NO	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH
			(Rp)
	REKENING KAS DAERAH		
1	21.100.101.007.123	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/RKUD	39.684.743.265,00
2	2110.0101.00010-6	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/ Kas Umum Daerah	8.749.205.709,61
3	2110.0101.00011-8	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/Dana Rutin	17.579.428.825,69
4	2110.0101.00510-4	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai DAK Non DR Thn 2008	0,00
5	2358882366	a.n. Penerimaan Retribusi Wisata Selancar Kabupaten Mentawai (BNI)	10.592.112.786,00
	Jumlah		76.605.490.586,30

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.2 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Penerimaan	0,00	16.000.000,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 sejumlah Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp16.000.000,00 Jumlah tersebut adalah penerimaan retribusi penyeberangan air yang masih berada pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00 dan tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp15.000.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.3.1.3 Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Pengeluaran	0,00	5.359.999,42

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp5.359.999,42 merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang telah disetor tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp1.185.000,00, kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.547.000,00 yang telah disetor pada tanggal 26 April 2024, kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp828.000,00 yang telah disetor pada tanggal 25 Januari 2024, kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.800.000,00 yang telah disetor pada tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp1.200.000,00 dan 11 Januari 2024 sebesar Rp600.000,00 serta koreksi kesalahan input STS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebesar (Rp0,58).



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.4 Kas Dana BOS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	388.390.595,00

Saldo Kas Dana BOS sebesar Tahun 2024 Rp0,00 sedangkan saldo di Bendahara BOS 31 Desember 2023 yang terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp248.058.187,00 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp140.332.408,00. Saldo kas dana bos tahun 2024 di reklasifikasi ke kas dana BOSP karena adanya penyesuaian nama akun Dana BOS menjadi Dana BOSP di SIPD-RI.

5.3.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.420.322.199,96	2.201.801.176,98

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.420.322.199,96 yang merupakan saldo kas bendahara FKTP di 15 Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3. Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Rincian	
			Kas di Bank	Kas Tunai
1	Puskesmas Bulasat	137.378.366,00	137.318.366,13	59.999,87
2	Puskesmas Bosua	55.707.225,00	38.418.924,97	17.288.300,03
3	Puskesmas Betaet	8.340.007,55	8.340.007,55	0,00
4	Puskesmas Saibi Samukop	154.941.287,76	154.768.788,10	172.499,66
5	Puskesmas Saumanganya	68.966.828,84	49.804.394,36	19.162.434,48
6	Puskesmas Pei-pei	384.061.128,91	383.970.728,91	90.400,00
7	Puskesmas Muara Sikabalu	189.434.226,00	189.303.408,00	130.818,00
8	Puskesmas Mapaddegat	326.583.698,80	326.483.699,75	99.999,05
9	Puskesmas Sikakap	167.515.185,00	167.462.435,43	52.749,57
10	Puskesmas Malakopa	139.100.850,00	139.100.849,48	0,52
11	Puskesmas Muara Siberut	200.248.311,00	200.248.311,00	0,00
12	Puskesmas Sioban	414.545.385,18	414.516.451,34	28.933,84
13	Puskesmas Sarereiket	74.848.954,92	73.850.653,83	998.301,09
14	Puskesmas Sigapokna	37.874.221,00	37.480.119,00	394.102,00
15	Puskesmas Simatalu	60.776.524,00	60.691.516,89	85.007,11
	JUMLAH	2.420.322.199,96	2.381.758.654,74	38.563.545,22



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.6 Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	79.064.597,95	2.575.335.635,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp**79.064.597,95** merupakan saldo Kas Lainnya Dana BOS SD sebesar Rp3.828.134,00, Kas Lainnya Dana BOS SMP sebesar Rp5.525.176,00 dan kas lainnya yang terdapat pada rekening PPTK rutin SKPD sebesar Rp69.711.287,95.

Rincian Saldo Kas Lainnya Dana SD sebesar Rp3.828.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOS SD

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
					Penutupan Rekening Tabungan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	21120101000585	235.831,00	235.831,00	0,00
2	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	21120101000574	205.656,00	205.656,00	0,00
3	SD Negeri 27 Berulou	Sipora Selatan	21100101006902	17.500,00	17.500,00	0,00
4	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	21110101000240	63.808,00	0,00	63.808,00
5	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	21110101000321	1.041.850,00	1.041.850,00	0,00
6	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	21110101000284	325.712,00	325.712,00	0,00
7	SD Negeri 18 Pasakiat Tailleleu	Siberut Barat Daya	21110101000192	37.683,00	37.683,00	0,00
8	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	21130101000326	123.488,00	120.894,00	2.594,00
9	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	21130101000293	17.709,00	0,00	17.709,00
10	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000260	930.602,00	930.602,00	0,00
11	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	21130101000234	154.881,00	114.955,00	39.926,00
12	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000271	19.346,00	0,00	19.346,00
13	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	21130101000365	52.804,00	52.804,00	0,00
14	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	21130101000256	22.316,00	0,00	22.316,00
15	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	21130101000164	13.012,00	0,00	13.012,00
16	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	21130101000094	32.937,00	0,00	32.937,00
17	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	21130101000282	36.852,00	0,00	36.852,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian	
					Penutupan Rekening Tabungan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
18	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	21130101000116	48.865,00	0,00	48.865,00
19	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	21130101000201	95.555,00	69.652,00	25.903,00
20	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	21130101000046	16.526,00	0,00	16.526,00
21	SD Negeri 04 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000330	80.006,00	80.006,00	0,00
22	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	21130101000131	41.194,00	0,00	41.194,00
23	SD Negeri 08 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000175	24.156,00	0,00	24.156,00
24	SD Negeri 09 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000035	36.234,00	0,00	36.234,00
25	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	21130101000212	86.485,00	68.346,00	18.139,00
26	SD Negeri 21 Muara Sikabalu	Siberut Utara	21130101000050	46.186,00	46.186,00	0,00
27	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	21130101000245	20.940,00	0,00	20.940,00
JUMLAH				3.828.134,00	3.347.677,00	480.457,00

Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOS SMP sebesar Rp5.525.176,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.5. Rincian Saldo Kas Lainnya Dana BOS SMP

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian			
					Penutupan Rekening Tabungan	Transaksi Salah Transfer	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000434	203.132,00	203.132,00	0,00	0,00	0,00
2	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	21120101000541	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00
3	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	21120101000552	108.664,00	108.664,00	0,00	0,00	0,00
4	SMP Negeri 1 Siberut Selatan	Siberut Selatan	21110101000332	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00
5	SMP Negeri 1 Siberut Tengah	Siberut Tengah	21110101000402	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Kecamatan	Rekening Giro	Saldo per 31 Desember 2023	Rincian			
					Penutupan Rekening Tabungan	Transaksi Salah Transfer	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan	Jasa Giro 2023 yang Belum Disetorkan
6	SMP Negeri 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	21110101000376	355.374,00	355.374,00	0,00	0,00	0,00
7	SMP Negeri 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	21110101000413	31.279,00	31.279,00	0,00	0,00	0,00
8	SMP Negeri 2 Siberut Barat	Siberut Barat	21130101000304	2.113.125,00	2.108.184,00	0,00	0,00	4.941,00
9	SMP Negeri 3 Siberut Barat	Siberut Barat	21130101000315	453.497,00	287.204,00	0,00	153.600,00	12.693,00
10	SMP Negeri 1 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000153	443.376,00	387.706,00	0,00	0,00	55.670,00
11	SMP Negeri 2 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000186	234.022,00	106.092,00	0,00	112.653,00	15.277,00
12	SMP Negeri 3 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000223	153.001,00	134.098,00	0,00	0,00	18.903,00
13	SMP Negeri 4 Siberut Utara	Siberut Utara	21130101000190	1.320.730,00	1.310.713,00	0,00	0,00	10.017,00
JUMLAH				5.525.176,00	5.041.422,00	100.000,00	266.253,00	117.501,00

Sedangkan rincian kas lainnya pada rekening PPTK rutin SKPD sebesar Rp69.711.287,95 terdiri dari :

- Belanja honorarium penyuluh atau pendampingan yang kurang transfer ke rekening pegawai yang bersangkutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp23.040.004,85
- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK rutin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,030,188,70,
- Kelebihan belanja jasa tenaga perhubungan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.182.000,00,
- Iuran jaminan kesehatan yang belum disetor oleh PPTK rutin Sekretariat Daerah sebesar Rp10.458.594,
- Kurang setor/transfer Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada SATPOLPP dan Damkar sebesar Rp500,00 dan
- Kurang setor/transfer Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-Tunjangan Hari Raya Dinas Kesehatan sebesar Rp0,40,



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.7 Kas Dana BOSP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	419.227.687,00	0,00

Kas Dana BOSP tahun anggaran 2024 sebesar Rp**419.227.687,00** merupakan Kas Dana BOSP SD sebesar Rp**292.676.930,00** dan Kas Dana BOSP SMP sebesar Rp**126.550.757,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6. Kas Dana BOSP SD

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR
1	SD NEGERI 01 Sikakap	SIKAKAP	1.724.665,00
2	SD NEGERI 02 Taikako	SIKAKAP	1.494.249,00
3	SD NEGERI 03 Taikako	SIKAKAP	489.857,00
4	SD NEGERI 07 Matobe	SIKAKAP	94.495,00
5	SD NEGERI 15 Sikakap	SIKAKAP	812.640,00
6	SD NEGERI 17 Taikako	SIKAKAP	199.108,00
7	SD NEGERI 21 Makalo	SIKAKAP	23.487,00
8	SD NEGERI 26 Taikako	SIKAKAP	249.275,00
9	SD NEGERI 32 Matobe	SIKAKAP	276.690,00
10	SD NEGERI 35 Matobe	SIKAKAP	1.974.293,00
11	SD NEGERI 36 Taikako	SIKAKAP	14.017,00
12	SD NEGERI 38 Sikakap	SIKAKAP	26.479,00
13	SD NEGERI 06 Sinaka	Pagai Selatan	0,00
14	SD NEGERI 08 Makalo	Pagai Selatan	0,00
15	SD NEGERI 09 Makalo	Pagai Selatan	65.700,00
16	SD NEGERI 12 Malakopa	Pagai Selatan	1.182.225,00
17	SD NEGERI 13 Bulasat	Pagai Selatan	6.329.900,00
18	SD NEGERI 14 Malakopa	Pagai Selatan	80.344,00
19	SD NEGERI 16 Makalo	Pagai Selatan	543.900,00
20	SD NEGERI 22 Makalo	Pagai Selatan	115.011,00
21	SD NEGERI 23 Sinaka	Pagai Selatan	1.297.710,00
22	SD NEGERI 24 Malakopa	Pagai Selatan	159.611,00
23	SD NEGERI 25 Malakopa	Pagai Selatan	0,00
24	SD NEGERI 28 Makalo	Pagai Selatan	204.520,00
25	SD NEGERI 29 Sinaka	Pagai Selatan	0,00
26	SD NEGERI 30 Sinaka	Pagai Selatan	142.931,00
27	SD NEGERI 31 Bulasat	Pagai Selatan	2.630.132,00
28	SD NEGERI 34 Sinaka	Pagai Selatan	50.000,00
29	SD NEGERI 39 Malakopa	Pagai Selatan	26.080.479,00
30	SD NEGERI 40 Bulasat	Pagai Selatan	835.400,00
31	SD NEGERI 41 Bulasat	Pagai Selatan	0,00
32	SD NEGERI 42 Sinaka	Pagai Selatan	302.065,00
33	SD NEGERI 04 Betumonga	Pagai Utara	532.740,00
34	SD NEGERI 05 Silabu	Pagai Utara	314.782,00
35	SD NEGERI 10 Saumanganya	Pagai Utara	477.695,00
36	SD NEGERI 11 Saumanganya	Pagai Utara	0,00
37	SD NEGERI 18 Saumanganya	Pagai Utara	2.173.557,00
38	SD NEGERI 19 Saumanganya	Pagai Utara	66.667.840,00
39	SD NEGERI 20 Saumanganya	Pagai Utara	25.509,00
40	SD NEGERI 27 Silabu	Pagai Utara	790.785,00
41	SD NEGERI 33 Betumonga	Pagai Utara	135.989,00
42	SD NEGERI 37 Saumanganya	Pagai Utara	185.924,00
43	SD NEGERI 43 Silabu	Pagai Utara	125.006,00
44	SD NEGERI 01 Sioban	Sipora Selatan	5.500.566,00
45	SD NEGERI 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	1.963.279,00
46	SD NEGERI 03 Beriulou	Sipora Selatan	274.100,00
47	SD NEGERI 04 Bosua	Sipora Selatan	37.113,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR
48	SD NEGERI 06 Saureinu	Sipora Selatan	11.917,00
49	SD NEGERI 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	126.413,00
50	SD NEGERI 08 Matobe	Sipora Selatan	38.029,00
51	SD NEGERI 09 Saureinu	Sipora Selatan	243.829,00
52	SD NEGERI 10 Mara	Sipora Selatan	796.988,00
53	SD NEGERI 14 Bosua	Sipora Selatan	44.596,00
54	SD NEGERI 19 Matobe	Sipora Selatan	977.581,00
55	SD NEGERI 20 Mara	Sipora Selatan	106.613,00
56	SD NEGERI 25 Bosua	Sipora Selatan	47.242,00
57	SD NEGERI 27 Beriulou	Sipora Selatan	0,00
58	SD NEGERI 05 Goisooinan	Sipora Utara	16,00
59	SD NEGERI 11 Tuapejat	Sipora Utara	236.095,00
60	SD NEGERI 12 Betumonga	Sipora Utara	73.311,00
61	SD NEGERI 13 Tuapejat	Sipora Utara	2.139.902,00
62	SD NEGERI 15 Betumonga	Sipora Utara	268.878,00
63	SD NEGERI 16 Tuapejat	Sipora Utara	2.144.388,00
64	SD NEGERI 17 Tuapejat	Sipora Utara	1.237.897,00
65	SD NEGERI 18 Tuapejat	Sipora Utara	1.025.475,00
66	SD NEGERI 21 GOISOoNAN	Sipora Utara	1.483.079,00
67	SD NEGERI 22 Tuapejat	Sipora Utara	2.818.178,00
68	SD NEGERI 23 Tuapejat	Sipora Utara	253.427,00
69	SD NEGERI 24 Betumonga	Sipora Utara	332.954,00
70	SD NEGERI 26 Tuapejat	Sipora Utara	18.007,00
71	SD NEGERI 02 Matotonan	Siberut Selatan	664.482,00
72	SD NEGERI 06 Madobag	Siberut Selatan	333.962,00
73	SD NEGERI 07 Madobag	Siberut Selatan	103.766,00
74	SD NEGERI 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	7.218.622,00
75	SD NEGERI 12 Muntei	Siberut Selatan	530.875,00
76	SD NEGERI 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	1.622.654,00
77	SD NEGERI 15 Simalepet	Siberut Selatan	149.765,00
78	SD NEGERI 21 Madobag	Siberut Selatan	1.343.543,00
79	SD NEGERI 23 Muntei	Siberut Selatan	0,00
80	SD NEGERI 24 Madobag	Siberut Selatan	382.745,00
81	SD NEGERI 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	376.844,00
82	SD NEGERI 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	1.197.325,00
83	SD NEGERI 10 Saliguma	Siberut Tengah	0,00
84	SD NEGERI 10 Cimpungan	Siberut Tengah	39.631,00
85	SD NEGERI 13 Cimpungan	Siberut Tengah	250.000,00
86	SD NEGERI 16 Saliguma	Siberut Tengah	289.382,00
87	SD NEGERI 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	701.931,00
88	SD NEGERI 22 Saliguma	Siberut Tengah	16.028.574,00
89	SD NEGERI 04 Katurei	Siberut Barat Daya	521.418,00
90	SD NEGERI 05 Katurei	Siberut Barat Daya	81.408,00
91	SD NEGERI 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	324.737,00
92	SD NEGERI 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	229.865,00
93	SD NEGERI 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	742.736,00
94	SD NEGERI 17 Muntei	Siberut Barat Daya	1.049.137,00
95	SD NEGERI 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	0,00
96	SD NEGERI 19 Katurei	Siberut Barat Daya	2.398.653,00
97	SD NEGERI 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	180.803,00
98	SD NEGERI 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	193.418,00
99	SD NEGERI 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	2.295.465,00
100	SD NEGERI 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	694.897,00
101	SD NEGERI 02 Sigapokna	Siberut Barat	1.052.792,00
102	SD NEGERI 05 Simatalu	Siberut Barat	303.275,00
103	SD NEGERI 11 Simalegi	Siberut Barat	0,00
104	SD NEGERI 14 Simalegi	Siberut Barat	43.817.800,00
105	SD NEGERI 16 Sigapokna	Siberut Barat	1.000.000,00
106	SD NEGERI 17 Simatalu	Siberut Barat	36.965.388,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR
107	SD NEGERI 18 Simalegi	Siberut Barat	94.724,00
108	SD NEGERI 19 Sigapokna	Siberut Barat	2.291.366,00
109	SD NEGERI 22 Simatalu	Siberut Barat	0,00
110	SD NEGERI 24 Sigapokna	Siberut Barat	201.629,00
111	SD NEGERI 25 Simatalu	Siberut Barat	2.885.375,00
112	SD NEGERI 26 Simalegi	Siberut Barat	370.713,00
113	SD NEGERI 27 Simatalu	Siberut Barat	412.535,00
114	SD NEGERI 28 Simatalu	Siberut Barat	1.202.086,00
115	SD NEGERI 29 Simatalu	Siberut Barat	231.742,00
116	SD NEGERI 01 Malancan	Siberut Utara	103.568,00
117	SD NEGERI 03 Sotboyak	Siberut Utara	266.590,00
118	SD NEGERI 04 Muara Sikabalu	Siberut Utara	1.015.930,00
119	SD NEGERI 06 Malancan	Siberut Utara	1.891.266,00
120	SD NEGERI 07 Sirilogui	Siberut Utara	262.291,00
121	SD NEGERI 08 Muara Sikabalu	Siberut Utara	276.121,00
122	SD NEGERI 09 Muara Sikabalu	Siberut Utara	299.854,00
123	SD NEGERI 12 Mongan Poula	Siberut Utara	1.106.352,00
124	SD NEGERI 15 Bojakan	Siberut Utara	3.988.011,00
125	SD NEGERI 20 Malancan	Siberut Utara	10.526.835,00
126	SD NEGERI 21 Muara Sikabalu	Siberut Utara	1.013.016,00
127	SD NEGERI 23 Bojakan	Siberut Utara	122.150,00
	Jumlah KAS BOSP SD		292.676.930,00

Tabel 5.3.7 kas Dana BOSP SMP

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR
1	SMPN 1 Pagai Utara Selatan	SIKAKAP	0,00
2	SMPN 2 Sikakap	SIKAKAP	16.989.750,00
3	SMPN 3 Sikakap	SIKAKAP	0,00
4	SMPN 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00
5	SMPN 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00
6	SMPN 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00
7	SMPN 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	0,00
8	SMPN 1 Pagai Utara	Pagai Utara	52.182,00
9	SMPN 2 Pagai Utara	Pagai Utara	0,00
10	SMPN 1 Sipora	Sipora Selatan	0,00
11	SMPN 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	0,00
12	SMPN 3 Sipora Selatan	Sipora Selatan	0,00
13	SMPN 1 Sipora Utara	Sipora Utara	3.000.000,00
14	SMPN 2 Sipora	Sipora Utara	35.908.825,00
15	SMPN 1 Siberut Selatan	Siberut Selatan	0,00
16	SMPN 2 Siberut Selatan	Siberut Selatan	0,00
17	SMPN 1 Siberut Tengah	Siberut Tengah	0,00
18	SMPN 2 Siberut Tengah	Siberut Tengah	35.000.000,00
19	SMPN 1 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	35.000.000,00
20	SMPN 2 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	0,00
21	SMPN 3 Siberut Barat Daya	Siberut Barat Daya	0,00
22	SMPN 1 Siberut Barat	Siberut Barat	0,00
23	SMPN 2 Siberut Barat	Siberut Barat	0,00
24	SMPN 3 Siberut Barat	Siberut Barat	0,00
25	SMPN 1 Siberut Utara	Siberut Utara	600.000,00
26	SMPN 2 Siberut Utara	Siberut Utara	0,00
27	SMPN 3 Siberut Utara	Siberut Utara	0,00
28	SMPN 4 Siberut Utara	Siberut Utara	0,00
	Jumlah		126.550.757,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	2.276.227.893,00	0,00

Jumlah Tersebut merupakan Saldo Kas BOK pada puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.8 Kas Dana BOK Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Akhir
1	Sioban	56.902.927,00
2	Sigapokna	14.160.126,00
3	Sikakap	63.288.975,00
4	Mapadeggat	218.593.929,00
5	Saibi Samukop	96.033.279,00
6	Saumanganya	138.884.503,00
7	Betaet	39.153.444,00
8	Sarereiket	101.598.550,00
9	Simatalu	201.318.074,00
10	Ma.Sikabalu	184.537.848,00
11	Bosua	218.667.665,00
12	Ma.siberut	385.047.066,00
13	Pei-pe	352.503.635,00
14	Malakopa	14.995.369,00
15	Bulasat	190.542.503,00
TOTAL		2.276.227.893,00

5.3.1.9 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	7.056.668.243,00	6.390.425.708,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 dimana tagihan pajak daerah tersebut sampai dengan tanggal neraca belum dilunasi atau disetorkan wajib pajak ke rekening kas daerah atau bendahara penerimaan yang terinci dibawah ini:

Tabel 5.3.9. Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

NO	Uraian	Per 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2024
1	Pajak Hotel	451.703.923,00	0,00	0,00	451.703.923,00
2	Pajak Restoran	62.776.800,00	0,00	0,00	62.776.800,00
3	Pajak PBB-P2	5.875.944.985,00	832.282.128,00	(166.039.593,00)	6.542.187.520,00
	Jumlah	6.390.425.708,00	832.282.128,00	(166.039.593,00)	7.056.668.243,00

Pada tahun 2024 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sebanyak 21.293 objek pajak dengan nilai Rp1.060.755.040,00 namun yang terealisasi atau pajak PBB yang bisa ditagih sebanyak Rp398.841.876,00 sehingga terdapat penambahan piutang pajak PBB sebesar Rp832.282.128,00 yang terdiri dari piutang PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp661.913.164,00 dan kurang catat Piutang PBB-P2 tahun 2014-2023 sebesar Rp170.624.722,00 setelah dikurangi denda. Pada Tahun 2024 juga terdapat pengurangan piutang PBB-P2 sebesar (Rp166.039.593,00) dari pembayaran/pelunasan piutang Pokok PBB-P2 Tahun 2014 s.d 2023 oleh objek pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo piutang pajak 31 Desember 2024 tersebut merupakan jumlah piutang daerah yang Surat Ketetapan Pajaknya telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Tabel 5.3.10. Piutang Pajak Hotel

No	Nama	Pajak Hotel	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	158.400.000,00	1
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	111.864.000,00	11
3	PT.Sura Wisata Sirloins	65.280.000,00	10
4	PT.Harta Karun	8.159.923,00	8
5	PT.Internusa Bahagia	108.000.000,00	6
	JUMLAH	451.703.923,00	

2. Piutang Pajak Restoran

Tabel 5.3.11 Piutang Pajak Restoran

No	Nama	Pajak Restoran	Nomor SKPP
		(Rp)	
1	PT.Internusa Bahagia	19.800.000,00	2
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	13.156.800,00	12
3	PT.Sura wisata sirloins	8.160.000,00	9
4	PT.Harta Karun	8.160.000,00	7
5	PT.Internusa Bahagia	13.500.000,00	3
	JUMLAH	62.776.800,00	

3. Piutang Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan Perkotaan

Tabel 5.3.12 Piutang Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan Perkotaan

NO	KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		RELISASI			SISA POKOK KETETAPAN	
		DHKP		SPPT	POKOK	DENDA	SPPT	RP
		SPPT	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Pagai Utara	1.434	34.036.033,00	1.425	32.217.699,00	-	1.493	1.818.334,00
2	Sipora Selatan	3.040	92.411.862,00	2.088	53.318.152,00	-	952	39.093.710,00
3	Sikakap	1.912	95.038.659,00	1.701	78.526.014,00	-	211	16.512.645,00
4	Siberut Barat	1.267	18.520.590,00	1.266	18.510.590,00	-	1	10.000,00
5	Siberut Selatan	1.988	55.111.795,00	1.280	34.876.425,00	-	708	20.235.370,00
6	Sipora Utara	3.782	452.636.354,00	971	99.848.822,00	-	2.811	352.787.532,00
7	Pagai Selatan	2.610	50.806.534,00	654	8.780.051,00	-	1.956	42.026.483,00
8	Siberut Barat Daya	2.248	206.099.716,00	1.074	23.145.303,00	-	1.174	182.954.413,00
9	Siberut Tengah	1.534	21.469.242,00	1.532	21.449.242,00	-	2	20.000,00
10	Siberut Utara	1.478	34.624.255,00	1.255	28.169.578,00	655,00	223	6.454.677,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		RELISASI			SISA POKOK KETETAPAN	
		DHKP		SPPT	POKOK	DENDA	SPPT	RP
		SPPT	Rp	Rp	Rp	Rp		
	TOTAL	21.293	1.060.755.040	13.246	398.841.876,00	655,00	9.531	661.913.164,00

Adapun kriteria kualitas Piutang PBB-P2 Tahun 2024 berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Kualitas Piutang PBB-P2 Tahun 2024

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2024	661.913.164,00	0,00	0,00	0,00	661.913.164,00
	2023	0,00	489.472.782,00	0,00	0,00	489.472.782,00
	2022	0,00	507.159.027,00	0,00	0,00	507.159.027,00
	2021	0,00	0,00	434.575.304,00	0,00	434.575.304,00
	2020	0,00	0,00	412.176.521,00	0,00	412.176.521,00
	2019	0,00	0,00	0,00	203.744.917,00	203.744.917,00
	2018	0,00	0,00	0,00	213.354.823,00	213.354.823,00
	2017	0,00	0,00	0,00	534.010.647,00	534.010.647,00
	2016	0,00	0,00	0,00	816.705.949,00	816.705.949,00
	2015	0,00	0,00	0,00	798.391.847,00	798.391.847,00
	2014	0,00	0,00	0,00	682.942.955,00	682.942.955,00
Perdesaan						
	2013					
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	373.929.732,00	373.929.732,00
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	319.755.171,00	319.755.171,00
		0,00	0,00	0,00	54.754.121,00	54.754.121,00
Jumlah		661.913.164,00	996.631.809,00	846.751.825,00	3.997.590.162,00	6.502.886.960,00
Perkotaan	2013	-	-	-	23.412.855,00	23.412.855,00
	2003-2012	-	-	-	15.887.705,00	15.887.705,00
	s/d 2002	-	-	-	0,00	0,00
	Jumlah	-	-	-	39.300.560,00	39.300.560,00
TOTAL		661.913.164,00	996.631.809,00	846.751.825,00	4.036.890.722,00	6.542.187.520,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.10 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	683.168.404,00	441.026.549,00

Jumlah Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp683.168.404,00 sedangkan saldo piutang retribusi Tahun 2023 tercatat senilai Rp441.026.549,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat pengurangan saldo piutang retribusi daerah sebesar Rp248.618.448,00 saldo piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi pelayanan air bersih yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian piutang retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.14. Piutang Retribusi Daerah

NO	Uraian	Per 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2024
1	Retribusi pelayanan air bersih Sampai thn 2024 yang belum tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.026.549,00	398.195.090,00	(156.053.145,00)	683.168.494,00
	Jumlah	441.026.549,00	398.195.090,00	(156.053.145,00)	683.168.494,00

Dari total piutang retribusi air bersih sebesar Rp683.168.494,00 dapat dirincikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.15. Rincian Piutang Retribusi Air Bersih

Tahun	Jumlah Tagihan	Tagihan yang dibayar	Piutang retribusi
2020	3.584.978,00	0,00	3.584.978,00
2021	20.917.200,00	(375.730,00)	20.541.470,00
2022	112.153.598,00	(3.581.313,00)	108.572.285,00
2023	304.370.683,00	(57.188.991,00)	247.181.692,00
2024	398.195.090,00	(94.907.111,00)	303.287.979,00
Jumlah	839.221.549,00	(156.053.145,00)	683.168.404,00

5.3.1.11 Piutang lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	5.656.686.710,45	3.971.962.209,12

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp**5.656.686.710,45** terdiri dari Jasa Giro Rekening Kas Daerah pada Bank Nagari yang belum dibayar sejak tahun 2018 sampai Tahun 2024 sejumlah Rp1.709.891.168,00 dan piutang hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan uang muka atas pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2012-2014 yang telah diklaim sebesar Rp**3.946.795.542,45**, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar seluruhnya oleh perusahaan penjamin. sesuai tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.16. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka

NO	Paket Pekerjaan	Perusahaan Penjamin	Sisa yang Belum Dibayar
A	TA 2012		
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Transmigrasi Rokot	PT Asuransi Kredit Indonesia	0,00
2	Lanjutan Peningk Jalan Sikabalu-Pokai	PT Asuransi Himalaya	757.826.200,00
3	Peningkatan Jalan Pokai-Sirilanggai	PT Asuransi Umum Videi	444.382.500,00
	Jumlah A		1.202.208.700,00
B	TA 2013		
1	Pembangunan SDN 30 Sinaka, Mabolak Kec. Pagai Selatan	PT Asuransi Umum Videi	60.488.850,00
2	Pembangunan Rumdin Guru SDN 06 Madobag 2 Kopel, Ke. Siberut Selatan	PT Asuransi Umum Videi	213.594.500,00
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Madobag 3 Kopel	PT Asuransi Umum Videi	107.352.000,00
4	Pembangunan Gedung SMPN 1 Pagai Utara, Kec. Pagai Utara	PT Asuransi Umum Videi	144.979.250,00
5	Lanjutan peningkatan Jalan Tua Pejat - Rokot	PT Pan Pacific Insurance	0,45
6	Pembangunan Jembatan Non Permanen di Sirisurak	PT Pan Pacific Insurance	226.850.000,00
7	Lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako	-	110.499.460,00
8	Pengadaan dan Pemasangan Solar Cell di Kawasan Tua Pejat dan Muara Siberut	PT Asuransi Umum Videi	366.450.000,00
	Jumlah B		1.230.214.060,45
C	TA 2014		
1	Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan 2014)	PT Asuransi Umum Videi	491.998.082,00
2	Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak (DAK Non DR dan Pendamping)	PT Asuransi Umum Videi	216.531.000,00
3	Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa (DAK Non DR dan Pendamping)	PT Asuransi Umum Videi	485.713.500,00
4	Pembangunan Rehabilitasi Turap SMPN 1 Sikakap	PT Asuransi Umum Videi	19.526.200,00
5	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pagai Utara	PT Asuransi Umum Videi	33.351.500,00
6	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pagai Selatan	PT Asuransi Umum Videi	244.020.000,00
7	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor BPP Sikakap	PT Asuransi Umum Videi	23.232.500,00
	Jumlah C		1.514.372.782,00
	Jumlah A+B+C		3.946.795.542,45

Adapun Rincian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka terdapat pada Lampiran 10.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.12 Piutang Tranfer Antar Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	17.281.034.849,00	11.885.571.768,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp17.281.034.849,00 merupakan kekurangan salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/008/PPD-BAPENDA/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.760.421.079,00.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.429.450.192,00.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp12.037.929.689,00
4. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp53.233.889,00.

5.3.1.13 Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	349.721.076,36	349.721.076,36

Piutang lainnya Tahun 2024 sebesar Rp349.721.076,36. Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 yang belum dibayar hingga akhir Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.17. Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Lainnya	(Rp)	(Rp)
1	Piutang pihak ke tiga Pemb Kantor Camat Sipora Utara oleh Pagari Wau 2006	57.755.576,36	57.755.576,36
2	Piutang pihak ke tiga pembangunan jalan produksi dengan bangunan pelengkap oleh PT.Vandino Karya Perkasa pada Dinas Pertanian tahun 2009	18.289.260,00	18.289.260,00
3	Piutang pihak ke tiga pembangunan gedung rawat inap RS oleh PT. Insan KaryaTama tahun 2009	204.451.600,00	204.451.600,00
4	Piutang CV Berkat Dinas Pendidikan CV. Berkat tahun 2013	69.224.640,00	69.224.640,00
	Jumlah	349.721.076,36	349.721.076,36

Dari tabel diatas dapat dijelaskan piutang lainnya terdiri dari:

1. Piutang Pihak ketiga Pembangunan Kantor Camat Sipora, saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.755.576,36 merupakan piutang yang telah tercatat dari Tahun 2006 dimana uang yang cair tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang ada, yang dilaksanakan oleh Pagari Wau.
2. Piutang Pihak Ketiga Pembangunan Jalan Produksi dengan bangunan pelengkap Dinas Pertanian, saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.289.260,00 merupakan kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk kerekening pihak ketiga (PT. Vandino Karya Perkasa) Tahun 2009.

3. Piutang pihak ketiga pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap RS, per 31 Desember 2024 sebesar Rp204.451.600 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (PT. Insan KaryaTama) Tahun 2009.
4. Piutang Dinas Pendidikan, saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.224.640,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (CV. Berkat) Tahun 2013.

5.3.1.14 Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(9.404.022.815,41)	(9.057.189.906,05)

Penyisihan piutang untuk Tahun 2024 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebesar Rp**(9.404.022.815,41)** yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari penyisihan piutang PBB-P2, penyisihan piutang pajak hotel dan pajak restoran, penyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lainnya. Berikut uraian masing-masing penyisihan piutang Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Penyisihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran yang dicatat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp514.480.723,00), merupakan penyisihan piutang hotel dan Restoran Tahun 2008.
2. Penyisihan piutang PBB-P2 yang dicatat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp**4.593.025.473,60**) merupakan penyisihan piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan kriteria kualitas piutang.
3. Penyisihan Piutang Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan yang dicatat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.946.795.542,45), merupakan penyisihan piutang dari Tahun Anggaran 2012-2014
4. Penyisihan Piutang Lainnya Tahun yang dicatat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp349.721.076,36), yang merupakan penyisihan piutang Tahun 2006-2013.

Rincian Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Tabel 5.3.18 Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Sektor	Tahun	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
HOTEL	2008	0,00	0,00	0,00	(451.703.923,00)	(451.703.923,00)
RESTORAN	2008	0,00	0,00	0,00	(62.776.800,00)	(62.776.800,00)
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	(514.480.723,00)	(514.480.723,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penyisihan Piutang PBB-P2

Tabel 5.3.19. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2

Sektor	Tahun Pajak	Penyisihan Piutang				
		Lancar (5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2						
	2024	(33.095.658,20)	0,00	0,00	0,00	(33.095.658,20)
	2023	0,00	(48.947.278,20)	0,00	0,00	(48.947.278,20)
	2022	0,00	(50.715.902,70)	0,00	0,00	(50.715.902,70)
	2021	0,00	-	(217.287.652,00)	0,00	(217.287.652,00)
	2020	0,00	-	(206.088.260,50)	0,00	(206.088.260,50)
	2019	0,00	0,00	0,00	(203.744.917,00)	(203.744.917,00)
	2018	0,00	0,00	0,00	(213.354.823,00)	(213.354.823,00)
	2017	0,00	0,00	0,00	(534.010.647,00)	(534.010.647,00)
	2016	0,00	0,00	0,00	(816.705.949,00)	(816.705.949,00)
	2015	0,00	0,00	0,00	(798.391.847,00)	(798.391.847,00)
	2014	0,00	0,00	0,00	(682.942.955,00)	(682.942.955,00)
Perdesaan						
	2013	0,00	0,00	0,00	(373.929.732,00)	(373.929.732,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(319.755.171,00)	(319.755.171,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	(54.754.121,00)	(54.754.121,00)
Jumlah		(33.095.658,20)	(99.663.180,90)	(423.375.912,50)	(3.997.590.162,00)	(4.553.724.913,60)
Perkotaan	2013	0,00	0,00	0,00	(23.412.855,00)	(23.412.855,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	(15.887.705,00)	(15.887.705,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Jumlah		-	0,00	0,00	0,00	(39.300.560,00)
TOTAL		(33.095.658,20)	(99.663.180,90)	(423.375.912,50)	(4.036.890.722,00)	(4.593.025.473,60)

3. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel 5.3.20. Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi

Tahun	Penyisihan Piutang				
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
2012	0,00	0,00	0,00	(1.202.208.700,00)	(1.202.208.700,00)
2013	0,00	0,00	0,00	(1.230.214.060,45)	(1.230.214.060,45)
2014	0,00	0,00	0,00	(1.514.372.782,00)	(1.514.372.782,00)
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	(3.946.795.542,45)	(3.946.795.542,45)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel 5.3.21. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun	Penyisihan Piutang				
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
2006	0,00	0,00	0,00	(57.755.576,36)	(57.755.576,36)
2009	0,00	0,00	0,00	(18.289.260,00)	(18.289.260,00)
2009	0,00	0,00	0,00	(204.451.600,00)	(204.451.600,00)
2013	0,00	0,00	0,00	(69.224.640,00)	(69.224.640,00)
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	(349.721.076,36)	(349.721.076,36)

5.3.1.15	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		69.472.222,22	51.375.000,00

Jumlah Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.472.222,22 merupakan beban dibayar dimuka-sewa gedung dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp50.305.555,56 terdiri dari :
 - a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Sikakap sebesar Rp7.708.333,33 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 600.516/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan nilai kontrak Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
 - a. Beban dibayar dimuka sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tuapejat Dinas PUPR di Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp7.708.333,33 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor:600.516/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00 selama satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka sewa kantor resort konservasi wilayah (RKW) sebesar Rp34.888.888,89 sesuai perjanjian kerja sama antara Balai KSDA Sumatera Barat dengan DINAS PUPR nomor PKS.318/K.9/TU/KSA/2/2022 dan 620/120/DPUPR/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp40.000.000,00 selama satu tahun.
- 2) Beban sewa dibayar dimuka pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp19.166.666,67 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban dibayar dimuka sewa gedung kantor (sewa rumah) Rumah aman atau tempat pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Jln. Raya Tuapejat KM.2 Kec. Sipora Utara sebesar Rp5.833.333,33 sesuai kontrak nomor:490.2.4/01/SG/DSP3A tanggal 26 Juli 2024 nilai kontrak Rp10.000.000,00 selama satu tahun.
 - b. Beban dibayar dimuka Sewa Gedung kantor (sewa rumah) tempat gudang kantor Dinas sosial P3A di Dusun Karang Anyar Sipora Jaya Kec. Sipora Utara sebesar Rp13.333.333,33 sesuai Kontrak nomor:400.9/02/SG/DSP3A tanggal 29 Agustus 2024 nilai kontrak Rp20.000.000,00 selama satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.16 Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	5.852.300.646,94	8.079.206.277,21

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Tahun 2024 merupakan bahan pakai habis sebesar Rp5.852.300.646,94. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan Rincian persediaan per SKPD 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 11**. Persediaan berdasarkan jenis barang sebagai berikut:

Tabel 5.3.22. Persediaan Berdasarkan Jenis Barang

No	Jenis Persediaan	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Bakar Pelumas	344.100.765,00	323.798.494,00
2	Isi Tabung Gas	280.000,00	0,00
3	Suku Cadang Alat Besar	0,00	29.117.000,00
4	Alat Tulis Kantor	92.640.751,00	33.460.190,00
5	Bahan Cetak	262.539.967,60	249.972.003,00
6	Benda Pos	10.000,00	20.000,00
7	Perlengkapan Dinas	10.290.000,00	0,00
8	Perabot Kantor	5.865.105,00	3.456.045,00
9	Alat Listrik	761.250,00	260.000,00
10	Obat	3.682.301.262,78	6.319.857.982,57
11	Obat-obatan Lainnya	580.167.051,56	661.246.786,64
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	659.990.348,00	249.018.630,00
13	Natura	213.354.146,00	208.999.146,00
	JUMLAH	5.852.300.646,94	8.079.206.277,21

Rincian jumlah persediaan pada masing-masing SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.3.23 Rincian Jumlah Persediaan Per SKPD

NO	SKPD	PERSEDIAAN
1	Rumah Sakit Umum Daerah	915.004.070,21
2	Dinas Kesehatan	3.358.430.549,13
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.994.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	646.990.348,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	PERSEDIAAN
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.840.000,00
6	Kantor Kesatuan Kebangsaan Dan Politik	2.163.350,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.672.715,60
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	221.999.146,00
9	Inspektorat	9.648.000,00
10	Sekretariat DPRD	41.258.700,00
11	Sekretariat Daerah	4.156.000,00
12	Dinas Perhubungan	346.065.565,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	27.012.651,00
14	Badan Keuangan Daerah	253.775.552,00
15	Kecamatan Siberut Utara	10.290.000,00
Total		5.852.300.646,94

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan berupa obat kadaluwarsa/*rusak/expired* pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp58.359.501,97. Rincian obat kadaluwarsa /*rusak/expired* pada RSUD pada **Lampiran 12**.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Investasi Jangka Panjang

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44
Jumlah Investasi Jangka Panjang	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	91.350.902.146,58	92.207.312.272,44

Investasi permanen sebesar Rp**91.350.902.146,58** merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.25. Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Nama Perusahaan	Jenis Investasi	Metode Penilaian	31 Des 2024	31 Des 2023
				(Rp)	(Rp)
1	Bank Nagari	Saham Biasa 80.578 Lembar Saham	Metode Biaya	80.578.000.000,00	80.578.000.000,00
2	BPR Sipora	Saham Hak Suara Khusus Sebanyak 250.000 Lembar Saham	Metode Ekuitas	7.951.839.961,02	7.494.876.449,57
3	BPR Pagai Utara Selatan (PUS)	Saham Biasa Sebanyak 250.000 Lembar Saham	Metode Ekuitas	1.284.296.642,56	1.209.653.471,87
4	Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai	Investasi jangka panjang	Metode Ekuitas	1.536.765.543,00	2.924.782.351,00
Total				91.350.902.146,58	92.207.312.272,44

- 1) Penyertaan Modal Pada Bank Nagari Cabang Mentawai. Penyertaan modal ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba dan deviden tunai sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp16.204.135.633,00, yang merupakan deviden penyertaan modal pada Bank Nagari pada tahun 2024 yang telah dibukukan ke Rekening Kas Daerah No. 2110.0101.00011-8 a.n. Pemda KKM Dana Rutin pada tanggal 03 April 2024. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Bank Nagari terakhir pada tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 sementara pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Bank Nagari sehingga saham Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 80.578 Lembar Saham dengan nilai nominal berjumlah Rp80.578.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3.26. Saham Bank Nagari

No	No. Surat Kolektif Saham	Jumlah Lembar Saham	Tanggal	Nominal Saham
1	A. 000010	32.909,00	20 September 2007	32.909.000.000,00
2	A. 000030	3.236,00	3 September 2009	3.236.000.000,00
3	A. 000049	3.727,00	6 September 2010	3.727.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	No. Surat Kolektif Saham	Jumlah Lembar Saham	Tanggal	Nominal Saham
4	A. 000064	3.440,00	18 April 2010	3.440.000.000,00
5	A. 000099	12.743,00	10 Januari 2013	12.743.000.000,00
6	A. 000129	2.523,00	22 Januari 2014	2.523.000.000,00
7	A. 000143	18.000,00	10 September 2014	18.000.000.000,00
8	A. 000186	2.000,00	1 Juli 2016	2.000.000.000,00
9	A. 000258	2.000,00	7 Maret 2022	2.000.000.000,00
	JUMLAH	80.578,00		80.578.000.000,00

- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora mulai sejak tanggal 11 Maret 2007. Jumlah Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada PT. BPR Sipora per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00. Pada Tahun 2007 sampai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerima deviden sebesar Rp657.002.533,00 atas penyertaan modal tersebut namun sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menerima deviden karena nilai ekuitas atau modal dasar BPR Sipora tidak memenuhi standar ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) untuk pembayaran deviden kepada investor. Pada Tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada BPR Sipora, hingga per 31 Desember 2024 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada BPR Sipora berjumlah Rp7.494.876.449,57 namun tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat deviden atas penyertaan modal pada BPR Sipora sebesar Rp272.519,621,00 yang disetor oleh BPR Sipora ke Kas Daerah pada tanggal 24 April 2024. Perhitungan nilai investasi PT. BPR Sipora sebagaimana tersaji dalam Lampiran 13.
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada BPR Pagai Utara Selatan (PUS) sejak tanggal 12 Februari 2007 sampai akhir tahun anggaran 2024 tidak ada penambahan penyertaan modal pada BPR PUS hingga per 31 Desember 2024 Saham Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah Rp2.500.000.000,00 dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan *dividen* atas laba sebesar Rp248.516.996,00 pada tahun 2014 namun sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mendapat deviden lagi dari BPR PUS karena BPR PUS cenderung mengalami kerugian sehingga nilai ekuitas atau modal dasar BPR PUS tidak memenuhi standar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membayar deviden kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai investor. Perhitungan nilai investasi BPR PUS sebagaimana tersaji dalam Lampiran 14.
- 4) Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai, dengan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 28 Desember 2017, bentuk badan hukum perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Kemakmuran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mentawai. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Perusda Kemakmuran Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai tanggal 20 November 2017 sebagaimana dalam pasal 4 menyatakan bahwa modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah). Untuk pertama kalinya modal disetor ke Perusda sebesar 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar) yang disalurkan secara bertahap. Sampai tahun 2019 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai berjumlah Rp20.676.235.800.000,00 sedangkan Tahun 2020 sampai Tahun 2024 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai. Dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapat deviden karena Perusda Kemakmuran Mentawai mengalami kerugian setiap tahunnya. Perhitungan nilai investasi Perusda Kemakmuran Mentawai sebagaimana tersaji dalam Lampiran 15. Rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Perusda Kemakmuran Mentawai sebagai berikut:

Tabel 5.3.27. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai

NO	TAHUN	NILAI	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D
1	2017	200.000.000,00	39978/DAU-04/XII/2017	18 Desember 2017
2	2018	10.000.000.000,00	0310/DAU-04/II/2028	23 Februari 2018
3	2018	4.476.235.800,00	3467/DAU-04/XI/2018	22 November 2018
4	2019	6.000.000.000,00	1466/DAU-04/VI/2019	13 Juni 2019
	Jumlah	20.676.235.800,00		

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2024
(Rp)

1.874.259.229.396,36

31 Desember 2023
(Rp)

1.861.884.753.801,53

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan akuntansi aset tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.874.259.229.396,36 mengalami kenaikan sebesar Rp12.374.475.594,83 atau 0,66% dari Tahun 2023 sebesar Rp1.861.884.753.801,53 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.28. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	URAIAN	Saldo Akhir Per 31-12-2024	Saldo Awal Per 31-12-2023
1	Tanah	83.765.763.996,00	83.456.093.696,00
2	Peralatan dan Mesin	413.056.186.352,30	399.214.891.749,30
3	Gedung dan Bangunan	788.628.146.683,94	762.229.234.027,94



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	Saldo Akhir Per 31-12-2024	Saldo Awal Per 31-12-2023
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.626.537.273.094,03	1.528.401.837.503,03
5	Aset Tetap Lainnya	23.943.373.914,00	22.744.893.094,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	83.400.216.814,00	78.704.126.643,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.145.071.731.457,91)	(1.012.866.322.911,74)
	Jumlah	1.874.259.229.396,36	1.861.884.753.801,53

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2023	Rp	1.861.884.753.801,53
Belanja Modal 31 Desember 2024	Rp	141.148.954.314,00
Mutasi Tambah Tahun 2024	Rp	50.871.969.054,00
Mutasi Kurang Tahun 2024	Rp	(47.441.039.227,00)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Rp	(132.205.408.546,17)
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	1.874.259.229.396,36

Adapun saldo aset tetap berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 sesuai nilai perolehan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29. Aset Tetap Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/ Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	439.068.896.060,23	23.398.573.268,00	4.907.235.250,00	(6.729.759.996,00)	460.644.944.582,23
2	Dinas Kesehatan	293.780.901.109,50	6.603.956.354,00	0,00	(110.711.514,00)	300.274.145.949,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	69.670.282.426,00	2.701.537.423,00	0,00	(1.353.358.000,00)	71.018.461.849,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.285.997.766.543,65	83.761.085.707,00	24.085.551.320,00	(25.662.890.570,00)	1.368.181.513.000,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.861.135.055,42	2.595.615.258,00	79.800.000,00	0,00	102.536.550.313,42
6	Kantor Kesbangpol	1.354.178.324,00	50.722.945,00	0,00	(867.716,00)	1.404.033.553,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	5.402.317.752,00	6.697.915.074,00	0,00	(428.090.000,00)	11.672.142.826,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.364.517.538,00	150.824.650,00	0,00	(24.946.150,00)	6.490.396.038,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.012.916.955,00	3.785.011.000,00	3.668.490.000,00	(3.668.490.000,00)	90.797.927.955,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.306.958.357,00	303.443.400,00	237.486.000,00	0,00	8.847.887.757,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	3.615.446.848,00	20.000.000,00	0,00	0,00	3.635.446.848,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8.997.425.480,00	32.013.360,00	265.800.000,00	0,00	9.295.238.840,00
13	Dinas Perhubungan	56.169.467.254,00	456.123.456,00	0,00	(1.762.317.258,00)	54.863.273.452,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.216.113.871,00	352.191.000,00	5.680.000,00	(12.870.000,00)	7.561.114.871,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.793.912.473,00	342.038.175,00	0,00	(22.500.000,00)	8.113.450.648,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.134.106.260,00	2.022.489.873,00	2.222.789.873,00	(2.006.039.873,00)	10.373.346.133,00
17	Dinas Perikanan	44.365.053.390,47	1.429.034.338,00	513.800.000,00	(513.800.000,00)	45.794.087.728,47



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/ Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35.884.844.819,00	1.692.826.519,00	0,00	(7.900.000,00)	37.569.771.338,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.302.659.743,00	573.036.000,00	0,00	0,00	46.875.695.743,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.675.318.458,00	12.898.000,00	0,00	0,00	167.688.216.458,00
21	Sekretariat Daerah	104.945.093.573,00	1.407.796.511,00	14.580.861.611,00	(3.811.419.899,00)	117.122.331.796,00
22	Sekretariat DPRD	13.909.302.250,00	616.369.670,00	0,00	(53.613.510,00)	14.472.058.410,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.883.068.844,00	30.031.000,00	0,00	(10.660.000,00)	1.902.439.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	6.318.409.500,00	44.230.000,00	0,00	(2.330.000,00)	6.360.309.500,00
25	Kecamatan Sipora Utara	4.112.726.435,00	162.514.000,00	0,00	(155.332.500,00)	4.119.907.935,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	4.889.997.271,00	41.652.700,00	257.500.000,00	(500.000,00)	5.188.649.971,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	3.927.655.690,00	-	0,00	(1.096.442.241,00)	2.831.213.449,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.452.387.000,00	55.789.000,00	0,00	0,00	2.508.176.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	3.286.811.369,00	21.795.700,00	0,00	0,00	3.308.607.069,00
30	Kecamatan Siberut Barat	2.518.684.768,00	65.250.000,00	0,00	0,00	2.583.934.768,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.695.687.650,00	65.200.000,00	0,00	0,00	2.760.887.650,00
32	Kecamatan Sikakap	1.208.344.840,00	75.497.500,00	0,00	0,00	1.283.842.340,00
33	Inspektorat	3.635.861.065,00	124.880.000,00	0,00	0,00	3.760.741.065,00
34	Bappeda	17.961.647.105,00	793.908.933,00	0,00	0,00	18.755.556.038,00
35	BKD	10.433.787.045,00	662.703.500,00	46.975.000,00	(6.200.000,00)	11.137.265.545,00
36	BKPSDM	7.597.393.591,00	0,00	0,00	0,00	7.597.393.591,00
	Jumlah	2.874.751.076.713,27	141.148.954.314,00	50.871.969.054,00	(47.441.039.227,00)	3.019.330.960.854,27

Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

83.765.763.996,00

83.456.093.696,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp83.765.763.996,00 mengalami penambahan sebesar Rp309.670.300,00 atau (0,37)% dari Tahun 2023 sebesar Rp83.456.093.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023		Rp	83.456.093.696,00
Belanja Modal Tahun 2024	Rp	213.300.000,00	
Hibah	Rp	96.370.300,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	309.670.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Pengurangan :

Koreksi Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	309.670.300,00
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp	83.765.763.996,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan aset tetap tanah sebesar Rp309.670.300,00.

Mutasi tambah aset tanah sebesar Rp309.670.300,00 diantaranya sebagai berikut :

1. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.690.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 5.3.30. Realisasi Penambahan Aset Tanah

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.186	9.239.400,00	AAY 802604 / 00004	SDN 19 Matobe
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	4.143	49.716.000,00	AAY 802600 / 00010	SDN 22 Tuapejat
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	4.401	12.762.900,00	AAY 802607 / 00004	SDN 21 Makalo
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	612	18.972.000,00	AAY 802599 / 00013	UPT Sikakap
	T O T A L		12.342	90.690.300,00		

2. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp213.300.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 5.3.30. Realisasi Penambahan Aset Tanah Pada PUPR dan Dinkes

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	500	55.800.000,00	Pembelian DAU	Tanah UPT PAM Sioban
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	500	57.500.000,00	Pembelian DAU	Tanah UPT PAM Sikabalu
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	20.000	100.000.000,00	Surat Jual Beli Tgl. 25 Okt 2024	Lokasi TPSP - Sibaybay - Sikakap
	T O T A L		21.000	213.300.000,00		

3. Realisasi penambahan aset tanah per 31 Desember 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.680.000,00 akibat hibah tanah masyarakat untuk layanan telekomunikasi dan informatika untuk masyarakat dan pemerintah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.3.31. Realisasi Penambahan Aset Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	1	400	1.160.000,00	Hibah Tanah Masyarakat An. Mastion. S No. 01/SKH/DS.SMN/II-2024 Tanggal 20 Februari 2024	Tanah Hibah Dusun Biubiu Desa Saumanganya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Tanah	Unit	Luas	Nilai	Tgl/Surat Hibah/Sertifikat	Keterangan
2	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	1	400	1.160.000,00	Hibah Tanah Masyarakat An. Safrizal Sageileppak No. 510/01/SKH/DPSI/II-2024 Tanggal 26 Februari 2024	Tanah Hibah Dusun Makukuet Desa Pasakiat Taileleu
3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	1	400	3.360.000,00	Hibah Tanah Masyarakat An. Gemar Aljafri No. 590/555/SKK-DBS Tanggal 29 Juli 2024	Tanah Hibah Dusun Minga Bosua Desa Bosua Kec. Sipora Selatan
TOTAL			1.200	5.680.000,00		

Sedangkan mutasi kurang aset tanah tidak ada pengurangan untuk per 31 Desember 2024

Berdasarkan mutasi tambah aset tanah di atas, tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah bersertifikat, sedangkan tanah yang belum mempunyai sertifikat ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Komunikasi dan Informatika akan segera disertifikatkan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, selain itu terdapat aset tanah yang masih bermasalah seluas 909.363 M² pada Sekretariat Daerah yang diperoleh dari hibah masyarakat pada Tahun 2014 sebesar Rp15.019.581.000,00 yang berlokasi mulai dari Kantor PLN Tuapejat sampai ke Jalan Susteran.

Rincian Aset ini terdapat pada lampiran 16.

Berikut ini disampaikan rincian aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebagai Berikut :

Tabel 5.3.32. Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1.3.1.01.01	Tanah Persil	32.375.050.376,00	0,00	0,00	32.679.040.676,00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/T. Tempat Tinggal	2.127.485.200,00	0,00	0,00	2.127.485.200
1.3.1.01.01.02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	5.283.932.500,00	0,00	0,00	5.283.932.500
1.3.1.01.01.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	123.057.800,00	0,00	0,00	123.057.800
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat kerja	23.493.322.876,00	303.990.300,00		23.797.313.176
1.3.1.01.01.07	Tanah Persil Lainnya	1.347.252.000,00	0,00	0,00	1.347.252.000
1.3.1.01.02	TANAH NON PERSIL	18.287.298.320,00	0,00	0,00	18.287.298.320,00
1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	17.494.718.320,00	0,00	0,00	17.494.718.320
1.3.1.01.02.03	Tanah Perkebunan	792.580.000,00	0,00	0,00	792.580.000
1.3.1.01.03	LAPANGAN	32.793.745.000,00	0,00	0,00	32.799.425.000,00
1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000
1.3.1.01.03.07	Tanah Untuk Jalan	30.924.620.000,00	0,00	0,00	30.924.620.000
1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk Bangunan Air	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000
1.3.1.01.03.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	897.840.000,00	5.680.000,00	0,00	903.520.000
1.3.1.01.03.12	Tanah Untuk Makam	202.055.000,00	0,00	0,00	202.055.000
1.3.1.01.03.13	Tanah Untuk Taman	154.800.000,00	0,00	0,00	154.800.000



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1.3.1.01.03.17	Tanah Kampung	364.000.000,00	0,00	0,00	364.000.000
	JUMLAH	83.456.093.696,00	309.670.300,00	0,00	83.765.763.996,00

Berikut disampaikan rincian saldo aset tetap tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.33. Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.551.306.865	0,00	90.690.300,00	0,00	8.641.997.165,00
2	Dinas Kesehatan	2.360.292.900	0,00	0,00	0,00	2.360.292.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.620.000.000	0,00	0,00	0,00	1.620.000.000,00
4	Dinas PUPR	31.380.410.700	213.300.000,00	0,00	0,00	31.593.710.700,00
5	Dinas Perumwaskim	2.095.722.000	0,00	0,00	0,00	2.095.722.000,00
6	Dinsos	59.100.000	0,00	0,00	0,00	59.100.000,00
7	BPBD	219.650.000	0,00	0,00	0,00	219.650.000,00
8	BPMP-KB	13.928.000	0,00	0,00	0,00	13.928.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.032.151.720	0,00	0,00	0,00	1.032.151.720,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	897.840.000	0,00	5.680.000,00	0,00	903.520.000,00
11	DPMPTSP	14.500.000	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
12	Dinas Perikanan	1.202.118.000	0,00	0,00	0,00	1.202.118.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	691.333.200	0,00	0,00	0,00	691.333.200,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.227.010.000	0,00	0,00	0,00	7.227.010.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	406.488.300	0,00	0,00	0,00	406.488.300,00
16	Sekretariat Daerah	21.133.844.000	0,00	0,00	0,00	21.133.844.000,00
17	Sekretariat DPRD	170.350.000	0,00	0,00	0,00	170.350.000,00
18	Kecamatan Pagai Utara	59.000.000	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
19	Kecamatan Sipora Selatan	947.260.000	0,00	0,00	0,00	947.260.000,00
20	Kecamatan Sipora Utara	1.148.000.000	0,00	0,00	0,00	1.148.000.000,00
21	Kecamatan Siberut Selatan	511.000.000	0,00	0,00	0,00	511.000.000,00
22	Kecamatan Siberut Barat Daya	55.000.000	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
23	Kecamatan Siberut Tengah	29.435.000	0,00	0,00	0,00	29.435.000,00
24	Kecamatan Siberut Utara	577.224.500	0,00	0,00	0,00	577.224.500,00
25	Kecamatan Siberut Barat	20.000.000	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
26	Kecamatan Pagai Selatan	42.000.000	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
27	Kecamatan Sikakap	292.500.000	0,00	0,00	0,00	292.500.000,00
28	Inspektorat	63.300.000	0,00	0,00	0,00	63.300.000,00
29	Bappeda	71.700.000	0,00	0,00	0,00	71.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
30	BKD	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BKPSDM	95.000.000	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
32	Pustaka Arsip	468.628.511	0,00	0,00	0,00	468.628.511,00
33	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	83.456.093.696,00	213.300.000,00	96.370.300,00	0,00	83.765.763.996,00

Dari rincian tersebut di atas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp309.670.300,00

5.3.3.2 Peralatan dan mesin

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

413.056.186.352,30

399.214.891.749,30

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp413.056.186.352,30 dan mengalami peningkatan sebesar Rp13.841.294.603,00 atau 3,47% dari Tahun 2023 sebesar 399.214.891.749,30. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023	Rp.	399.214.891.749,30
- Belanja Modal Tahun 2024	Rp	22.511.776.874,00
- Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B	Rp	221.811.698,00
- Hibah dari Kementerian	Rp	216.750.000,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	807.761.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	23.758.099.572,00

Mutasi Pengurangan :

- Reklasifikasi KIB B ke Ekstra	Rp	(264.113.352,00)
- Reklasifikasi ke KIB C	Rp	(513.800.000,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	(622.562.638,00)
- Reklasifikasi ke Ekstra (Dana BOS)	Rp	(537.093.043,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa (Dana BOS)	Rp	(100.855.700,00)
- Perubahan Kondisi Aset tetap dari Baik ke RB	Rp	(7.292.434.236,00)
- Hibah BMD Ke Msy/Desa/Verikal	Rp	(43.985.000,00)
- Mutasi Antar SKPD	Rp	(541.961.000,00)
- Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	(9.916.804.969,00)
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	13.841.294.603,00
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp.	413.056.186.352,30

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp13.841.294.603,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.511.776.874,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.34. Realisasi Penambahan Peralatan Dan Mesin

NO	SKPD	BELANJA 2024
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.659.643.251,00
2.	Dinas Kesehatan	1.887.522.754,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.701.537.423,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.355.104.002,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	171.800.000,00
6.	Kantor Kesbangpol	50.722.945,00
7.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.498.844.000,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.824.650,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.521.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	303.443.400,00
11.	Dinas Kependudukan dan Capil	20.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	32.013.360,00
13.	Dinas Perhubungan	86.473.100,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	352.191.000,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	342.038.175,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.450.000,00
17.	Dinas Perikanan	1.231.046.300,00
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	604.765.000,00
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
20.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12.898.000,00
21.	Sekretariat Daerah	1.407.796.511,00
22.	Sekretariat DPRD	616.369.670,00
23.	Kecamatan Pagai Utara	30.031.000,00
24.	Kecamatan Sipora Selatan	44.230.000,00
25.	Kecamatan Sipora Utara	142.524.000,00
26.	Kecamatan Siberut Selatan	41.652.700,00
27.	Kecamatan Siberut Barat Daya	-
28.	Kecamatan Siberut Tengah	55.789.000,00
29.	Kecamatan Siberut Utara	21.795.700,00
30.	Kecamatan Siberut Barat	65.250.000,00
31.	Kecamatan Pagai Selatan	65.200.000,00
32.	Kecamatan Sikakap	75.497.500,00
33.	Inspektorat	124.880.000,00
34.	Bappeda	564.218.933,00
35.	Badan Keuangan Daerah	662.703.500,00
36.	BKPSDM	-
	TOTAL	22.511.776.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penambahan akibat reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp221.811.698,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Sekolah Dasar berupa aset tetap mobiler dengan rincian sekolah sebagai berikut:

Tabel 5.3.35 Daftar Nama Sekolah Penerima Mobiler

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	UNIT	JUMLAH
1	SDN 01 Sikakap	Meja Guru 1/2 Biro	1.942.500,00	6	11.655.000,00
		Lemari Buku	2.856.400,00	3	8.569.200,00
2	SDN 07 Nemnemleleu	Meja Guru 1/2 Biro	1.942.500,00	3	5.827.500,00
		Lemari Buku	2.862.360,00	3	8.587.080,00
3	SDN 14 Malakopa	Meja Guru 1/2 Biro	1.942.500,00	6	11.655.000,00
		Lemari Buku	2.856.400,00	3	8.569.200,00
4	SDN 22 Saliguma	Meja Guru 1/2 Biro	1.921.096,00	3	5.763.288,00
		Lemari Buku	2.886.000,00	3	8.658.000,00
5	SDN 25 Malakopa	Meja Guru 1/2 Biro	2.180.680,00	2	4.361.360,00
		Meja Guru 1/2 Biro	2.180.678,00	1	2.180.678,00
		Lemari Buku	2.886.000,00	3	8.658.000,00
6	SDN 22 Simatalu	Meja Guru 1/2 Biro	1.998.000,00	2	3.996.000,00
		Lemari Buku	2.775.000,00	2	5.550.000,00
7	SDN 10 Cimpungan	Meja Guru ½ biro	2.053.500,00	4	8.214.000,00
		Lemari Buku	2.775.000,00	5	13.875.000,00
8	SDN 13 Bulasat	Meja Guru ½ biro	2.486.833,00	5	12.434.165,00
		Meja Guru ½ biro	2.486.835,00	1	2.486.835,00
		Kotak sampah	3.163.500,00	6	18.981.000,00
9	SDN 26 Simatalu	Meja Guru ½ biro	2.035.200,00	2	4.070.400,00
		Lemari Buku	2.775.000,00	2	5.550.000,00
10	SMPN 2 Siberut Barat Daya	Keyboard Yamaha PSR SX700 + stand keyboard + tas keyboard	24.000.000,00	1	24.000.000,00
		Speaker Aktif Baretone Max15H (1 set)	9.080.000,00	2	18.160.000,00
		Gitar Akustik Elektrik Yamaha APX 600 Original	3.190.000,00	3	9.570.000,00
		Mixer Ashley king note 8	4.190.000,00	1	4.190.000,00
		Mic wirelles ashley Pro 1	2.150.000,00	1	2.150.000,00
		Stavolt Powell 5000 VA	4.099.992,00	1	4.099.992,00
TOTAL					221.811.698,00

3. Penambahan akibat hibah dari Kementerian Perpustakaan Republik Indonesia ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp216.750.000,00 dengan rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Daftar Nama Perangkat Elektornik, Hibah Dari
Kementerian Perpustakaan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	UNIT	JUMLAH
1	PC Unit	19.715.000	4	78.860.000



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	UNIT	JUMLAH
2	DLS (Digital Library Station)	25.000.000	1	25.000.000
3	Monitor 43 inci	5.500.000	1	5.500.000
4	UPS	2.900.000	1	2.900.000
5	Tablet Android	4.000.000	5	20.000.000
6	Meubeleur 1 Paket + Jaringannya	84.490.000	1	84.490.000
	TOTAL			216.750.000

4. Penambahan akibat mutasi antar SKPD sebesar Rp807.761.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Daftar Barang Milik Daerah yang Mutasi Tahun 2024

NO	SKPD	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	UNIT	TOTAL	TAHUN	SKPD ASAL
1	Dinas Lingkungan Hidup	Mini Bus Penumpang (Mitsubishi Kuda	199.386.000,00	1	199.386.000,00	2005	Setda
		Kendaraan Lainnya (Betor Vlar)	38.100.000,00	1	38.100.000,00	2024	Setda
2	Dinas BPMP-KB	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Toyota Rush)	265.800.000,00	1	265.800.000,00	2023	PUPR
3	Kecamatan Siberut Selatan	Kendaraan Roda 4 (Toyota Rysh)	257.500.000,00	1	257.500.000,00	2024	Setda
3	Badan Keuangan Daerah	Laptop	46.975.000,00	1	46.975.000	2023	Setda
TOTAL					807.761.000,00		

Mutasi Pengurangan :

1. Pengurangan akibat reklasifikasi barang milik daerah ke ekstra komputabel dengan total sebesar Rp264.113.352,00 atas aset peralatan dan mesin dengan perolehan nilai di bawah Rp1.500.000,00 atas kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Ke Ekstra Komputabel

NO	SKPD	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan Permainan Lainnya dan Alat Tenis Meja	19.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	Mesin Mebel, Alat Dapur, Alat Rumah Tangga Lainnya, Peralatan Cetak, Alat Kedokteran Umum, Laser Sunat.	42.292.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Mesin Pompa	1.270.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Alat kantor Lainnya dan Alat Dapur.	15.042.000,00
5	Kantor Kesbangpol	Komputer Unit Lainnya	867.716,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat Rumah Tangga Lainnya dan Perangkat Kamera CCTV	8.001.186,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat Kantor Lainnya, Alat Komputer Unit Lainnya, Komputer Jaringan.	11.900.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan	Alat Kantor Lainnya.	22.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	NAMA BARANG	JUMLAH
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tangka Semprot	7.900.000,00
10	Sekretariat Daerah	Mebel, Monitor	75.142.750,00
11	Sekretariat DPRD	Alat Rumah Tangga Lainnya	2.963.700,00
12	Kecamatan Pagai Utara	Alat Dapur, Mebel	4.160.000,00
13	Kecamatan Sipora Utara	Tangki Semprot, Mebel, Alat Rumah Tangga.	51.974.000,00
14	Kecamatan Siberut Selatan	Alat Rumah Tangga.	500.000,00
TOTAL			264.113.352,00

- Pengurangan akibat reklasifikasi barang milik daerah pada peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp513.800.000,00 pada Dinas Perikanan dengan rincian yaitu Pengadaan Sarana Kaji Terap Budidaya Lobster sebesar Rp193.800.000,00 dan Pengadaan Bak Pakan Alami sebesar Rp320.000.000,00.
- Pengurangan akibat reklasifikasi barang milik daerah dari kelompok peralatan dan mesin ke barang dan jasa sebesar Rp622.562.638,00 terhadap beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.39 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Dari Kelompok Peralatan Dan
Mesin Ke Barang Dan Jasa

NO	SKPD	NAMA BARANG	BARANG DAN JASA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meteran	1.000.000	
		Kompas	700.000	1.700.000
2	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Umum	7.307.514	
		Penakit kandungan	11.532.000	
		Benecheck Plus Multi Monitoring	1.500.000	
		Alat Laboratorium	5.275.000	
		Alat Kesehatan Olahraga	27.370.000	
		Ala Laboratorium Hematologi	10.950.000	63.934.514
3	Dinas PUPR	Alat Rumah Tangga Lainnya	5.320.000	
		Pengadaan Alat Obat-obatan	2.868.750	
		Sepatu Lapangan	5.062.500	
		Alat Pelindung Lainnya	800.000	14.051.250
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	428.090.000	428.090.000
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kertas Hias Dinding	4.245.750	
		Perangkat CCV	2.699.214	6.944.964
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keyboar dan Mouse	970.000	970.000
7	Sekretariat Daerah	Perangkat CCV	6.937.500	
		Peralatan Personal Komputer	26.473.500	
		Kelengkapan CCTV	7.781.100	41.192.100
8	DPRD	Alat Rumah Tangga Lainnya	49.029.810	
		Personal Komputer	1.620.000	50.649.810



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	NAMA BARANG	BARANG DAN JASA	JUMLAH
9	Kecamatan Pagai Utara	Alat Rumah Tangga Lainnya	6.500.000	6.500.000
10	Kecamatan Sipora Selatan	Alat Rumah Tangga Lainnya	2.330.000	2.330.000
11	Badan Keuangan Daerah	Alat Rumah Tangga Lainnya	6.200.000	6.200.000
	TOTAL			622.562.638

4. Pengurangan akibat reklasifikasi ke ekstra komptabel dari Dana BOS SDN dan SMPN pada peralatan dan mesin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp537.093.043,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.40 Reklasifikasi ke Ekstrakomp dari Dana BOS SDN dan SMPN

NO	SKPD	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mobiler dan Alat Kantor Lainnya	342.653.000,00	BOS SDN
		Mobiler dan Alat Kantor Lainnya	194.440.043,00	BOS SMPN
	TOTAL		537.093.043,00	

5. Pengurangan akibat reklasifikasi ke barang dan jasa dari Dana BOS Sekolah SDN dan SMPN Dinas Pendidikan sebesar Rp100.855.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.41 Reklasifikasi ke barang dan jasa dari Dana BOS Sekolah SDN dan SMPN

NO	SKPD	NAMA BARANG	BARANG DAN JASA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Alat Kantor Lainnya	72.282.900,00	BOS SDN
		Alat Kantor Lainnya	28.572.800,00	BOS SMPN
	TOTAL		100.855.700,00	

6. Pengurangan akibat reklasifikasi barang milik daerah atas perubahan kondisi aset tetap dari baik ke rusak berat sebesar Rp7.292.434.236,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.42 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Atas Perubahan Kondisi Aset Tetap

Dari Baik Ke Rusak Berat

NO	SKPD	JUMLAH	KET
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1.352.088.000,00	Rusak Berat
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	Rusak Berat
3	Dinas Perhubungan	1.697.670.258,00	Rusak Berat
4	Sekretariat Daerah	3.113.624.049,00	Rusak Berat
5	Kecamatan Sipora Utara	83.368.500,00	Rusak Berat
6	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.035.683.429,00	Rusak Berat
	TOTAL	7.292.434.236,00	

7. Pengurangan akibat hibah barang milik daerah ke Instansi Verikal/Kementerian dari peralatan dan mesin sebesar Rp43.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.43 Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat/Desa/Verikal/Kementerian

Dari Peralatan Dan Mesin

NO	SKPD	NAMA BARANG	HARGA	KET
1	Dinas Kesehatan	GPS	4.485.000,00	Hibah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Sekretariat Daerah	Genset	39.500.000,00	Hibah ke Polres Kepulauan Mentawai
TOTAL			43.985.000,00	

8. Pengurangan akibat mutasi antar SKPD terhadap barang milik daerah sebesar Rp541.961.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.44 Mutasi Antar OPD Terhadap Barang Milik Daerah

NO	SKPD	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	TAHUN	SKPD PENERIMA
1	Sekretariat Daerah	Mini Bus Penumpang (Toyota Avanza)	257.500.000,00	2024	Kec. Siberut Selatan
		Kendaraan Lainnya (Betor Viar)	38.100.000,00	2024	Dinas Lingkungan Hidup
		Mini Bus Penumpang (Mitsubishi Kuda)	199.386.000,00	2005	Dinas Lingkungan Hidup
		Laptop	24.975.000,00	2023	Badan Keuangan Daerah
TOTAL			541.961.000,00		

Adapun saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.45 Saldo Aset Tetap Berupa Peralatan Dan Mesin Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.481.257.475,00	3.659.643.251,00	221.811.698,00	(659.248.743,00)	48.703.463.681,00
2	Dinas Kesehatan	92.433.637.864,30	1.887.522.754,00	0,00	(110.711.514,00)	94.210.449.104,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	41.313.617.439,00	2.701.537.423,00	0,00	(1.353.358.000,00)	42.661.796.862,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.447.944.964,00	1.355.104.002,00	0,00	(29.093.250,00)	30.773.955.716,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.126.391.316,00	171.800.000,00	0,00	0,00	3.298.191.316,00
6	Kantor Kesbangpol	773.074.082,00	50.722.945,00	0,00	(867.716,00)	822.929.311,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.624.951.150,00	5.498.844.000,00	0,00	(428.090.000,00)	9.695.705.150,00
8	Dinsos, Pemberdyn. Perempuan dan Perlindungan Anak	3.744.616.609,00	150.824.650,00	0,00	(24.946.150,00)	3.870.495.109,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.662.202.860,00	116.521.000,00	0,00	0,00	14.778.723.860,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.060.253.781,00	303.443.400,00	237.486.000,00	0,00	5.601.183.181,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.977.594.804,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2.997.594.804,00
12	Dinas Pemberdyn Msy Desa, Pengendl Penduduk dan KB	3.339.736.607,00	32.013.360,00	265.800.000,00	0,00	3.637.549.967,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
13	Dinas Perhubungan	32.807.298.106,00	86.473.100,00	0,00	(1.697.670.258,00)	31.196.100.948,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.841.243.771,00	352.191.000,00	0,00	(12.870.000,00)	5.180.564.771,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.006.862.995,00	342.038.175,00	0,00	(22.500.000,00)	2.326.401.170,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.031.989.991,00	16.450.000,00	216.750.000,00	0,00	2.265.189.991,00
17	Dinas Perikanan	13.681.954.101,00	1.231.046.300,00	0,00	(513.800.000,00)	14.399.200.401,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.955.703.874,00	604.765.000,00	0,00	(7.900.000,00)	5.552.568.874,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.347.316.484,00	0,00	0,00	0,00	2.347.316.484,00
20	Dinas Koperindagkop	2.915.321.960,00	12.898.000,00	0,00	0,00	2.928.219.960,00
21	Sekretariat Daerah	46.266.843.821,00	1.407.796.511,00	0,00	(3.811.419.899,00)	43.863.220.433,00
22	Sekretariat DPRD	7.801.573.120,00	616.369.670,00	0,00	(53.613.510,00)	8.364.329.280,00
23	Kec. Pagai Utara	1.116.874.844,00	30.031.000,00	0,00	(10.660.000,00)	1.136.245.844,00
24	Kec. Sipora Selatan	1.529.277.845,00	44.230.000,00	0,00	(2.330.000,00)	1.571.177.845,00
25	Kecamatan Sipora Utara	876.250.400,00	142.524.000,00	0,00	(135.342.500,00)	883.431.900,00
26	Kec. Siberut Selatan	1.033.851.536,00	41.652.700,00	257.500.000,00	(500.000,00)	1.332.504.236,00
27	Kec. Siberut Barat Daya	1.371.293.878,00	0,00	0,00	(1.035.683.429,00)	335.610.449,00
28	Kec. Siberut Tengah	229.532.000,00	55.789.000,00	0,00	0,00	285.321.000,00
29	Kec. Siberut Utara	1.127.825.500,00	21.795.700,00	0,00	0,00	1.149.621.200,00
30	Kec. Siberut Barat	1.130.201.500,00	65.250.000,00	0,00	0,00	1.195.451.500,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.118.420.650,00	65.200.000,00	0,00	0,00	2.183.620.650,00
32	Kec. Sikakap	374.140.940,00	75.497.500,00	0,00	0,00	449.638.440,00
33	Inspektorat	1.848.440.324,00	124.880.000,00	0,00	0,00	1.973.320.324,00
34	Bappeda	6.130.492.349,00	564.218.933,00	0,00	0,00	6.694.711.282,00
35	BKD	10.275.065.133,00	662.703.500,00	46.975.000,00	(6.200.000,00)	10.978.543.633,00
36	BKPSDM	3.411.837.676,00	0,00	0,00	0,00	3.411.837.676,00
	TOTAL	399.214.891.749,30	22.511.776.874,00	1.246.322.698,00	(9.916.804.969,00)	413.056.186.352,30

Berikut ini disampaikan daftar rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 terlampir dalam lampiran 17.

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>788.628.146.683,94</u>	<u>762.229.234.027,94</u>

Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp788.628.146.683,94 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan Saldo Aset Gedung Dan Bangunan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp762.229.234.027,94 mengalami kenaikan sebesar Rp26.398.912.656,00 atau 3,46%.

Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023		Rp.	762.229.234.027,94
- Belanja Modal Tahun 2024	Rp.	26.067.914.028,00	
- Reklasifikasi dari KIB B	Rp.	513.800.000,00	
- Reklasifikasi dari KIB F	Rp.	3.987.374.302,00	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	30.569.088.330,00	

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB B	Rp.	(221.811.698,00)	
- Reklasifikasi ke KIB F	Rp.	(2.613.398.823,00)	
- Reklasifikasi ke RB / Aset Lainnya	Rp.	(64.647.000,00)	
- Hibah Ke Sekolah Swasta	Rp.	(454.150.859,00)	
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	(71.880.052,00)	
- Reklasifikasi ke KIB F (Ekstra)	Rp.	(19.990.000,00)	
- Reklasifikasi ke KIB B (Ekstra)	Rp.	(724.297.242,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(4.170.175.674,00)	
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	26.398.912.656,00	
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp.	788.628.146.683,94	

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp26.398.912.656,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.067.914.028,00 pada 9 (sembilan) SKPD dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.3.46 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

NO	SKPD	REALISASI 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.525.852.235,00
2	Dinas Kesehatan	204.033.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.595.520.371,00
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.199.071.074,00
5	Dinas Perhubungan	199.655.356,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.006.039.873,00
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.088.061.519,00
8	Kecamatan Sipora Utara	19.990.000,00
9	Bappeda	229.690.000,00
	TOTAL	26.067.914.028,00

2. Penambahan akibat reklasifikas dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp513.800.000,00 pada Dinas Perikanan dengan rincian yaitu Pengadaan Sarana Kaji Terap Budidaya Lobster sebesar Rp193.800.000,00 dan Pengadaan Bak Pakan Alami sebesar Rp320.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penambahan akibat reklasifikasi barang milik daerah dari konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp3.987.374.302,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH
1	Pemb. Ruang Guru / TU SMPN 1 Siberut Utara	2021	27.802.500,00
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 4 Pagai Selatan	2023	1.381.708.337,00
3	Pembangunan Ruang TU beserta Perbaotnya SMPN 1 Siberut Utara	2023	852.517.189,00
4	Pemb. Sarana Prasarana SMPN 1 Sipora Keg. Penambahan RKB	2023	99.288.112,00
5	Pemb. Sarana Prasarana SMPN 1 Pagai Utara Keg. Penambahan RKB	2023	99.288.112,00
6	Perencanaan Pembangunan Gapura dan Kantor Serta Lanscape (Akademi)	2023	99.682.162,00
7	Perencanaan Pembangunan Gapura dan Kantor Serta Lanscape (Akademi)	2023	1.427.087.890,00
	JUMLAH		3.987.374.302,00

Mutasi Pengurangan :

Sedangkan pengurangan aset tetap terhadap gedung dan bangunan dengan total sebesar Rp4.170.175.674,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp221.811.698,00 yaitu berupa mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diuraikan pada aset peralatan dan mesin pada jenis mutasi penambahan di atas nomor 2 (dua).
2. Reklasifikasi gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan terhadap dua kegiatan fisik gedung yang belum selesai pekerjaannya sebesar Rp2.613.398.823,00 yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.48 Kegiatan Fisik Gedung Dan Bangunan Yang Belum Selesai Pengerjaannya

No	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Pembangunan RKB SD Frsiskus Bai Rp389.711.950,00 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Rp185.747.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 28 Simatalu Rp 31.900.000,00	607.358.950,00
2	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	2.006.039.873,00
	TOTAL	2.613.398.823,00

3. Reklasifikasi gedung dan bangunan dari kondisi baik ke rusak berat sebesar Rp64.647.000,00 yaitu berupa Tugu/Tanda Batas Lainnya /Pos jaga Tuapejat pada Dinas Perhubungan.
4. Reklasifikasi kegiatan fisik gedung dan bangunan namun ada pembelian atau pengadaan seperti mobiler, Alat Permainan Edukasi Siswa dan Pembangunan Sanggar Kesenian dengan total hibah sebesar Rp454.150.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.49 Reklasifikasi Kegiatan Fisik Gedung Dan Bangunan

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	UNIT	JUMLAH
1	Tk Santo Petrus	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dan Alat Pembelajaran TK	49.650.000,00	1	49.650.0000,00
2	SD Swasta Fransiskus	Pengadaan Mebel Sekolah			
		Bangku Siswa	499.500,00	60	29.970.000,00
		Meja Siswa	521.702,00	60	31.302.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	UNIT	JUMLAH
		Bangku Guru	555.000,00	6	3.330.000,00
		Meja Guru 1/2 Biro	2.020.313,00	6	12.121.878,00
		Papan Tulis	555.000,00	6	3.330.000,00
		Papan Absen	333.000,00	6	1.998.000,00
		Tong Sampah	333.000,00	5	1.665.000,00
		Tong Sampah	333.002,00	1	333.002,00
		Lemari Buku	2.775.000,00	6	16.650.000,00
3	Sanggar Kesenian Desa Tuapejat	Bangunan Terbuka	151.799.657,00	1	151.799.657,00
4	Sanggar Kesenian Desa Muntei	Bangunan Terbuka	152.001.202,00	1	152.001.202,00
	TOTAL				454.150.859,00

5. Reklasifikasi gedung dan bangunan ke barang dan jasa sebesar Rp71.880.052,00 pada Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.50. Reklas Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT	UNIT	JUMLAH
1	SMPN 1 Pagai Utara	Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2	SDN 01 Sikakap	Papan Absen	388.500,00	6	2.331.000,00
		Tong Sampah	333.000,00	6	1.998.000,00
3	SDN 07 Nemnem Leleu	Tong Sampah	333.000,00	3	999.000,00
4	SDN 14 Malakopa	Tong Sampah	333.000,00	6	1.998.000,00
5	SDN 22 Saliguma	Papan Absen	394.050,00	3	1.182.150,00
		Tong Sampah	335.120,00	2	670.240,00
		Tong Sampah	335.122,00	1	335.122,00
6	SDN 25 Malakopa	Papan Absen	352.980,00	3	1.058.940,00
		Tong Sampah	333.000,00	3	999.000,00
7	SDN 22 Simatalu	Papan Absen	333.000,00	4	1.332.000,00
8	SDN 10 Cimpungan	Kotak sampah	333.000,00	6	1.998.000,00
9	SDN 13 Bulasat	Papan Absen	388.500,00	6	2.331.000,00
10	SDN 25 Simatalu	Kotak sampah	321.900,00	4	1.287.600,00
11	SDMPN 2 Siberut Barat Daya	Kabel Jack Keyboard/Gitar	50.000,00	14	700.000,00
		Kabel speaker isi 6x2,5mm Eurotone	50.000,00	40	2.000.000,00
		Jak canon Eurotone	33.000,00	20	660.000,00
	TOTAL				71.880.052,00

6. Reklasifikasi gedung dan bangunan ke ekstra komptabel sebesar Rp19.990.000,00 yaitu berupa Pembangunan Parkir Kantor Camat Sipora Utara.
7. Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin ekstra komptabel peralatan dan mesin sebesar Rp724.297.242,00 atas pengadaan mobile dan alat kantor lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.51 Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke KIB B Ekstrakomptabel

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT	UNIT	JUMLAH
1	SDN 01 Sikakap	Bangku Siswa	454.767,00	84	38.200.428,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA BARANG	HARGA SAT	UNIT	JUMLAH
		Meja Siswa	499.500,00	84	41.958.000,00
		Bangku Guru	548.562,00	6	3.291.372,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
2	SDN 07 Nemnem Leleu	Bangku Siswa	460.095,00	56	25.765.320,00
		Meja Siswa	510.600,00	56	28.593.600,00
		Bangku Guru	555.000,00	3	1.665.000,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
		Papan Absen	388.500,00	3	1.165.500,00
3	SDN 14 Malakopa	Bangku Siswa	454.767,00	84	38.200.428,00
		Meja Siswa	499.500,00	84	41.958.000,00
		Bangku Guru	548.562,00	6	3.291.372,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
		Papan Absen	388.500,00	6	2.331.000,00
4	SDN 22 Saliguma	Bangku Siswa	460.650,00	56	25.796.400,00
		Meja Siswa	505.050,00	56	28.282.800,00
		Bangku Guru	555.000,00	3	1.665.000,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
5	SDN 25 Malakopa	Bangku Siswa	450.549,00	56	25.230.744,00
		Meja Siswa	510.600,00	56	28.593.600,00
		Bangku Guru	553.890,00	3	1.661.670,00
		Papan Tulis	442.668,00	6	2.656.008,00
6	SDN 22 Simatalu	Bangku Siswa	444.000,00	85	37.740.000,00
		Meja Siswa	555.000,00	85	47.175.000,00
		Bangku Guru	555.000,00	2	1.110.000,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
7	SDN 10 Cimpungan	Bangku Siswa	444.000,00	80	35.520.000,00
		Meja Siswa	555.000,00	80	44.400.000,00
		Bangku Guru	540.750,00	4	2.163.000,00
		Papan Tulis	555.000,00	6	3.330.000,00
8	SDN 13 Bulasat	Bangku Siswa	444.000,00	90	39.960.000,00
		Meja Siswa	555.000,00	90	49.950.000,00
		Bangku Guru	721.500,00	6	4.329.000,00
		Papan Tulis	610.500,00	6	3.663.000,00
		Lemari Buku	277.500,00	6	1.665.000,00
9	SDN 25 Simatalu	Bangku Siswa	443.647,00	84	37.266.348,00
		Bangku Siswa	443.652,00	1	443.652,00
		Meja Siswa	555.000,00	85	47.175.000,00
		Bangku Guru	555.000,00	2	1.110.000,00
		Papan Tulis	499.500,00	6	2.997.000,00
10	SDMPN 2 Siberut Barat Daya	Stand Speaker Baretone ES80	900.000,00	2	1.800.000,00
		Cajon Akustik Elektrik	1.297.000,00	2	2.594.000,00
		Mic Kabel ASHLEY 11 G3/ 11G3	1.198.000,00	2	2.396.000,00
		Stand Mic	777.000,00	2	1.554.000,00
		Stand book	665.000,00	1	665.000,00
TOTAL					724.297.242,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut disampaikan saldo aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.52 Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	355.398.503.650,23	18.525.852.235,00	3.987.374.302,00	(2.079.498.801,00)	375.832.231.386,23
2	Dinas Kesehatan	168.951.714.323,20	204.033.600,00	0,00	0,00	169.155.747.923,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.612.895.267,00	0,00	0,00	0,00	22.612.895.267,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.655.570.627,04	2.595.520.371,00	0,00	0,00	35.251.090.998,04
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.177.809.459,00	0,00	0,00	0,00	10.177.809.459,00
6	Kantor Kesbangpol	468.610.982,00	0,00	0,00	0,00	468.610.982,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	749.744.402,00	1.199.071.074,00	0,00	0,00	1.948.815.476,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.295.552.529,00	0,00	0,00	0,00	2.295.552.529,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	539.290.291,00	0,00	0,00	0,00	539.290.291,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.259.682.944,00	0,00	0,00	0,00	1.259.682.944,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	626.147.544,00	0,00	0,00	0,00	626.147.544,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5.449.466.123,00	0,00	0,00	0,00	5.449.466.123,00
13	Dinas Perhubungan	4.888.571.293,00	199.655.356,00	0,00	(64.647.000,00)	5.023.579.649,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.369.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.647.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.735.094.878,00	0,00	0,00	0,00	5.735.094.878,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.700.000,00	2.006.039.873,00	0,00	(2.006.039.873,00)	29.700.000,00
17	Dinas Perikanan	17.866.886.974,47	-	513.800.000,00	0,00	18.380.686.974,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23.885.195.604,00	1.088.061.519,00	0,00	0,00	24.973.257.123,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.519.934.720,00	0,00	0,00	0,00	17.519.934.720,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.823.482.905,00	0,00	0,00	0,00	22.823.482.905,00
21	Sekretariat Daerah	29.525.005.170,00	0,00	0,00	0,00	29.525.005.170,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
22	Sekretariat DPRD	5.091.408.330,00	0,00	0,00	0,00	5.091.408.330,00
23	Kecamatan Pagai Utara	681.859.000,00	0,00	0,00	0,00	681.859.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	3.763.966.655,00	0,00	0,00	0,00	3.763.966.655,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.649.529.465,00	19.990.000,00	0,00	(19.990.000,00)	1.649.529.465,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	3.332.544.835,00	0,00	0,00	0,00	3.332.544.835,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.652.497.000,00	0,00	0,00	0,00	1.652.497.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.106.545.000,00	0,00	0,00	0,00	2.106.545.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.349.152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.349.152.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.236.651.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.651.000,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	496.020.000,00	0,00	0,00	0,00	496.020.000,00
32	Kecamatan Sikakap	534.016.400,00	0,00	0,00	0,00	534.016.400,00
33	Inspektorat	1.561.359.291,00	0,00	0,00	0,00	1.561.359.291,00
34	Bappeda	10.126.767.166,00	229.690.000,00	0,00	0,00	10.356.457.166,00
35	BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BKPSDM	3.818.411.200,00	0,00	0,00	0,00	3.818.411.200,00
	JUMLAH	762.229.234.027,94	26.067.914.028,00	4.501.174.302,00	(4.170.175.674,00)	788.628.146.683,94

Berikut ini disampaikan daftar rincian Aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 terlampir dalam lampiran 18.

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.626.537.273.094,03	1.528.401.837.503,03

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.626.537.273.094,03 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp1.528.401.837.503,03 mengalami kenaikan sebesar Rp98.135.435.591,00 atau 6,42%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023	Rp.	1.528.401.837.503,03
- Belanja Modal Tahun 2024	Rp.	91.142.885.630,00
- Hibah dari Kementerian	Rp.	14.580.861.611,00
- Reklasifikasi dari KIB F	Rp.	10.881.887.835,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	116.605.635.076,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB F	Rp.	(16.872.153.485,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp.	(49.800.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	(198.246.000,00)	
- Reklasifikasi ke Hibah/Masyarakat/Desa	Rp.	(1.350.000.000,00)	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(18.470.199.485,00)	
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.		98.135.435.591,00
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp.		1.626.537.273.094,03

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp98.135.435.591,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.142.885.630,00 pada 7 (tujuh) SKPD dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.3.53 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	4.512.400.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.597.161.334,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.423.815.258,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.668.490.000,00
5	Dinas Perhubungan	169.995.000,00
6	Dinas Perikanan	197.988.038,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	573.036.000,00
	JUMLAH	91.142.885.630,00

2. Reklasifikasi barang milik daerah dari Hibah Kementerian sebesar Rp14.580.861.611,00 kepada Sekretariat Daerah berupa Jaringan Transmisi Lain-lain atau yang lebih dikenal Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 25 Januari 2023 yang berlokasi di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan.
3. Reklasifikasi barang milik daerah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu kegiatan fisik yang sudah selesai dilaksanakan dan menjadi aset tetap KIB D pada Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebesar Rp10.881.887.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.54 Reklasifikasi Barang Milik Daerah Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH
1	Jalan Kabupaten Lokal Rogdog – Matotonan	2022	1.758.365.880,00
2	Jalan Kabupaten Lokal Sirilaggai – Terekan	2018	74.740.000,00
3	Jalan Kabupaten Lokal Muara Saibi – Subelen	2023	1.951.748.366,00
4	Jalan Kabupaten Lokal Mapadegat – Dermaga	2023	6.300.597.756,00
5	Jalan Kabupaten Lokal Mapadegat – Dermaga	2018	74.770.000,00
6	Jembatan Pada Jalan Kab. Arteri Taikako	2021	84.293.000,00
7	Jaringan Irigasi Permukaan Silaoinan – Taikako	2023	637.372.833,00
	TOTAL		10.881.887.835,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset tetap terhadap KIB D dengan total sebesar Rp18.470.199.485,00 dengan rincian aset pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp16.872.153.485,00 yaitu kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan pada Tahun 2024 pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.55 Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB F

NO	NAMA KEGIATAN	SKPD	NILAI	JUMLAH
1	Peningktn Jln Ma. Taikako - Silabu (Sikakap)	PUPR	727.730.873,00	
2	Peningktn Jln. Sagitci – Beriulou	PUPR	2.713.689.000,00	
3	Peningktn. Jln. Simp. Mapadegat - Mapadegat 30%	PUPR	545.216.100,00	
4	Peningktn Jln. Saumanganyak - Matobek DAK Tematik	PUPR	6.495.659.000,00	
5	Pemb Jln TPSP Sisa DAU SG 2023 lokasi SP II Berkat	PUPR	145.613.512,00	
6	Pemb. Kanal Banjir Pei-pei	PUPR	2.575.755.000,00	
	Jumlah			13.203.663.485,00
7	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain (Sip. Utara 3 lokasi)	BPBD	2.061.325.000,00	
8	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain (Sip. Selatan 2 lokasi)	BPBD	1.607.165.000,00	
	Jumlah			3.668.490.000,00
TOTAL				16.872.153.485,00

2. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke aset lainnya sebesar Rp49.800.000,00 pada Kecamatan Siberut Barat Daya yaitu perubahan kondisi dari baik ke rusak berat yakni Jaringan Telekomunikasi pengadaan Tahun 2012 pada Kantor Camat.
3. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke barang dan jasa sebesar Rp198.246.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni berupa pembelian jaringan perpipaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.56. Reklas Jalan Irigasi dan Jaringan ke Barang dan Jasa

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA BARANG	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pembelian Pipa Aecessories PAM	Gate Valve 3"	6	1.665.000,00	9.990.000,00
		Fleng Socet 3"	8	410.700,00	3.285.600,00
		Fleng Spigot 3"	8	394.050,00	3.152.400,00
		Karet Peking 4"	8	27.750,00	222.000,00
		Gate Valve 6"	3	3.885.000,00	11.655.000,00
		Fleng Socet 6"	3	888.000,00	2.664.000,00
		Fleng Spigot 6"	3	876.900,00	2.630.700,00
		Karet Peking 6"	3	38.850,00	116.550,00
		Pipa PVC 2" SNI	7	266.400,00	1.864.800,00
		Pipa PVC 3" SNI	8	555.000,00	4.440.000,00
		Gate Valve 2"	4	1.054.500,00	4.218.000,00
		Fleng Socet 2"	4	305.250,00	1.221.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA BARANG	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
		Fleng Spigot 2"	4	271.950,00	1.087.800,00
		Fleng Socet 4"	2	527.250,00	1.054.500,00
		Fleng Spigot 4"	2	493.950,00	987.900,00
		G.Join 3"	5	405.150,00	2.025.750,00
		Pipa HDPE 3/4"	10	1.221.000,00	12.210.000,00
		W.Meter 1/2 Onda	50	388.500,00	19.425.000,00
		Impeck	1	2.775.000,00	2.775.000,00
		Flexibel Join 4"	1	1.165.500,00	1.165.500,00
		Stop Kran 1/2 "	35	105.450,00	3.690.750,00
		Elbow Drat 1/2"	100	11.100,00	1.110.000,00
		Tee Drat 1/2"	100	12.210,00	1.221.000,00
		Baut 19	50	9.990,00	499.500,00
		Baut 22	50	13.320,00	666.000,00
		Bor Pipa 1/2"	1	804.750,00	804.750,00
		Pipa Pvc 1/2"	50	44.400,00	2.220.000,00
		Pipa Pvc 3/4"	40	61.050,00	2.442.000,00
2	Pek. Pengadaan Asesoris PAM Tuapejat	Gate Valve 3"	6	1.665.000,00	9.990.000,00
		Fleng Socet 3"	8	410.700,00	3.285.600,00
		Fleng Spigot 3"	8	394.050,00	3.152.400,00
		Karet Peking 4"	8	27.750,00	222.000,00
		Gate Valve 6"	3	3.885.000,00	11.655.000,00
		Fleng Socet 6"	3	888.000,00	2.664.000,00
		Fleng Spigot 6"	3	876.900,00	2.630.700,00
		Karet Peking 6"	3	38.850,00	116.550,00
		Pipa PVC 2" SNI	7	266.400,00	1.864.800,00
		Pipa PVC 3" SNI	8	555.000,00	4.440.000,00
		Gate Valve 2"	4	1.054.500,00	4.218.000,00
		Fleng Socet 2"	4	305.250,00	1.221.000,00
		Fleng Spigot 2"	4	271.950,00	1.087.800,00
		Fleng Socet 4"	2	527.250,00	1.054.500,00
		Fleng Spigot 4"	2	493.950,00	987.900,00
		G.Join 3"	5	405.150,00	2.025.750,00
		Pipa HDPE 3/4"	10	1.332.000,00	13.320.000,00
		W.Meter 1/2 Onda	50	388.500,00	19.425.000,00
		Impeck	1	2.192.250,00	2.192.250,00
		Flexibel Join 4"	1	1.165.500,00	1.165.500,00
		Stop Kran 1/2 "	35	105.450,00	3.690.750,00
		Elbow Drat 1/2"	100	11.100,00	1.110.000,00
		Tee Drat 1/2"	100	12.210,00	1.221.000,00
		Baut 19	50	10.545,00	527.250,00
		Baut 22	50	13.320,00	666.000,00
		Bor Pipa 1/2"	1	804.750,00	804.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA BARANG	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
		Pipa Pvc 1/2"	50	44.400,00	2.220.000,00
		Pipa Pvc 3/4"	40	61.050,00	2.442.000,00
	TOTAL				198.246.000,00

4. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan yang dihibahkan ke masyarakat melalui kegiatan optimalisasi berbasis masyarakat sebesar Rp1.350.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.57 Reklasifikasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan Yang Dihibahkan Ke Masyarakat

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI
1	Pemb. Optimalisasi SPAM Berbasis masyarakat Dusun Panasalat Desa Pasakiat Taileleu	450.000.000,00
2	Pemb. SPAM Berbasis Masyarakat Dusun Limosua Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	400.000.000,00
3	Pemb. SPAM Berbasis Masyarakat Dusun Simasoro Desa Saibi Samukop Kec Siberut Tengah	500.000.000,00
	TOTAL	1.350.000.000,00

Berikut disampaikan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.58 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.817.781.891,00	0,00	0,00	0,00	7.817.781.891,00
2	Dinas Kesehatan	12.308.034.258,00	4.512.400.000,00	0,00	0,00	16.820.434.258,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.945.962.500,00	0,00	0,00	0,00	3.945.962.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.154.281.962.041,61	79.597.161.334,00	10.881.887.835,00	(14.751.909.485,00)	1.230.009.101.725,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	83.949.603.280,42	2.423.815.258,00	0,00	0,00	86.373.418.538,42
6	Kantor Kesbangpol	102.415.500,00	0,00	0,00	0,00	102.415.500,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	245.628.900,00	0,00	0,00	0,00	245.628.900,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.474.182.138,00	3.668.490.000,00	0,00	(3.668.490.000,00)	60.474.182.138,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan	116.053.600,00	0,00	0,00	0,00	116.053.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
	Kebersihan					
11	Dinas Kependudukan dan Capil	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60.095.650,00	0,00	0,00	0,00	60.095.650,00
13	Dinas Perhubungan	16.694.620.637,00	169.995.000,00	0,00	0,00	16.864.615.637,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.543.600,00	0,00	0,00	0,00	7.543.600,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.661.000,00	0,00	0,00	0,00	34.661.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perikanan	11.550.099.315,00	197.988.038,00	0,00	0,00	11.748.087.353,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.195.744.891,00	0,00	0,00	0,00	6.195.744.891,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.787.465.539,00	573.036.000,00	0,00	0,00	19.360.501.539,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	141.471.337.293,00	0,00	0,00	0,00	141.471.337.293,00
21	Sekretariat Daerah	6.800.515.032,00	0,00	14.580.861.611,00	0,00	21.381.376.643,00
22	Sekretariat DPRD	776.717.550,00	0,00	0,00	0,00	776.717.550,00
23	Kecamatan Pagai Utara	24.915.000,00	0,00	0,00	0,00	24.915.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	66.105.000,00	0,00	0,00	0,00	66.105.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	425.686.200,00	0,00	0,00	0,00	425.686.200,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	832.906.000,00	0,00	0,00	(49.800.000,00)	783.106.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	116.160.000,00	0,00	0,00	0,00	116.160.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	101.012.000,00	0,00	0,00	0,00	101.012.000,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	20.692.000,00	0,00	0,00	0,00	20.692.000,00
32	Kecamatan Sikakap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Inspektorat	71.524.340,00	0,00	0,00	0,00	71.524.340,00
34	Bappeda	719.075.140,00	0,00	0,00	0,00	719.075.140,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
35	BKD	105.927.912,00	0,00	0,00	0,00	105.927.912,00
36	BKPSDM	259.609.295,00	0,00	0,00	0,00	259.609.295,00
	JUMLAH	1.528.401.837.503,03	91.142.885.630,00	25.462.749.446,00	(18.470.199.485,00)	1.626.537.273.094,03

Berikut ini disampaikan daftar rincian Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 terlampir dalam lampiran 19.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	23.943.373.914,00	22.744.893.094,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.943.379.914,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp22.744.893.094,00 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.198.480.820,00 atau 5,27%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023	Rp.	22.744.893.094,00
- Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	Rp.	1.213.077.782,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	1.213.077.782,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke Rusak Berat	Rp.	(10.958.812,00)
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	(3.638.150,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(14.596.962,00)
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	1.198.480.820,00
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp.	23.943.373.914,00

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.198.480.820,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.213.077.782,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belanja modal untuk Dana BOS Tahun 2024.

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp14.596.962,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke rusak berat sebesar Rp10.958.812,00 pada Kecamatan Siberut Barat Daya yaitu berupa buku-buku perpustakaan.
2. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke barang dan jasa sebesar Rp3.638.150,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada kegiatan yang didanai dana BOS.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut disampaikan Saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.59 Saldo Aset Tetap Lainnya Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.853.573.100,00	1.213.077.782,00	0,00	(3.638.150,00)	18.063.012.732,00
2	Dinas Kesehatan	206.890.850,00	0,00	0,00	0,00	206.890.850,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	177.807.220,00	0,00	0,00	0,00	177.807.220,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.088.700,00	0,00	0,00	0,00	17.088.700,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.623.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623.000,00
6	Kantor Kesbangpol	10.077.760,00	0,00	0,00	0,00	10.077.760,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27.622.200,00	0,00	0,00	0,00	27.622.200,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.619.500,00	0,00	0,00	0,00	19.619.500,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00	8.871.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.870.968.032,00	0,00	0,00	0,00	1.870.968.032,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	1.904.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	134.199.100,00	0,00	0,00	0,00	134.199.100,00
13	Dinas Perhubungan	8.721.500,00	0,00	0,00	0,00	8.721.500,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.229.500,00	0,00	0,00	0,00	50.229.500,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.793.600,00	0,00	0,00	0,00	2.793.600,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.004.006.233,00	0,00	0,00	0,00	1.004.006.233,00
17	Dinas Perikanan	63.995.000,00	0,00	0,00	0,00	63.995.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	156.867.250,00	0,00	0,00	0,00	156.867.250,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	361.153.000,00	0,00	0,00	0,00	361.153.000,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	23.708.000,00	0,00	0,00	0,00	23.708.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.218.885.550,00	0,00	0,00	0,00	1.218.885.550,00
22	Sekretariat DPRD	69.253.250,00	0,00	0,00	0,00	69.253.250,00
23	Kecamatan Pagai Utara	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	13.260.370,00	0,00	0,00	0,00	13.260.370,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	8.600.900,00	0,00	0,00	0,00	8.600.900,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	15.958.812,00	0,00	0,00	(10.958.812,00)	5.000.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	62.875.000,00	0,00	0,00	0,00	62.875.000,00
29	Kecamatan Siberut	17.614.369,00	0,00	0,00	0,00	17.614.369,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Realisasi Belanja Modal 2024	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
				Tambah	Kurang	
	Utara					
30	Kecamatan Siberut Barat	30.820.268,00	0,00	0,00	0,00	30.820.268,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	18.555.000,00	0,00	0,00	0,00	18.555.000,00
32	Kecamatan Sikakap	7.687.500,00	0,00	0,00	0,00	7.687.500,00
33	Inspektorat	91.237.110,00	0,00	0,00	0,00	91.237.110,00
34	Bappeda	109.876.000,00	0,00	0,00	0,00	109.876.000,00
35	BKD	52.794.000,00	0,00	0,00	0,00	52.794.000,00
36	BKPSDM	12.535.420,00	0,00	0,00	0,00	12.535.420,00
	TOTAL	22.744.893.094,00	1.213.077.782,00	0,00	(14.596.962,00)	23.943.373.914,00

Berikut ini disampaikan daftar rincian Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 terlampir dalam lampiran 20.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

83.400.216.814,00

78.704.126.643,00

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.400.216.814,00 yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp78.704.126.643,00 terdapat penambahan nilai sebesar Rp4.696.090.171,00 atau 5,97%. Rincian aset ini sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Saldo Awal 2023	Rp.	78.704.126.643,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	79.800.000,00
- Reklasifikasi dari KIB C	Rp.	2.613.398.823,00
- Reklasifikasi dari KIB D	Rp.	16.872.153.485,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	19.565.352.308,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi ke KIB C	Rp.	(3.987.374.302,00)
- Reklasifikasi ke KIB D	Rp.	(10.881.887.835,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	(14.869.262.137,00)
Jumlah Bersih Mutasi	Rp.	Rp. 4.696.090.171,00
Jumlah Saldo Akhir 2024	Rp.	Rp. 83.400.216.814,00

Dari rincian tersebut di atas menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp4.696.090.171,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi penambahan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp79.800.000,00 yakni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.60 Reklasifikasi Penambahan Dari Belanja Barang Dan Jasa

NO	SKPD	JUMLAH
1	Perencanaan Jln Lingkung Simalegi	39.900.000,00
2	Konsltn perenc / jln lingkungan Ds. Sibaybay	39.900.000,00
	TOTAL	79.800.000,00

2. Reklasifikasi Penambahan dari gedung dan bangunan sebesar Rp2.613.398.823,00 yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.61 Reklasifikasi Penambahan dari Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	607.358.950,00
2	Dinas Kearsipan dan Kepustakaan	2.006.039.873,00
	TOTAL	2.613.398.823,00

3. Reklasifikasi penambahan dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp16.872.153.485,00 yakni Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.62 Reklasifikasi Penambahan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	SKPD/KEGIATAN	NILAI	JUMLAH
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)		
	Peningktn Jln Ma. Taikako - Silabu (Sikapap)	727.730.873,00	
	Peningktn Jln. Sagitci – Beriulou	2.713.689.000,00	
	Peningktn. Jln. Simp. Mapadegat - Mapadegat	545.216.100,00	
	Peningktn Jln. Saumanganyak - Matobek DAK Tematik	6.495.659.000,00	
	Pemb Jln TPSP Sisa DAU SG 2023 lokasi SP II Berkat	145.613.512,00	
	Pemb. Kanal Banjir Pei-pe	2.575.755.000,00	13.203.663.485,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		
	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain (Sipora Utara 3 lokasi)	2.061.325.000,00	
	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain (Sipora Selatan 2 lokasi)	1.607.165.000,00	3.668.490.000,00
	TOTAL		16.872.153.485,00

Mutasi Pengurangan

Sedangkan pengurangan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp14.869.262.137,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

1. Reklasifikasi pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan sebesar Rp3.987.374.302,00 atas selesainya pekerjaan pembangunan fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.63 Reklasifikasi Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Ke Kib C

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH
----	---------------	-------	--------



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	JUMLAH
1	Pemb. Ruang Guru / TU SMPN 1 Siberut Utara	2021	27.802.500,00
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 4 Pagai Selatan	2023	1.381.708.337,00
3	Pembangunan Ruang TU beserta Perbaotnya SMPN 1 Siberut Utara	2023	852.517.189,00
4	Pemb. Sarana Prasarana SMPN 1 Sipora Keg. Penambahan RKB	2023	99.288.112,00
5	Pemb. Sarana Prasarana SMPN 1 Pagai Utara Keg. Penambahan RKB	2023	99.288.112,00
6	Perencanaan Pembangunan Gapura dan Kantor Serta Lanscape (Akademi)	2023	99.682.162,00
7	Perencanaan Pembangunan Gapura dan Kantor Serta Lanscape (Akademi)	2023	1.427.087.890,00
	JUMLAH		3.987.374.302,00

2. Reklasifikasi pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.881.887.835,00 atas lunas selesainya pekerjaan tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.64 Reklasifikasi Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Ke Kib D

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	NILAI
1	Jalan Kabupaten Lokal Rogdog-Matotonan	2022	1.758.365.880,00
2	Jalan Kabupaten Lokal Sirilaggai-Terekan	2018	74.740.000,00
3	Jalan Kabupaten Lokal Muara Saibi-Subelen	2023	1.951.748.366,00
4	Jalan Kabupaten Lokal Mapadegat-Dermaga	2023	6.300.597.756,00
5	Jalan Kabupaten Lokal Mapadegat-Dermaga	2018	74.770.000,00
6	Jembatan Pada Jalan Kab. Arteri Taikako	2021	84.293.000,00
7	Jaringan Irigasi Permukaan Silaoinan-Taikako	2023	637.372.833,00
TOTAL			10.881.887.835,00

Berikut disampaikan Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.65 Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Kesehatan	17.520.330.914,00	0,00	0,00	17.520.330.914,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.214.789.511,00	13.203.663.485,00	(10.881.887.835,00)	40.536.565.161,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	508.986.000,00	79.800.000,00	0,00	588.786.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.108.720.166,00	3.668.490.000,00	0,00	14.777.210.166,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.966.473.079,00	607.358.950,00	(3.987.374.302,00)	1.586.457.727,00
6	Kecamatan Siberut Utara	98.835.000,00	0,00	0,00	98.835.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.736.450,00	0,00	0,00	803.736.450,00
8	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	59.780.000,00	0,00	0,00	59.780.000,00
9	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	34.980.000,00	0,00	0,00	34.980.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.610.000,00	0,00	0,00	49.610.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31-12-2023	Penyesuaian/Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
11	Dinas Perhubungan	738.103.998,00	0,00	0,00	738.103.998,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.599.781.525,00	2.006.039.873,00	0,00	6.605.821.398,00
	TOTAL	78.704.126.643,00	19.565.352.308,00	(14.869.262.137,00)	83.400.216.814,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	(1.145.071.731.457,91)	(1.012.866.322.911,74)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp1.145.071.731.457,91) dan mengalami kenaikan sebesar (Rp132.205.408.546,17) atau 13,05% dari Tahun 2023 sebesar (Rp1.012.866.322.911,74) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.66 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	Uraian	Saldo Awal Per 31-12-2023	Penyesuaian/ Koreksi 2024		Saldo Akhir Per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	304.713.491.466,13	27.888.715.556,17	-7.453.122.780,00	325.149.084.242,30
3	Gedung dan Bangunan	128.916.767.171,00	14.702.738.278,00	-10.343.520,00	143.609.161.929,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	579.236.064.274,61	97.107.301.012,00	-29.880.000,00	676.313.485.286,61
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.012.866.322.911,74	139.698.754.846,17	-7.493.346.300,00	1.145.071.731.457,91

Adapun Saldo Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan penyusutan sebesar Rp20.435.592.776,17 atau sebesar 6,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.67 Penyusutan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.366.819.507,00	2.836.497.279,00	2.371.565.364,00	0,00	- 19.600.000,00	36.555.282.150,00
2	Dinas Kesehatan	58.148.545.374,18	4.430.792.087,12	4.286.256.945,00	0,00	0,00	66.865.594.406,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	35.124.325.810,95	917.887.824,05	854.837.212,00	0,00	-1.352.088.000,00	35.544.962.847,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan	24.697.021.893,00	469.784.927,00	512.812.615,00	0,00	0,00	25.679.619.435,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
	Penataan Ruang						
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.773.391.141,00	72.062.987,00	79.101.318,00	0,00	0,00	2.924.555.446,00
6	Kantor Kesbangpol	684.155.232,00	17.433.803,00	18.218.800,00	0,00	0,00	719.807.835,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.204.463.643,00	221.631.245,00	378.460.158,00	0,00	0,00	4.804.555.046,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.091.379.815,00	99.365.180,00	101.262.564,00	0,00	- 10.000.000,00	3.282.007.559,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.521.647.491,00	463.484.232,00	423.449.953,00	0,00	0,00	12.408.581.676,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.617.273.177,00	156.771.855,00	158.502.221,00	199.386.000,00	0,00	3.131.933.253,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.094.594.565,00	124.210.824,00	117.146.655,00	0,00	0,00	2.335.952.044,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3.096.840.275,00	73.577.071,00	55.505.124,00	0,00	3.164.286,00	3.229.086.756,00
13	Dinas Perhubungan	28.182.637.322,00	1.199.914.667,00	1.203.498.013,00	0,00	-1.697.670.258,00	28.888.379.744,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.818.487.844,00	189.632.279,00	155.232.318,00	0,00	0,00	4.163.352.441,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.875.307.900,00	34.500.601,00	43.614.473,00	0,00	0,00	1.953.422.974,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.088.273.353,00	129.130.603,00	126.801.789,00	0,00	0,00	1.344.205.745,00
17	Dinas Perikanan	12.660.722.104,00	168.914.575,00	176.655.680,00	0,00	0,00	13.006.292.359,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.576.115.521,00	198.039.490,00	200.905.926,00	0,00	0,00	3.975.060.937,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.108.428.628,00	40.855.007,00	35.022.502,00	0,00	0,00	2.184.306.137,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.522.795.312,00	69.799.818,00	70.068.521,00	0,00	0,00	2.662.663.651,00
21	Sekretariat Daerah	34.203.395.917,00	1.388.144.129,00	1.290.708.351,00	0,00	-3.319.860.570,00	33.562.387.827,00
22	Sekretariat DPRD	6.715.725.579,00	186.679.073,00	172.218.616,00	0,00		7.074.623.268,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.011.054.683,00	16.361.508,00	16.571.323,00	0,000,00	0,00	1.043.987.514,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.197.306.828,00	37.978.734,00	36.548.695,00	0,00	0,00	1.271.834.257,00
25	Kecamatan Sipora Utara	702.673.551,00	41.261.372,00	45.175.210,00	0,00	- 83.368.500,0000	705.741.633,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	909.254.296,00	27.395.660,00	33.390.534,00	0,00	0,00	970.040.490,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.210.251.988,00	23.560.216,00	22.386.883,00	0,00	-973.699.738,00	282.499.349,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	175.692.301,00	7.561.793,00	10.835.648,00	0,00	0,00	194.089.742,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.059.476.583,00	15.598.666,00	15.666.513,00	0,00	0,00	1.090.741.762,00
30	Kecamatan Siberut	956.588.848,00	32.913.308,00	33.188.519,00	0,00	0,00	1.022.690.675,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
	Barat						
31	Kecamatan Pagai Selatan	1.949.124.863,00	35.864.853,00	37.698.778,00	0,00	0,00	2.022.688.494,00
32	Kecamatan Sikakap	358.281.565,00	3.518.750,00	4.317.457,00	0,00	0,00	366.117.772,00
33	Inspektorat	1.425.282.871,00	49.998.974,00	52.696.277,00	0,00	0,00	1.527.978.122,00
34	Bappeda	5.681.987.925,00	89.853.774,00	90.254.920,00	0,00	0,00	5.862.096.619,00
35	BKD	8.653.377.703,00	282.835.378,00	247.233.475,00	6.850.521,00	0,00	9.190.297.077,00
36	BKPSDM	3.250.790.057,00	25.428.571,00	25.428.572,00	0,00	0,00	3.301.647.200,00
	Jumlah	304.713.491.466,13	14.179.241.113,17	13.503.237.922,00	206.236.521,00	-7.453.122.780,00	325.149.084.242,30

Adapun Saldo Penyusutan Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp14.692.394.758,00 atau sebesar 10,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.68 Penyusutan Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian/Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.177.145.481,00	3.355.895.933,00	3.389.952.164,00	0,00	0,00	60.922.993.578,00
2	Dinas Kesehatan	27.045.085.299,00	1.672.971.567,00	1.673.311.625,00	0,00	0,00	30.391.368.491,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.372.055.891,00	230.401.521,00	230.401.523,00	0,00	0,00	5.832.858.935,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.069.016.839,00	329.545.709,00	333.538.433,00	0,00	0,00	5.732.100.981,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.482.379.253,00	102.278.378,00	102.278.379,00	0,00	0,00	1.686.936.010,00
6	Kantor Kesbangpol	106.993.575,00	3.121.877,00	3.121.877,00	0,00	0,00	113.237.329,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	152.611.303,00	8.614.956,00	10.613.407,00	0,00	0,00	171.839.666,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	813.208.500,00	23.365.025,00	23.365.025,00	0,00	0,00	859.938.550,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.633.711,00	3.954.910,00	3.954.910,00	0,00	0,00	83.543.531,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.323.596,00	12.423.300,00	12.423.300,00	0,00	0,00	393.170.196,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	175.300.306,00	5.997.287,00	5.997.287,00	0,00	0,00	187.294.880,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan	920.505.518,00	51.492.409,00	51.492.410,00	0,00	0,00	1.023.490.337,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian/Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
	KB						
13	Dinas Perhubungan	1.268.917.647,00	43.194.128,00	43.526.887,00	0,00	(10.343.520,00)	1.345.295.142,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	185.088.187,00	13.846.200,00	13.846.200,00	0,00	0,00	212.780.587,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.135.455.444,00	58.276.621,00	58.276.620,00	0,00	0,00	1.252.008.685,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.128.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	7.722.000,00
17	Dinas Perikanan	4.258.414.151,00	173.773.896,00	174.630.231,00	0,00	0,00	4.606.818.278,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.127.250.933,00	188.055.114,00	188.055.114,00	0,00	0,00	2.503.361.161,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.930.612.867,00	174.432.707,00	174.432.706,00	0,00	0,00	4.279.478.280,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.573.801.652,00	226.957.986,00	226.957.986,00	0,00	0,00	4.027.717.624,00
21	Sekretariat Daerah	7.546.246.858,00	283.281.543,00	283.281.545,00	0,00	0,00	8.112.809.946,00
22	Sekretariat DPRD	1.249.771.740,00	49.535.669,00	49.535.668,00	0,00	0,00	1.348.843.077,00
23	Kecamatan Pagai Utara	187.375.316,00	6.664.132,00	6.664.132,00	0,00	0,00	200.703.580,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.379.025.721,00	37.530.862,00	37.530.861,00	0,00	0,00	1.454.087.444,00
25	Kecamatan Sipora Utara	439.912.585,00	16.495.295,00	16.495.295,00	0,00	0,00	472.903.175,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.152.551.613,00	32.865.765,00	32.865.766,00	0,00	0,00	1.218.283.144,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	354.506.823,00	16.473.889,00	16.473.888,00	0,00	0,00	387.454.600,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	339.088.592,00	21.065.450,00	21.065.450,00	0,00	0,00	381.219.492,00
29	Kecamatan Siberut Utara	280.267.660,00	13.291.330,00	13.291.330,00	0,00	0,00	306.850.320,00
30	Kecamatan Siberut Barat	259.580.260,00	12.366.510,00	12.366.510,00	0,00	0,00	284.313.280,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	141.271.800,00	4.960.200,00	4.960.200,00	0,00	0,00	151.192.200,00
32	Kecamatan Sikakap	230.853.904,00	5.340.164,00	5.340.164,00	0,00	0,00	241.534.232,00
33	Inspektorat	654.568.379,00	16.792.424,00	16.792.424,00	0,00	0,00	688.153.227,00
34	Bappeda	1.621.915.591,00	96.486.996,00	96.486.996,00	0,00	0,00	1.814.889.583,00
35	BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BKPSDM	834.902.176,00	38.534.106,00	38.534.106,00	0,00	0,00	911.970.388,00
	Jumlah	128.916.767.171,00	7.330.580.859,00	7.372.157.419,00	0,00	(10.343.520,00)	143.609.161.929,00

Adapun Saldo Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp97.077.421.012,00 atau sebesar 14,35% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.69 Penyusutan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	620.757.530,00	103.076.164,00	103.076.164	0,00	0,00	826.909.858,00
2	Dinas Kesehatan	1.990.980.984,00	183.627.776,00	198.650.282	0,00	0,00	2.373.259.042,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.245.392.212,00	61.195.421,00	61.195.421	0,00	0,00	1.367.783.054,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	490.613.744.907,61	41.032.521.813,00	43.324.507.537	0,00	0,00	574.970.774.257,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.662.100.140,00	1.623.046.758,00	1.623.046.762	0,00	0,00	31.908.193.660,00
6	Kantor Kesbangpol	25.241.292,00	1.280.194,00	1.280.194,00	0,00	0,00	27.801.680,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.012.897,00	3.179.284,00	3.179.288,00	0,00	0,00	69.371.469,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.997.005.515,00	906.053.884,00	906.053.889,00	0,00	0,00	12.809.113.288,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	42.822.780,00	1.465.670,00	1.465.670,00	0,00	0,00	45.754.120,00
11	Dinas Kependudukan dan Cakil	2.695.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	2.940.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	48.727.061,00	194.070,00	194.071,00	0,00	0,00	49.115.202,00
13	Dinas Perhubungan	6.195.191.516,00	381.606.267,00	381.606.267,00	0,00	0,00	6.958.404.050,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	204.306,00	94.295,00	94.295,00	0,00	0,00	392.896,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.441.775,00	515.762,00	515.763,00	0,00	0,00	8.473.300,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perikanan	5.066.650.580,00	159.189.814,00	159.189.818,00	0,00	0,00	5.385.030.212,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.453.381.043,00	230.585.210,00	230.585.208,00	0,00	0,00	1.914.551.461,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.455.144.596,00	441.391.874,00	441.391.877,00	0,00	0,00	14.337.928.347,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.441.313.258,00	1.767.440.091,00	1.767.440.092,00	0,00	0,00	17.976.193.441,00
21	Sekretariat Daerah	3.161.676.490,00	263.231.004,00	263.231.009,00	364.521.540,00	0,00	4.052.660.043,00
22	Sekretariat DPRD	153.879.196,00	8.610.810,00	8.610.811,00	0,00	0,00	171.100.817,00
23	Kecamatan Pagai Utara	6.976.200,00	249.150,00	249.150,00	0,00	0,00	7.474.500,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	18.965.000,00	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	20.949.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	274.902.939,00	3.751.920,00	3.751.921,00	0,00	0,00	282.406.780,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.412.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.512.500,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	252.033.121,00	17.664.387,00	17.664.388,00	0,00	(29.880.000,00)	257.481.896,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	6.400.013,00	400.001,00	400.001,00	0,00	0,00	7.200.015,00
29	Kecamatan Siberut Utara	48.303.750,00	2.195.625,00	2.195.625,00	0,00	0,00	52.695.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	31.849.794,00	1.507.377,00	1.507.378,00	0,00	0,00	34.864.549,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	7.759.500,00	258.650,00	258.650,00	0,00	0,00	8.276.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan 31-12-2023	Semester I	Semester II	Penyesuaian Penyusutan 2024		Akumulasi Penyusutan 31-12-2024
					Tambah	Kurang	
32	Kecamatan Sikakap	-			0,00	0,00	0,00
33	Inspektorat	20.782.061,00	924.137,00	924.137,00	0,00	0,00	22.630.335,00
34	Bappeda	211.747.214,00	16.347.929,00	16.347.928,00	0,00	0,00	244.443.071,00
35	BKD	16.698.564,00	788.948,00	788.948,00	0,00	0,00	18.276.460,00
36	BKPSDM	90.870.540,00	4.326.821,00	4.326.822,00	0,00	0,00	99.524.183,00
	Jumlah	579.236.064.274,61	47.217.885.606,00	49.524.893.866,00	364.521.540,00	(29.880.000,00)	676.313.485.286,61

Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp132.205.408.546,17 atau kenaikan sebesar 11,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.70 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan SKPD

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan Per 31-12- 2023	Penyesuaian/Penyusutan 2024		Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan Per 31-12-2024
			Tambah	Kurang			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.164.722.518,00	0,00	(19.600.000,00)	6.295.469.376,00	5.864.593.692,00	98.305.185.586,00
2	Dinas Kesehatan	87.184.611.657,18	0,00	0,00	6.287.391.430,12	6.158.218.852,00	99.630.221.939,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	41.741.773.913,95	0,00	(1.352.088.000,00)	1.209.484.766,05	1.146.434.156,00	42.745.604.836,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.379.783.639,61	0,00	0,00	41.831.852.449,00	44.170.858.585,00	606.382.494.673,61
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.917.870.534,00	0,00	0,00	1.797.388.123,00	1.804.426.459,00	36.519.685.116,00
6	Kantor Kesbangpol	816.390.099,00	0,00	0,00	21.835.874,00	22.620.871,00	860.846.844,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.357.074.946,00	0,00	0,00	230.246.201,00	389.073.565,00	4.976.394.712,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.967.601.212,00	0,00	(10.000.000,00)	125.909.489,00	127.806.877,00	4.211.317.578,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.594.286.717,00	0,00	0,00	1.373.493.026,00	1.333.458.752,00	25.301.238.495,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.028.419.553,00	199.386.000,00	0,00	170.660.825,00	172.391.191,00	3.570.857.569,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.272.589.871,00	0,00	0,00	130.330.611,00	123.266.442,00	2.526.186.924,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4.066.072.854,00	0,00	3.164.286,00	125.263.550,00	107.191.605,00	4.301.692.295,00
13	Dinas Perhubungan	35.646.746.485,00	0,00	(1.708.013.778,00)	1.624.715.062,00	1.628.631.167,00	37.192.078.936,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.003.780.337,00	0,00	0,00	203.572.774,00	169.172.813,00	4.376.525.924,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.018.205.119,00	0,00	0,00	93.292.984,00	102.406.856,00	3.213.904.959,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.095.401.353,00	0,00	0,00	129.427.603,00	127.098.789,00	1.351.927.745,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Akumulasi Penyusutan Per 31-12- 2023	Penyesuaian/ Penyusutan 2024		Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan Per 31-12-2024
			Tambah	Kurang			
17	Dinas Perikanan	21.985.786.835,00	0,00	0,00	501.878.285,00	510.475.729,00	22.998.140.849,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.156.747.497,00	0,00	0,00	616.679.814,00	619.546.248,00	8.392.973.559,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.494.186.091,00	0,00	0,00	656.679.588,00	650.847.085,00	20.801.712.764,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	20.537.910.222,00	0,00	0,00	2.064.197.895,00	2.064.466.599,00	24.666.574.716,00
21	Sekretariat Daerah	44.911.319.265,00	364.521.540,00	(3.319.860.570,00)	1.934.656.676,00	1.837.220.905,00	45.727.857.816,00
22	Sekretariat DPRD	8.119.376.515,00	0,00	0,00	244.825.552,00	230.365.095,00	8.594.567.162,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.205.406.199,00	0,00	0,00	23.274.790,00	23.484.605,00	1.252.165.594,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	2.595.297.549,00	0,00	0,00	76.501.596,00	75.071.556,00	2.746.870.701,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.417.489.075,00	0,00	(83.368.500,00)	61.508.587,00	65.422.426,00	1.461.051.588,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	2.063.218.409,00	0,00	0,00	60.311.425,00	66.306.300,00	2.189.836.134,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.816.791.932,00	0,00	(1.003.579.738,00)	57.698.492,00	56.525.159,00	927.435.845,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	521.180.906,00	0,00	0,00	29.027.244,00	32.301.099,00	582.509.249,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.388.047.993,00	0,00	0,00	31.085.621,00	31.153.468,00	1.450.287.082,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.248.018.902,00	0,00	0,00	46.787.195,00	47.062.407,00	1.341.868.504,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.098.156.163,00	0,00	0,00	41.083.703,00	42.917.628,00	2.182.157.494,00
32	Kecamatan Sikakap	589.135.469,00	0,00	0,00	8.858.914,00	9.657.621,00	607.652.004,00
33	Inspektorat	2.100.633.311,00	0,00	0,00	67.715.535,00	70.412.838,00	2.238.761.684,00
34	Bappeda	7.515.650.730,00	0,00	0,00	202.688.699,00	203.089.844,00	7.921.429.273,00
35	BKD	8.670.076.267,00	6.850.521	0,00	283.624.326,00	248.022.423,00	9.208.573.537,00
36	BKPSDM	4.176.562.773,00	0,00	0,00	68.289.498,00	68.289.500,00	4.313.141.771,00
TOTAL		1.012.866.322.911,74	570.758.061,00	(7.493.346.300,00)	68.727.707.578,17	70.400.289.207,00	1.145.071.731.457,91

5.3.4 Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	80.769.159.313,81	83.437.375.469,19

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp**80.769.159.313,81** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.71. Aset lainnya

Uraian	Saldo 31 Des 2023	Penyesuaian / Koreksi 2024		Saldo 31 Des 2024
	(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Tagihan Jangka Panjang	4.712.877.342,00	0,00	(39.006.063,00)	4.673.871.279,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402.790.000,00	0,00	0,00	402.790.000,00
Aset Tak Berwujud	9.065.150.876,82	315.845.000,00	(3.602.000,00)	9.377.393.876,82
Aset Lain – Lain	231.648.748.744,00	8.029.027.284,00	(894.632.236,00)	238.783.143.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Saldo 31 Des 2023	Penyesuaian / Koreksi 2024		Saldo 31 Des 2024
	(Rp)	Tambah	Kurang	(Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.403.630.051,44)	0,00	(1.319.987.075,38)	(8.723.617.126,82)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(156.658.148.442,19)	184.400.000,00	(7.270.674.065,00)	(163.744.422.507,19)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.669.587.000,00	0,00	(1.669.587.000,00)	0,00
Jumlah	83.437.375.469,19	8.529.272.284,00	(11.197.488.439,38)	80.769.159.313,81

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan Tuntutan Perbendaharaan atas kerugian negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri sebagai bendahara sebesar Rp76.650.999,00 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp4.597.220.280,00 sehingga terdapat saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.673.871.279,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri sebagai Bendahara sebesar Rp76.650.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.72 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri sebagai Bendahara

No	Uraian	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
		Per 31 Des 2023 (Rp)	(Rp)	(Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD An. ASNA (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD)	9.904.938,00	0,00	0,00	9.904.938,00
2	Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021	105.752.124,00	0,00	(39.006.063,00)	66.746.061,00
	JUMLAH	115.657.062,00	0,00	(39.006.063,00)	76.650.999,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan Perbendaharaan atas kekuarangan kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp9.904.938,00 yang belum dilunasi sampai saat ini. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas nama Asna (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 41.C/LHP/XVIII.PDG/07/2016 Tanggal 25 Juli 2016.
- b. Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 25 April 2022 atas nama Guntur Prasetyo Nugroho yang masih tersisa atau belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp66.746.061,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.936.530,00 yang merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2005 yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan merupakan hasil temuan BPK terhadap kegiatan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan DAK NON DR dan Pendamping DAK NON DR yang telah melalui proses hukum pidana atas nama Ali Arifin (mantan Plt. Kepala Dinas PU).
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp3.999.283.750,00 merupakan temuan kerugian daerah yang disebabkan oleh pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan jalan desa strategi yang terindikasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 06/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 terhadap Keputusan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dan sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-Tahun 2024 tentang Pembebanan Kerugian Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Ir. Elfi, MM, Febrinaldi, ST dan Metri Doni sesuai dengan surat perintah penyidikan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Nomor Sprin.Lidik/32/IIIds/RES.3.3/2023/ Ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, dan Pembangunan jalan desa strategis Desa Saumanganyak, kasus tersebut sudah selesai proses hukumnya sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Ir. Elfi, MM, Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Febrinaldi, ST dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 14 April 2024 an Metri Doni.

5.3.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp402.790.00,00 merupakan kerjasama pemanfaatan rumah dinas Kecamatan Siberut Utara ke Bank Nagari sesuai dengan nomor perjanjian 644.4/478/SETDA tanggal 19 Agustus 2019 jangka waktu 5 tahun dihitung mulai tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2024 dengan nilai sebesar Rp51.000.000,00. Kemitraan dengan pihak ketiga di Tahun 2024 belum ada perjanjian lanjutan karena masih menunggu proses penilaian terhadap rumah dinas tersebut oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5.3.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.377.393.876,82 terdiri dari *software* pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan jumlah *software* pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp315.845.000,00 dan adanya pengurangan sebesar (Rp3.602.000,00) reklas ke extracompactable. Rincian aset tak berwujud pada masing-masing SKPD relampir pada Lampiran 21.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4.4 Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	238.783.143.792,00	231.648.748.744,00

Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp**238.783.143.792,00** terdiri dari:

Tabel 5.3.73. Aset Lain-lain

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
		(Rp)			(Rp)
1	Aset Rusak Berat	78.914.757.353,00	8.029.027.284,00	(184.400.000,00)	86.759.384.637,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	152.733.991.391,00	0,00	(710.232.236,00)	152.023.759.155,00
	JUMLAH	231.648.748.744,00	8.029.027.284,00	(894.632.236,00)	238.783.143.792,00

1. Aset rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.759.384.637,00 mengalami penambahan sebesar Rp8.029.027.284,00 pengurangan sebesar (Rp184.400.000,00) yang ada di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.74 Aset Rusak Berat

No.	OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	940.910.157,00	0,00	0,00	940.910.157,00
2	Badan Keuangan Daerah	783.029.098,00	0,00	0,00	783.029.098,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.412.465.867,00	30.708.700,00	0,00	2.443.174.567,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	671.145.250,00	0,00	0,00	671.145.250,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	285.215.182,00	0,00	0,00	285.215.182,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.799.525,00	0,00	0,00	272.799.525,00
7	Dinas Kesehatan	7.201.558.632,00	0,00	0,00	7.201.558.632,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.742.703.625,00	0,00	0,00	2.742.703.625,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.155.000,00	0,00	0,00	51.155.000,00
10	Dinas Koperasi Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.615.373.350,00	0,00	0,00	1.615.373.350,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	366.336.260,00	0,00	0,00	366.336.260,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan	1.745.203.200,00	37.500.000,00	(4.400.000,00)	1.778.303.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	Olahraga				
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.983.569.061,00	0,00	0,00	4.983.569.061,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.115.154.100,00	0,00	0,00	1.115.154.100,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.269.692,00	0,00	0,00	104.269.692,00
16	Dinas Pendidikan	6.437.678.515,00	0,00	0,00	6.437.678.515,00
17	Dinas Perhubungan	3.102.657.287,00	1.762.317.258,00	0,00	4.864.974.545,00
18	Dinas Perikanan	2.789.004.028,00	0,00	0,00	2.789.004.028,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	692.515.056,00	10.000.000,00	0,00	702.515.056,00
21	Inspektorat	768.545.700,00	0,00	0,00	768.545.700,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	980.666.562,00	0,00	(180.000.000,00)	800.666.562,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	919.254.075,00	39.600.000,00	0,00	958.854.075,00
24	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.174.525.200,00	1.096.442.241,00	0,00	2.270.967.441,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	889.724.503,00	14.575.000,00	0,00	904.299.503,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.341.602.195,00	0,00	0,00	1.341.602.195,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.199.223.175,00	0,00	0,00	1.199.223.175,00
30	Kecamatan Sikakap	1.392.438.820,00	0,00	0,00	1.392.438.820,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	480.806.450,00	0,00	0,00	480.806.450,00
32	Kecamatan Sipora Utara	1.627.181.979,00	83.368.500,00	0,00	1.710.550.479,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	1.382.981.485,00	1.352.088.000,00	0,00	2.735.069.485,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.342.841.020,00	0,00	0,00	1.342.841.020,00
35	Sekretariat Daerah	24.122.786.692,00	3.113.624.049,00	0,00	27.236.410.741,00
36	Sekretariat DPRD	2.269.785.467,00	488.803.536,00	0,00	2.758.589.003,00
Total		78.914.757.353,00	8.029.027.284,00	(184.400.000,00)	86.759.384.637,00

Pada Tahun 2024 terdapat penambahan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp8.029.027.284,00 dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi tambah dari kondisi sebelumnya aset hilang yang telah ditemukan menjadi aset rusak berat sebesar Rp30.708.700,00, berupa sepeda motor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Koreksi tambah dari kondisi sebelumnya aset hilang yang telah ditemukan menjadi aset rusak berat sebesar Rp37.500.000,00, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp1.762.317.258,00, berupa Kapal Kaya Penumpang (KM Simatalu), Printer, Sepeda Motor, dan Personal Komputer pada Dinas Perhubungan.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp10.000.000,00, berupa sepeda motor pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp18.000.000,00, berupa personal komputer pada Kecamatan Pagai Selatan.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp1.096.442.241,00, berupa mobil, sepeda motor, alat rumah tangga lainnya, motor boat, personal komputer dan lain-lain pada Kecamatan Siberut Barat Daya.
- Koreksi tambah dari kondisi sebelumnya aset hilang yang telah ditemukan menjadi aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp14.575.000,00, berupa global positioning system (gps) pada Kecamatan Siberut Selatan.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp83.368.500,00, berupa sepeda motor, lemari kaca, meja kerja pejabat dan kursi kerja pada Kecamatan Sipora Utara.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp1.352.088.000,00 berupa alat kedokteran THT pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Koreksi tambah dari aset tetap ke aset rusak berat karena ada perubahan status sebesar Rp3.113.624.049,00, berupa mini bus, kapal motor, dump truck, mesin ketik, kursi kerja, sepeda motor, alat pendingin, alat rumah tangga, alat kantor lainnya, GPS, dan personal computer pada Sekretariat Daerah.
- Koreksi tambah dari kondisi sebelumnya aset hilang dan aset dalam penelusuran yang telah ditemukan menjadi rusak berat sebesar Rp488.803.536,00, pada Sekretariat DPRD.

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak berat sebesar Rp184.400.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Koreksi kurang dari rusak berat ke extracomtable sebesar Rp4.400.000,00, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Koreksi kurang dari rusak berat berupa minibus penumpang sebesar Rp180.000.000,00, karena double pencatatan pada Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Tahun 2024 sebesar Rp152.023.759.155,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp152.733.991.391,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.75 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Perumahan KM.2	3.900.000.000,00	0,00	0,00	3.900.000.000,00
2	Dana Bergulir	99.045.000,00	0,00	(99.045.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
3	Hibah	137.540.599.987,00	0,00	0,00	137.540.599.987,00
4	Aset Dalam Penelusuran	8.804.210.408,00	0,00	(40.000,00)	8.804.170.408,00
5	Aset Hilang (TGR)	179.813.700,00	0,00	(122.383.700,00)	57.430.000,00
6	Dikuasi oleh pihak ketiga	2.210.322.296,00	0,00	(488.763.536,00)	1.721.558.760,00
	JUMLAH	152.733.991.391,00	0,00	(710.232.236,00)	152.023.759.155,00

Dari uraian tabel di atas terdapat penambahan sebesar Rp0,00 dan Pengurangan sebesar (Rp611.187.236,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sebesar Rp3.900.000.000,00 yang merupakan penyajian Investasi berupa pembangunan perumahan/pemukiman PNS/Swasta dan DPRD di Km 2 Tuapejat Sipora ke aset lain-lain, sampai dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas perjanjian tersebut dapat ditentukan sejak tahun 2014.
Terhadap aset tersebut telah dibuat surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab Kep Mentawai dengan PT Satria Muda Manugraha tentang penyelesaian pemulihan penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan PNS/Swasta dan DPRD kab kepulauan Mentawai yang berlokasi di Jalan Raya KM 2 Desa Tuapejat, Nomor 900.1.11.4/137.1SETDA-2024 tanggal 6 Maret tahun 2024.
- Pada tahun 2023 terdapat aset lainnya sebesar Rp99.045.000,00 sebelumnya merupakan Dana bergulir pada Dinas Perikanan sebesar Rp70.295.000,00 yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk mesin 15 PK dan fiber penangkap ikan. Penerima kredit adalah masyarakat yang bergerak di bidang penangkapan ikan dilaut sebanyak 31 orang. Atas nilai sebesar Rp70.295.000,00 diperkirakan tidak dapat tertagih seluruhnya yang disajikan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain, namun terhadap aset tersebut telah dihibahkan kepada kelompok nelayan Purimanuaijat senilai Rp30.775.000,00 dan kelompok nelayan Kato Saiyo senilai Rp39.520.000,00 dengan Naskah Perjanjian Hibah DAerah (NPHD) tanggal 22 Juni 2024 antara kepala Dinas Perikanan dan Ketua kelompok Nelayan dan aset lainnya senilai Rp28.750.000,00 merupakan investasi dana bergulir non permanen dalam bentuk sapi yang dimulai Tahun 2005 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan di Aset Lainnya karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir bahwa karakteristik dana bergulir adalah berupa uang, bukan berupa barang dan terhadap dana bergulir tersebut sudah dilakukan penghapusan dengan Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penghapusan investasi dana bergulir non permanen dalam bentuk sapi dari daftar barang pengguna dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 3 Juli 2024 .
- Hibah sebesar Rp137.540.599.987,00 per 31 Desember 2023 belum ada perubahan nilai sampai sekarang atas 2 OPD yang masih tahap proses dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.76 Hibah

No	Dinas	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.477.800.000,00	0,00	0,00	1.477.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.062.799.987,00	0,00	0,00	136.062.799.987,00
	SUB TOTAL	137.540.599.987,00	0,00	0,00	137.540.599.987,00

Dari rincian aset hibah ini dapat diterangkan bahwa dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih dalam tahap proses hibah berupa status Jalan Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum, dikarenakan bahwa sampai dengan ini Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih meneliti atas pencatatan aset Jalan, Jembatan beserta dengan Tanahnya.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan ini berupa pengalihan pencatatan aset yang masih tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya sudah dialihkan pencatatannya Dimana hal ini menjadi kendala pihak Dinas Pendidikan untuk mencari keberadaan aset tersebut berupa gedung dan bangunan Taman Kanak-kanak atau PAUD di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dihibahkan.

- d. Aset dalam penelusuran sebesar Rp 8.804.170.408,00 per 31 Desember 2023 belum ada perubahan yang signifikan nilainya sampai sekarang atas beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.77 Aset dalam Penelusuran

No	SKPD	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	152.933.477,00	0,00	0,00	152.933.477,00
2	Badan Keuangan Daerah	267.644.462,00	0,00	0,00	267.644.462,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	117.166.050,00	0,00	0,00	117.166.050,00
4	Dinas Kesehatan	462.069.900,00	0,00	0,00	462.069.900,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.604.700,00	0,00	0,00	36.604.700,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.207.000,00	0,00	0,00	279.207.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	298.752.560,00	0,00	0,00	298.752.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	Dinas Pendidikan	746.250.000,00	0,00	0,00	746.250.000,00
11	Dinas Perikanan	448.413.576,00	0,00	0,00	448.413.576,00
12	Kecamatan Siberut Barat Daya	255.958.588,00	0,00	0,00	255.958.588,00
13	Kecamatan Siberut Utara	145.070.000,00	0,00	0,00	145.070.000,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	11.775.180,00	0,00	0,00	11.775.180,00
15	Sekretariat Daerah	5.323.223.785,00	0,00	0,00	5.323.223.785,00
16	Sekretariat DPRD	239.341.130,00	0,00	(40.000,00)	239.301.130,00
	Total	8.804.210.408,00	0,00	(40.000,00)	8.804.170.408,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aset dalam penelusuran ada pengurang di Sekretariat DPRD sebesar Rp40.000,00. Aset dalam penelusuran belum mengalami penurunan yang signifikan di Tahun 2024. Harapan dari bidang aset dalam penelusuran ini bisa dapat dihapus nantinya berupa berupa dokumen-dokumen yang dipersiapkan dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku dalam proses penghapusannya.

- e. Realisasi Aset Lain-lain berupa aset hilang (TP-TGR) pada Tahun 2024 sebesar Rp57.430.000,00 terdapat pengurangan sebesar Rp122.383.700,00 dimana ada barang yang telah ditemukan tetapi kondisi barang tersebut sudah rusak berat maka terjadi reklasifikasi aset hilang ke aset rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.76 Aset Hilang

No.	SKPD	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.708.700,00	0,00	(30.708.700,00)	0,00
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	0,00
3	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
4	Kecamatan Pagai Selatan	39.600.000,00	0,00	(39.600.000,00)	0,00
5	Kecamatan Siberut Barat Daya	14.575.000,00	0,00	(14.575.000,00)	0,00
6	Sekretariat Daerah	7.930.000,00	0,00	0,00	7.930.000,00
	Total	179.813.700,00	0,00	(122.383.700,00)	57.430.000,00

Penjelasan pengurangan aset hilang telah dijelaskan pada aset rusak berat.

- f. Begitu juga dengan aset lain-lainnya yang Dikuasi Pihak Ketiga pada tahun 2024 sebesar Rp1.721.558.760,00 belum ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian aset ini sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.77 Aset yang dikuasai Pihak Ketiga

No.	SKPD	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat Daerah	1.389.362.500,00	0,00	0,00	1.389.362.500,00
2	Sekretariat DPRD	820.959.796,00	0,00	(488.763.536,00)	332.196.260
	Total	2.210.322.296,00	0,00	(488.763.536,00)	1.721.558.760,00

- 1) Rincian aset yang dikuasai Pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.389.362.500,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.78 Aset yang dikuasai Pihak ke 3 pada Sekretariat Daerah

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Pihak Ke 3 (Tiga)
1	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kodim
2	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Polres
3	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Kejari
4	Mini Bus	Nissan	2012	318.956.250,00	Lanal
5	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
6	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Lanal
7	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
8	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Kodim
9	Sepeda Motor	Yamaha	2014	22.707.500,00	Polres
	Jumlah			1.389.362.500,00	

- 2) Rincian aset yang dikuasai pihak ke 3 (tiga) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.389.362.500,00. Rincian aset ini sebagai berikut:

Tabel 5.3.79 Aset yang dikuasai Pihak ke 3 pada Sekretariat DPRD

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Pihak Ke 3 (Tiga)
				(Rp)	
1	Sepeda Motor	Honda Supra / Honda Supra	2001	127.678.650,00	Anggota DPRD
2	Sepeda Motor	Honda Supra / Honda Supra	2001	11.607.150,00	Anggota DPRD
3	Sepeda Motor	Honda Supra / Honda Supra	2001	11.607.150,00	Anggota DPRD
4	Sepeda Motor	Turbo / Strong X	2003	10.500.000,00	Anggota DPRD
5	Sepeda Motor	Honda Kharisma / Honda Kharisma	2004	11.627.310,00	Anggota DPRD
6	Sepeda Motor	Honda Kharisma / Honda Kharisma	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
7	Sepeda Motor	Honda Kharisma / Honda Kharisma	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
8	Sepeda Motor	Honda Kharisma / Honda Kharisma	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
9	Sepeda Motor	Honda Kharisma / Honda Kharisma	2004	15.594.000,00	Anggota DPRD
10	Perahu Penumpang	Lokal / Body Boat	2013	48.400.000	Anggota DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Pihak Ke 3 (Tiga)
				(Rp)	
11	Perahu Penumpang	Lokal / Body Boat	2013	48.400.000	Anggota DPRD
	Jumlah			332.196.260,00	

5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud berupa *software* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar (Rp8.723.617.126,82) dengan rinciannya Akumulasi Aset Tak Berwujud pada lampiran 22.

Rekapitulasi akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.80 Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud

No	Nama Dinas	Saldo	Saldo
		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419.760.000,00	419.760.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	526.020.000,00	526.020.000,00
3	Dinas Kesehatan	186.664.000,00	167.636.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.700.000,00	59.700.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.655.000,00	138.655.000,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	49.500.000,00	49.500.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	141.460.000,00	141.460.000,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	404.940.000,00	385.540.000,00
9	Sekretariat Daerah	839.700.000,00	839.700.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.681.277.626,82	2.720.143.801,44
11	Badan Keuangan Daerah	1.421.301.500,00	1.127.738.250,00
12	Inspektorat	53.724.000,00	26.862.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	443.880.000,00	443.880.000,00
14	Kecamatan Siberut Utara	97.295.000,00	97.295.000,00
15	Siberut Barat Daya	49.500.000,00	49.500.000,00
16	Kecamatan Sipora Utara	49.500.000,00	49.500.000,00
17	Kecamatan Pagai Selatan	64.790.000,00	64.790.000,00
18	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	95.950.000,00	95.950.000,00
	Jumlah	8.723.617.126,82	7.403.630.051,44



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan penyusutan atas aset lainnya karena penggunaan sesuai dengan masa manfaatnya. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp163.744.422.507,19 dan Tahun 2023 Rp156.658.148.442,19. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2024 terdiri dari akumulasi penyusutan atas aset kondisi rusak, aset dalam penelusuran, dikuasai pihak ke 3 (tiga), mutasi, hibah dan perkiraan penyisihan tidak tertagih atas aset lain-lain dana bergulir sebesar Rp99.045.000,00. Rincian penyusutan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.3.81. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			(Rp)	(Rp)	
1	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.093.843.634,00	0,00	0,00	1.093.843.634,00
2	Badan Keuangan Daerah	1.032.907.654,75	0,00	0,00	1.032.907.654,75
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.433.878.408,00	0,00	0,00	2.433.878.408,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	788.311.300,00	0,00	0,00	788.311.300,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	285.044.453,00	0,00	0,00	285.044.453,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	266.835.275,00	0,00	0,00	266.835.275,00
7	Dinas Kesehatan	7.663.628.532,00	0,00	0,00	7.663.628.532,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.545.632.665,00	0,00	0,00	2.545.632.665,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.623.750,00	0,00	0,00	24.623.750,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.607.106.059,00	0,00	0,00	1.607.106.059,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.327.902,14	0,00	0,00	143.327.902,14
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.742.355.971,00	0,00	(4.400.000,00)	1.737.955.971,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.359.705.879,00	0,00	0,00	73.359.705.879,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1.132.954.100,00	0,00	0,00	1.132.954.100,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.269.692,00	0,00	0,00	104.269.692,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.985.452.754,30	0,00	0,00	6.985.452.754,30
17	Dinas Perhubungan	2.905.609.287,00	1.708.013.778,00	0,00	4.613.623.065,00
18	Dinas Perikanan	3.286.807.104,00	0,00	0,00	3.286.807.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal Saldo Per 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			(Rp)	(Rp)	
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	988.219.990,00	10.000.000,00	0,00	998.219.990,00
20	Inspektorat	768.545.700,00	0,00	0,00	768.545.700,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	968.228.962,00	0,00	(180.000.000,00)	788.228.962,00
22	Kecamatan Pagai Selatan	958.854.075,00	0,00	0,00	958.854.075,00
23	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
24	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
25	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.420.517.788,00	1.003.579.738,00	0,00	2.424.097.526,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	896.138.003,00	0,00	0,00	896.138.003,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	1.332.328.403,00	0,00	0,00	1.332.328.403,00
28	Kecamatan Siberut Utara	1.377.091.509,00	0,00	0,00	1.377.091.509,00
29	Kecamatan Sikakap	1.375.964.940,00	0,00	0,00	1.375.964.940,00
30	Kecamatan Sipora Selatan	479.495.618,00	0,00	0,00	479.495.618,00
31	Kecamatan Sipora Utara	1.570.429.392,00	83.368.500,00	0,00	1.653.797.892,00
32	Rumah Sakit Umum Daerah	1.374.824.665,00	1.352.088.000,00	0,00	2.726.912.665,00
33	Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	1.342.841.020,00	0,00	0,00	1.342.841.020,00
34	Sekretariat Daerah	30.367.279.277,00	3.113.624.049,00	0,00	33.480.903.326,00
35	Sekretariat DPRD	3.325.443.535,00	0,00	0,00	3.325.443.535,00
	Jumlah	156.658.148.442,19	7.270.674.065,00	(184.400.000,00)	163.744.422.507,19

5.3.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*

Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.669.587.000,00 merupakan penyaluran Dana TDF ke Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan nomor: S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024.

5.3.5 Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.119.612.553,28	679.288.347,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.119.612.553,28 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.82. Kewajiban

No.	Uraian	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	1.119.612.553,28	679.288.347,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	1.119.612.553,28	679.288.347,00

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.119.612.553,28	679.288.347,00

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.482.566,00 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek Bendahara Umum Daerah berupa potongan Potongan Tabungan Perumahan bulan Januari 2021 sebesar Rp240.023.972,00 yang belum disetor karena tidak ada pos / rekening tempat setorannya dan Utang Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp10.458.594,00 pada Sekretariat Daerah yang telah disetor tanggal 10 Februari 2025.
- Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.833.333,33 merupakan sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Menara telekomunikasi bersama dan fasilitas menunjangnya antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK nomor kontrak: 000.1.3.3/55/BKD tanggal 28 Februari 2024, selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 September 2022 s/d 28 September 2027 dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00.
- Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp814.296.653,95 merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :
 - Utang pada pihak ketiga CV. PRIADI SABENA atas pekerjaan Docking KM. SUBBULAT Tahun 2006 untuk pembayaran 95% belum terealisasi disebabkan terjadinya kesalahan pembayaran pada mata anggaran penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp361.475.000,00 kegiatan pemeliharaan Kapal Pemda pada Dinas Perhubungan yang belum dibayarkan hingga Tahun 2024 dikarenakan dasar pembayarannya belum kuat dan dokumen pendukung untuk pencairan anggaran tidak ada sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat membayarnya.
 - Utang belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung yang belum selesai Tahun 2024 sebesar Rp399.750.960,00 merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perhubungan yang tidak terbayar pada akhir Tahun 2024
 - Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp30.030.188,70 pada Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disetor pada tanggal 3 Januari 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp505,25 yang telah disetor pada tanggal 29 April 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp23.040.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetor pada tanggal 15 Januari 2025.

5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 bernilai Rp0,00.

5.3.6 Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89

Ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2024. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.154.605.040.604,24.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

B. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Definisi

1. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Surplus/defisit adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	901.555.610.851,19	879.679.571.495,21

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 menunjukkan Pendapatan-LO masing-masing sebesar Rp901.555.610.851,19 dan Rp879.679.571.495,21.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	53.718.125.567,19	48.298.281.365,21

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp53.718.125.567,19 dan tahun 2023 sebesar Rp48.298.281.365,21. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah -LO dengan Pendapatan Asli Daerah -LRA sebagai berikut:

Tabel 5.4.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		
1	Pajak Hotel-LO	2.642.993.978,15	2.642.993.978,15
2	Pajak Restoran-LO	1.622.892.256,09	1.655.196.756,09
3	Pajak Hiburan-LO	17.941.845,00	17.941.845,00
4	Pajak Reklame-LO	1.498.500,00	1.498.500,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.243.304.399,00	2.243.304.399,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam-LO	15.954.800,00	15.954.800,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	1.060.755.040,00	563.854.689,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.971.816.300,00	1.971.816.300,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	32.304.500,00	0,00
	Jumlah	9.609.461.618,24	9.112.561.267,24
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Jasa Umum-LO	4.739.336.464,00	4.497.194.609,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.535.234.000,00	10.535.234.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	334.819.964,00	334.819.964,00
	Jumlah	15.609.390.428,00	15.367.248.573,00
	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
1	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD-LO	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00
Jumlah		16.476.655.254,00	16.476.655.254,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO	0,00	0,00
2	Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	26.800.000,00	100.000.000,00
3	Jasa Giro	1.678.192.155,00	1.678.192.155,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.118.315.268,29	4.119.080.290,29
5	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain-LO	427.447.930,07	427.447.930,07
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.416.356.432,34	2.416.356.432,34
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	54.296.904,00	54.296.904,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	2.564.104.408,25	2.564.104.408,25
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	737.105.169,00	737.105.169,00
Jumlah		12.022.618.266,95	12.096.583.288,95
TOTAL		53.718.125.567,19	53.053.048.383,19

Perbandingan antara pendapatan asli daerah antara LRA dan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2. Perbandingan Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pajak Daerah-LO	9.112.561.267,24	774.451.945,00	(277.551.594,00)	9.609.461.618,24	496.900.351,00
2	Retribusi Daerah-Lo	15.367.248.573,00	242.141.855,00	0,00	15.609.390.428,00	242.141.855,00
3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang tidak Dipisahkan	16.476.655.254,00	0,00	0,00	16.476.655.254,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.096.583.288,95	6.800.000,00	(80.765.022,00)	12.022.618.266,95	(73.965.022,00)
Jumlah		53.053.048.383,19	1.023.393.800,00	(358.316.616,00)	53.718.125.567,19	665.077.184,00

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat selisih Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA sebesar Rp665.077.184,00 merupakan penambahan dan Pengurangan pada pendapatan pajak Daerah sebesar Rp496.900.351,00, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp242.141.855,00 dan pengurangan Lain-lain PAD yang sah sebesar (Rp73.965.022,00) sebagaimana uraian pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Pendapatan Pajak Daerah –LO

Tabel 5.4.3. Perbandingan Antara Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pajak Daerah-LO

No	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	2.642.993.978,15	0,00	0,00	2.642.993.978,15	0,00
2	Pajak restoran-LO	1.655.196.756,09	0,00	(32.304.500,00)	1.622.892.256,09	(32.304.500,00)
3	Pajak Hiburan-LO	17.941.845,00	0,00	0,00	17.941.845,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	1.498.500,00	0,00	0,00	1.498.500,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.243.304.399,00	0,00	0,00	2.243.304.399,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Mieral Bukan Logam dan Batuan -LRA	15.954.800,00	0,00	0,00	15.954.800,00	0,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	563.854.689,00	717.268.164,00	(220.367.813,00)	1.060.755.040,00	496.900.351,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanag dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.971.816.300,00	0,00	0,00	1.971.816.300,00	0,00
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	0,00	32.304.500,00	0,00	32.304.500,00	32.304.500,00
Jumlah		9.112.561.267,24	749.572.664,00	(252.672.313,00)	9.609.461.618,24	496.900.351,00

Pada tabel dapat dilihat perbedaan pendapatan pajak daerah – LRA dan pendapatan pajak daerah-LO merupakan pengurangan pajak daerah sebesar (Rp252.672.313,00) terdiri dari pajak restoran sebesar (Rp32.304.500,00) dan Pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar (Rp220.367.813,00) serta terdapat penambahan pajak daerah sebesar Rp749.572.664,00 yang terdiri dari penambahan saldo pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp717.268.164,00 dan penambahan saldo PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp32.304.500,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Berikut rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.4. Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	4.497.194.609,00	242.141.855,00	0,00	4.739.336.464,00	242.141.855,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.535.234.000,00	0,00	0,00	10.535.234.000,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	334.819.964,00	0,00	0,00	334.819.964,00	0,00
	Jumlah	15.367.248.573,00	242.141.855,00	0,00	15.609.390.428,00	242.141.855,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dari tabel tersebut diatas terdapat selisih beban pendapatan retribusi daerah-LO dan belanja pendapatan retribusi-LRA sebesar Rp242.141.855,00, selisih tersebut merupakan penambahan saldo awal piutang retribusi jasa umum yang tak tertagih sebesar Rp242.141.855,00.

c. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 5.4.5. Perbandingan Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan LO

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	16.476.655.254,00	0	0	16.476.655.254,00	0,00
	Jumlah	16.476.655.254,00	0	0	16.476.655.254,00	0,00

Dari tabel pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada Bank Nagari Cabang Mentawai Tahun 2024 antara LO dan LRA tidak terdapat selisih.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 5.4.5-2. Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara LRA dan LO

NO	URAIAN	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	100.000.000,00	6.800.000,00	(80.000.000,00)	26.800.000,00	(73.200.000,00)
3	Jasa Giro-LO	1.678.192.155,00	0,00	0,00	1.678.192.155,00	0,00
4	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO	4.119.080.290,29	0,00	(765.022,00)	4.118.315.268,29	(765.022,00)
5	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain-LO	427.447.930,07	0,00	0,00	427.447.930,07	0,00
6	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO	2.416.356.432,34	0,00	0,00	2.416.356.432,34	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	54.296.904,00	0,00	0,00	54.296.904,00	0,00
8	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-LO	2.564.104.408,25	0,00	0,00	2.564.104.408,25	0,00
9	Pendapatan dari pengembalian-LO	737.105.169,00	0,00	0,00	737.105.169,00	0,00
	Jumlah	12.096.583.288,95	6.800.000,00	(80.765.022,00)	12.022.618.266,95	(73.965.022,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA senilai (Rp73.965.022,00). Selisih tersebut merupakan pengurangan saldo pendapatan hasil sewa dibayar dimuka BMD sebesar (Rp73.200.000,00) berupa sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi bersama dan fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK Nomor kontrak: 000.1.3.3/55/BKD tanggal 28 Februari 2024, pengurangan Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah berupa pengembalian saldo rekening giro dana bos SD dan SMP sebesar (Rp765.022,00).

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	821.697.658.024,00	820.298.761.084,00

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp821.697.658.024,00 dan tahun 2023 sebesar Rp820.298.761.084,00 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024

NO	Uraian	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO			
1	Dana Perimbangan-LO	751.416.175.442,00	756.544.364.389,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	19.459.955.000,00
3	Insentif Fiskal-LO	20.978.611.000,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00
	Jumlah	772.394.786.442,00	776.004.319.389,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	49.302.871.582,00	42.634.441.695,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00	1.660.000.000,00
	Jumlah	49.302.871.582,00	44.294.441.695,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO		821.697.658.024,00	820.298.761.084,00

1) Pendapatan Dana Transfer Pusat – LO tahun 2024 dari Dana Perimbangan terdiri dari:

Tabel 5.4.7. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024

NO	Uraian	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	15.162.656.814,00	19.852.823.305,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	593.136.045.604,00	569.588.001.480,00
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	60.558.056.051,00	89.054.044.924,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	82.559.416.973,00	78.049.494.680,00
Jumlah		751.416.175.442,00	756.544.364.389,00

- 2) Pendapatan Dana Transfer Pusat dari Dana Insentif Daerah –LO Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat Dana Transfer Pusat – DID sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2023 terdapat DID sebesar Rp19.459.955.000,00.
- 3) Tahun 2024 pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat alokasi dana transfer pusat berupa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp20.978.611.000,00 sedang kan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
- 4) Pada tahun 2024 juga terdapat Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp47.145.094.237,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp44.294.441.695,00 sebagaimana dijelaskan pada bagian pendapatan transfer antar daerah -LRA.

Perbandingan antara Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

Tabel 5.4.8. Perbandingan antara Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO						
1	Dana Perimbangan	753.085.762.442,00	0,00	(1.669.587.000,00)	751.416.175.442,00	(1.669.587.000,00)
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Desa	46.496.234.000,00	0,00	(46.496.234.000,00)	0,00	(46.496.234.000,00)
4	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	0,00	0,00	20.978.611.000,00	0,00
	Jumlah	820.560.607.442,00	0,00	(48.165.821.000,00)	772.394.786.442,00	(48.165.821.000,00)
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH -LO						
1	Pendapatan Bagi hasil Pajak -LO	43.907.408.501,00	17.281.034.849,00	(11.885.571.768,00)	49.302.871.582,00	5.395.463.081,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	43.907.408.501,00	17.281.034.849,00	(11.885.571.768,00)	49.302.871.582,00	5.395.463.081,00
	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	864.468.015.943,00	17.281.034.849,00	(60.051.392.768,00)	821.697.658.024,00	(42.770.357.919,00)

Pada pendapatan transfer terdapat selisih pendapatan Dana Perimbangan-LRA dengan Pendapatan Dana Perimbangan-LO sebagai berikut:

1. Pengurangan pendapatan bagi hasil Dana *Treasury Deposit Facilty* (TDF-TKD) yang telah diakui sebagai pendapatan pada tahun 2023 yang sudah disalurkan ke Rekening



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas Umum Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan nomor: S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebesar (Rp1.669.587.000,00).

2. Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Non Anggaran), yang dananya langsung ditransfer dari pemerintah pusat (RKUN) ke Rekening masing-masing Pemerintah Desa (RKD) sebesar (Rp46.496.234.000,00).
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO berkurang sebesar Rp11.885.571.768,00 yang telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah di Tahun 2024 sedangkan pendapatan bagi hasil pajak-LO Tahun 2024 bertambah sebesar (Rp17.281.034.849,00) yang merupakan kekurangan salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.760.421.079,00.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.429.450.192,00.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp12.037.929.689,00
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp53.233.889,00.

5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		26.139.827.260,00	11.082.529.046,00

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp26.139.827.260,00 dan tahun 2023 sebesar Rp11.082.529.046,00 sebagai berikut:

Tabel 5.4.9. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	18.194.804.877,00	4.067.960.314,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.945.022.383,00	7.014.568.732,00
Jumlah		26.139.827.260,00	11.082.529.046,00

Perbandingan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.4.10. Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA

No.	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	18.194.804.877,00	18.194.804.877,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	7.945.022.383,00	7.945.022.383,00	0,00
Jumlah		7.945.022.383,00	26.139.827.260,00	18.194.804.877,00

1) Perbedaan antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp18.194.804.877,00 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah dari Kementerian Jaringan Transmisi lain-lain Tahun 2023 sesuai Hibah BMN No. 07/NH/03.04/SDE/2023 TgL 24 Januari 2023, BAST Pihak I No. 07/BAST/BN.07/KPB/2023, Pihak II No. 032/02/SETDA, Tgl. 25 Januari 2023 sebesar Rp14.216.340.071,00 pada Sekretariat Daerah.
- Pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp847.830.800,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pendapatan Hibah dari pemerintah daerah berupa obat-obatan dari Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.817.513.706,00 pada Dinas Kesehatan.
- Pendapatan hibah tanah dari Desa untuk bangunan sekolah Rp90.690.300,00 pada Dinas Pendidikan.
- Pendapatan Hibah Peralatan dan mesin dari Kementerian Perpustakaan senilai Rp216.750.000,00 terdiri dari mebel senilai Rp84.490.000,00, personal komputer senilai Rp78.860.000,00 dan alat kantor lainnya Rp53.400.000,00.
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan berupa Hibah Tanah dari Masyarakat senilai Rp5.680.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.

2) Sedangkan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang langsung masuk ke Rekening Puskesmas sebesar Rp7.945.022.383,00, untuk pencatatannya tidak terdapat perbedaan antara LO dan LRA.

Rincian Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.11 Rincian Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

No.	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	14.433.090.071,00	0,00	14.433.090.071,00	14.433.090.071,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	3.756.034.806,00	0,00	3.756.034.806,00	3.756.034.806,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok	0,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	5.680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	Masyarakat/Perorangan					
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.945.022.383,00	0,00	0,00	7.945.022.383,00	0,00
Jumlah		7.945.022.383,00	18.194.804.877,00	0,00	26.139.827.260,00	18.194.804.877,00

5.4.2 Beban – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	878.789.720.284,98	818.070.598.467,34

Beban-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp878.789.720.284,98 dan Tahun 2023 sebesar Rp818.070.598.467,34. Beban-LO pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.12. Beban-LO

No	URAIAN	BEBAN - LO 2024	BEBAN - LO 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	672.835.688.284,43	621.846.939.763,34	50.988.748.521,09	8,20
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.447.983.860,55	134.707.134.318,00	5.740.849.542,55	4,26
3	Beban Transfer	64.480.186.519,00	60.597.292.380,00	3.882.894.139,00	6,41
4	Beban Tidak Terduga	1.025.861.621,00	919.232.006,00	106.629.615,00	11,60
	Jumlah	878.789.720.284,98	818.070.598.467,34	60.719.121.817,64	7,42

1. Beban Operasi

Beban Operasi – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp672.835.688.284,43 yang terdiri dari:

Tabel 5.4.13. Beban Operasi-LO

No	URAIAN	BEBAN - LO 2024	BEBAN - LO 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pegawai	331.088.804.278,00	274.844.651.251,00	56.244.153.027,00	20,46
2	Beban Barang dan Jasa	297.816.984.656,07	317.601.602.138,68	(19.784.617.482,61)	(6,23)
3	Beban Subsidi	7.208.422.603,00	7.585.855.000,00	(377.432.397,00)	(4,98)
4	Beban Hibah	35.433.087.998,00	20.591.050.126,00	14.842.037.872,00	72,08
5	Beban Bantuan Sosial	941.555.840,00	980.807.665,00	(39.251.825,00)	(4,00)
6	Beban Penyisihan Piutang	346.832.909,36	242.973.582,66	103.859.326,70	42,75
	Jumlah	672.835.688.284,43	621.846.939.763,34	50.988.748.521,09	8,20



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Beban Pegawai-LO

Pengakuan beban pegawai-LO Tahun 2024 sebesar Rp331.088.804.278,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Beban Pegawai-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	207.465.088.650,00	167.702.800.670,00	39.762.287.980,00	23,71
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	63.597.099.293,00	56.382.292.934,00	7.214.806.359,00	12,80
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	50.869.096.132,00	41.549.203.300,00	9.319.892.832,00	22,43
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.589.443.239,00	8.708.754.347,00	(119.311.108,00)	(1,37)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	77.364,00	0,00	77.364,00	100,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	567.999.600,00	501.600.000,00	66.399.600,00	13,24
JUMLAH		331.088.804.278,00	274.844.651.251,00	56.244.153.027,00	20,46

Tidak terdapat selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.15 Selisih Antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA

No	Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	207.465.088.650,00	207.465.088.650,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	63.597.099.293,00	63.597.099.293,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	50.869.096.132,00	50.869.096.132,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.589.443.239,00	8.589.443.239,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH- LO	77.364,00	77.364,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	567.999.600,00	567.999.600,00	0,00
JUMLAH		331.088.804.278,00	331.088.804.278,00	0,00

Beban pegawai-LO per rincian objek tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Beban Pegawai-LO Per Rincian Objek Tahun 2024

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	207.465.088.650,00	207.465.088.650,00	0,00
1.1	Beban Gaji Pokok ASN	156.571.034.958,00	156.571.034.958,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	14.243.830.207,00	14.243.830.207,00	0,00
1.3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.729.220.000,00	3.729.220.000,00	0,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	10.350.486.000,00	10.350.486.000,00	0,00
1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.031.690.000,00	2.031.690.000,00	0,00
1.6	Beban Tunjangan Beras ASN	8.796.784.980,00	8.796.784.980,00	0,00
1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	539.442.811,00	539.442.811,00	0,00
1.8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.194.350,00	2.194.350,00	0,00
1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.937.518.880,00	9.937.518.880,00	0,00
1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	315.722.394,00	315.722.394,00	0,00
1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	947.164.070,00	947.164.070,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	63.597.099.293,00	63.597.099.293,00	0,00
2.1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.645.367.195,00	31.645.367.195,00	0,00
2.2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.527.349.184,00	1.527.349.184,00	0,00
2.3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	499.452.713,00	499.452.713,00	0,00
2.4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	29.924.930.201,00	29.924.930.201,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.869.096.132,00	50.869.096.132,00	0,00
3.1	Beban Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.063.331.900,00	18.063.331.900,00	0,00
3.2	Beban Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.379.403.600,00	16.379.403.600,00	0,00
3.3	Beban Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	821.500.000,00	821.500.000,00	0,00
3.4	Beban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			0,00
3.5	Beban Belanja Honorarium	3.961.695.900,00	3.961.695.900,00	0,00
3.6	Beban Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
3.7	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.731.658.832,00	1.731.658.832,00	0,00
3.8	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	8.866.005.900,00	8.866.005.900,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.9	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.045.500.000,00	1.045.500.000,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.589.443.239,00	8.589.443.239,00	0,00
4.1	Beban Belanja Uang Representasi DPRD	445.095.000,00	445.095.000,00	0,00
4.2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	33.482.421,00	33.482.421,00	0,00
4.3	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.462.860,00	49.462.860,00	0,00
4.4	Beban Belanja Uang Paket DPRD	38.062.500,00	38.062.500,00	0,00
4.5	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	645.387.750,00	645.387.750,00	0,00
4.6	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	51.125.550,00	51.125.550,00	0,00
4.7	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
4.8	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.488.500.000,00	2.488.500.000,00	0,00
4.9	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD	388.500.000,00	388.500.000,00	0,00
4.10	Beban Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.203.130,00	5.203.130,00	0,00
4.11	Beban Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
4.12	Beban Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.657.839.028,00	1.657.839.028,00	0,00
4.13	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.617.000.000,00	2.617.000.000,00	0,00
4.14	Beban Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	169.785.000,00	169.785.000,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	77.364,00	77.364,00	0,00
5.1	Beban Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.3	Beban Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.4	Beban Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.5	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.6	Beban Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.7	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	LO	LRA	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.8	Beban Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	77.364,00	77.364,00	0,00
5.9	Beban Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	567.999.600,00	567.999.600,00	0,00
6.1	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
6.2	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.600,00	399.999.600,00	0,00
	JUMLAH	331.088.804.278,00	331.088.804.278,00	0,00

b. Beban Barang dan Jasa-LO

Pengakuan beban barang dan jasa-LO sebesar Rp297.816.984.656,07 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.17. Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Barang	72.800.125.006,09	77.167.845.524,05	(4.367.720.517,96)	(5,66)
2	Beban Jasa	118.092.920.735,98	131.070.230.023,63	(12.977.309.287,65)	(9,90)
3	Beban Pemeliharaan	23.839.661.767,00	22.557.214.628,00	1.282.447.139,00	5,69
4	Beban Perjalanan Dinas	56.113.458.147,00	57.145.644.873,00	(1.032.186.726,00)	(1,81)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.814.638.000,00	11.956.355.000,00	(1.141.717.000,00)	(9,55)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	16.156.181.000,00	17.704.312.090,00	(1.548.131.090,00)	(8,74)
	JUMLAH	297.816.984.656,07	317.601.602.138,68	(19.784.617.482,61)	(6,23)

1) Beban Barang-LO

Beban barang-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.800.125.006,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.18 Beban Barang-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Bahan Pakai Habis-LO	72.403.791.373,09	77.167.845.524,05	(4.764.054.150,96)	(6,17)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	100,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	384.083.633,00	0,00	384.083.633,00	100,00
	Jumlah	72.800.125.006,09	77.167.845.524,05	(4.367.720.517,96)	(5,66)

Perbandingan beban barang-LRA dengan beban barang LO Tahun 2024 sebesar Rp5.892.250.136,27 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.19 Perbandingan Belanja Barang-LRA dengan Beban Barang-LO

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
I	Beban Barang Pakai Habis	66.511.541.236,82	11.535.551.637,21	(5.643.301.500,94)	72.403.791.373,09	5.892.250.136,27
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	187.456.000,00	0,00	0,00	187.456.000,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	117.200.755,00	0,00	0,00	117.200.755,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.219.984.055,00	323.798.494,00	(344.100.765,00)	9.199.681.784,00	(20.302.271,00)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	110.737.000,00	0,00	0,00	110.737.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	69.085.000,00	0,00	(280.000,00)	68.805.000,00	(280.000,00)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.810.516.150,00	0,00	0,00	1.810.516.150,00	0,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	91.058.000,00	0,00	0,00	91.058.000,00	0,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.238.708,00	0,00	0,00	3.238.708,00	0,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	297.150.245,00	29.117.000,00	0,00	326.267.245,00	29.117.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.456.314.061,00	33.460.190,00	(65.628.100,00)	4.424.146.151,00	(32.167.910,00)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.053.974.020,00	0,00	0,00	1.053.974.020,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.036.949.008,00	249.972.003,00	(262.539.967,60)	2.024.381.043,40	(12.567.964,60)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	175.888.000,00	20.000,00	(10.000,00)	175.898.000,00	10.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.021.080,00	0,00	0,00	11.021.080,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.080.038.799,00	3.456.045,00	(5.865.105,00)	1.077.629.739,00	(2.409.060,00)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	757.771.990,00	260.000,00	(761.250,00)	757.270.740,00	(501.250,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	510.729.259,00	0,00	(10.290.000,00)	500.439.259,00	(10.290.000,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	170.756.008,00	0,00	0,00	170.756.008,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	459.361.070,00	0,00	0,00	459.361.070,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	407.602.737,00	0,00	0,00	407.602.737,00	0,00
22	Beban Obat-Obatan-Obat	1.596.921.485,00	9.137.371.688,57	(3.682.301.262,78)	7.051.991.910,79	5.455.070.425,79



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.506.098.320,82	661.246.786,64	(580.167.051,56)	2.587.178.055,90	81.079.735,08
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.150.631.554,00	1.096.849.430,00	(687.002.999,00)	26.560.477.985,00	409.846.431,00
25	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.945.869.264,00	0,00	(4.355.000,00)	1.941.514.264,00	(4.355.000,00)
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	388.159.580,00	0,00	0,00	388.159.580,00	0,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.002.500.500,00	0,00	0,00	2.002.500.500,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.881.612.398,00	0,00	0,00	4.881.612.398,00	0,00
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	562.505.192,00	0,00	0,00	562.505.192,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	686.913.632,00	0,00	0,00	686.913.632,00	0,00
31	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.186.619.393,00	0,00	0,00	1.186.619.393,00	0,00
32	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	37.614.701,00	0,00	0,00	37.614.701,00	0,00
33	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	270.582.500,00	0,00	0,00	270.582.500,00	0,00
34	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	741.433.834,00	0,00	0,00	741.433.834,00	0,00
35	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	18.668.000,00	0,00	0,00	18.668.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Adat Daerah	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Batik Tradisional	70.709.948,00	0,00	0,00	70.709.948,00	0,00
38	Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Pakaian Paskibraka	411.668.990,00	0,00	0,00	411.668.990,00	0,00
II	Beban Barang Tak Habis Pakai	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
III	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	384.083.633,00	0,00	0,00	384.083.633,00	0,00
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	18.348.300,00	0,00	0,00	18.348.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
4	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	355.235.333,00	0,00	0,00	355.235.333,00	0,00
	TOTAL	66.907.874.869,82	11.535.551.637,21	(5.643.301.500,94)	72.800.125.006,09	5.892.250.136,27

Rincian beban persediaan masing-masing SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
Tabel 5.4.20 Rincian beban Persediaan Per SKPD

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	290.786.735,00	0,00	0,00	290.786.735,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	2.561.246.450,00	55.512.234,00	(253.775.552,00)	2.362.983.132,00	(198.263.318,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	401.209.139,00	1.096.849.430,00	(646.990.348,00)	851.068.221,00	449.859.082,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.321.299.458,00	0,00	0,00	1.321.299.458,00	0,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	140.284.787,00	0,00	0,00	140.284.787,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	481.797.600,00	179.384.269,00	(11.672.715,60)	649.509.153,40	167.711.553,40
7	Dinas Kesehatan	7.240.922.852,82	8.707.562.498,57	(3.358.430.549,13)	12.590.054.802,26	5.349.131.949,44
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.022.727.650,00	208.999.146,00	(221.999.146,00)	3.009.727.650,00	(13.000.000,00)
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	255.540.950,00	993.490,00	(1.994.000,00)	254.540.440,00	(1.000.510,00)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	1.840.719.070,00	627.000,00	(27.012.651,00)	1.814.333.419,00	(26.385.651,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.053.659.807,00	0,00	0,00	1.053.659.807,00	0,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.351.782.858,00	0,00	0,00	1.351.782.858,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.759.162.388,00	33.287.000,00	(1.840.000,00)	3.790.609.388,00	31.447.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	770.722.755,00	0,00	0,00	770.722.755,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	312.723.659,00	0,00	0,00	312.723.659,00	0,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	982.335.500,00	0,00	0,00	982.335.500,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	1.938.306.639,00	321.980.494,00	(346.065.565,00)	1.914.221.568,00	(24.085.071,00)
18	Dinas Perikanan	20.865.876.739,00	0,00	0,00	20.865.876.739,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP)	469.613.457,00	0,00	0,00	469.613.457,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.057.391.817,00	0,00	0,00	1.057.391.817,00	0,00
21	Inspektorat	505.022.987,00	10.515.000,00	(9.648.000,00)	505.889.987,00	867.000,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	657.316.490,00	1.125.000,00	(2.163.350,00)	656.278.140,00	(1.038.350,00)
23	Kecamatan Pagai Selatan	159.503.000,00	0,00	0,00	159.503.000,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	203.197.700,00	0,00	0,00	203.197.700,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	348.994.610,00	0,00	0,00	348.994.610,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	246.079.300,00	0,00	0,00	246.079.300,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	265.064.430,00	0,00	0,00	265.064.430,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	396.647.000,00	0,00	0,00	396.647.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	352.277.300,00	0,00	(10.290.000,00)	341.987.300,00	(10.290.000,00)
30	Kecamatan Sikakap	188.257.600,00	0,00	0,00	188.257.600,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	238.084.650,00	0,00	0,00	238.084.650,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Utara	154.977.800,00	0,00	0,00	154.977.800,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	3.271.388.175,00	1.099.125.921,64	(915.004.070,21)	3.455.510.026,43	184.121.851,43
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	857.857.950,00	552.000,00	0,00	858.409.950,00	552.000,00
35	Sekretariat Daerah	6.378.612.131,00	3.608.000,00	(4.156.000,00)	6.378.064.131,00	(548.000,00)
36	Sekretariat DPRD	2.566.483.436,00	24.429.300,00	(41.258.700,00)	2.549.654.036,00	(16.829.400,00)
JUMLAH		66.907.874.869,82	11.744.550.783,21	(5.852.300.646,94)	72.800.125.006,09	5.892.250.136,27

2) Beban Jasa-LO

Pengakuan beban jasa-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp 118.092.920.735,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Beban Jasa-LO

NO.	Uraian	LO - 2024	LO - 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	79.064.325.153,20	88.347.353.957,00	(9.283.028.803,80)	(10,51)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.884.597.835,00	10.259.052.857,00	3.625.544.978,00	35,34
3	Beban Sewa Tanah	15.920.000,00	0,00	15.920.000,00	100,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.359.972.603,00	10.048.652.267,00	(1.688.679.664,00)	(16,81)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	446.152.777,78	870.999.197,63	(424.846.419,85)	(48,78)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	19.985.000,00	0,00	19.985.000,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.579.721.748,00	13.002.704.516,00	(3.422.982.768,00)	(26,33)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LO - 2024	LO - 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.018.382.969,00	4.801.211.629,00	(782.828.660,00)	(16,30)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	226.720.000,00	158.695.000,00	68.025.000,00	42,87
10	Beban Kursus/Pelatihan/ Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	2.477.142.650,00	3.581.560.600,00	(1.104.417.950,00)	(30,84)
	Jumlah	118.092.920.735,98	131.070.230.023,63	(12.977.309.287,65)	(9,90)

Terdapat selisih antara beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA sebesar (Rp12.977.309.287,22) dengan rincian sbb:

Tabel 5.4.22 Selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA

NO.	Uraian	LRA - 2024	TAMBAH	KURANG	LO - 2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	79.070.507.153,20	0,00	(6.182.000,00)	79.064.325.153,20	(6.182.000,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.884.597.835,00	0,00	0,00	13.884.597.835,00	0,00
3	Beban Sewa Tanah	15.920.000,00	0,00	0,00	15.920.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.359.972.603,00	0,00	0,00	8.359.972.603,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	464.250.000,00	51.375.000,00	(69.472.222,22)	446.152.777,78	(18.097.222,22)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	19.985.000,00	0,00	0,00	19.985.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.683.130.169,00	0,00	(103.408.421,00)	9.579.721.748,00	(103.408.421,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.018.382.969,00	0,00	0,00	4.018.382.969,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	226.720.000,00	0,00	0,00	226.720.000,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan/ Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	2.477.142.650,00	0,00	0,00	2.477.142.650,00	0,00
	Jumlah	118.220.608.379,20	51.375.000,00	(179.062.643,22)	118.092.920.735,98	(127.687.643,22)

Selisih antara beban jasa-lo dengan belanja jasa-lra yang merupakan akumulasi selisih beban sewa gedung dan bangunan sebesar (Rp18.097.222,22) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp23.430.555,56) dengan penambahan sebesar Rp26.875.000,00 dan pengurangan sebesar (Rp50.305.555,56) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp5.333.333,34 dengan penambahan sebesar Rp24.500.000,00 dan pengurangan sebesar (Rp19.166.666,66) Selisih beban jasa konsultansi konstruksi sebesar (Rp79.800.000,00) yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pengurangan sebesar (Rp79.800.000,00) serta adanya pengurangan atas pelunasan utang pada pihak ketiga CV. Karya Bangun Persada sebesar (Rp23.608.421,00) atas pembayaran 5% jaminan pemeliharaan pembangunan toilet Mapaddegat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun 2023 sesuai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SP2D No 08.03.04.0/000107/LS/3.26.2.19.0.00.26.0000/P.05/12/2023 Tanggal 22 Desember 2023 dan adanya pengurangan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp6.182.000,00) yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa tenaga perhubungan.

Secara rinci penambahan dan pengurangan beban jasa per rincian objek Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.23 Selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA rincian obyek

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Beban Jasa Kantor	79.070.507.153,20	0,00	(6.182.000,00)	79.064.325.153,20	(6.182.000,00)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.425.652.500,00	0,00	0,00	1.425.652.500,00	0,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	423.850.000,00	0,00	0,00	423.850.000,00	0,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	89.400.000,00	0,00	0,00	89.400.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.254.484.663,00	0,00	0,00	2.254.484.663,00	0,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	600.500.000,00	0,00	0,00	600.500.000,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	2.651.766.000,00	0,00	0,00	2.651.766.000,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	21.999.884.617,20	0,00	0,00	21.999.884.617,20	0,00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	269.353.600,00	0,00	0,00	269.353.600,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	534.890.800,00	0,00	0,00	534.890.800,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.721.425.738,00	0,00	0,00	1.721.425.738,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	711.038.754,00	0,00	0,00	711.038.754,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	55.600.000,00	0,00	0,00	55.600.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	647.084.341,00	0,00	(6.182.000,00)	640.902.341,00	(6.182.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	61.430.000,00	0,00	0,00	61.430.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	16.085.198.078,00	0,00	0,00	16.085.198.078,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	122.124.000,00	0,00	0,00	122.124.000,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	897.058.000,00	0,00	0,00	897.058.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	847.730.219,00	0,00	0,00	847.730.219,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.659.364.737,00	0,00	0,00	6.659.364.737,00	0,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.461.797.637,00	0,00	0,00	4.461.797.637,00	0,00
25	Beban Jasa Tenaga Supir	1.592.084.923,00	0,00	0,00	1.592.084.923,00	0,00
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	359.538.500,00	0,00	0,00	359.538.500,00	0,00
27	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	188.676.700,00	0,00	0,00	188.676.700,00	0,00
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	0,00
29	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	464.364.727,00	0,00	0,00	464.364.727,00	0,00
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	196.552.113,00	0,00	0,00	196.552.113,00	0,00
31	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	78.175.000,00	0,00	0,00	78.175.000,00	0,00
32	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	430.328.471,00	0,00	0,00	430.328.471,00	0,00
33	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	189.088.040,00	0,00	0,00	189.088.040,00	0,00
34	Beban Jasa Kalibrasi	153.549.897,00	0,00	0,00	153.549.897,00	0,00
35	Beban Jasa Pengolahan Sampah	215.200.000,00	0,00	0,00	215.200.000,00	0,00
36	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	519.903.120,00	0,00	0,00	519.903.120,00	0,00
37	Beban Jasa Operator Kapal	3.364.019.728,00	0,00	0,00	3.364.019.728,00	0,00
38	Beban Tagihan Telepon	16.525.465,00	0,00	0,00	16.525.465,00	0,00
39	Beban Tagihan Air	154.974.911,00	0,00	0,00	154.974.911,00	0,00
40	Beban Tagihan Listrik	3.431.678.180,00	0,00	0,00	3.431.678.180,00	0,00
41	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	646.726.000,00	0,00	0,00	646.726.000,00	0,00
42	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.548.116.106,00	0,00	0,00	3.548.116.106,00	0,00
43	Beban Paket/Pengiriman	98.862.700,00	0,00	0,00	98.862.700,00	0,00
44	Beban Penambahan Daya	33.750.870,00	0,00	0,00	33.750.870,00	0,00
45	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	116.662.350,00	0,00	0,00	116.662.350,00	0,00
46	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	287.875.718,00	0,00	0,00	287.875.718,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
47	Beban Lembur	258.598.750,00	0,00	0,00	258.598.750,00	0,00
48	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	112.471.200,00	0,00	0,00	112.471.200,00	0,00
II	Beban luran Jaminan/Asuransi	13.884.597.835,00	0,00	0,00	13.884.597.835,00	0,00
1	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	848.393.448,00	0,00	0,00	848.393.448,00	0,00
2	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.798.135.561,00	0,00	0,00	4.798.135.561,00	0,00
3	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.294.375,00	0,00	0,00	100.294.375,00	0,00
4	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	125.367.969,00	0,00	0,00	125.367.969,00	0,00
5	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	63.536.882,00	0,00	0,00	63.536.882,00	0,00
6	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	4.731.470.000,00	0,00	0,00	4.731.470.000,00	0,00
7	Beban luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	3.217.399.600,00	0,00	0,00	3.217.399.600,00	0,00
III	Beban Sewa Tanah	15.920.000,00	0,00	0,00	15.920.000,00	0,00
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	14.520.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00	0,00
2	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
IV	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.359.972.603,00	0,00	0,00	8.359.972.603,00	0,00
1	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	71.684.298,00	0,00	0,00	71.684.298,00	0,00
2	Beban Sewa Kapal Tarik	29.999.805,00	0,00	0,00	29.999.805,00	0,00
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	304.500.000,00	0,00	0,00	304.500.000,00	0,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
6	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
7	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.869.433.500,00	0,00	0,00	7.869.433.500,00	0,00
8	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9	Beban Sewa Alat Kerja Bawah Air	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00
10	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
11	Beban Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	24.975.000,00	0,00	0,00	24.975.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
V	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	464.250.000,00	51.375.000,00	(69.472.222,22)	446.152.777,78	(18.097.222,22)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	85.600.000,00	32.708.333,33	(56.138.888,89)	62.169.444,44	(23.430.555,56)
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00	18.666.666,67	(13.333.333,33)	40.333.333,34	5.333.333,34
3	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	129.550.000,00	0,00	0,00	129.550.000,00	0,00
5	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
6	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
7	Beban Sewa Hotel	42.600.000,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00
8	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	0,00
VI	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	19.985.000,00	0,00	0,00	19.985.000,00	0,00
1	Beban Sewa Alat Musik	19.985.000,00	0,00	0,00	19.985.000,00	0,00
VII	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.683.130.169,00	0,00	(103.408.421,00)	9.579.721.748,00	(103.408.421,00)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	396.568.728,00	0,00	0,00	396.568.728,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	13.990.000,00	0,00	0,00	13.990.000,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	540.408.430,00	0,00	(79.800.000,00)	460.608.430,00	(79.800.000,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	985.752.214,00	0,00	0,00	985.752.214,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	984.877.000,00	0,00	0,00	984.877.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	446.555.690,00	0,00	0,00	446.555.690,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.066.288.866,00	0,00	0,00	1.066.288.866,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	159.999.063,00	0,00	0,00	159.999.063,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	73.904.957,00	0,00	0,00	73.904.957,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	643.646.210,00	0,00	(23.608.421,00)	620.037.789,00	(23.608.421,00)
11	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.739.284.287,00	0,00	0,00	2.739.284.287,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	993.341.300,00	0,00	0,00	993.341.300,00	0,00
13	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00
14	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	396.814.000,00	0,00	0,00	396.814.000,00	0,00
15	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	230.299.424,00	0,00	0,00	230.299.424,00	0,00
VIII	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.018.382.969,00	0,00	0,00	4.018.382.969,00	0,00
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	196.692.000,00	0,00	0,00	196.692.000,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	340.812.042,00	0,00	0,00	340.812.042,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.119.654.775,00	0,00	0,00	2.119.654.775,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	345.724.152,00	0,00	0,00	345.724.152,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
IX	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	226.720.000,00	0,00	0,00	226.720.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	226.720.000,00	0,00	0,00	226.720.000,00	0,00
X	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.477.142.650,00	0,00	0,00	2.477.142.650,00	0,00
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.087.363.650,00	0,00	0,00	2.087.363.650,00	0,00
2	Beban Bimbingan Teknis	67.300.000,00	0,00	0,00	67.300.000,00	0,00
3	Beban Diklat Kepemimpinan	322.479.000,00	0,00	0,00	322.479.000,00	0,00
	JUMLAH	118.220.608.379,20	51.375.000,00	(179.062.643,22)	118.092.920.735,98	(127.687.643,22)

Tabel 5.4.24 Berikut rincian Beban Jasa masing- masing SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan sebagai berikut:

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	727.038.579,00	0,00	0,00	727.038.579,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	11.887.975.420,00	0,00	0,00	11.887.975.420,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.816.648.049,00	0,00	0,00	1.816.648.049,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.411.355.718,00	0,00	0,00	1.411.355.718,00	0,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	744.704.182,00	0,00	0,00	744.704.182,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	957.948.956,00	0,00	0,00	957.948.956,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	29.025.167.422,20	0,00	0,00	29.025.167.422,20	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.045.037.926,00	0,00	0,00	2.045.037.926,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	3.517.652.251,00	0,00	0,00	3.517.652.251,00	0,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	550.943.602,00	0,00	0,00	550.943.602,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	1.338.070.763,00	0,00	0,00	1.338.070.763,00	0,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	2.439.068.824,00	0,00	(23.608.421,00)	2.415.460.403,00	(23.608.421,00)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.638.721.881,00	26.875.000,00	(50.305.555,56)	15.615.291.325,44	(23.430.555,56)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.423.547.357,00	0,00	0,00	2.423.547.357,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	738.475.460,00	0,00	0,00	738.475.460,00	0,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7.748.036.671,00	0,00	0,00	7.748.036.671,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	4.229.310.816,00	0,00	0,00	4.229.310.816,00	0,00
18	Dinas Perikanan	2.258.806.540,00	0,00	(6.182.000,00)	2.252.624.540,00	(6.182.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	2.333.238.369,00	0,00	(79.800.000,00)	2.253.438.369,00	(79.800.000,00)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	686.547.499,00	24.500.000,00	(19.166.666,66)	691.880.832,33	5.333.333,34
21	Inspektorat	1.039.844.891,00	0,00	0,00	1.039.844.891,00	0,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	666.758.532,00	0,00	0,00	666.758.532,00	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	336.074.942,00	0,00	0,00	336.074.942,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	342.379.789,00	0,00	0,00	342.379.789,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	274.094.000,00	0,00	0,00	274.094.000,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	264.372.000,00	0,00	0,00	264.372.000,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	273.168.000,00	0,00	0,00	273.168.000,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	296.370.000,00	0,00	0,00	296.370.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	237.520.000,00	0,00	0,00	237.520.000,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	237.831.000,00	0,00	0,00	237.831.000,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	389.664.000,00	0,00	0,00	389.664.000,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Utara	445.224.897,00	0,00	0,00	445.224.897,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	8.385.453.724,00	0,00	0,00	8.385.453.724,00	0,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.751.438.053,00	0,00	0,00	2.751.438.053,00	0,00
35	Sekretariat Daerah	6.754.252.689,00	0,00	0,00	6.754.252.689,00	0,00
36	Sekretariat DPRD	3.007.865.577,00	0,00	0,00	3.007.865.577,00	0,00
JUMLAH		118.220.608.379,20	51.375.000,00	(179.062.643,22)	118.092.920.735,97	(127.687.643,22)

3) Beban Pemeliharaan-LO

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp23.839.661.767,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp22.557.214.628,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.25. Beban Pemeliharaan-LO

No.	Uraian	LO - 2024	LO - 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.534.633.727,00	9.005.318.547,00	(470.684.820,00)	(5,23)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.342.379.588,00	9.384.841.751,00	(4.042.462.163,00)	(43,07)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.955.408.302,00	4.163.253.830,00	5.792.154.472,00	139,13
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.638.150,00	1.650.000,00	1.988.150,00	120,49
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.602.000,00	2.150.500,00	1.451.500,00	67,50
	Jumlah	23.839.661.767,00	22.557.214.628,00	1.282.447.139,00	5,69

Terdapat selisih beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp2.546.278.177,00, dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.26 Selisih Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA

No.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.010.008.994,00	1.524.624.733,00	0,00	8.534.633.727,00	1.524.624.733,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.526.212.294,00	816.167.294,00	0,00	5.342.379.588,00	816.167.294,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.757.162.302,00	198.246.000,00	0,00	9.955.408.302,00	198.246.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.638.150,00	0,00	3.638.150,00	3.638.150,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
	TOTAL	21.293.383.590,00	2.546.278.177,00	0,00	23.839.661.767,00	2.546.278.177,00

Uraian beban pemeliharaan-LO per rincian objek tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Selisih Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA rincian obyek

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.010.008.994,00	1.524.624.733,00	0,00	8.534.633.727,00	1.524.624.733,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	111.499.929,00	0,00	0,00	111.499.929,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	84.987.900,00	0,00	0,00	84.987.900,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	6.971.300,00	0,00	6.971.300,00	6.971.300,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.626.509.871,00	0,00	0,00	1.626.509.871,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.356.816,00	0,00	0,00	2.356.816,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	166.421.900,00	0,00	0,00	166.421.900,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.195.000,00	0,00	0,00	24.195.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	145.968.950,00	0,00	0,00	145.968.950,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	1.457.500,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.812.946.400,00	0,00	0,00	3.812.946.400,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.186.500,00	91.072.000,00	0,00	143.258.500,00	91.072.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.761.000,00	122.592.750,00	0,00	139.353.750,00	122.592.750,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	304.582.177,00	32.700.000,00	0,00	337.282.177,00	32.700.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	615.265.570,00	0,00	615.265.570,00	615.265.570,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	438.001.262,00	0,00	438.001.262,00	438.001.262,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.915.482,00	0,00	0,00	9.915.482,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	4.480.721,00	0,00	4.480.721,00	4.480.721,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
24	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	39.940.000,00	0,00	0,00	39.940.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	136.885.200,00	19.899.514,00	0,00	156.784.714,00	19.899.514,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	15.398.000,00	0,00	15.398.000,00	15.398.000,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00	27.370.000,00	0,00	27.370.000,00	27.370.000,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	2.868.750,00	0,00	2.868.750,00	2.868.750,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	5.275.000,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	0,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Studi:IPA Lanjutan	0,00	1.977.800,00	0,00	1.977.800,00	1.977.800,00
33	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	265.072.919,00	1.620.000,00	0,00	266.692.919,00	1.620.000,00
35	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	25.946.966,00	0,00	25.946.966,00	25.946.966,00
36	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	118.787.950,00	39.244.600,00	0,00	158.032.550,00	39.244.600,00
37	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.991.000,00	19.620.500,00	0,00	29.611.500,00	19.620.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
38	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	5.062.500,00	0,00	5.062.500,00	5.062.500,00
39	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
40	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
41	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
II	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.526.212.294,00	816.167.294,00	0,00	5.342.379.588,00	816.167.294,00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.550.310.108,00	796.177.294,00	0,00	4.346.487.402,00	796.177.294,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	872.018.996,00	0,00	0,00	872.018.996,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.998.950,00	0,00	0,00	15.998.950,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	87.884.240,00	0,00	0,00	87.884.240,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	19.990.000,00
III	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.757.162.302,00	198.246.000,00	0,00	9.955.408.302,00	198.246.000,00
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.222.839.279,00	0,00	0,00	1.222.839.279,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	109.925.797,00	0,00	0,00	109.925.797,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	6.720.234.362,00	0,00	0,00	6.720.234.362,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	981.150.000,00	0,00	0,00	981.150.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	199.500.000,00	0,00	0,00	199.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	Uraian	LRA-2024	TAMBAH	KURANG	LO-2024	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	179.389.559,00	0,00	0,00	179.389.559,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	99.539.800,00	0,00	0,00	99.539.800,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	244.583.505,00	0,00	0,00	244.583.505,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	0,00	198.246.000,00	0,00	198.246.000,00	198.246.000,00
IV	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.638.150,00	0,00	3.638.150,00	3.638.150,00
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	3.638.150,00	0,00	3.638.150,00	3.638.150,00
V	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
1	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00
	JUMLAH	21.293.383.590,00	2.546.278.177,00	0,00	23.839.661.767,00	2.546.278.177,00

Selisih antara beban pemeliharaan-LO dengan belanja Pemeliharaan-LRA berasal dari penambahan sebesar Rp2.546.278.177,00 merupakan reklas dari belanja modal peralatan dan mesin ke beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.524.624.733, reklas belanja modal gedung dan bangunan ke beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp816.167.294,00, reklas belanja modal pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi ke beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp198.246.000,00, reklas dari belanja modal aset tetap lainnya ke beban pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp3.638.150,00 dan reklas belanja modal aset tidak berwujud ke beban pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebesar Rp3.602.000,00.

Tabel 5.4.28 Rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD Tahun 2024

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.886.050,00	0,00	0,00	34.886.050,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	187.444.000,00	9.802.000,00	0,00	197.246.000,00	9.802.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191.770.780,00	0,00	0,00	191.770.780,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.099.982,00	0,00	0,00	76.099.982,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	49.803.133,00	0,00	0,00	49.803.133,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	190.254.082,00	0,00	0,00	190.254.082,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	2.057.525.585,00	106.226.514,00	0,00	2.163.752.099,00	106.226.514,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	81.095.740,00	12.870.000,00	0,00	93.965.740,00	12.870.000,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	116.091.392,00	0,00	0,00	116.091.392,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	151.150.000,00	0,00	0,00	151.150.000,00	0,00
12	Dinas Parawisata, Pemuda Dan Olah Raga	22.200.000,00	7.900.000,00	0,00	30.100.000,00	7.900.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.141.640.407,00	227.339.250,00	0,00	3.368.979.657,00	227.339.250,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	22.378.745,00	0,00	0,00	22.378.745,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.585.000,00	22.500.000,00	0,00	61.085.000,00	22.500.000,00
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.576.500,00	1.459.064.187,00	0,00	1.482.640.687,00	1.459.064.187,00
17	Dinas Perhubungan	9.374.766.093,00	0,00	0,00	9.374.766.093,00	0,00
18	Dinas Perikanan	293.390.573,00	0,00	0,00	293.390.573,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPKP)	48.735.000,00	0,00	0,00	48.735.000,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23.326.000,00	14.946.150,00	0,00	38.272.150,00	14.946.150,00
21	Inspektorat	235.947.197,00	0,00	0,00	235.947.197,00	0,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.000.000,00	867.716,00	0,00	8.867.716,00	867.716,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	9.955.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	0,00	10.660.000,00	0,00	10.660.000,00	10.660.000,00
25	Kecamatan Siberut Barat	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	46.860.000,00	500.000,00	0,00	47.360.000,00	500.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
29	Kecamatan Siberut Utara	31.460.000,00	0,00	0,00	31.460.000,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
32	Kecamatan Sipora Utara	126.867.775,00	71.964.000,00	0,00	198.831.775,00	71.964.000,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	1.724.821.204,00	1.270.000,00	0,00	1.726.091.204,00	1.270.000,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	93.405.000,00	428.090.000,00	0,00	521.495.000,00	428.090.000,00
35	Sekretariat Daerah	2.502.695.415,00	116.334.850,00	0,00	2.619.030.265,00	116.334.850,00
36	Sekretariat DPRD	346.322.937,00	53.613.510,00	0,00	399.936.447,00	53.613.510,00
JUMLAH		21.293.383.590,00	2.546.278.177,00	0,00	23.839.661.767,00	2.546.278.177,00

4) Beban Perjalanan Dinas-LO

Beban perjalanan dinas-LO Tahun 2024 sebesar Rp56.113.458.147,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp57.145.644.873,00 Berikut uraian beban perjalanan dinas-LO per rincian objek Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO - 2024	LO - 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.113.458.147,00	56.924.503.462,00	(811.045.315,00)	(1,42)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	221.141.411,00	(221.141.411,00)	(100,00)
	Jumlah	56.113.458.147,00	57.145.644.873,00	(1.032.186.726,00)	5,69

Beban perjalanan dinas -LO per rincian objek tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Perjalanan Dinas-LO

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.679.504.542,00	0,00	0,00	32.679.504.542,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.016.594.670,00	0,00	0,00	1.016.594.670,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.188.003.935,00	0,00	0,00	22.188.003.935,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.655.000,00	0,00	0,00	59.655.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169.700.000,00	0,00	0,00	169.700.000,00	0,00
	Jumlah	56.113.458.147,00	0,00	0,00	56.113.458.147,00	0,00

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan atau selisih antara beban perjalanan dinas-LO dengan belanja perjalanan dinas-LRA. Berikut ini rincian beban Perjalanan-LO masing-masing SKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4.30. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Masing-Masing SKPD TA 2024

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	899.803.047,00	0,00	0,00	899.803.047,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	2.912.632.311,00	0,00	0,00	2.912.632.311,00	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.163.851,00	0,00	0,00	675.163.851,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.419.689.606,00	0,00	0,00	1.419.689.606,00	0,00
5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	302.937.506,00	0,00	0,00	302.937.506,00	0,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	464.525.397,00	0,00	0,00	464.525.397,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	3.389.078.025,00	0,00	0,00	3.389.078.025,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	459.054.813,00	0,00	0,00	459.054.813,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	260.813.928,00	0,00	0,00	260.813.928,00	0,00
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	508.017.217,00	0,00	0,00	508.017.217,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	782.604.466,00	0,00	0,00	782.604.466,00	0,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.542.852.316,00	0,00	0,00	1.542.852.316,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.496.545.701,00	0,00	0,00	3.496.545.701,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	663.061.587,00	0,00	0,00	663.061.587,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal	460.907.434,00	0,00	0,00	460.907.434,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
16	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.795.157.277,00	0,00	0,00	2.795.157.277,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	855.131.449,00	0,00	0,00	855.131.449,00	0,00
18	Dinas Perikanan	1.213.000.322,00	0,00	0,00	1.213.000.322,00	0,00
19	Dinas Perumahan Dan Kawassan Pemukiman (DPKP)	700.223.036,00	0,00	0,00	700.223.036,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.312.382.965,00	0,00	0,00	1.312.382.965,00	0,00
21	Inspektorat	3.261.608.511,00	0,00	0,00	3.261.608.511,00	0,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	605.020.378,00	0,00	0,00	605.020.378,00	0,00
23	Kecamatan Pagai Selatan	499.836.755,00	0,00	0,00	499.836.755,00	0,00
24	Kecamatan Pagai Utara	469.173.955,00	0,00	0,00	469.173.955,00	0,00
25	Kecamatan Siberut Barat	389.753.000,00	0,00	0,00	389.753.000,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	289.999.500,00	0,00	0,00	289.999.500,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Selatan	301.286.800,00	0,00	0,00	301.286.800,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	258.726.000,00	0,00	0,00	258.726.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	342.370.600,00	0,00	0,00	342.370.600,00	0,00
30	Kecamatan Sikakap	381.428.255,00	0,00	0,00	381.428.255,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Selatan	280.044.800,00	0,00	0,00	280.044.800,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Utara	215.847.450,00	0,00	0,00	215.847.450,00	0,00
33	Rumah Sakit Umum Daerah	401.485.726,00	0,00	0,00	401.485.726,00	0,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.294.373.335,00	0,00	0,00	1.294.373.335,00	0,00
35	Sekretariat Daerah	5.379.415.453,00	0,00	0,00	5.379.415.453,00	0,00
36	Sekretariat DPRD	16.629.605.375,00	0,00	0,00	16.629.605.375,00	0,00
	JUMLAH	56.113.558.147,00	0,00	0,00	56.113.558.147,00	0,00

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.814.638.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp11.956.355.000,00. Rincian beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.156.181.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp17.704.312.090,00 merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Barang BOS pada 133 Sekolah Dasar (SD) dan Beban Barang BOS pada 25 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian beban sebagaimana dijelaskan pada bagian realisasi belanja barang dan jasa BOS.

c. Beban Subsidi-LO

Beban subsidi-LO per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp7.208.422.603,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp7.585.855.000,00. Beban subsidi-LO Tahun 2024 merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera untuk operasional Kapal Antar Pulau sebesar Rp5.441.779.000,00 dan Rp1.759.862.000,00 untuk operasional penyeberangan antar Kota/Kabupaten (Padang-Tuapejat) serta adanya biaya perjalanan dinas sebesar Rp6.781.603,00 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Belanja Subsidi.

d. Beban Hibah-LO

Beban hibah-LO tahun 2024 sebesar Rp35.433.087.998,00 dan tahun 2023 sebesar Rp20.591.050.126,00. Beban hibah-LO merupakan beban hibah yang diberikan kepada:

Tabel 5.4.31 Beban Hibah-LO

No.	Uraian	Beban Hibah-LO 2024	Beban Hibah-LO 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20.806.244.600,00	7.200.000.000,00	13.606.244.600,00	188,98
2	Beban Hibah Uang kepada BUMN	0,00	231.415.174,00	(231.415.174,00)	(100,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.545.111.300,00	2.785.400.788,00	(240.289.488,00)	(8,63)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.010.461.988,00	2.000.000.000,00	10.461.988,00	0,52
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.629.026.000,00	4.694.310.975,00	1.934.715.025,00	41,21
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.259.103.500,00	3.052.695.189,00	(793.591.689,00)	(26,00)
7	Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
8	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	357.140.600,00	0,00	357.140.600,00	100,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	626.000.010,00	627.228.000,00	(1.227.990,00)	(0,20)
Jumlah		35.433.087.998,00	20.591.050.126,00	14.842.037.872,00	72,08



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Hibah – LO Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Beban hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp20.806.244.600,00 merupakan hibah uang kepada Pemerintah Pusat Badan Pengawas Pemilu Daerah Pada Kesbangpol dan Linmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.808.244.000,00. Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Kesbangpol dan Linmas Tahun Anggaran 2024 Rp13.698.000.600,00. Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Kapolres Kepulauan mentawai Pada Kesbangpol dan Linmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Komando Resort Militer 032/WIRABRAJA Pada Kesbangpol dan Linmas Tahun Anggaran 2024 di Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan sebesar Rp800.000.000,00.
- 2) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.545.111.300,00 merupakan hibah BOP PAUD sebesar Rp935.071.300,00 hibah BOP Kesetaraan sebesar Rp923.370.000,00 dan BOS SWASTA sebesar Rp486.670.000,00 pada Dinas Pendidikan. Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka Pengembangan PMI Tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- 3) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp2.010.461.988,00 merupakan hibah Pendidikan Akademi Komunitas Negeri Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp1.950.461.988,00 pada Sekretariat Daerah dan hibah dari dana insentif fiskal (DIF) berupa penyaluran bahan pokok atau pangan lainnya sebesar Rp60.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- 4) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp6.629.026.000,00 merupakan hibah uang kepada rumah ibadah sebesar Rp6.252.026.000,00 dan hibah uang kepada kelompok usaha masyarakat di beberapa desa sebesar Rp377.000.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 5) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.259.103.500,00 merupakan hibah barang dan uang kepada TK/PAUD sebesar Rp912.673.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hibah transportasi perdesaan kepada BUMDES di beberapa desa sebesar Rp1.346.430.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- 6) Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp200.000.000,00 merupakan hibah uang kepada kelompok usaha mikro kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 7) Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp357.140.600,00 merupakan hibah uang kepada Asosiasi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten PSSI sebesar Rp60.000.000,00, hibah uang kepada Kwartir cabang 15 gerakan pramuka sebesar Rp100.000.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

- 8) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp626.000.010,00 pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

e. Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun 2024 sebesar Rp941.555.840,00 dan Tahun 2023 Rp980.807.665,00 merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan rincian dibawah ini:

Tabel 5.4.32. Beban Bantuan Sosial-LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	110.000.000,00	267.107.665,00	(157.107.665,00)	(58,82)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	450.000.000,00	675.750.000,00	(225.750.000,00)	(33,41)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	37.950.000,00	(37.950.000,00)	100,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	381.555.840,00	0,00	381.555.840,00	100,00
Jumlah		941.555.840,00	980.807.665,00	(39.251.825,00)	(4,00)

Beban bantuan sosial kepada individu Tahun 2024 sebesar Rp110.000.000,00 merupakan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada keluarga/orang pasca kecelakaan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 100.3.3.2-453 Tahun 2024, 100.3.3.2-454 Tahun 2024 dan 100.3.3.2-456 Tahun 2024. Beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu Tahun 2024 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan kegiatan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada keluarga/orang berupa beras premium, gula pasir, teh celup, minyak goreng, telur ayam, susu kaleng, susu bubuk sachet, kacang hijau.

Sedangkan beban bantuan sosial kepada keluarga tahun 2024 sebesar Rp381.555.840,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 128 KK sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai nomor 100.3.3.2-479 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penerima Bantuan Meteran Listrik 900 watt serta pemasangan instalasinya Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Antara beban bantuan sosial-LO dengan belanja bantuan sosial-LRA tahun 2024 tidak terdapat perbedaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.33. Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA

No	URAIAN	BELANJA LRA	Tambah	Kurang	BEBAN-LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	381.555.840,00	0,00	0,00	381.555.840,00	0,00
	Jumlah	941.555.840,00	0,00	0,00	941.555.840,00	0,00

f. Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban penyisihan piutang-LO Tahun 2024 sebesar Rp346.832.909,36 dan Tahun 2023 sebesar Rp242.973.582,66 merupakan beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO

Beban penyusutan-LO Tahun 2024 sebesar Rp140.447.983.860,55 dan Tahun 2023 sebesar Rp134.707.134.318,00 merupakan beban penyusutan aset tetap pada 36 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.682.479.035,17. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.702.738.278,00 Beban Penyusutan jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp96.742.779.472,00 dan Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.319.987.075,38 dengan uraian masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.34. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Per SKPD

NO	URAIAN	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
BEBAN PENYUSUTAN			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	136.578.998,00	147.258.165,00
2	Badan Keuangan Daerah	531.646.749,00	568.067.260,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.706.951.778,00	2.774.169.637,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	405.778.543,00	427.304.459,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	256.526.392,00	127.133.298,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	253.597.053,00	208.529.785,00
7	Dinas Kesehatan	12.445.610.282,12	12.141.480.043,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.307.526.673,00	1.315.476.173,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	372.745.587,00	497.916.561,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.128.664.494,00	4.197.962.244,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	343.052.016,00	330.580.498,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.236.226.062,00	1.189.129.841,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.002.711.034,00	82.709.727.057,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.455.155,00	218.964.948,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	195.699.840,00	220.618.700,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.160.063.068,00	11.229.496.403,00
17	Dinas Perhubungan	3.253.346.229,00	3.297.624.599,00
18	Dinas Perikanan	1.012.354.014,00	983.514.119,00
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.601.814.582,00	3.639.572.985,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	619.319.766,00	486.715.507,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	253.716.366,00	228.420.585,00
22	Inspektorat	138.128.373,00	113.258.901,00
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	44.456.745,00	43.234.291,00
24	Kecamatan Pagai Selatan	84.001.331,00	86.047.514,00
25	Kecamatan Pagai Utara	46.759.395,00	46.775.856,00
26	Kecamatan Siberut Barat	93.849.602,00	79.514.055,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	114.223.651,00	153.596.388,00
28	Kecamatan Siberut Selatan	126.617.725,00	109.247.351,00
29	Kecamatan Siberut Tengah	61.328.343,00	54.833.169,00
30	Kecamatan Siberut Utara	62.239.089,00	67.853.713,00
31	Kecamatan Sikakap	18.516.535,00	15.015.953,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	151.573.152,00	141.095.570,00
33	Kecamatan Sipora Utara	126.931.013,00	110.823.267,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah	2.355.918.922,05	2.538.216.682,00
35	Sekretariat Daerah	3.771.877.581,00	3.409.500.825,00
36	Sekretariat DPRD	475.190.647,00	501.532.266,00
	Jumlah	139.127.996.785,17	134.410.208.668,00
BEBAN AMORTISASI			
1	Badan Keuangan Daerah	293.563.250,00	251.035.650,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	961.133.825,38	0,00
3	Dinas Kesehatan	19.028.000,00	19.028.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.400.000,00	0,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
7	Inspektorat	26.862.000,00	26.862.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
	Jumlah	1.319.987.075,38	296.925.650,00
Total Beban Penyusutan + Beban Amortisasi		140.447.983.860,55	134.707.134.318,00

2. Beban Transfer - LO

Beban Transfer – LO Tahun 2024 sebesar Rp 64.480.186.519,00 dan Tahun 2023 sebesar 60.597.292.380,00 beban transfer 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.882.894.139,00 atau 6.41% yang terdiri dari:

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp835.191.384,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp561.518.875,00 merupakan beban bagi hasil pajak daerah kepada 43 Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

2) Beban Bagi Hasil Retribusi

Pengakuan beban transfer bagi hasil retribusi Tahun 2024 sebesar Rp2.422.715.191,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.400.514.316,00 merupakan beban transfer bagi hasil retribusi kepada 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi – LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi– LRA.

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pengakuan beban transfer bantuan keuangan ke Desa Tahun 2024 sebesar Rp61.222.279.944,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp58.635.259.189,00 merupakan transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur desa.

2. Beban Tak Terduga

Pengakuan Beban Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp1.025.861.621,00 dan Tahun 2023 bernilai Rp919.232.006,00 merupakan dana bantuan sosial korban kebakaran, pemulasaran jenazah dan bantuan longsor sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pos Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga .

5.4.3 Surplus Defisit dari Operasi – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	22.765.890.566,21	61.608.973.027,87

Surplus dari Operasi-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp22.765.890.566,21 dan Tahun 2023 terdapat sebesar Rp61.608.973.027,87 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban Operasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	(5.372.399,87,00)

Surplus/defisit kegiatan non operasional-LO pada Tahun Rp0,00 pada Tahun 2023 terdapat sebesar (Rp5.372.399,87,00).

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa-LO pada Tahun 2024 Rp22.765.890.566,21 dan Tahun 2023 diperoleh sebesar Rp61.603.600.628,00.

5.4.6 Beban Luar Biasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Luar Biasa –LO per 31 Desember 2024 berjumlah Rp0,00 dan Tahun 2023 berjumlah Rp0,00.

5.4.7 Surplus/Defisit – LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00

Surplus/defisit-LO merupakan selisih pendapatan-LO dengan beban-LO dengan kegiatan non operasional serta pos luar biasa, pada Tahun 2024 terjadi surplus-LO sebesar Rp22.765.890.566,21 sedangkan Tahun 2023 diperoleh surplus-LO sebesar Rp61.603.600.628,00.

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	925.466.086.709,19	920.347.874.595,54
Arus Kas Keluar	776.180.296.845,02	720.936.144.443,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	149.285.789.864,17	199.411.730.152,54

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2024, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp149.285.789.864,17 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp925.466.086.709,19 dengan arus kas keluar sebesar Rp776.180.296.845,02. Rincian arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

Tabel 5.5.1. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	9.161.616.151,24	8.514.261.917,00
4	Hasil Retribusi Daerah	15.367.248.573,00	13.344.054.501,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.476.655.254,00	14.907.522.965,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.047.528.404,95	10.416.938.845,54
7	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.832.243.814,00	20.072.513.537,00
8	Dana Alokasi Umum	593.136.045.604,00	569.588.001.480,00
9	Dana Alokasi Khusus-Fisik	60.558.056.051,00	89.054.044.924,00
10	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	82.559.416.973,00	78.049.494.680,00
11	Dana Insentif	0,00	19.459.955.000,00
12	Dana Desa	46.496.234.000,00	46.289.511.000,00
13	Insentif Fiskal	20.978.611.000,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Dari Pripinsi	43.907.408.501,00	41.977.007.014,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	1.660.000.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.945.022.383,00	7.014.568.732,00
17	Jumlah Arus Kas Masuk	925.466.086.709,19	920.347.874.595,54
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai	331.088.804.278,00	274.844.651.251,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	289.506.143.986,02	309.205.396.703,00
21	Pembayaran Subsidi	7.208.422.603,00	7.585.855.000,00
22	Pembayaran Belanja Hibah	35.433.087.998,00	20.513.398.438,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	941.555.840,00	980.807.665,00
24	Pembayaran Tak Terduga	1.025.861.621,00	919.232.006,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	3.257.906.575,00	1.962.033.191,00
26	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	107.718.513.944,00	104.924.770.189,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar	776.180.296.845,02	720.936.144.443,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	149.285.789.864,17	199.411.730.152,54



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	637.310.100,00
Arus Kas Keluar	142.697.574.476,00	220.044.232.584,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(142.697.574.476,00)	(219.406.922.484,00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp142.697.574.476,00) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan arus kas keluar sebesar Rp142.697.574.476,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.5.2. Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai		
Penjualan Hasil Peralatan Mesin Hasil Lelang	0,00	637.310.100,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	637.310.100,00
Arus Kas Keluar:		
Belanja Modal Tanah	213.300.000,00	199.222.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.182.154.448,00	33.569.000.163,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.067.914.028,00	65.815.959.222,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	91.142.885.630,00	118.659.040.585,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.775.475.370,00	1.666.699.814,00
Belanja Modal Aset Lainnya	315.845.000,00	134.310.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	142.697.574.476,00	220.044.232.584,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(142.697.574.476,00)	(219.406.922.484,00)

Selama Tahun 2024 arus kas keluar sebesar (Rp(142.697.574.476,00)) yang merupakan pengeluaran dana dari kas daerah untuk belanja modal yaitu:

- (1) Belanja modal tanah Tahun 2024 sebesar Rp213.300.000,00
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp23.182.154.448,00, merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan alat besar, pengadaan alat angkutan, pengadaan alat bengkel dan alat ukur, pengadaan alat pertanian, pengadaan alat kantor dan rumah tangga, pengadaan alat, studio, komunikasi dan pemancar, pengadaan alat kedokteran



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dan kesehatan, pengadaan alat laboratorium, pengadaan computer, pengadaan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, pengadaan alat keselamatan kerja, pengadaan alat peraga, pengadaan rambu-rambu, pengadaan peralatan olah raga serta pengadaan peralatan dan mesin BOS.
- (3) Belanja gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp26.067.914.028,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja gedung dan bangunan yakni pengadaan bangunan gedung dan pengadaan bangunan menara.
- (4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024 sebesar Rp91.142.885.630,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja jalan irigasi dan jaringan yang dipergunakan untuk pengadaan jalan dan jembatan, pengadaan bangunan air, pengadaan peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, pengadaan bangunan air, pengadaan instalasi, pengadaan jaringan.
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebesar Tahun 2024 sebesar Rp1.775.475.370,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja aset tetap lainnya yang dipergunakan untuk pembelian buku ilmu pengetahuan umum, pengadaan software serta pengadaan aset tetap lainnya.
- (6) Belanja modal aset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp315.845.000,00 yang merupakan pengeluaran untuk belanja aset tidak berwujud.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Aliran kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 bernilai Rp0,00 atau nihil.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	10.458.594,00	0,00
Arus Kas Keluar	47.380.954,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(36.922.360,00)	0,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong oleh pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris senilai (Rp36.922.360,00) merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp10.458.594,00 dan arus kas keluar sebesar (Rp36.922.360,00) Rincian aliran kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3. Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.458.594,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	10.458.594,00	0,00
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.380.954,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	47.380.954,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(36.922.360,00)	0,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	6.551.293.028,17	(19.995.192.331,46)

Kenaikan Kas Bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp6.551.293.028,17 karena arus kas bersih dari aktivitas operasi lebih besar dari pada arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.4. Perhitungan Kenaikan Kas Bersih

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	149.285.789.864,17	199.411.730.152,54
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(142.697.574.476)	(219.406.922.484,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(36.922.360,00)	0,00
Kenaikan /Penurunan Kas	6.551.293.028,17	(19.995.192.331,46)

a. Saldo Awal Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	74.484.067.946,04	94.538.782.580,50

Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp74.484.067.946,04 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2024.

b. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	81.035.360.974,21	74.484.067.946,04

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp81.035.360.974,21 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.5. Saldo Akhir Kas di BUD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan kas bersih selama periode	6.551.293.028,17	(19.995.192.331,46)
Saldo awal kas	74.484.067.946,04	94.538.782.580,50
Koreksi SiLPA	0,00	(59.522.303,00)
Saldo awal kas setelah koreksi	74.484.067.946,04	94.479.260.277,50
Saldo Akhir Kas	81.035.360.974,21	74.484.067.946,04

Jika dibandingkan dengan saldo kas di Neraca, maka saldo Kas di Kas Daerah sesuai Laporan Arus Kas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah	:	76.605.490.586,30
2. Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	0,00
3. Kas di Bendahara FKTP	:	2.420.322.199,96
4. Kas Lainnya	:	79.064.597,95,00
4. Kas di Bendahara BOSP	:	419.227.687,00
5. Kas DANA BOK Puskesmas	:	2.276.227.893,00
Jumlah	:	81.800.332.964,21

5.6 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut tabel Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan 2023:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.134.179.324.141,89	2.088.330.491.856,62
Surplus / (Defisit) - LO	22.765.890.566,21	61.603.600.628,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain - lain	(2.340.174.103,86)	(15.754.768.342,73)
Koreksi Kas	(26.520.000,00)	(99.933.134,95)
Koreksi Piutang	1.879.233.352,00	(3.946.795.542,45)
Koreksi Investasi	(856.410.125,86)	(6.478.617.641,33)
Koreksi Aset Tetap	(2.798.675.307,00)	(5.039.352.024,00)
Koreksi Aset Lainnya	(138.051.063,00)	(190.070.000,00)
Koreksi Utang	(399.750.960,00)	0,00
Ekuitas Akhir	2.154.605.040.604,24	2.134.179.324.141,89



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.134.179.324.141,89 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023 sesuai dengan neraca *audited*.
- b. Surplus/defisit-LO sebesar Rp22.765.890.566,21 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirincikan sebagai berikut:
 1. Koreksi Kas sebesar (Rp26.520.000,00) merupakan koreksi saldo awal kas di kas lainnya pada Dinas Kesehatan.
 2. Koreksi Piutang sebesar Rp1.879.233.352,00 merupakan koreksi Piutang PBBP2 sebesar Rp169.342.184,00 dan Koreksi Piutang jasa giro pada kas daerah sebesar Rp1.709.891.168,00 pada Badan Keuangan Daerah.
 3. Koreksi Investasi sebesar (Rp856.410.125,86) merupakan koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni BPR Sipora, BPR Pagau Utara Selatan dan Perusda Kemakmuran Mentawai yang dicatat pada Badan Keuangan Daerah.
 4. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp2.798.675.307,00) yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - 1) Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar (Rp432.126.860,00) merupakan generating set sebesar (Rp39.500.000,00) yang dihibahkan dari Sekretariat Daerah ke Polres, kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp265.800.000,00 mutasi tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp199.386.000,00 mutasi tambah dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, alat ukur lainnya sebesar (Rp4.485.000,00) yang dihibahkan dari Dinas Kesehatan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alat rumah tangga lainnya (Home Use) berupa belanja modal peralatan dan mesin BOS SD dan SMP Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp670.377.574,00).
 - 2) Koreksi Gedung dan Bangunan sebesar (Rp454.150.859,00) merupakan bangunan gedung kantor yang dihibahkan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan ke PAUD.
 - 3) Koreksi Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp1.350.000.000,00) merupakan jaringan pipa distribusi yang dihibahkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke masyarakat.
 - 4) Koreksi Aset Tetap lainnya sebesar (Rp562.397.588,00) merupakan Buku Umum pada Dinas Pendidikan.
 - 5) Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp182.950.286,00) merupakan Akumulasi penyusutan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar (Rp3.164.286,00), akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang sebesar (Rp199.386.000,00), akumulasi penyusutan peralatan permainan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp16.000.000,00 dan akumulasi penyusutan peralatan olahraga lainnya sebesar Rp3.600.000,00.

5. Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp138.051.063,00) merupakan setoran pengembalian Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar (Rp39.006.063,00) pada Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan koreksi dana bergulir berupa mesin boat sebesar (Rp70.295.000,00) dan dana bergulir berupa sapi sebesar (Rp28.750.000,00) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Koreksi Utang sebesar (Rp.399.750.960,00) merupakan utang belanja jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi pada Dinas Perhubungan yang tidak terbayar pada akhir Tahun 2024.

Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.154.605.040.604,24



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENGUNGKAPAN INFOMASI PENTING LAINNYA

6.1 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Pada tahun anggaran 2024 proses pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mulai dari penyusunan APBD, Penatausahaan sampai ke penyusunan laporan keuangan. Pada tahun ini merupakan tahun kedua penyajian laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dari sistem aplikasi SIPD. Dalam penyusunan LKPD tahun 2024 juga menggunakan Aplikasi Simda BMD untuk pengelolaan Laporan Aset / BMD yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi sehingga dapat menunjang kelancaran penyusunan LKPD Tahun 2024. Untuk laporan keuangan pemerintah desa menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui kompilasi laporan keuangan 43 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6.2 REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk itu dalam upaya meringankan biaya pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan bagi Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dapodikdasmen) yang besarnya:

- Untuk tingkat SD Rp800.000,00/siswa/tahun
- Untuk tingkat SMP Rp1.000.000,00/siswa/tahun

Prioritas penggunaan dana BOS ini adalah untuk membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku baru, mengganti yang rusak dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku, disamping itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah lainnya.

Pencatatan Pendapatan Dana BOS pada SIPD dilakukan pada menu Transaksi Non Anggaran.

6.3 KASUS HUKUM

Data perkara litigasi dan non litigasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diselesaikan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.332.200 dengan Nomor Perkara 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Tergugat PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan Penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mentawai. Pada proses persidangan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Selanjutnya pada tingkat Banding, majelis hakim melalui Putusan Banding Nomor: 88/Pdt.G/2017/PT.Pdg tanggal 10 Oktober 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 November 2016. Putusan Kasasi Nomor 2950 K/Pdt/2018 memutuskan menolak permohonan Kasasi PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG. Proses klaim pencairan uang muka sebesar Rp.510.332.200,00 terkendala karena PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG sejak tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan keterangan OJK Padang telah dinyatakan pailit. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini telah menyurati PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan selanjutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).

2. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabalu-Pokai Tahun 2012 sebesar Rp247.494.000,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/24/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
3. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa sebesar Rp.485.713.500,00. Tergugat PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/07/DPU-KKM/V-2016, dengan jaminan pelaksanaan kegiatan irigasi Malakopa berdasarkan nomor jaminan 06.91.01.0478.08.14 sebesar Rp.80.952.250,00 sudah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2016.
4. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp147.621.900,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai melanjutkan proses mediasi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/32/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Somasi yang ditujukan kepada PT. ASURANSI INTRA ASIA. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya menyatakan bahwa PT. ASURANSI INTRA ASIA telah menanggapi somasi melalui Surat Nomor 00353/Klm-KP/AIA/III/20 tanggal 18 Maret 2020 perihal tanggapan Somasi Pencairan Jaminan Pelaksanaan.

5. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp194.675.500,00 dengan status hukum proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/21/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/33/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Somasi melalui Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan tanggapan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
6. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp297.322.582,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan sudah memberikan tanggapan dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
7. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako Tahun 2013 sebesar Rp110.580.460,00 dengan status hukum sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
8. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp297.760.600,00, dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mediasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018.

9. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak sebesar Rp185.598.000,00 pada PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/08/DPU-KKM/V-2016.
10. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2023/PTUN.PDG antara CV. Teknik Dirgantara selaku penggugat lawan PPK Pekerjaan konstruksi Pembangunan Embung kecamatan Sipora Selatan TA 2022 perkara ini incracht dengan hasil putusan sela majelis hakim yang menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan objek sengketa TUN sehingga Pengadialan Tata usaha Negara padasng tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo akan tetapi ini kewenangan Pengadilan Negeri Padang.
11. Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.PDG antara PT. Kinaya Nayaka sebagai Penggugat lawan PKK Pekerjaan Pembangunan jembatan semi permanen muara saibi tahun Anggaran 2014, perkara ini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung dan sampai saat ini belum ada putusan Mahkamah Agung Terkait Perkara dimaksud.
12. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 1/G/2024/PT.TUN.MDN anatar Sdr. Efri Faisal, SE selaku Penggugat lawan Bupati Kepulauan Mentawai sebagai tergugat dengan objek perkara SK Nomor 862-223 Tahun 2023 ttg Pemberhentian dgn Hormat tidak atas permintaan Sendiri an. Efri Faisal, SE. perkara ini sudah Incracht pada Tingkat kakasi dengan putusan pada pokoknya adalah menolak Gugagatan Penggugat Seluruhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Piutang Pajak	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pajak hotel		451.703.923,00	0,00	0,00	451.703.923,00
	- Pajak Restoran		62.776.800,00	0,00	0,00	62.776.800,00
2	Piutang PBB-P2					
	- Tahun 2024	2024	0,00	661.883.164,00	0,00	661.883.164,00
	- Tahun 2023	2023	514.451.888,00	24544846,00	(49.523.952,00)	489.472.782,00
	- Tahun 2022	2022	490.216.581,00	54189152,00	(37.246.706,00)	507.159.027,00
	- Tahun 2021	2021	423.684.402,00	42168568,00	(31.277.666,00)	434.575.304,00
	- Tahun 2020	2020	398.654.551,00	34605350,00	(21.083.380,00)	412.176.521,00
	- Tahun 2019	2019	192.069.264,00	19732131,00	(8.056.478,00)	203.744.917,00
	- Tahun 2018	2018	207.101.197,00	9456070,00	(3.202.444,00)	213.354.823,00
	- Tahun 2017	2017	533.691.429,00	2071420,00	(1.752.202,00)	534.010.647,00
	- Tahun 2016	2016	816.227.002,00	3102891,00	(2.623.944,00)	816.705.949,00
	- Tahun 2015	2015	811.108.576,00	0,00	(12.716.729,00)	798.391.847,00
	- Tahun 2014	2014	701.000.511,00	0,00	(18.057.556,00)	682.942.955,00
	- Tahun 2013	2013	787.739.584,00	0,00	0,00	787.739.584,00
3	Piutang Retribusi Daerah					
	- Piutang retribusi pelayanan air bersih	2024	441.026.549,00	398.195.090,00	(156.053.145,00)	683.168.494,00
4	Piutang lain-lain PAD yang sah					
	- Piutang sewa menyewa lahan	2024	25.166.666,67	0,00	(25.166.666,67)	0,00
	- Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	2024	0,00	1.709.891.168,00	0,00	1.709.891.168,00
	- Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka					
	- Tahun 2012	2012	1.202.208.700,00	0,00	0,00	1.202.208.700,00
	- Tahun 2013	2013	1.230.214.060,45	0,00	0,00	1.230.214.060,45

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
	- Tahun 2014	2014	1.514.372.782,00	0,00	0,00	1.514.372.782,00
5	Piutang Tranfer Daerah					
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2024	3.925.607.082,00	3.760.421.079,00	(3.925.607.082,00)	3.760.421.079,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2024	1.756.166.438,00	1.429.450.192,00	(1.756.166.438,00)	1.429.450.192,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2024	6.187.950.113,00	12.037.929.689,00	(6.187.950.113,00)	12.037.929.689,00
	- Piutang Pajak Air Permukaan	2024	15.848.135,00	53.233.889,00	(15.848.135,00)	53.233.889,00
6	Piutang Pihak Ketiga					
	- Pembangunan Kantor Camat Sipora Utara	2006	57.755.576,36	0,00	0,00	57.755.576,36
	- Pengadaan Alat kesehatan Dinas Kesehatan	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pembangunan Jalan Produksi dengan Bangunan Pelengkap (Dinas Pertanian)	2009	18.289.260,00	0,00	0,00	18.289.260,00
7	Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit	2009	204.451.600,00	0,00	0,00	204.451.600,00
8	Dinas Pendidikan CV.Berkat	2013	69.224.640,00	0,00	0,00	69.224.640,00
JUMLAH			23.038.707.310,48	20.240.874.699,00	(12.252.332.636,67)	31.027.249.372,81

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang					Penyisihan Piutang				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar (5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
1. Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2											
	2024	661.913.164,00	0,00	0,00	0,00	661.913.164,00	(33.095.658,20)	0,00	0,00	0,00	(33.095.658,20)
	2023	0,00	489.472.782,00	0,00	0,00	489.472.782,00	0,00	(48.947.278,20)	0,00	0,00	(48.947.278,20)
	2022	0,00	507.159.027,00	0,00	0,00	507.159.027,00	0,00	(50.715.902,70)	0,00	0,00	(50.715.902,70)
	2021	0,00	0,00	434.575.304,00	0,00	434.575.304,00	0,00	0,00	(217.287.652,00)	0,00	(217.287.652,00)
	2020	0,00	0,00	412.176.521,00	0,00	412.176.521,00	0,00	0,00	(206.088.260,50)	0,00	(206.088.260,50)
	2019	0,00	0,00	0,00	203.744.917,00	203.744.917,00	0,00	0,00	0,00	(203.744.917,00)	(203.744.917,00)
	2018	0,00	0,00	0,00	213.354.823,00	213.354.823,00	0,00	0,00	0,00	(213.354.823,00)	(213.354.823,00)
	2017	0,00	0,00	0,00	534.010.647,00	534.010.647,00	0,00	0,00	0,00	(534.010.647,00)	(534.010.647,00)
	2016	0,00	0,00	0,00	816.705.949,00	816.705.949,00	0,00	0,00	0,00	(816.705.949,00)	(816.705.949,00)
	2015	0,00	0,00	0,00	798.391.847,00	798.391.847,00	0,00	0,00	0,00	(798.391.847,00)	(798.391.847,00)
	2014	0,00	0,00	0,00	682.942.955,00	682.942.955,00	0,00	0,00	0,00	(682.942.955,00)	(682.942.955,00)
Perdesaan											
	2013	0,00	0,00	0,00	373.929.732	373.929.732,00	0,00	0,00	0,00	(373.929.732,00)	(373.929.732,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	319.755.171	319.755.171,00	0,00	0,00	0,00	(319.755.171,00)	(319.755.171,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	54.754.121	54.754.121,00	0,00	0,00	0,00	(54.754.121,00)	(54.754.121,00)
Jumlah		661.913.164,00	996.631.809,00	846.751.825,00	3.997.590.162,00	6.502.886.960,00	(33.095.658,20)	(99.663.180,90)	(423.375.912,50)	(3.997.590.162,00)	(4.553.724.913,60)
Perkotaa											
	2013	0,00	0,00	0,00	23.412.855,00	23.412.855,00	0,00	0,00	0,00	(23.412.855,00)	(23.412.855,00)
	2003-2012	0,00	0,00	0,00	15.887.705,00	15.887.705,00	0,00	0,00	0,00	(15.887.705,00)	(15.887.705,00)
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	39.300.560,00	39.300.560,00	0,00	0,00	0,00	(39.300.560,00)	(39.300.560,00)
Sub Total		661.913.164,00	996.631.809,00	846.751.825,00	4.036.890.722,00	6.542.187.520,00	(33.095.658,20)	(99.663.180,90)	(423.375.912,50)	(4.036.890.722,00)	(4.593.025.473,60)
3. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran											
	2008	0,00	0,00	0,00	451.703.923,00	451.703.923,00	0,00	0,00	0,00	(451.703.923,00)	(451.703.923,00)
	2008	0,00	0,00	0,00	62.776.800,00	62.776.800,00	0,00	0,00	0,00	(62.776.800,00)	(62.776.800,00)
Sub Total		0,00	0,00	0,00	514.480.723,00	514.480.723,00	0,00	0,00	0,00	(514.480.723,00)	(514.480.723,00)
4. Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah											
	2012	0,00	0,00	0,00	1.202.208.700,00	1.202.208.700,00	0,00	0,00	0,00	(1.202.208.700,00)	(1.202.208.700,00)
	2013	0,00	0,00	0,00	1.230.214.060,45	1.230.214.060,45	0,00	0,00	0,00	(1.230.214.060,45)	(1.230.214.060,45)
	2014	0,00	0,00	0,00	1.514.372.782,00	1.514.372.782,00	0,00	0,00	0,00	(1.514.372.782,00)	(1.514.372.782,00)
Sub Total		0,00	0,00	0,00	3.946.795.542,45	3.946.795.542,45	0,00	0,00	0,00	(3.946.795.542,45)	(3.946.795.542,45)
5. Penyisihan Piutang Lainnya											
	2006	0,00	0,00	0,00	57.755.576,36	57.755.576,36	0,00	0,00	0,00	(57.755.576,36)	(57.755.576,36)
	2009	0,00	0,00	0,00	18.289.260,00	18.289.260,00	0,00	0,00	0,00	(18.289.260,00)	(18.289.260,00)

	2009	0,00	0,00	0,00	204.451.600,00	204.451.600,00	0,00	0,00	0,00	(204.451.600,00)	(204.451.600,00)
	2013	0,00	0,00	0,00	69.224.640,00	69.224.640,00	0,00	0,00	0,00	(69.224.640,00)	(69.224.640,00)
Sub Total		0,00	0,00	0,00	349.721.076,36	349.721.076,36	0,00	0,00	0,00	(349.721.076,36)	(349.721.076,36)
Total		661.913.164,00	996.631.809,00	846.751.825,00	8.847.888.063,81	11.353.184.861,81	(33.095.658,20)	(99.663.180,90)	(423.375.912,50)	(8.847.888.063,81)	(9.404.022.815,41)

Tuapejat, 15 Agustus 2025



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama Penerima Dana Bergulir	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	N I H I L				
	JUMLAH				

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
RINTO WARDANA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2007	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	32.909.000.000,00	0,00	32.909.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.909.000.000,00
2	2009	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	3.236.000.000,00	0,00	3.236.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000.000,00
3	2010	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	7.167.000.000,00	0,00	7.167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.167.000.000,00
4	2013	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	12.743.000.000,00	0,00	12.743.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.743.000.000,00
5	2014	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	20.523.000.000,00	0,00	20.523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.523.000.000,00
6	2016	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
7	2022	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
8		BPR SIPORA		Saham Biasa	0,00	7.494.876.449,57	456.963.511,45	7.951.839.961,02	0,00	0,00	0,00	7.951.839.961,02
9		BPR PUS		Saham Biasa	0,00	1.209.653.471,87	74.643.170,68	1.284.296.642,55	0,00	0,00	0,00	1.284.296.642,55
10	2017	PT Pembangunan Kemakmuran Mentawai		Penyertaan Modal	0,00	2.924.782.351,00	(1.388.016.808,00)	-	0,00	0,00	0,00	1.536.765.543,00
JUMLAH									0,00	0,00	0,00	91.350.902.146,58

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
RINTO WARDANA

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	439.068.896.060,23	28.305.808.518,00	(6.729.759.996,00)	460.644.944.582,23
2	Rumah Sakit Umum Daerah	69.670.282.426,00	2.701.537.423,00	(1.353.358.000,00)	71.018.461.849,00
3	Dinas Kesehatan	293.780.901.109,50	6.603.956.354,00	(110.711.514,00)	300.274.145.949,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.285.997.766.543,65	107.846.637.027,00	(25.662.890.570,00)	1.368.181.513.000,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.861.135.055,42	2.675.415.258,00	0,00	102.536.550.313,42
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.402.317.752,00	6.697.915.074,00	(428.090.000,00)	11.672.142.826,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.012.916.955,00	7.453.501.000,00	(3.668.490.000,00)	90.797.927.955,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.364.517.538,00	150.824.650,00	(24.946.150,00)	6.490.396.038,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.302.659.743,00	573.036.000,00	0,00	46.875.695.743,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.306.958.357,00	540.929.400,00	0,00	8.847.887.757,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.615.446.848,00	20.000.000,00	0,00	3.635.446.848,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8.997.425.480,00	297.813.360,00	0,00	9.295.238.840,00
13	Dinas Perhubungan	56.169.467.254,00	456.123.456,00	(1.762.317.258,00)	54.863.273.452,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.216.113.871,00	357.871.000,00	(12.870.000,00)	7.561.114.871,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.675.318.458,00	12.898.000,00	0,00	167.688.216.458,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.793.912.473,00	342.038.175,00	(22.500.000,00)	8.113.450.648,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.134.106.260,00	4.245.279.746,00	(2.006.039.873,00)	10.373.346.133,00
18	Dinas Perikanan	44.365.053.390,47	1.942.834.338,00	(513.800.000,00)	45.794.087.728,47
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	35.884.844.819,00	1.692.826.519,00	(7.900.000,00)	37.569.771.338,00
20	Sekretariat Daerah	104.945.093.573,00	15.988.658.122,00	(3.811.419.899,00)	117.122.331.796,00
21	Inspektorat	3.635.861.065,00	124.880.000,00	0,00	3.760.741.065,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.961.647.105,00	793.908.933,00	0,00	18.755.556.038,00
23	Badan Keuangan Daerah	10.433.787.045,00	709.678.500,00	(6.200.000,00)	11.137.265.545,00

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	7.597.393.591,00	0,00	0,00	7.597.393.591,00
25	Sekretariat DPRD	13.909.302.250,00	616.369.670,00	(53.613.510,00)	14.472.058.410,00
26	Kecamatan Pagai Utara	1.883.068.844,00	30.031.000,00	(10.660.000,00)	1.902.439.844,00
27	Kecamatan Sipora Selatan	6.318.409.500,00	44.230.000,00	(2.330.000,00)	6.360.309.500,00
28	Kecamatan Sipora Utara	4.112.726.435,00	162.514.000,00	(155.332.500,00)	4.119.907.935,00
29	Kecamatan Siberut Selatan	4.889.997.271,00	299.152.700,00	(500.000,00)	5.188.649.971,00
30	Kecamatan Siberut Barat Daya	3.927.655.690,00	0,00	(1.096.442.241,00)	2.831.213.449,00
31	Kecamatan Siberut Tengah	2.452.387.000,00	55.789.000,00	0,00	2.508.176.000,00
32	Kecamatan Siberut Utara	3.286.811.369,00	21.795.700,00	0,00	3.308.607.069,00
33	Kecamatan Siberut Barat	2.518.684.768,00	65.250.000,00	0,00	2.583.934.768,00
34	Kecamatan Pagai Selatan	2.695.687.650,00	65.200.000,00	0,00	2.760.887.650,00
35	Kecamatan Sikakap	1.208.344.840,00	75.497.500,00	0,00	1.283.842.340,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.354.178.324,00	50.722.945,00	(867.716,00)	1.404.033.553,00
JUMLAH		2.874.751.076.713,27	192.020.923.368,00	(47.441.039.227,00)	3.019.330.960.854,27

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	83.456.093.696,00	309.670.300,00	0,00	83.765.763.996,00
2	Peralatan dan Mesin	399.214.891.749,30	23.758.099.572,00	(9.916.804.969,00)	413.056.186.352,30
3	Gedung dan Bangunan	762.229.234.027,94	30.569.088.330,00	(4.170.175.674,00)	788.628.146.683,94
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.528.401.837.503,03	116.605.635.076,00	(18.470.199.485,00)	1.626.537.273.094,03
5	Aset Tetap Lainnya	22.744.893.094,00	1.213.077.782,00	(14.596.962,00)	23.943.373.914,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	78.704.126.643,00	19.565.352.308,00	(14.869.262.137,00)	83.400.216.814,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.012.866.322.911,74)	7.493.346.300,00	(139.698.754.846,17)	(1.145.071.731.457,91)
JUMLAH		1.861.884.753.801,53	199.514.269.668,00	(187.139.794.073,17)	1.874.259.229.396,36

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
RINTO WARDANA

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.586.457.727,00	4.966.473.079,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	17.520.330.914,00	17.520.330.914,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.536.565.161,00	38.214.789.511,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	588.786.000,00	508.986.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.777.210.166,00	11.108.720.166,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.780.000,00	59.780.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	738.103.998,00	738.103.998,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.610.000,00	49.610.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	34.980.000,00	34.980.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.605.821.398,00	4.599.781.525,00
18	Dinas Perikanan	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
21	Inspektorat	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.736.450,00	803.736.450,00
23	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
26	Kecamatan Pagai Utara	0,00	0,00
27	Kecamatan Sipora Selatan	0,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
28	Kecamatan Sipora Utara	0,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	0,00
30	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00
31	Kecamatan Siberut Tengah	0,00	0,00
32	Kecamatan Siberut Utara	98.835.000,00	98.835.000,00
33	Kecamatan Siberut Barat	0,00	0,00
34	Kecamatan Pagai Selatan	0,00	0,00
35	Kecamatan Sikakap	0,00	0,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
JUMLAH		83.400.216.814,00	78.704.126.643,00

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	1.676.275.760,70	0,00	0,00	1.676.275.760,70
2	Dinas Kesehatan	57.084.000,00	0,00	(19.028.000,00)	38.056.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.932.000,00	0,00	0,00	19.932.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.563.806.699,00	0,00	0,00	68.563.806.699,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesbangpol	12.437.600,00	0,00	0,00	12.437.600,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.047.626,00	0,00	0,00	3.047.626,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.296.159,00	0,00	0,00	9.296.159,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	330.760.481,86	0,00	(39.006.063,00)	291.754.418,86
11	Dinas Kependudukan dan Capil	5.964.250,00	0,00	0,00	5.964.250,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	246.548.000,00	1.762.317.258,00	(1.708.013.778,00)	300.851.480,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.531.250,00	0,00	0,00	26.531.250,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	170.729,00	0,00	0,00	170.729,00
17	Dinas Perikanan	20.905.500,00	0,00	0,00	20.905.500,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	59.747.229,00	41.900.000,00	(61.300.000,00)	40.347.229,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	262.425.660,00	0,00	(28.750.000,00)	233.675.660,00

20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.267.291,00	0,00	0,00	8.267.291,00
21	Sekretariat Daerah	476.023.700,00	3.113.624.049,00	(3.113.624.049,00)	476.023.700,00
22	Sekretariat DPRD	14.547.796,00	488.803.536,00	(488.803.536,00)	14.547.796,00
23	Kecamatan Pagai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.310.832,00	0,00	0,00	1.310.832,00
25	Kecamatan Sipora Utara	56.752.587,00	83.368.500,00	(83.368.500,00)	56.752.587,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	8.161.500,00	14.575.000,00	(14.575.000,00)	8.161.500,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	9.966.000,00	1.096.442.241,00	(1.003.579.738,00)	102.828.503,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	9.273.792,00	0,00	0,00	9.273.792,00
29	Kecamatan Siberut Utara	369.991.666,00	0,00	0,00	369.991.666,00
30	Kecamatan Siberut Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Sikakap	16.473.880,00	0,00	0,00	16.473.880,00
33	Inspektorat	107.448.000,00	0,00	(26.862.000,00)	80.586.000,00
34	Bappeda	961.133.825,38	0,00	(961.133.825,38)	0,00
35	BKD	10.103.091.655,25	315.845.000,00	(2.037.047.250,00)	8.381.889.405,25
36	BKPSDM	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		83.437.375.469,19	6.916.875.584,00	(9.585.091.739,38)	80.769.159.313,81

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	N	I	H	I	L			
JUMLAH								

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	287.404.926,00	10.458.594,00	(47.380.954,00)	250.482.566,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	385.083.421,00	452.821.653,95	(23.608.421,00)	814.296.653,95
3	Pendapatan Diterima Dimuka	6.800.000,00	54.833.333,33	(6.800.000,00)	54.833.333,33
Jumlah		679.288.347,00	518113581,28	(77.789.375,00)	1.119.612.553,28

Tuapejat, 15 Agustus 2025


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Tuapejat, 15 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA



Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah Yang Masih Harus Dianggarkan Kembali Pada APBD Berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber (a)	Status (b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1 a b	Bidang Perbankan	Laporan Keuangan Tahun 2024 Laporan Keuangan Tahun 2024	Aktif															
	8.079.038.089,00			317.159.678,00	637.836.883,00	9.034.034.650,00	2.873.939.210,00	4.775.021.713,00	7.648.960.923,00	2.525.000.000,00	0,00	0,00	165.178.978,00	(1.370.748.084,00)	1.319.430.894,00	84,20	1.111.021.171,77	
	PT BPR. Sipora		Aktif	24.113.297.016,00	564.460.148,00	317.072.305,00	24.994.829.469,00	419.518.129,00	17.552.260.823,00	17.971.778.952,00	2.525.000.000,00	0,00	0,00	1.387.668.895,00	3.110.381.622,00	7.023.050.517,00	99,01	6.953.522.316,88
Sub Total				32.192.335.105,00	881.619.826,00	954.909.188,00	34.028.864.119,00	3.293.457.339,00	22.327.282.536,00	25.620.739.875,00	5.050.000.000,00	0,00	0,00	1.552.847.873,00	1.739.633.538,00	8.342.481.411,00	96,67	8.064.543.488,65
1 a	Bidang Perdagangan	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tidak Aktif															
	867.820.723			2.623.437.626	0,00	3.491.258.349,00	263.156.493	0,00	263.156.493,00	20.676.235.800	0,00	0,00	0,00	(17.448.133.944)	3.228.101.856,00	100,00	3.228.101.856	
	867.820.723			2.623.437.626	0,00	3.491.258.349	263.156.493	0,00	263.156.493	20.676.235.800	0,00	0,00	0,00	(17.448.133.944)	3.228.101.856	100,00	3.228.101.856	
Total Seluruh Bidang				33.060.155.828	3.505.057.452	954.909.188	37.520.122.468	3.556.613.832	22.327.282.536	25.883.896.368	25.726.235.800	0,00	0,00	1.552.847.873	(15.708.500.406)	11.570.583.267	97,60	11.292.645.345
Tahun 2023																		
1 a b	Bidang Perbankan	Laporan Keuangan Tahun 2023 Laporan Keuangan Tahun 2023	Aktif															
	7.546.263.787			188.099.208	794.857.657	8.529.220.652,00	1.925.317.845,00	5.227.370.830,00	7.152.688.675,00	2.525.000.000,00	0,00	0,00	165.178.978,00	(1.446.137.611,00)	1.244.041.367,00	82,17	1.022.220.918,00	
	PT BPR. Sipora		Aktif	22.616.969.857,00	630.778.311,00	226.155.309,00	23.473.903.477,00	467.814.742,00	16.147.182.883,00	16.614.997.625,00	2.525.000.000,00	0,00	0,00	1.230.421.516,00	3.103.484.336,00	6.858.905.852,00	99,01	6.791.002.684,07
Sub Total				30.163.233.644,00	818.877.519,00	1.021.012.966,00	32.003.124.129,00	2.393.132.587,00	21.374.553.713,00	23.767.686.300,00	5.050.000.000,00	0,00	0,00	1.395.600.494,00	1.657.346.725,00	8.102.947.219,00	96,42	7.813.223.602,07
1 a	Bidang Perdagangan	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tidak Aktif															
	7.237.497.195			1.784.411.877	478.801.353	9.500.710.425,00	18.476.702	0,00	18.476.702	20.798.618.050	0,00	0,00	0,00	(11.795.185.680)	9.003.432.370,00	100,00	9.003.432.370	
Sub Total				7.237.497.195	1.784.411.877	478.801.353	9.500.710.425	18.476.702	0,00	18.476.702	20.798.618.050	0,00	0,00	0,00	(11.795.185.680)	9.003.432.370	100,00	9.003.432.370
Total Seluruh Bidang				37.400.730.839	2.603.289.396	1.499.814.319	41.503.834.554	2.411.609.289	21.374.553.713	23.786.163.002	25.848.618.050	0,00	0,00	1.395.600.494	(10.137.838.955)	17.106.379.589	98,31	16.816.655.972

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber (a)	Status (b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=7+8-9
1	Bidang Perbankan								
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2024	Aktif	2.178.564.609,00	2.100.100.914,00	78.463.695,00	6.224.005,00	9.298.173,00	75.389.527,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2024	Aktif	5.749.887.357,00	4.925.951.928,00	823.935.429,00	50.788.637,00	47.262.056,00	827.462.010,00
Sub Total				7.928.451.966,00	7.026.052.842,00	902.399.124,00	57.012.642,00	56.560.229,00	902.851.537,00
1	Bidang Perdagangan								
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tidak Aktif	692.828.100,00	746.285.515	(53.457.415,00)	27.808.274	702.248.565	(727.897.706,00)
Sub Total				692.828.100,00	746.285.515,00	(53.457.415,00)	27.808.274,00	702.248.565,00	(727.897.706,00)
	Total Seluruh Bidang			8.621.280.066,00	7.772.338.357,00	848.941.709,00	84.820.916,00	758.808.794,00	174.953.831,00
Tahun 2023									
1	Bidang Perbankan								
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2023	Aktif	2.112.789.792,00	1.963.536.052,00	149.253.740,00	7.336.405,00	7.234.027,00	149.356.118,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2023	Aktif	7.094.868.811,00	6.286.679.868,00	808.188.943,00	63.909.738,00	66.743.738,00	805.354.943,00
Sub Total				9.207.658.603,00	8.250.215.920,00	957.442.683,00	71.246.143,00	73.977.765,00	954.711.061,00
1	Bidang Perdagangan								
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tidak Aktif	245.437.600,00	137.342.950	108.094.650,00	20.126.097	1.483.959.199	(1.355.738.452,00)
Sub Total				245.437.600,00	137.342.950,00	108.094.650,00	20.126.097,00	1.483.959.199,00	(1.355.738.452,00)
	Total Seluruh Bidang			9.453.096.203,00	8.387.558.870,00	1.065.537.333,00	91.372.240,00	1.557.936.964,00	(401.027.391,00)

Tuapejat, 15 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA